



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017**

RANCANGAN AKHIR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021



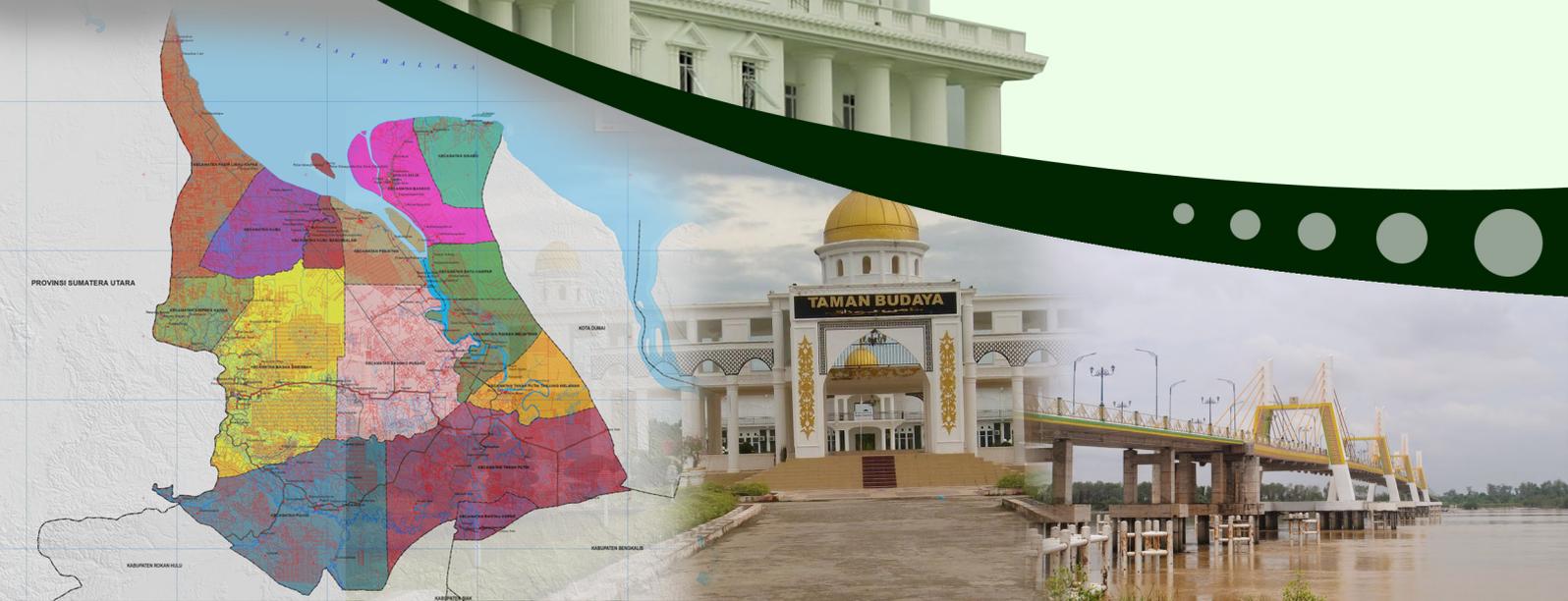
BAB I

Pendahuluan



BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah



BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah



BAB IV

Analisis Isu-isu Strategis



BAB V

Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



BAB VI

Strategis Arah Kebijakan



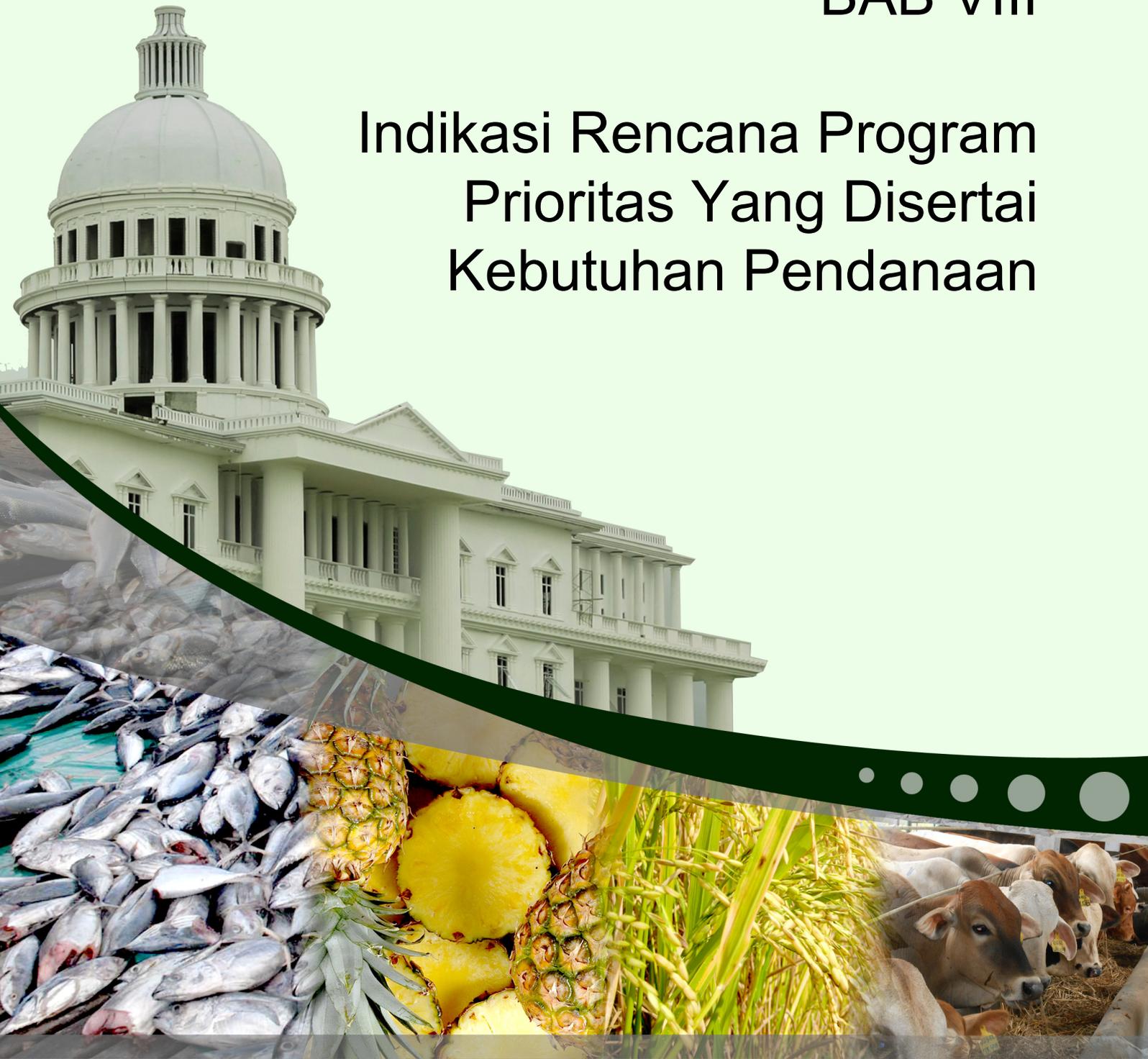
BAB VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah



BAB VIII

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan



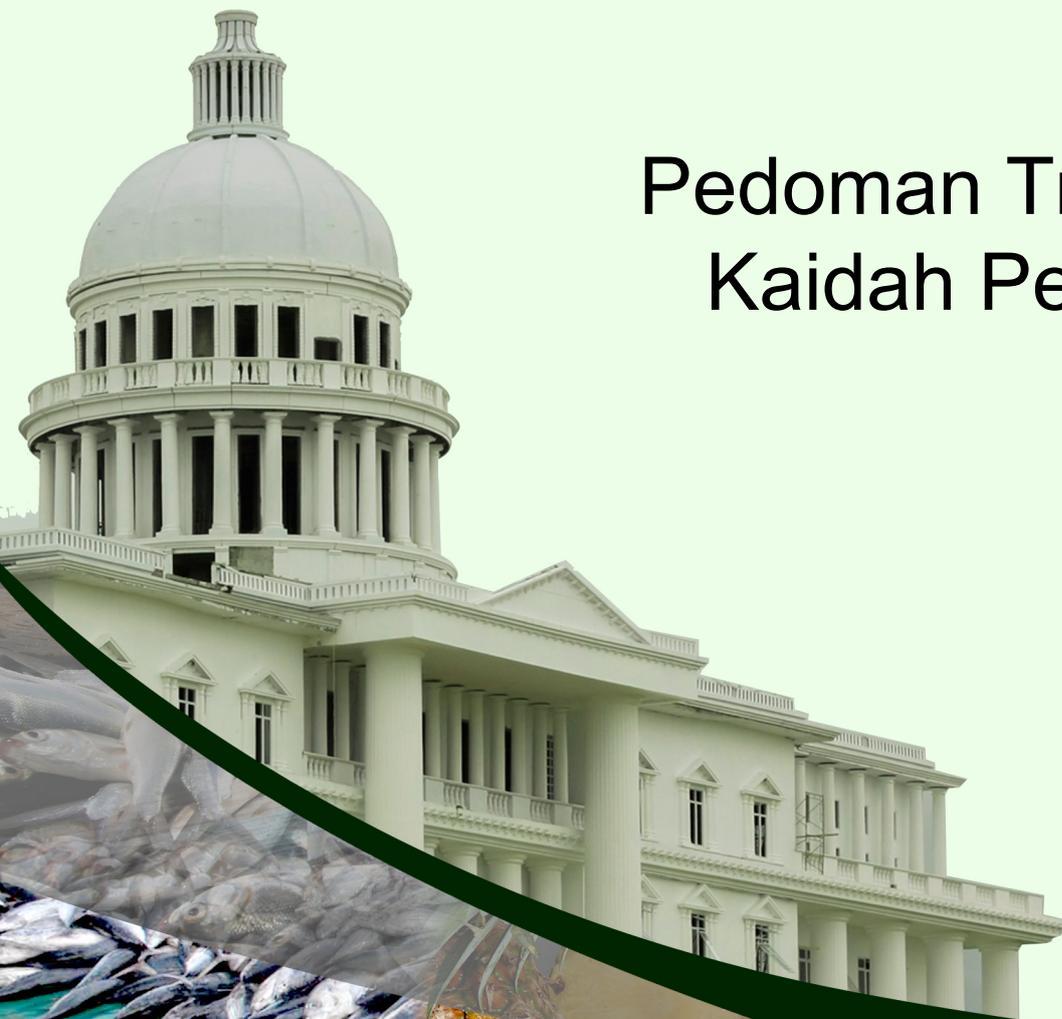
BAB IX

Penetapan Indikator Kinerja Daerah



BAB X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan





**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN 2016-2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II
SISTEMATIKA RECAPA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD dan lintas SKPD dalam jangka waktu lima (5) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD; dan
- b. pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN;
- d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
- e. BAB V VISI DAN MISI;
- f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
- i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;
- j. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;

(2) Rincian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 02

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROPINSI RIAU :
(10.12.C/2017)**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Riau dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam kurun waktu RPJMD Kabuapten Rokan Hilir adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021. RPJMD Kabuapten Rokan Hilir memuat visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabuapten Rokan Hilir dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabuapten Rokan Hilir yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Rokan Hilir. RKPD memuat

prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabuapten Rokan Hilir secara meyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendaan yang bersifat indikatif.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Rokan hilir untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Terwujudnya Rokan Hilir Sebagaimana kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu : (a) membangun masyarakat rokan hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa. (b) Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. (c). mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. (d). Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi. (e). Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Strategi Pembangunan adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah harus mempunyai cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Rencana Strategis adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah mempunyai suatu proses dalam menetapkan rencana yang akan diambil
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas



PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Dokumen ini merupakan hasil pengkajian dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021, yang telah melewati mekanisme perencanaan secara teknokratis dan partisipatif untuk itu diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016–2021, khususnya bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) untuk setiap tahunnya. Selain itu, dokumen RPJMD ini diharapkan dapat juga dipergunakan sebagai instrumen keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Dokumen RPJMD ini terdiri dari sembilan bab yakni; pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Dokumen RPJMD ini dapat diselesaikan. Terima kasih, semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama lima tahun ke depan.

BUPATI ROKAN HILIR

H. SUYATNO



DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3.	Hubungan RPJPM Kabupaten Rokan Hilir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
1.4.	Sistematika Dokumen RPJMD	I-4
1.5.	Maksud dan Tujuan	I-5
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-2
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-29
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-83
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN..	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu	III-13
3.3	Kerangka Pendanaan	III-16
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Lingkungan Strategis Lainnya yang Mempengaruhi	IV-6
4.3.	Isu – Isu Strategis	IV-11
BAB V	VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	VISI	V-2
5.2	MISI	V-4
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1	Strategi Umum Pembangunan.....	VI-2
6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	VI-4
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	VII-1
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X	PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	X-1
10.1	Pedoman Masa transisi	X-1
10.2	Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan	X-1



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi lingkungan strategis daerah, serta evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir periode sebelumnya.

Dokumen perencanaan tersebut merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 2016-2021 yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Bupati Rokan Hilir terpilih H. Suyatno, Amp dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih Drs. H. Djamiludin yang dilantik pada 8 Juni 2016. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan



pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir sebagai rencana kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang sedang berkembang serta mengakomodasikan perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, wilayah sekitar, nasional, maupun internasional. Pada lingkup nasional telah terjadi perubahan sistem perencanaan yang menuntut penyesuaian berbagai pranata perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan kondisi dan substansi masing-masing daerah dengan harapan instrument tersebut dapat diimplementasikan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD ini, peraturan perundang-perundangan yang menjadi rujukan antara lain:

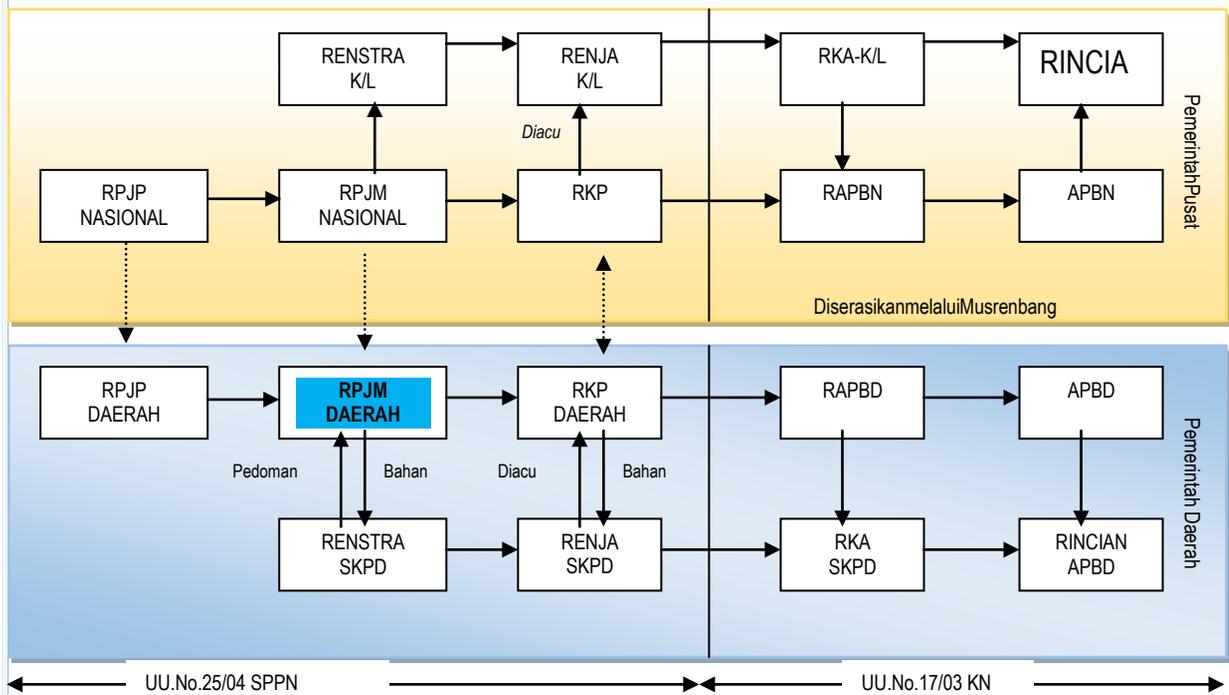
- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- j) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



- n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- o) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- r) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- s) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- t) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- u) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- v) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- w) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- x) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- z) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
- aa) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
- bb) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2002-2012;
- cc) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD Kabupaten, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 mengacu pada Visi, Misi, sasaran dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025 khususnya pada penggalan ke 3 dan awal penggalan ke 4 RPJPD kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu, RPJM Daerah juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD untuk selanjutnya menjadi APBD melalui proses Musrenbang. Secara skematis, hubungan antara dokumen perencanaan dan anggaran ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.4. Sistematika Dokumen RPJMD

Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan.
- Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
- Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan.
- Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis.
- Bab V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
- Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VIII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.
- Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan



Bab IX. Indikator Kinerja Daerah

Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentu pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. RPJM ini juga sebagai acuan bagi DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam pembahasan berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan kebijakan lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta sumber pembiayaan lain yang sah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka RPJM ini disusun dengan tujuan:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten dan sumber pembiayaan lain.
2. Menyediakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisi tolok ukur pembangunan yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunannya.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.



II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan kondisi geografi dan demografi serta pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun sebelumnya. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Gambaran umum kondisi daerah akan menjadi dasar penyusunan identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan yang akan dijadikan sebagai basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan pada lima tahun mendatang di Kabupaten Rokan Hilir.

Bab II ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang kondisi daerah, yang dilengkapi dengan data dan statistik tentang kondisi Kabupaten Rokan Hilir saat ini yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode yang lalu. Tujuan dari penyajian gambaran umum dan statistik dimaksud antara lain adalah:

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap aspek pembangunan, sehingga memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir untuk menentukan arah kebijakan, strategi pembangunan dan penyusunan program pilihan yang akan dilaksanakan pada periode lima tahun yang akan datang, sesuai dengan skala prioritas yang sinkron dengan rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
2. Untuk memudahkan penetapan target pembangunan dan memudahkan pengukuran prestasi kerja Bupati dan Wakil Bupati pada saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan selama lima tahun yang akan datang.

Pada bahagian ini akan disampaikan secara detail gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang diawali dengan penggambaran kondisi geografis dan demografis Kabupaten Rokan Hilir dan telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dan kemudian dilanjutkan dengan gambaran umum kondisi daerah pada pencapaian pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

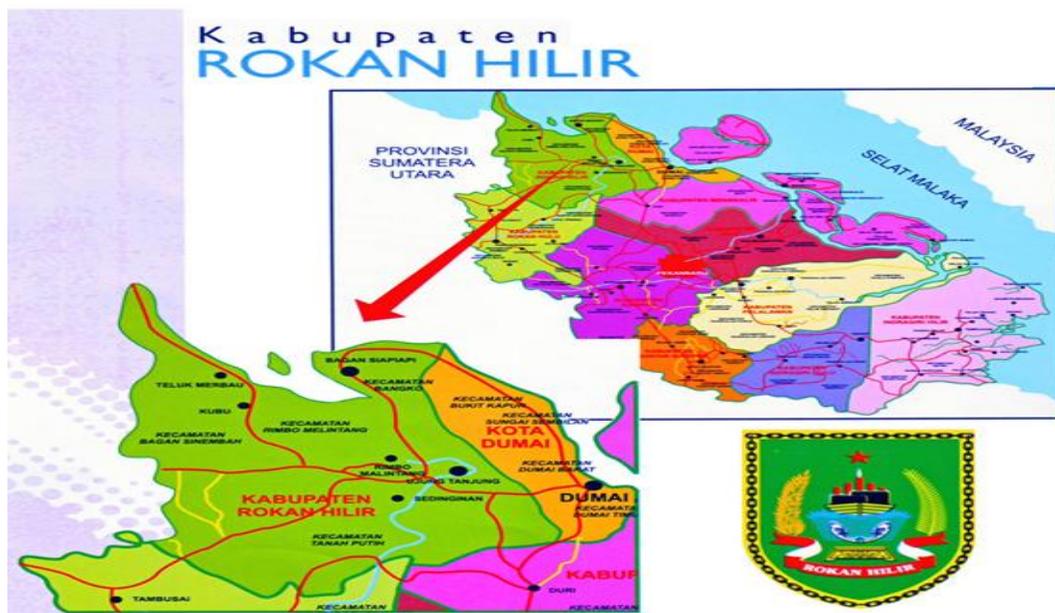
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

- Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Rokan Hilir seluas 8.881,59 Km². Secara astronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1^o14' - 2^o 30' Lintang Utara dan 100^o16' – 101^o21' Bujur Timur.

Gambar II-1: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hilir



Kabupaten Rokan Hilir Memiliki Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan
- Sebelah Timur berbatasan Kota Dumai.

Secara administrasi, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 terdiri dari 18 Kecamatan, 178 desa, 15 Kelurahan, 1.338 RW dan 3.644 RT. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir ditunjukkan pada Tabel II.1.

Tabel II-1: Jumlah Desa/kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tanah Putih	15	2	131	318
2	Pujud	15	1	230	551
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	5		14	52
4	Rantau Kopar	4		16	46
5	Tanjung Medan	13		145	329



6	Bagan Sinembah	15	2	197	664
7	Bagan Sinembah Jaya	12	1		
8	Balai Jaya	9	2		
9	Simpang Kanan	6		49	153
10	Kubu	9	1	62	169
11	Pasir Limau Kapas	7		89	243
12	Kubu babussalam	11		54	137
13	Bangko	10	5	84	209
14	Sinaboi	5		13	49
15	Batu hampar	5		17	43
16	Pekaitan	10		53	136
17	Rimba Melintang	11	1	75	229
18	Bangko Pusako	16		109	316
	Jumlah 2015	178	15	1.338	3.644
	2014	169	14	1.338	3.644
	2013	166	14	1.160	3.271

Sumber: BPS Rokan Hilir (Rokan Hilir Dalam Angka 2015)

- Topografi

Dilihat dari sisi topografi, wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian antara 0-40 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah pesisir pantai memiliki ketinggian 0-6 m dpl dan dipengaruhi pasang surut air laut. Daerah sepanjang aliran sungai memiliki ketinggian 0-30 m dpl. Daerah aliran Sungai Rokan mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah pasang surut air laut. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen, dan terdapat 80 persen dari luas daratan dengan kemiringan 0-3 persen. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0-5 persen sampai 8-15 persen dengan ketinggian antara 5-100 m dpl.

Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen. Daerah dengan kemiringan 0-3 persen meliputi 80 persen dari luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0-5 persen sampai 8-15 persen dengan ketinggian antara 5-100 m dpl.

- Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Rokan Hilir terutama di wilayah bagian Barat dan Selatan didominasi oleh batuan sedimen kuartar dengan sisipan batuan sedimen tersier. Struktur geologi di wilayah ini memiliki lipatan yang merupakan lanjutan kondisi geologi Bukit Barisan. Kabupaten Rokan Hilir memiliki kondisi kawasan yang cukup bervariasi berupa kawasan daratan, kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang merupakan salah satu ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Kawasan pesisir dan perairan laut merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut, termasuk biota-biota yang dilindungi. Sebagai muara dari salah satu sungai yang terbesar di Provinsi Riau, maka kawasan



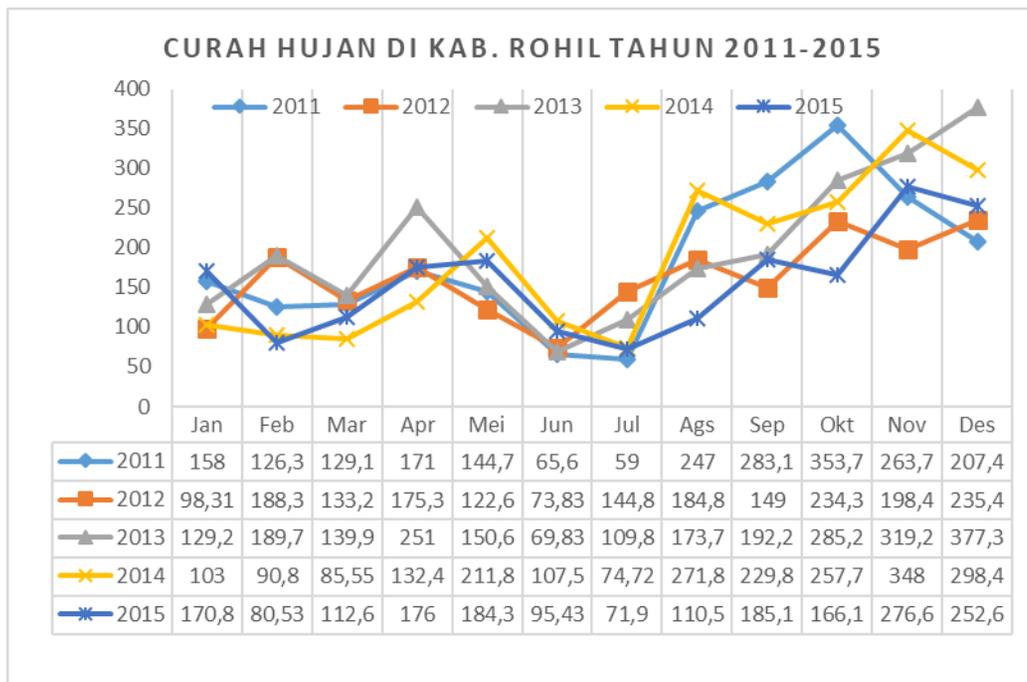
pesisir dan laut Kabupaten Rokan Hilir kaya akan sumber daya perikanan. Demikian pula halnya pulau-pulau kecil yang sebagian diantaranya sesuai dengan luasnya berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil nyatanya juga merupakan tempat bermukim para nelayan yang sebagian besar merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan dan keanekaragaman biota yang perlu dilindungi.

- Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 15 (lima belas) aliran sungai yang ada. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6-8 m yang melintasi Kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di Pegunungan Bukit Barisan pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu. Tetapi saat ini banyak anak sungai yang berada di hulu ini kekeringan dan tertutup oleh areal perkebunan. Pemkab Rohil tidak mengizinkan usaha industri dijalankan di sepanjang Sungai Rokan untuk menjaga kualitas air dan lingkungan sepanjang Sungai Rokan yang sangat strategis untuk sumber air dan perekonomian.

- Klimatologi

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing adalah 184,05; 161,51; 198,97; 184,29; dan 156,87 mm/bulan, dan temperatur udara berkisar antara 22^o – 35^oC. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni dan Juli. Sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan April, Mei, Agustus sampai Desember. Jumlah hari hujan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing adalah 64, 98, 129, 126 dan 95 hari. Curah hujan setiap bulan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar II.2.

Gambar II-2: Curah Hujan setiap Bulan pada Tahun 2011-2015 di Kabupaten Rokan Hilir


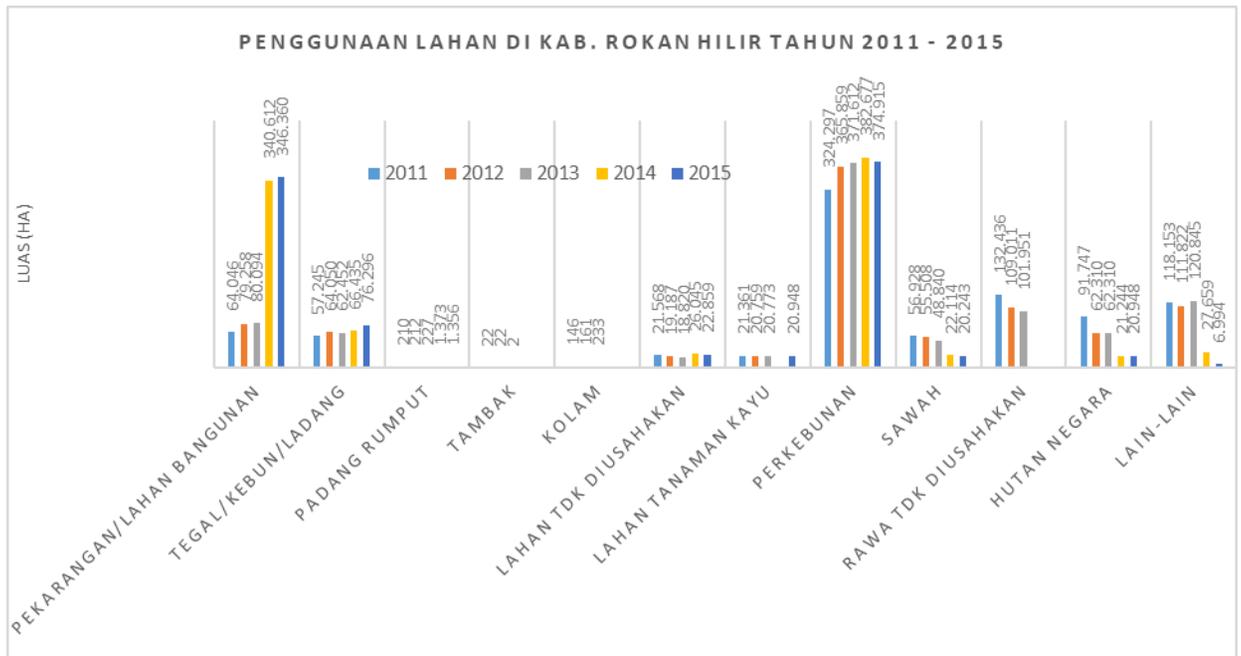
Sumber: BPS Rokan Hilir (Rokan Hilir Dalam Angka 2012 s.d. 2016)

- Penggunaan Lahan

Luas daratan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 888.159 ha. Penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak untuk perkebunan, pekarangan untuk bangunan, dan tegal/kebun. Perubahan penggunaan lahan yang terbesar terjadi pada lahan yang digunakan untuk pekarangan (lahan bangunan), dimana tahun 2013 masih seluas 80.094 ha, menjadi 340.612 pada tahun 2014 dan 346.360 ha tahun 2015, yaitu kenaikan lebih dari 4 kali lipat. Hutan negara terus merosot dari 91.747 ha pada tahun 2011 menjadi 20.948 ha pada tahun 2015, yaitu merosot 70.799 ha dalam waktu 5 tahun.

Tingginya alih fungsi lahan dan hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Alih fungsitersebut dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri per kayu, permukiman, dan perladangan. Umumnya alih fungsi lahan tersebut terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan konsep konservasi.

Untuk lebih jelas penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir digambarkan pada Gambar II-3.

Gambar II-3: Penggunaan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014


Sumber: BPS Rokan Hilir (2011-2015)

Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banjir dan genangan di wilayah hilir karena berkurangnya daerah resapan air serta perubahan lahan pertanian di daerah tangkapan air. Hal tersebut juga menimbulkan kerusakan badan sungai berupa longsor dan abrasi tebing dan tanggul sungai oleh aktifitas bongkar-muat bahan dan produk industri; pendangkalan sungai yang menimbulkan dampak berkurangnya panjang alur sungai efektif yang dapat dilayari; pencemaran badan sungai oleh limbah industri dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan dengan semakin luasnya lahan terlantar yang tidak dikelola, sebagaimana diindikasikan dengan meningkatnya luas lahanlahan tidur dan terbentuknya padang rumput.

Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya dan perkebunan turut meningkatkan produksi pertanian. Meskipun demikian, tidak sedikit pula menyebabkan lahan-lahan terlantar. Keberadaan lahan terlantar ini menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari.

Dimana Kawasan bagian Utara dan Timur Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar merupakan lahan gambut yang terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air. Selain itu, kawasan ini juga rawan terhadap bahaya kebakaran di musim kemarau akibat pembukaan lahan gambut perkebunan dan pertanian oleh masyarakat dan perusahaan.

2.1.2. Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012, telah ditetapkan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung pengembangan wilayah dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan struktur ruang sebagai berikut:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Bagan Siapi-Api
- Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan (PKWP) di wilayah Bagan Batu
- Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan) di wilayah Ujung Tanjung
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Sinaboi
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Teluk Merbau, Sedinginan dan Panipahan
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Rimba Melintang, Bangko Kanan, Kampung Melayu, Pujud dan Simpang Kanan.

Potensi pengembangan wilayah lainnya berdasarkan struktur dan pola ruang dijelaskan sebagai berikut.

- Kawasan Budidaya Perkebunan

Kawasan yang berfungsi untuk meningkatkan hasil-hasil perkebunan bagi kepentingan negara, masyarakat dan dunia usaha. Kawasan ini diarahkan pada kawasan yang secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk tanaman perkebunan dengan kemiringan antara 8 - 25% di luar kawasan lindung. Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar swasta tersebar di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan Luas 215.734,30 Ha. Sedangkan perkebunan rakyat tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 160.451 Ha.

- Kawasan Cepat Tumbuh

Kawasan cepat tumbuh di kabuapten Rokan Hilir diklasifikasikan dalam tiga kawasan yaitu Perkotaan Sedang, Perkotaan Kecil dan Pemukiman Pedesaan yang menjadi perkotaan kecil. Klasifikasi daerah perkotaan sebagai pusat pemukiman dan aktivitas masyarakat yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II-2: Klasifikasi Perkotaan Menurut Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir

Klasifikasi Perkotaan	Besaran Penduduk	Pemukiman Perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir
Perkotaan Sedang	100.001 – 500.000	Perkotaan Bagan Siapiapi
		Perkotaan Ujung Tanjung
		Perkotaan Bagan Batu
Perkotaan kecil	10.001 – 100.000	Perkotaan Tanjung Lumba-lumba
		Perkotaan Panipahan
		Perkotaan Teluk Pulai
		Perkotaan Balam Sampurna
		Perkotaan Balai Jaya
		Perkotaan Bahtera Makmur
		Perkotaan Pasir Putih
		Perkotaan Bagan Sinembah



Klasifikasi Perkotaan	Besaran Penduduk	Permukiman Perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir
		Perkotaan Simpang Kanan
		Perkotaan Sinaboi
		Perkotaan Sedinginan
		Perkotaan Banjar XII
		Perkotaan Sintong
		Perkotaan Sekeladi
		Perkotaan Rantau Kopar
		Perkotaan Pujud
		Perkotaan Sei Arang-arang
		Perkotaan Tanjung Medan
Permukiman Perdesaan yang Menjadi Perkotaan Kecil	5.001 – 10.000	Perdesaan Rimba Melintang
		Perdesaan Bangko Jaya
		Perdesaan Bangko Sampurna
		Perdesaan Bangko Kiri
		Perdesaan Rantau Bais
		Perdesaan Teluk Nayang
		Perdesaan Melayu Besar

- Kawasan Pusat Pemerintahan

Meliputi Kecamatan Bangko dengan ibukota Bagan siapiapi tepatnya di batu 6 Kawasan ini merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi/bisnis.

- Kawasan Sentra Perternakan dan Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan, selain pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, kedepan dicadangkan untuk investasi pihak swasta/dunia usaha. Areal pengembangan investasi perikanan diarahkan pada lokasi yang jauh dari permukiman nelayan dan potensial untuk kegiatan budidaya perikanan.

Kawasan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perikanan darat dan perikanan pesisir laut. Pengembangan kawasan perikanan ditujukan untuk mendukung kebijakan kawasan sentra produksi perikanan yang telah ditetapkan, serta mengembalikan nilai historis Bagansiapiapi sebagai salah satu sentra produksi perikanan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya peningkatan pola usaha masyarakat nelayan dan pola kebiasaan kegiatan perikanan masyarakat yang berupa perikanan tangkap, ditingkatkan menjadi perikanan budidaya perikanan darat. Perikanan darat tersebar di Kecamatan Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, dan Tanah Putih Tanjung Melawan. Sedangkan perikanan pesisir laut terdapat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, dan Sinaboi.

- Kawasan Pertanian

Pertanian lahan basah

Kawasan ini merupakan kawasan yang secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan basah, memiliki kemiringan lahan kurang dari 8% di luar kawasan lindung



dan di luar kawasan budidaya lainnya. Secara ruang dapat memberikan manfaat, lapangan kerja, pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang ada. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah ini dikaitkan dengan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi beras dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2030 (akhir tahun perencanaan). Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Rokan Hilir tersebar di Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan. Dengan luas 503.645,90 Ha dan 44.633,20 Ha.

Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering yaitu jenis tanaman padi-padian, palawija dan hortikultura. Berdasarkan pada kebijakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Tanah Putih diarahkan sebagai kawasan sentra produksi buah-buahan. Kawasan ini secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan kering dengan kemiringan kurang dari 8% dan tidak berada di kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan luas 82.827 Ha.

a) Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir adalah bahan galian C yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih dan Pujud.

b) Kawasan Strategis

Kawasan strategi yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II-3: Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Strategis dari Sudut Pertumbuhan Ekonomi	Potensi Pengembangan
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagan Siapiapi dan sekitarnya (Kecamatan Bangko); ▪ Kecamatan Pasir Limau Kapas; ▪ Kubu; ▪ Sinaboi. 	Kawasan peruntukan sentra produksi dan kawasan prospektif pengembangan investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan sentra produksi (KSP) Perikanan
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Rimba Melintang; ▪ Kec. Bangko ▪ Kec. Pekaitan ▪ Kec. Kubu ▪ Kec. Sinaboi. 	Kawasan peruntukan sentra produksi dan kawasan prospektif pengembangan investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan sentra produksi (KSP) padi/berasras.
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Pasir Limau Kapas ▪ Kec. Kubu 	Kawasan peruntukan sentra produksi dan kawasan prospektif pengembangan investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan sentra produksi (KSP) kelapa
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Bagan Sinembah ▪ Kec. Pujud ▪ Kec. Tanah Putih 	Kawasan peruntukan sentra produksi dan kawasan prospektif pengembangan investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan sentra produksi (KSP) kelapa sawit.
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Ujung Tanjung (Kec. Tanah Putih). 	Kawasan potensi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan peruntukan

No.	Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Strategis dari Sudut Pertumbuhan Ekonomi	Potensi Pengembangan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Bagan Punak (Kec Bangko) ▪ Kawasan Bagan Batu (Kec. Bagan Sinembah) 	cepat tumbuh	pengembangan agroindustri <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pusat jasa dan perdagangan jasa

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hilir

c) Kawasan Kehutanan

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Secara fisik kawasan kriteria hutan lindung dengan tingkat keanekaragaman hayati sesuai dengan RTRW Provinsi Riau 2008 - 2027. Kawasan hutan lindung dialokasikan seluas 42.360 Ha (4,70%) dengan fungsi melindungi kawasan di bawahnya (hidro-orologis) hulu sungai Rokan. Kawasan ini terletak di Kecamatan Tanah Putih atau sebelah selatan dari Kabupaten Rokan Hilir.

- Cagar alam Pulau Berkey

Kawasan suaka alam di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan cagar alam Pulau Berkey di Kecamatan Bangko dengan luas 4.212 Ha atau 3,89% dari luas kabupaten. Sesuai dengan SK Penunjukan Memperta No. 13/3/1986 dengan luas 500 Ha, sedangkan sebagai fungsi penyangga maka ditetapkan seluruh luas Pulau Berkey. Fungsi kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman satwa (aneka burung laut) dan tumbuhan serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

- Kawasan perlindungan penyu

Kawasan ini berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, kawasan ini diarahkan untuk melindungi keberadaan habitat penyu yang juga berfungsi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

- Kawasan pelestarian alam

Kawasan ini merupakan taman wisata alam danau laut Napangga yang berada di Kecamatan Pujud dengan luas 1.700 Ha. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi keberadaan danau laut Napangga sebagai tempat berkembang biaknya berbagai ikan arwana, di samping sebagai tempat wisata alam yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

- Kawasan lindung lainnya

Termasuk kawasan lindung yaitu kawasan pantai/pulau berhutan bakau yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Tanah Putih Tanjung Melawan. Dengan luas 19.087 Ha, kawasan ini minimal 130 kali nilai rata-rata air pasang terendah tahunan diukur dari garis pasang surut terendah ke arah darat. Kawasan ini berfungsi melindungi keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem pesisir dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut dan perlindungan usaha



budidaya di belakangnya. Selain itu di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan pulau-pulau kecil dengan luas < 10 Ha yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, seluas 30,24 Ha. Kawasan lindung ini difungsikan untuk melestarikan ekosistem khas pulau dan sekitarnya bagi kawasan darat pulau, kawasan pesisir, dan perairan laut dibawahnya.

Untuk pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang, juga perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2010-2030, beberapa yang perlu diperhatikan untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir adalah:

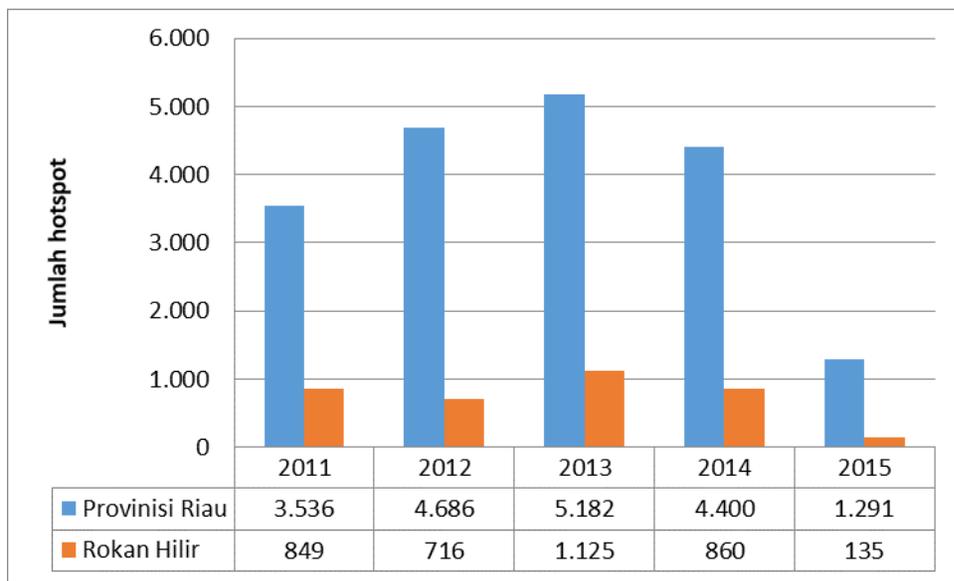
- Rencana Pelabuhan Nasional di Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,
- Pelabuhan Khusus Industri, akan dikembangkan di pulau Jemur (Gugusan Kepulauan Aruah) di Kabupaten Rokan Hilir,
- Kawasan Hutan Lindung (HL) dipertahankan di perbatasan Riau bagian Barat dengan luas total: 228.793,82 Ha yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, dan Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, perbatasan Kota Siak - Kabupaten Bengkalis
- Mempertahankan Kawasan Lindung Kubah Gambut (LGb) di Kabupaten Rokan Hilir (terutama Kecamatan Kubu),
- Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari jalur hijau penahan intrusi air laut diarahkan di kawasan pesisir se Provinsi Riau.
- Kawasan Sempadan Pantai tersebar di sepanjang pantai Timur wilayah Riau dan Pulau-pulau termasuk di Kabupaten Rokan Hilir,
- Kawasan Hutan Suaka Alam, terdiri dari Kawasan Cagar Alam (CA) termasuk CA Pulau Berkey (Kabupaten Rokan Hilir). Kawasan Hutan Pelestarian Alam termasuk di Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Bk) Kabupaten Rokan Hilir,
- Rencana Pola Kawasan Lindung Ruang Lautan Provinsi Riau adalah Kawasan Berbahaya bagi Pelayaran di Kabupaten Rokan Hilir (pada kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia, di perairan Selat Malaka)
- Untuk Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Daratan Provinsi Riau mencakup kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Punak),
- Sedangkan Rencana Pola Kawasan Budidaya Lautan Provinsi Riau yang mencakup Kawasan Penangkapan Ikan di Kabupaten Rokan Hilir,
- Kawasan Budidaya Perikanan Laut Kabupaten Rokan Hilir
- Kawasan Kegiatan Wisata Laut Kabupaten Rokan Hilir, di perairan sekitar Pulau Jemur.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Rokan Hilir juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir pantai oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit, *crumb rubber*, *plywood*, *pulp* dan kertas, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang terkadang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK.

Permasalahan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hilir sejak beberapa tahun terakhir dan berlangsung secara berkala adalah perubahan pola iklim yang tak menentu yang cenderung meningkatkan suhu bumi dan dampak kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan seluruh pihak di Kabupaten Rokan Hilir, bahkan hingga ke negara tetangga terdekat. Kebakaran hutan terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan perusahaan melakukan pembersihan lahan untuk pengembangan areal pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum optimal.

Gambar II-4. Jumlah hotspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2015



Data jumlah hotspot di Provinsi Riau dan Kabupaten Rohil tahun 2011-2015 yang disajikan pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2013, kecenderungan jumlah hotspot terus bertambah. Tetapi, setelah tahun 2013, yaitu tahun 2014 dan 2015 turun secara signifikan. Upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan tampaknya membuahkan hasil yang cukup baik.

Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

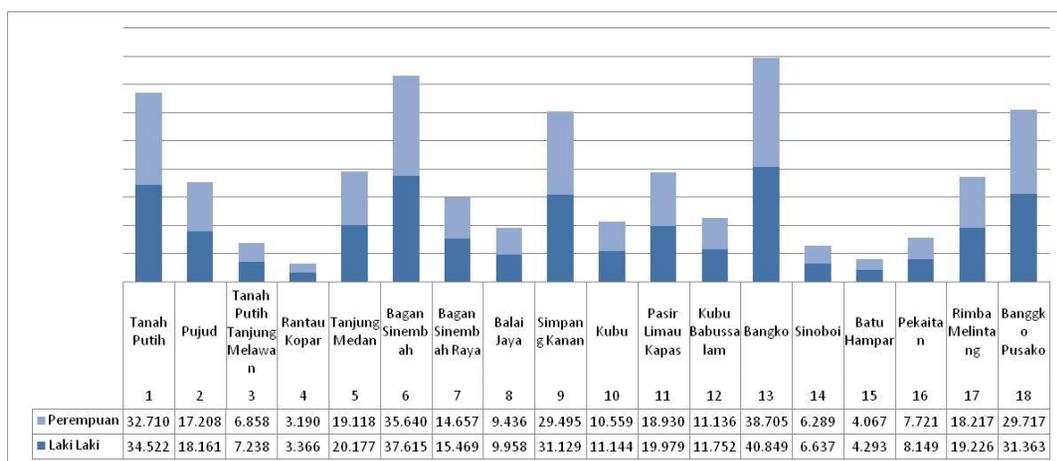
2.1.4. Demografi

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 adalah 644.680 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 – 2010 sebesar 4,58 persen per tahun. Sedangkan rasio jenis kelaminnya adalah 105,67 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 106 penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Sinaboi 109,36 berarti dari 100 penduduk perempuan akan terdapat 110 penduduk laki-laki di Kecamatan Sinaboi. Kecamatan Pekaitan memiliki rasio jenis kelamin terendah, yaitu

100,59. Kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bagan Sinembah menempati urutan tertinggi yaitu 170 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rantau Kopar dan Batu Hampar menempati urutan terendah yaitu 25 dan 29 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Bangko menempati urutan tertinggi, yaitu 79.554 jiwa, kemudian Kecamatan Bagan Sinembah 73.255 jiwa, Kecamatan Tanah Putih 67.232 jiwa, Kecamatan Bangko Pusako 61.080 jiwa, dan Kecamatan Rantau Kopar memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 6.556 jiwa.

Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

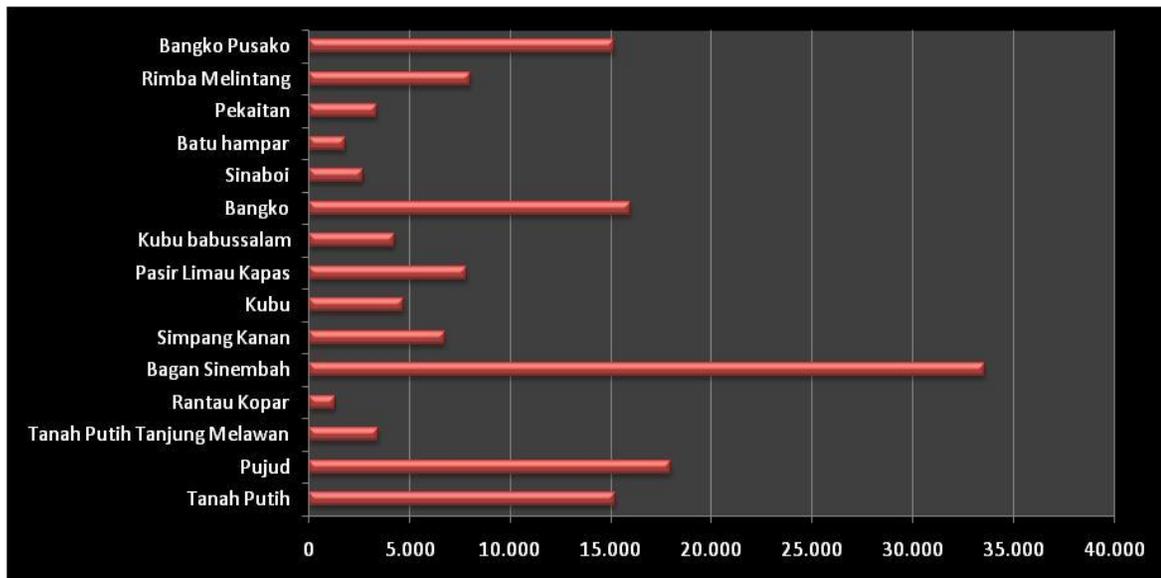
Gambar II-5: Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Kelamin 2015



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016)

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir juga cenderung meningkat. Jumlah penduduk dan rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir tersebar pada 18 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah rumahtangga terbanyak terdapat di Kecamatan Sinembah, Kecamatan Pujud dan Kecamatan Bangko. Sementara itu kecamatan dengan jumlah Rumah Tangga yang relatif sedikit adalah Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Batu Hampar, dan Kecamatan Sinaboi.

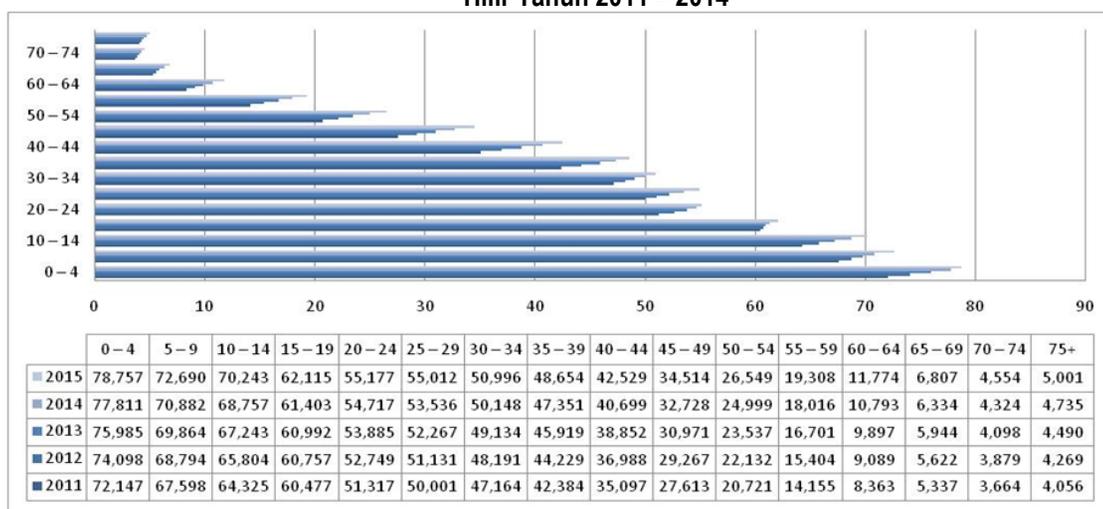
Gambar II-6: Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Perkembangan penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rokan Hilir memperlihatkan komposisi jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-54 tahun) selama lima tahun terakhir jauh lebih besar daripada jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Rokan Hilir mengalami era bonus demografi. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung sampai dengan tahun 2035. Potensi dan peluang ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir di segala bidang. Bonus demografi mengandung pengertian bahwa tingginya tingkat produktivitas sumberdaya manusia di Kabupaten Rokan Hilir apabila memiliki etos kerja dan sikap (moralitas) yang baik. Sebaliknya apabila etos kerja dan sikap kurang baik, bonus demografi dapat memberikan efek negatif bagi pembangunan.

Gambar II-7: Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.

Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

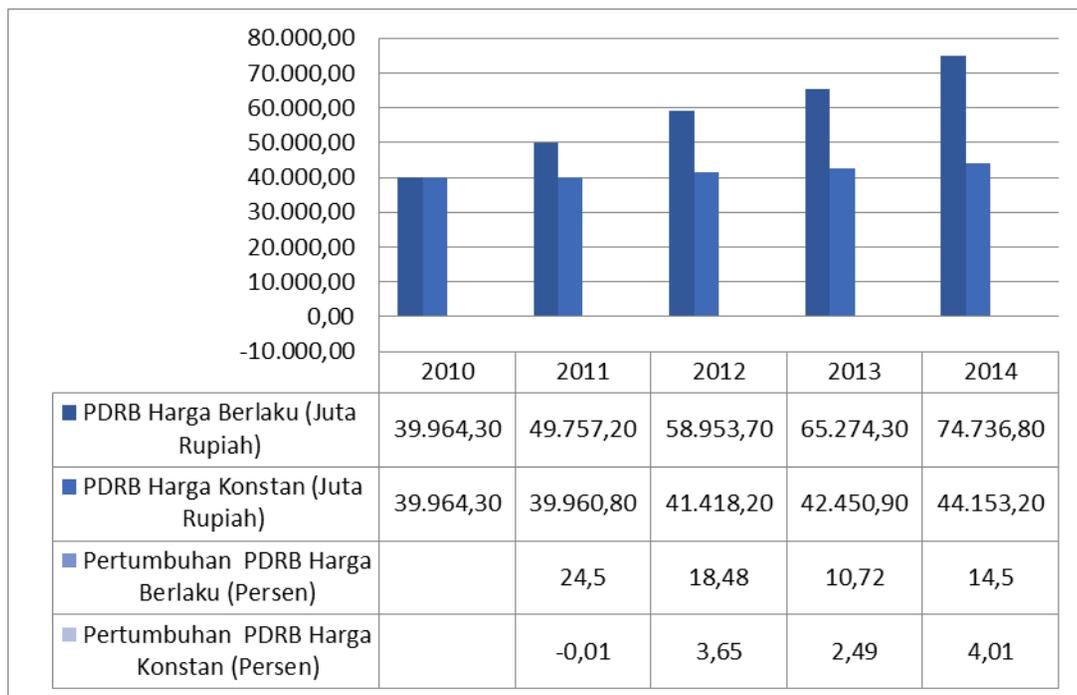
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

2.2.1.2. Perkembangan PDRB

Secara makro perkembangan PDRB Rokan Hilir selama kurun waktu 2010 – 2015 baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan 2010 sudah mulai memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku Rp 39.964,30 milyar pada tahun 2010 Rp 65.274,30 milyar pada tahun 2013 dan kemudian meningkat Menjadi Rp 74.736,82 milyar pada tahun 2015. Demikian juga halnya dengan keadaan PDRB atas dasar harga konstan 2010 cenderung meningkat dengan cukup baik dari tahun 2010 – 2015. Pada tahun 2010 PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 39.964, 30 milyar, meningkat menjadi Rp 42.450,89 milyar pada tahun 2013 dan Rp 44.153,18 milyar pada tahun 2015.

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2011 – 2015 cukup mengembirakan walaupun mengalami perlambatan di tahun 2015. Kinerja ekonomi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan laju pertumbuhan 0,01 persen, 3,65 persen, 2,38 persen, 4,10 persen dan 1,0 persen. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2011 hingga 2015 adalah sebesar 2,23 persen pertahun.

Gambar II-8: Perkembangan Nilai PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun dasar 2010) Beserta Pertumbuhannya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Tabel II-4: Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015

No.	Sektor	2010	2011	2012	2013	2015
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	11,810.60	13,159.30	14,579.00	15,813.90	18,186.30
2	Pertambangan dan Penggalian	19,587.10	26,864.40	32,825.40	36,744.90	42,140.60
3	Industri Pengeolahan	5,843.10	6,662.10	8,192.80	8,994.50	10,006.30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.3	6.1	6.1	6	8.1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.6	3.1	2.9	2.7	2.8
5	Konstruksi	351.1	372.8	377.3	433.2	498.1
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	1,511.40	1,687.80	1,845.80	2,024.10	2,443.00
7	Transportasi dan Pergudangan	45.9	48.8	55	61.6	70.9
	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	56.6	65.3	76.3	100.5	161.8
	Informasi dan Komunikasi	85.3	95.9	109.8	118.4	144.6
8	Jasa Keuangan dan Asuransi	61.2	107.9	134.2	156.1	185.1
	Real Estat	124.7	144.9	164	176.9	194.9
	Jasa Perusahaan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	296.2	334.1	364.8	404.8	418.5
	Jasa Pendidikan	95.2	106	115.9	121.8	134
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21.6	24	27.9	30.6	36.6
9	Jasa Lainnya	63.9	74.7	76.4	84.3	105.2
	Total PDRB	39.964,3	49.757,2	58.953,7	65.274,3	74.736,8

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016)

Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan nilai PDRB harga berlaku tahun 2010 pada periode 2010-2015 terlihat mengalami peningkatan, yang ditandai oleh peran sektor pertambangan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada sisi lain, kontribusi

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian memiliki kecenderungan meningkat, juga sektor industri pengolahan dan jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang kuat dan dapat dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang.

Tabel II-5: Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2015
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	11,810.60	12,494.20	13,222.20	13,780.70	14,640.30
2	Pertambangan dan Penggalian	19,587.10	18,169.60	18,007.60	17,565.40	17,788.90
3	Industri Pengeolahan	5,843.10	6,310.20	6,968.40	7,630.80	8,033.10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.3	7	7.6	7.8	8.3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
6	Konstruksi	351.1	384.6	426.3	461.4	518.6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	1,511.40	1,641.90	1,766.60	1,914.10	2,003.00
8	Transportasi dan Pergudangan	45.9	47.6	52.4	57.4	61.5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	56.6	61.4	67.3	73.4	79.9
10	Informasi dan Komunikasi	85.3	94.1	102.9	113.4	124.2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	61.2	101.5	114.5	126.4	142
12	Real Estat	124.7	131.5	138.5	146.1	154.4
13	Jasa Perusahaan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	296.2	322.8	338.1	356.7	365.3
15	Jasa Pendidikan	95.2	98.8	104	108.5	114.9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21.6	23.5	25.6	27.3	29.3
17	Jasa Lainnya	63.9	68.3	72.6	77.7	85.6
Total PDRB		39.964,3	39.960,8	41.418,2	42.450,9	44.153,2

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016)

Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan nilai PDRB harga konstan tahun 2010 pada periode 2010-2015 terlihat mengalami sedikit pergeseran, yang ditandai oleh peran sektor pertambangan semakin menurun, meskipun kontribusinya masih yang terbesar. Sedangkan kontribusi sektor pertanian dan industri, meskipun berada pada urutan kedua dan ketiga, semakin meningkat yang diikuti oleh peningkatan kontribusi pada sektor sekunder dan tersier lainnya.

Pada sisi lain, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian memiliki kecenderungan meningkat, juga sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang kuat dan dapat dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang.

Tabel II-6: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015

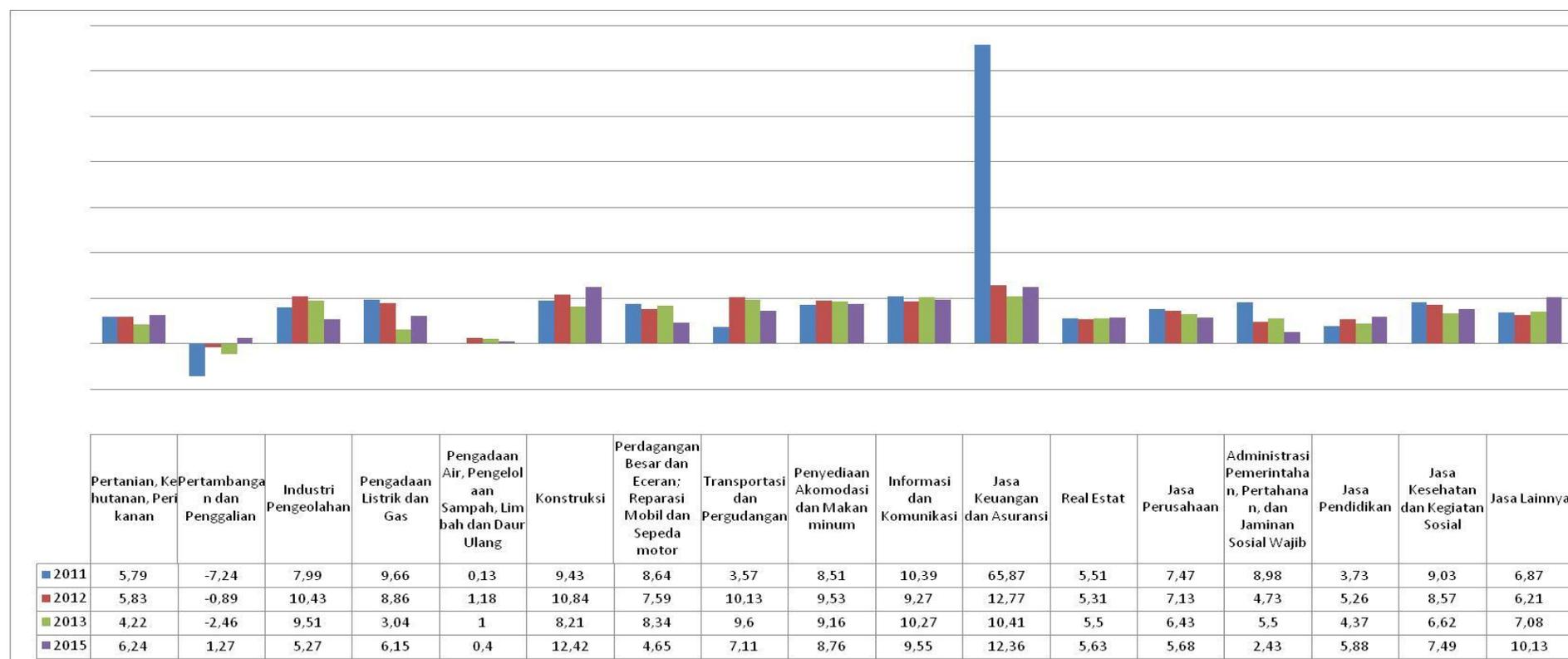
No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2015
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	29.55	26.45	24.73	24.23	24.33
2	Pertambangan dan Penggalian	49.01	53.99	55.68		56.39
3	Industri Pengeolahan	14.62	13.39	13.90	13.78	13.39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
5	Konstruksi	0.88	0.75	0.64	0.66	0.67
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	3.78	3.39	3.13	3.10	3.27
7	Transportasi dan Pergudangan	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09
	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	0.14	0.13	0.13	0.15	0.22
	Informasi dan Komunikasi	0.21	0.19	0.19	0.18	0.19
8	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.15	0.22	0.23	0.24	0.25
	Real Estat	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26
	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0.74	0.67	0.62	0.62	0.56
	Jasa Pendidikan	0.24	0.21	0.20	0.19	0.18
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
9	Jasa Lainnya	0.16	0.16	0.15	0.13	0.14
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Distribusi persentase PDRB Rokan Hilir berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010-2015 mengalami sedikit pergeseran, dimana sektor yang memberikan distribusii terbesar masih di tempati oleh sektor pertambangan dan penggalian serta diurutan kedua ada sector pertanian yang trend nya mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk Harga berlaku berlawanan terbalik dengan harga konstan dimana sektor yang memberikan distribusi terbesar masih di tempati oleh sector pertambangan dan penggalian tetapai mengalami trend yang menurun selama rentang tahun 2010-2015 sedangkan sektor pertanian memberikan trend yang positif terhadap distribusi PDRB yang mana selalu mengalmi kenaikan setiap tahunnya.

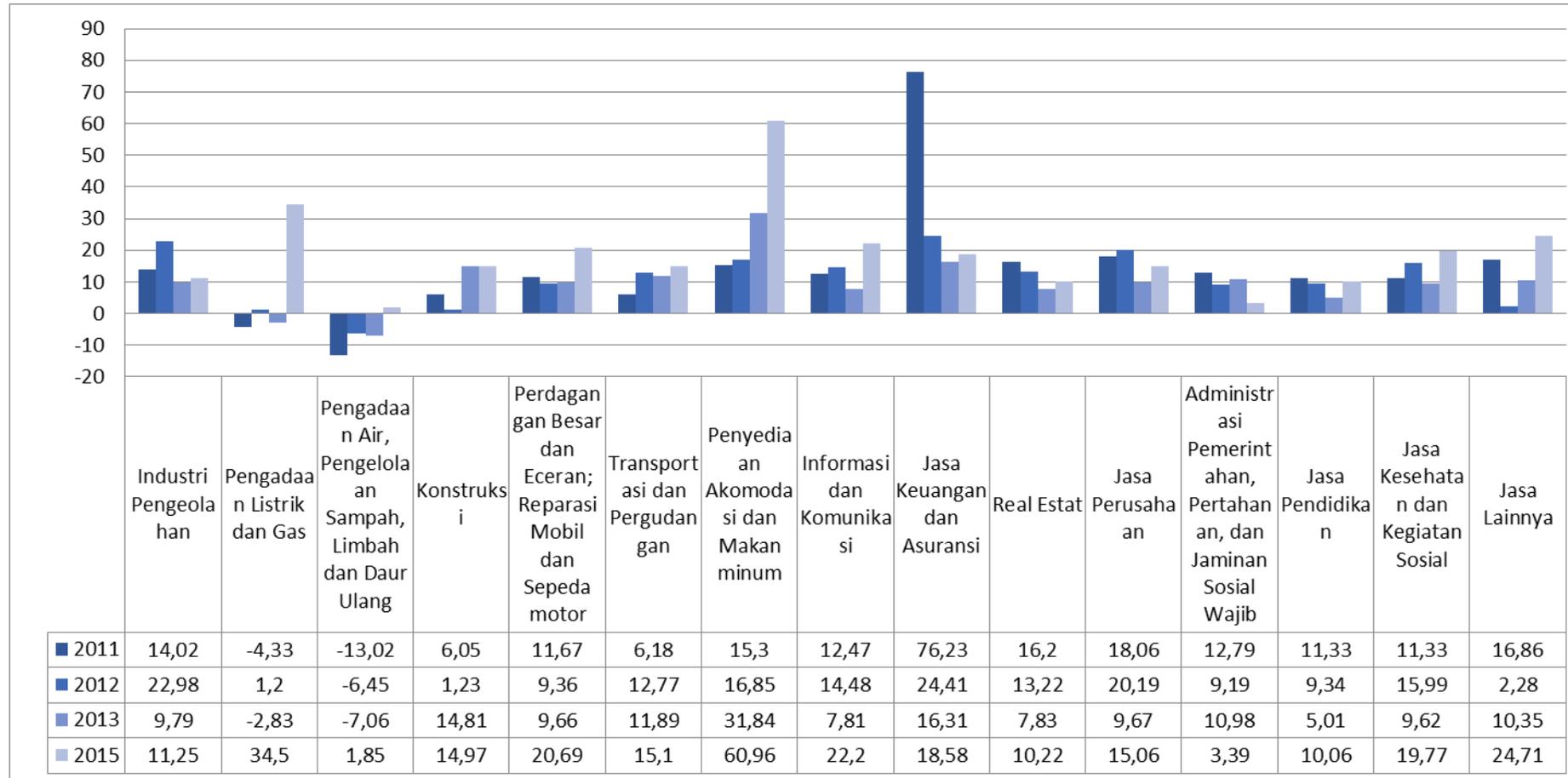


Gambar II-9: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015

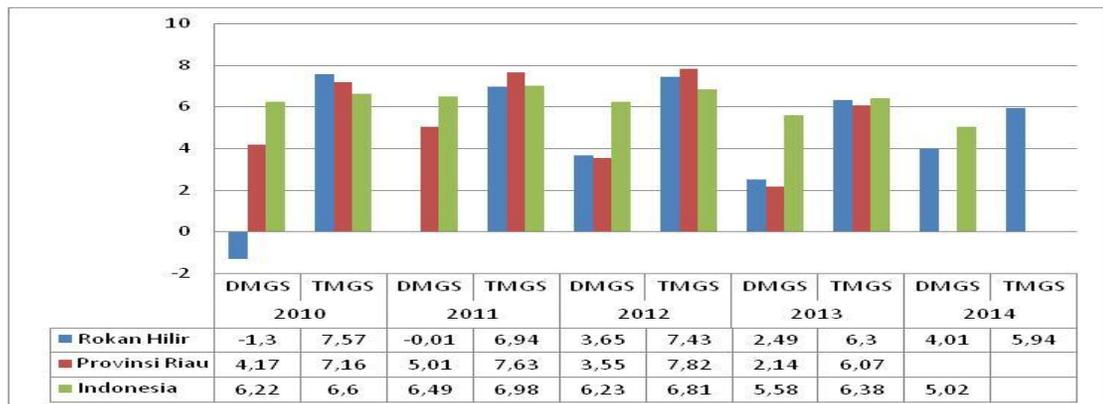


Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)



Gambar II-10: Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015


Gambar II-11: Pertumbuhan PDRB DMGS dan TMGS Kabupaten Rokan Hilir, Riau dan Indonesia Tahun 2010 – 2014



ertumbuhan sektor PDRB atas dasar harga Konstan (Hk) 2010 Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada gambar diatas bahwa Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir pada sektor Pertambangan dan Penggalian dengan harga konstan pada periode 2010-2014 mengalami penurunan sebesar 9,2 persen. Tetapi, pertumbuhan di luar Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan pesat sebesar 29,4 persen dari tahun 2010 ke tahun 2014. Secara total, PDRB Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami peningkatan sebesar 10,5 persen pada periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Rokan Hilir masih terus bertumbuh, meskipun terjadi penurunan pada sektor Pertambangan dan Penggalian.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir tahun per tahun (*year on year*) pada perekonomian dengan minyak dan gas yang selalu lebih rendah dari pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau dan Nasional. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa minyak dan gas, yang awalnya pada tahun 2010 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, kecenderungannya terus pula menurun.

Fenomena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang lebih tinggi pada perekonomian tanpa minyak dan gas menunjukan bahwa potensi pembangunan perekonomian selain sektor minyak dan gas cukup besar dalam mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang.

2.2.1.3. Inflasi

Tingkat inflasi yang terjadi pada suatu daerah merupakan indikator tingkat kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Laju inflasi sebagai indikator ekonomi makro di Kabupaten Rokan Hilir dihitung pada tingkat inflasi Kota Dumai ini dilakukan karena pada Provinsi Riau inflasi hanya dihitung hanya pada tiga daerah saja yaitu Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Indra Giri Hilir. Laju inflasi di Kota Dumai pada pada tahun 2014 hingga 2015 dengan menggunakan 2007 sebagai tahun dasar perhitungan.

Secara umum pada tahun 2014 untuk bulan November dan Desember terjadi peningkatan inflasi yang paling tinggi khususnya pada pada bahan makanan dengan nilai 2.99 namun secara umum untuk bulan november berada 1.86 dan Desember 1.86 Sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan mei yang secara umum berada pada tingkat 0.14. Jika dilihat berdasarkan sektor, Kesehatan dan Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga menjadi sektor yang paling rendah

berdampak pada inflasi. Sedangkan pada sektor yang paling besar dalam menyumbang inflasi adalah sektor bahan Makanan dan Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.

Tabel II-7: Nilai Inflasi Tahun 2014 s.d 2015 di Kota Dumai

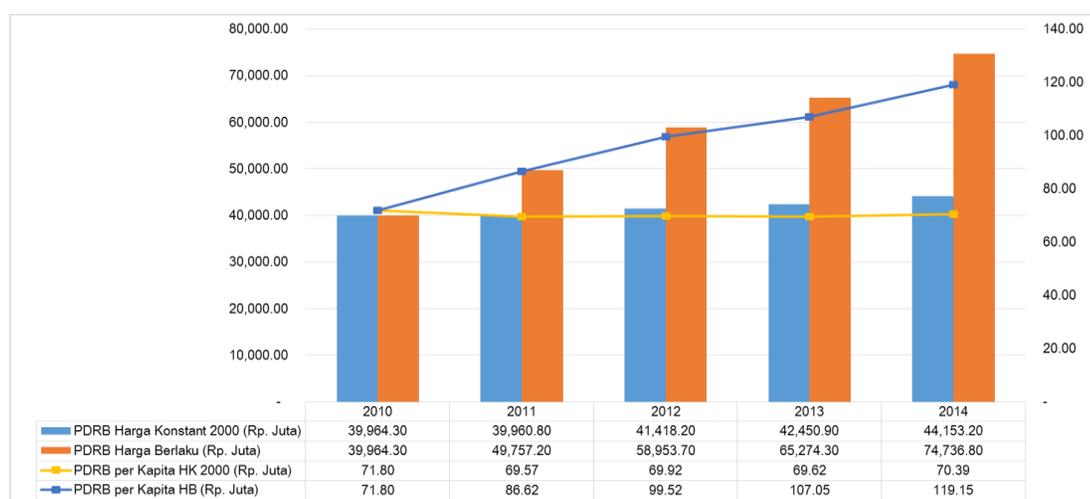
Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Umum
2014								
Januari	0.49	0.34	0.71	0.38	0.71	0.41	0.04	0.43
Februari	-0.36	0.54	0.76	0.36	0.99	0.16	0.38	0.3
Maret	-0.23	0.48	0.35	1.34	0.32	0.17	0.12	0.24
April	0.2	1.07	-0.06	-0.25	0.26	0.06	0.98	0.4
Mei	0.3	0.01	0.15	0.23	0.34	0.52	-0.16	0.14
Juni	2.24	0.13	0.15	0.44	0.08	0.01	-0.04	0.66
Juli	2.04	0.11	0.36	1.56	0.19	0.16	0.44	0.83
Agustus	0.27	0.4	0.87	2.61	0.01	2.23	0.07	0.65
September	0.65	2.49	0.34	-0.72	0	-0.05	-0.12	0.64
Oktober	-0.34	1.21	1.21	0.18	0.08	0	0.04	0.42
November	2.99	1.72	0.71	0.46	0.06	0.28	3.24	1.86
Desember	0.54	0.4	1.88	0.63	1.21	0.01	5.63	1.66
2015								
Januari	-0.01	1.51	0.3	0.73	0.23	0.08	-4.37	-0.37
Februari	-2.76	1.46	0.47	0.37	0.16	0.31	-2.25	-0.68
Maret	-1.61	0.32	1.63	-0.31	0	0	0.91	0.13
April	-0.35	0.92	0.04	0.01	0.18	0	1.55	0.38
Mei	2.38	1.54	0.16	0.04	0.04	0.49	0.08	0.98
Juni	1.46	0.13	0.38	1.21	0.27	0.61	-0.06	0.59

Sumber: Riau Dalam Angka 2015 (BPS, 2015)

Pada tahun 2015 inflasi di hitung hanya sampai pada bulan juni dimana secara umum inflasi yang besar terjadi pada bulan Mei yang berada pada tingkat 0.98. Namun jika dilihat pada semester pertama tahun 2015 sektor Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau merupakan sektor tertinggi dalam menyumbang inflasi.

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Gambar II-12: Nilai PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir Menurut Harga Konstant dan Harga Berlaku 2010-2014



ndapatan per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada harga konstant tahun 2000 pada tahun 2010 sebesar Rp. 71,80 juta dan kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi Rp. 70,30 juta. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir dengan harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 71,80 juta dan terus mengalami peningkatan hingga Rp. 119,19 juta pada tahun 2014. Pendapatan perkapita penduduk menurut harga konstant tahun 2000 yang menurun, sedangkan pendapatan perkapita penduduk harga berlaku meningkat, disebabkan oleh tingkat inflasi yang cukup tinggi.

Kenaikan pendapatan per kapita penduduk telah mengakibatkan juga terjadinya kenaikan pada pengeluaran penduduk. Pengeluaran rata-rata menurut kelompok barang yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2010-2014 yang terbesar terdapat pada padi-padian careals yang mana mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010 sampai 2014. Dimana Pada Tahun 2010 sebesar 56.184 dan mengalami kenaikan sebesar 56.763 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 66.448 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 68.267 dan 71.988. Sedangkan urutan kedua yang tertinggi adalah jenis Makanan dan Minuman jadi Prep yang mana pada tahun 2010 sebesar 42.113 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 53.378 dan 54.273 serta mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 47.785 dan 49.980.

Tabel II-8: Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan Tahun 2010-2014

No	Jenis Pengeluaran Konsumsi	Kelompok Pengeluaran Perkapita				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Padi-padian Cereals	56,184	56,763	66,448	68,267	71,988
2	Umbi-umbian Tobers	2,770	2,942	3,486	3,399	3,670
3	Ikan Fish	36,023	42,335	59,290	54,384	52,994
4	Daging Meat	11,452	8,438	12,427	11,239	13,437
5	Telur & susu Eggs & Milk	19,550	19,354	21,862	25,161	18,875
6	Sayur-sayuran Vegetables	31,524	30,766	34,369	39,759	40,003
7	Kacang-kacangan Legumes	7,290	5,011	5,842	5,463	6,801
8	Buah-buahan Fruits	14,416	15,447	19,280	18,476	20,178
9	Minyak dan Lemak Oil & Fats	12,064	14,196	17,712	15,678	17,763
10	Bahan Minuman Beverages Stu	14,002	13,972	16,854	15,454	16,407
11	Bumbu-bumbuan Spices	6,955	6,725	8,871	7,793	8,538
12	Konsumsi Lainnya Miscellacous	10,592	6,608	7,830	6,378	6,466
13	Makanan & Minuman Jadi Prep	42,113	53,378	54,273	47,785	49,980
14	Tembakau & sirih Tobacco & B	41,582	47,239	55,573	58,092	64,607
MAKANAN		306,517	323,174	384,120	377,329	391,708

Sum

ber: Rokan Hilir Dalam Angka (BPS, 2015)

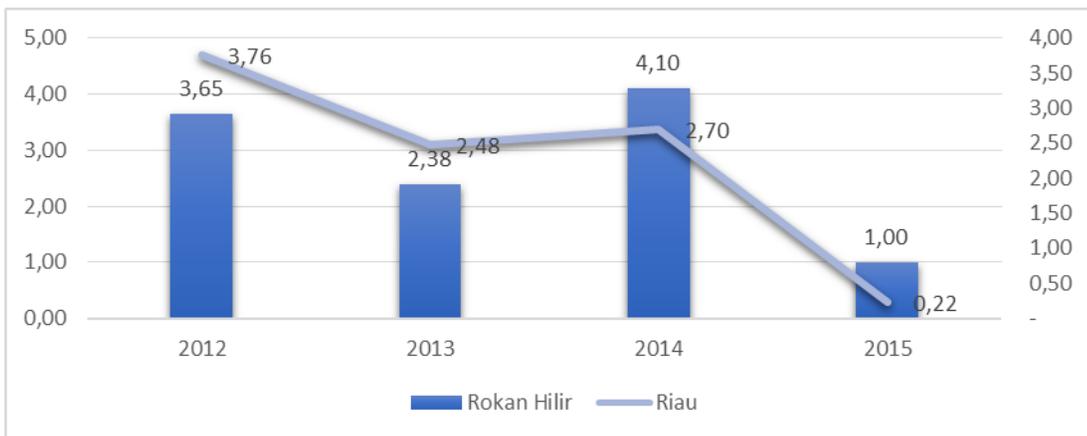
Untuk urutan ke tiga adalah jenis Tembakau dan sirih Tobacco & B, hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Rokan Hilir banyak terdapat perokok aktif, dimana pada tahun 2010 sebesar 41.582 dan mengalami kenaikan secara terus menerus pada tahun 2011 sampai 2014 yaitu sebesar 47.239, 55.573, 58.092 dan 64.607.

2.2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Rokan Hilir tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,10% dan Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,00% dengan migas sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II-12. Walau demikian secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Yang perlu dicermati adalah Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh pertumbuhan pada sektor non tradable di Kabupaten Rokan Hilir perlu mendapat perhatian karena akan berdampak

terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumberdaya yang rendah. Dengan demikian, pertumbuhan sektor tradable, mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya industri hilir kelapa sawit dan kelapa serta industri pariwisata dan industri lainnya perlu menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir ke depan. Secara umum Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2012-2015 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana pada tahun 2015 hanya berada pada 1% dengan Migas.

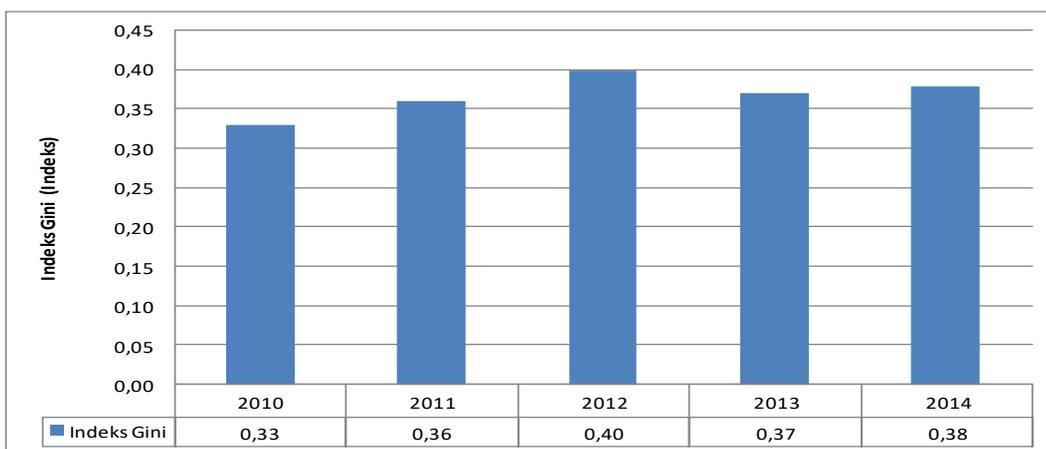
Gambar II-13 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten Rokan Hilir Termasuk Minyak Bumi Dan Gas Tahun 2012-2015



2.2.1.6. Indeks Gini

Data untuk perhitungan indeks gini maupun perhitungan indeks gini untuk Kabupaten Rokan Hilir tidak tersedia sehingga dilakukan pendekatan dengan angka indeks gini Provinsi Riau yang digunakan sebatas untuk penggambaran tren perkembangan indeks gini. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam indeks ini adalah pergerakan angka indeks gini tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 yang memiliki arti bahwa ketimpangannya rendah. Namun mulai tahun 2011 angka indeks gini sudah diatas 0,35 dan berfluktuatif meningkat dimana pada tahun 2014 sebesar 0,38 dimana kategori pemerataannya adalah ketimpangan sedang. Bila tidak ada antisipasi yang baik memungkinkan terjadinya ketimpangan tinggi (indeks gini > 0,50).

Gambar II-14: Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir yang Didekati dari Indeks Gini Provinsi Riau Tahun 2010 - 2014



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual 2012 dan 2014)

2.2.1.7. Kemiskinan

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makan merupakan nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Disamping tingkat kemiskinan biasanya diukur juga tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index – P1*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index – P2*). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel II-9: Statistik Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir

Uraian	2012	2013	2014
Garis Kemiskinan (Rp)	292.179	296.27	296.27
Jumlah Penduduk Miskin (000)	44,60	47,5	46,4
Penduduk Miskin (%)	7,37	7,73	7,31

Sumber Rokan Hilir Dalam Angka 2015

Tingkat kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin hanya sebesar 44,60 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 47,5 persen dan baru lah padatahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 46,4 persen. Sedangkan untuk angka garis kemiskinannya adalah sebesar Rp. 292.179 pada tahun2012 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014 menjadi Rp 296.27 .

Tabel II-10: Tingkat KemiskinanKabupaten/Kota di Provinsi Riau , 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kuantan Singingi	12,57	10,19	10,29	11,28	10,79
2	Indragiri Hulu	8,90	7,25	7,17	7,50	7,14
3	Indragiri Hilir	9,41	7,65	7,81	7,88	7,54
4	Pelalawan	14,51	11,93	11,11	12,00	11,20
5	Siak	6,49	5,29	5,17	5,54	5,24
6	Kampar	10,47	8,52	8,36	9,04	8,59
7	Rokan Hulu	13,03	10,66	10,13	10,86	10,18
8	Bengkalis	8,25	6,72	6,76	7,57	7,23
9	Rokan Hilir	9,30	7,58	7,37	7,73	7,31
10	Kepulauan Meranti	42,57	34,53	35,88	35,74	34,33
11	Pekanbaru	4,20	3,45	3,38	3,27	3,10
12	Dumai	6,45	5,27	5,23	4,98	4,73
	Riau	10,04	8,17	8,05	8,42	7,99

Sumber Rokan Hilir Dalam Angka 2015

Tingkat kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010-2014 termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. Dimana Tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir mengalami fluktuatif, yang mana pada tahun 2010 sebesar 9,30 persen dan mengalami penurunan menjadi 7,58 dan 7,37 persen pada tahun 2011-2012 dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 7,73 persen serta pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 7,31 persen. Tingkat Kemiskinan kabupaten Rokan Hilir lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Riau.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial penduduk menggambarkan kondisi pembangunan manusia seutuhnya, yang meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Kesejahteraan penduduk digambarkan oleh keberhasilan pembangunan ketiga aspek tersebut, yang pada akhirnya membentuk indeks pembangunan manusia.

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Kondisi kesejahteraan sosial penduduk dapat digambarkan oleh pembangunan pendidikan dalam rangka pemberantasan buta huruf. Kondisi penduduk buta huruf dapat dilihat dari penduduk buta huruf untuk usia 15 – 24 tahun dan penduduk di atas 15 - 55 tahun. Kondisi penduduk buta huruf untuk Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-11: : Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013 Kabupaten Rokan Hilir

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun*	100,00	100,00	100,00	97,00	96,63
2	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 55 Tahun*	98,89	98,03	96,73	98,06	94,30
3	Rata-Rata Angka Melek Huruf Penduduk**	97,80	97,99	98,15	98,18	98,20

Sumber: * Data SIMPADU TNP2K ** Rokan Hilir Dalam Angka 2015 (BPS, 2015)

Penduduk melek huruf pada usia 15 – 24 tahun atau merupakan usia sekolah, lebih baik dibandingkan dengan penduduk usia 15 – 55 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia 24 tahun ketas memberikan kontribusi terhadap angka buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir. Artinya pemberantasan buta huruf perlu dilakukan untuk penduduk berusia 24 – 55 tahun, melalui program pemberantasan buta huruf.

Jika dibandingkan dengan angka melek huruf Kabupaten Rokan Hilir dan angka melek huruf di Provinsi Riau, terlihat bahwa kondisi buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir lebih buruk jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2010 angka melek huruf di Kabupaten Rokan Hilir secara rata-rata sudah mencapai 97,99 persen dan di Provinsi Riau sudah mencapai 98,35 persen. Sampai dengan tahun 2014 angka melek huruf di Kabupaten Rokan Hilir baru mencapai 98,20 persen, sedangkan di Provinsi Riau sudah mencapai 98,48 persen. Artinya persentase penduduk buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk buta huruf di Provinsi Riau.

Tabel II-12: Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2009-2013

No	Daerah	Angka Melek Huruf (%)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Rokan Hilir	97,80	97,99	98,15	98,18	98,20
2.	Riau	98,11	98,35	98,42	98,45	98,48

Sumber: Data Annual 2014

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau menunjukkan trend peningkatan pada periode 2010-2014 disetiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Angka rata-rata lama sekolah dengan nilai yang paling tinggi yaitu Kota Pekanbaru dengan angka 10,95 tahun pada tahun 2014. Sedangkan untuk Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kabupaten dengan angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah yaitu 7,62 tahun pada tahun 2014.

Tabel II-13: Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Daerah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Riau	8,25	8,29	8,34	8,38	8,47
Rokan Hilir	7,24	7,30	7,36	7,42	7,62

Sumber: Data Annual 2016

Angka rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir yang baru mencapai 7,62 tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun belum tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Riau yang telah mencapai 8,47 tahun, maka angka rata-rata lama sekolah penduduk ini masih cukup rendah. Oleh sebab itu, pembangunan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir masih memerlukan perhatian untuk meningkatkan partisipasi sekolah agar mampu mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk dimasa yang akan datang.

2.2.2.3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010 mencapai 68,98 tahun dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau yang telah mencapai 70,15 tahun pada tahun 2010. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hilir Angka Harapan Hidup telah mencapai 69,23 tahun pada tahun 2013 dan sedikit meningkat menjadi 69,27 tahun pada tahun 2014.

Tabel II-14: Angka Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Daerah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Riau	70,15	70,32	70,49	70,67	70,76
Rokan Hilir	68,98	69,07	69,16	69,23	69,27

Sumber: Riau Dalam Angka 2016

Memperhatikan data statistik, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hilir merupakan posisi terendah kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengindikasikan

bahwa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir masih diperlukan dimasa mendatang.

2.2.2.4. IPM

Dilihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hilir pada Tabel 2.14 yang merupakan deskripsi dari tiga komponen sosial yaitu indeks harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak, maka secara umum IPM Kabupaten Rokan Hilir termasuk kategori menengah (IPM 64,76 -66,81). Meskipun data IPM menunjukkan kecenderungan pembangunan manusia yang relatif baik, namun dari segi pemerataan masih masih perlu di teliti dengan melihat nilai Gini Ratio. Untuk gambaran yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut perkembangan IPM antara Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau

Tabel II-15: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota SeProvinsi Riau Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	IPM				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rokan Hulu	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29
Bengkalis	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29
Rokan Hilir	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81
Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20
RIAU	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni budaya yang ada pada Kabupaten Rokan Hilir bertujuan untuk melestarikan nilai budaya dan Seni yang ada pada Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat perkembangan dapat dilihat dari Tabel berikut:

2.2.3.1. Perkembangan Seni dan Budaya

Tabel II-16: Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 S/D 2016

NO	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Group Kesenian	11 GROUP	19 GROUP	24 GROUP	31 GROUP	36 GROUP	41 GROUP
2	Jumlah Gedung Kesenian	1 UNIT					

Untuk gambaran perkembangan group Gambus hanya terdapat di 8 Kecamatan yaitu bangko, bangko pusako, tanah putih sidinginan, tanah putih tj. Melawan, kubu, bagan sinembah dan untuk Group Rebbana 18 Kecamatan Sanggar Seni Tari dan Musik 6 Kec.: bangko, kubu, tanah putih sediginan, bagan sinembah, bangko pusako, pasir limau kapas untuk kesenian teater hanya terdapat pada 2 Kecamatan yaitu Kec. Bangko dan Kec. Bangko Pusako. Masih bayaknya group kesenian yang belum dapat terdata dan dibantu dalam pengembangannya hal ini terkait masih minimnya anggran dan SDM terkait dengan pengembangan Seni dan Budaya.

2.3. Aspek Pelayan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

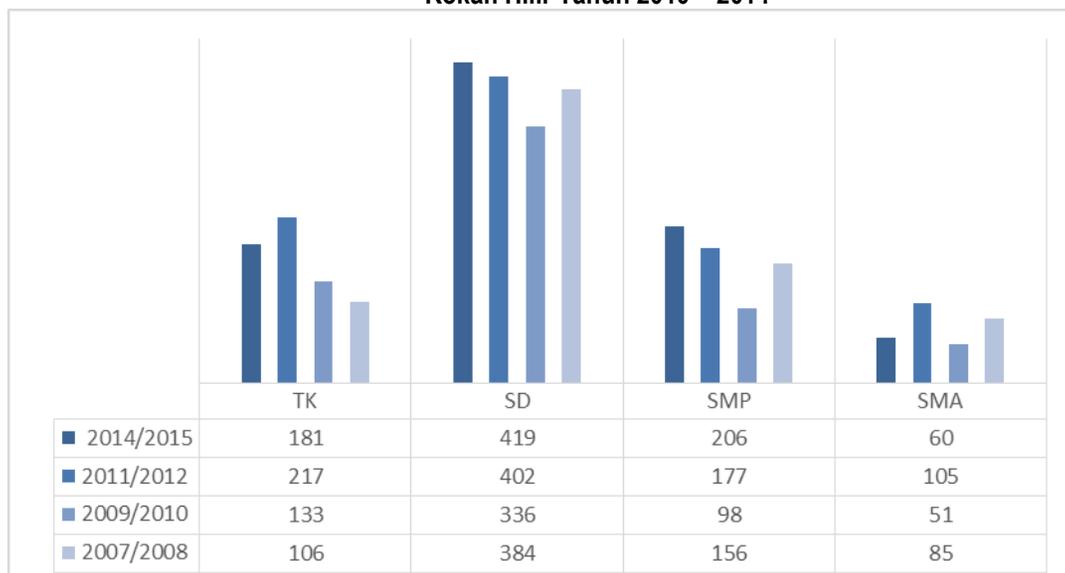
Badan Standar Nasional Pendidikan mengatur standar sarana dan prasarana pendidikan dimana setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

a) Jumlah Sekolah

Selama periode 2009/2010 - 2014/2015, jumlah unit sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hilir mengalami meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sekolah dasar sebanyak 336 sekolah meningkat menjadi 402 sekolah pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 419 sekolah tahun 2014.

Jumlah sekolah menengah lanjutan pertama (SLTP) di Kabupaten Rokan Hilir terus meningkat. Pada tahun 2010, jumlah SLTP di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 98 sekolah, meningkat menjadi 177 sekolah SLTP dan menjadi 206 sekolah tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2010, jumlah sekolah tingkat SLTA di Rokan Hilir sebanyak 51 sekolah, meningkat menjadi 151 sekolah pada tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 60 sekolah. Pada tahap awal, dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah sekolah tingkat SLTA di Kabupaten Rokan Hilir belum mengikuti perkembangan jumlah penduduk yang akan bersekolah ditingkat SLTA.

Gambar II-15: Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Perkembangan sekolah berdasarkan kecamatan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 yang memiliki jumlah sekolah terbanyak untuk kategori TK kecamatan Tanah Putih memiliki sekolah sebanyak 31 sekolah, kategori SD dikecamatan Bagan Sinembah sebanyak 80 sekolah, Kategori SMP ada di kecamatan Sinembah sebanyak 42 sekolah serta untuk kategori pendidikan menengah atas ada di kecamatan sinembah dan kecamatan bangko yaitu sebanyak 12 sekolah dan 7 sekolah.

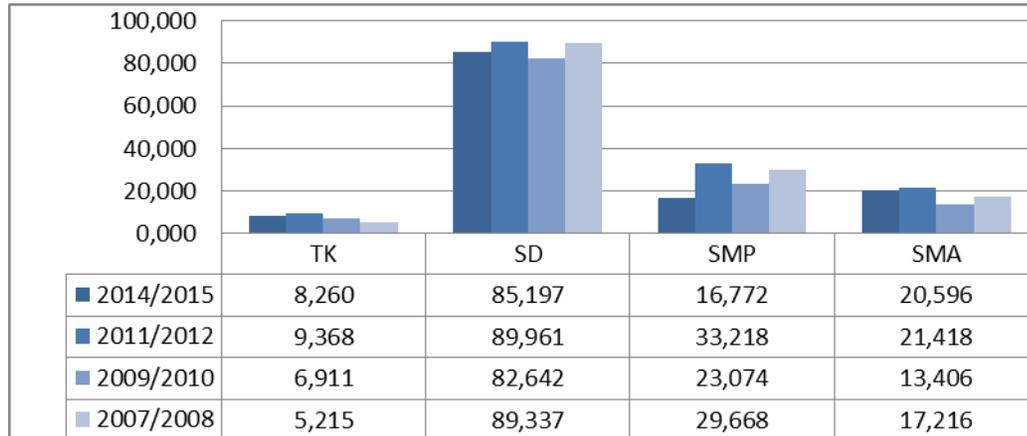
Tabel II-17: Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan kecamatan Tahun 2010 – 2014.

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1. TANAH PUTIH	31	46	23	7
2. PUJUD	22	58	30	7
3. TP TJ MELAWAN	4	10	2	1
4. RANTAU KOPAR	1	5	3	1
5. BAGAN SINEMBAH	25	80	42	12
6. SIMPANG KANAN	3	18	10	2
7. KUBU	11	40	15	4
8. PASIR LIMAU KIPAS	6	37	15	4
9. BANGKO	18	47	24	9
10. SINABOI	2	11	5	1
11. BATU HAMPAR	9	4	6	1
12. PEKAITAN	5	1	1	3
13. RIMBA MELINTANG	19	24	7	3
14. BANGKO PUSAKO	25	38	23	5
JUMLAH 2014/2015	181	419	206	60
2011/2012	217	402	177	105
2009/2010	133	336	98	51
2007/2008	106	384	156	85

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

b) Jumlah Murid

Selama periode 2007/2008 – 2014/2015 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami pasang surut, Dimana untuk jenjang pendidikan TK pada tahun 2007/2008 adalah sebanyak 5.215 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi sebanyak 9.368 orang tetapi pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan menjadi 8.260 orang. Hal ini disebabkan tingkat angka kelahiran anak dan usia anak untuk paud berkurang.

Gambar II-16: Perkembangan Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007/2008 – 2014/2015


Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2007/2008 adalah sebanyak 89.337 orang mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi 89.961 orang serta pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan menjadi 85.197 orang. Sedangkan untuk kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2007/2008 jumlah muridnya adalah sebanyak 17.216 orang dan mengalami kenaikan pada tahun 2011/2012 menjadi 21.418 orang serta mengalami sedikit penurunan menjadi 20.596 orang pada tahun 2014/2015.

Tabel II-18: Perkembangan Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Kecamatan pada tahun 2014/2015

KECAMATAN	TK	SD	SMP	SMA
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1. TANAH PUTIH	967	8.824	1.392	2.137
2. PUJUD	974	10.593	1.693	1.704
3. TP TJ MELAWAN	140	1.925	507	303
4. RANTAU KOPAR	24	841	192	198
5. BAGAN SINEMBAH	1.699	18.813	3.759	5.569
6. SIMPANG KANAN	129	3.167	286	619
7. KUBU	425	6.618	1.543	1.623
8. PASIR LIMAU KIPAS	457	5.136	401	956
9. BANGKO	1.59	11.527	2.688	3.182
10. SINABOI	38	2.363	443	435
11. BATU HAMPAR	225	1.091	402	490
12. PEKAITAN	102	2.056	392	281
13. RIMBA MELINTANG	662	4.329	987	429
14. BANGKO PUSAKO	828	8.114	2.087	2.68
JUMLAH 2014/2015	8.26	85.197	16.772	20.596
	2011/2012	89.961	33.218	21.418
	2009/2010	82.642	23.074	13.406
	2007/2008	89.337	29.668	17.216

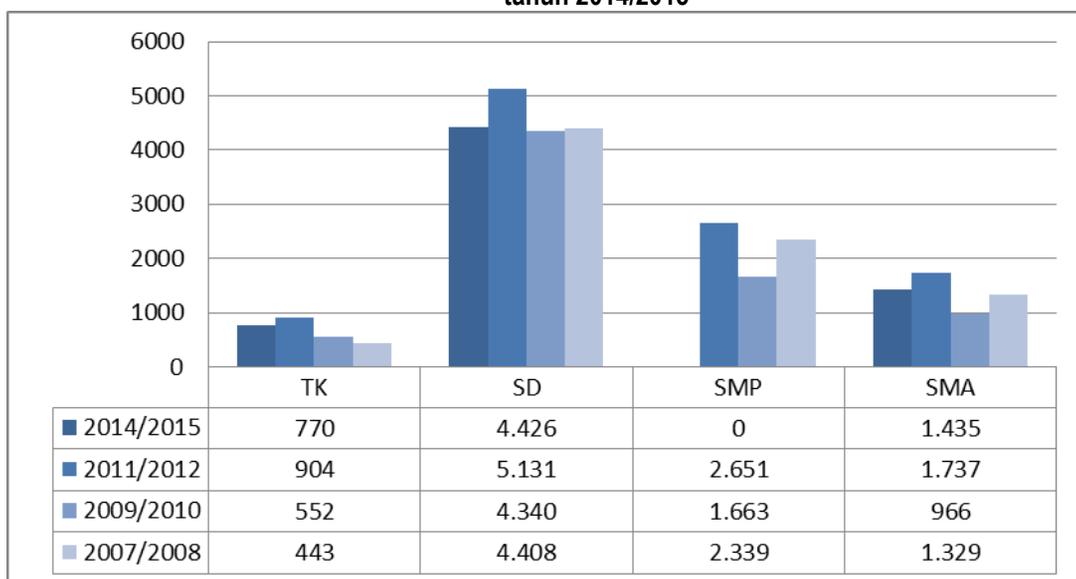
Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015)

Untuk perkembangan jumlah murid berdasarkan kecamatan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 untuk kategori Jenjang TK yang terbanyak ada di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu sebanyak 1.699 orang dengan pertumbuhan 4,8 persen, serta untuk kategori pendidikan SD, SMP dan SMA juga ada di kecamatan Sinembah yaitu masing-masing sebanyak 18.813 orang untuk SD dengan pertumbuhannya 4,52 persen, 3.759 orang SMP dengan pertumbuhannya 4,46 persen serta 5.560 orang untuk jenjang pendidikan SMA.

c) Jumlah Guru

Perkembangan jumlah guru ditingkat SD di Kabupaten Rokan Hilir berfluktuatif. Pada tahun 2009/2010, jumlah guru SD di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4.340 orang, meningkat secara berfluktuatif menjadi 5.131 orang guru pada tahun 2011/2012 serta pada tahun 2014/2015 jumlah guru SD mengalami penurunan yaitu sebesar 4.426 orang. Berfluktuatifnya jumlah guru ditingkat SD ini dimungkinkan oleh pergerakan guru bantu disamping banyaknya guru yang pensiun. Perkembangan jumlah guru tingkat SLTP berfluktuatif meningkat yang mungkin disebabkan pergerakan guru bantu dan guru pensiun. Pada tahun 2009/2010, jumlah guru SLTP sebanyak 1.663 orang meningkat menjadi 2.651 orang pada tahun 2011/2012 serta mengalami penurunan pada tahun 2014/2015 menjadi 1.680 orang.

Gambar II-17: Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015



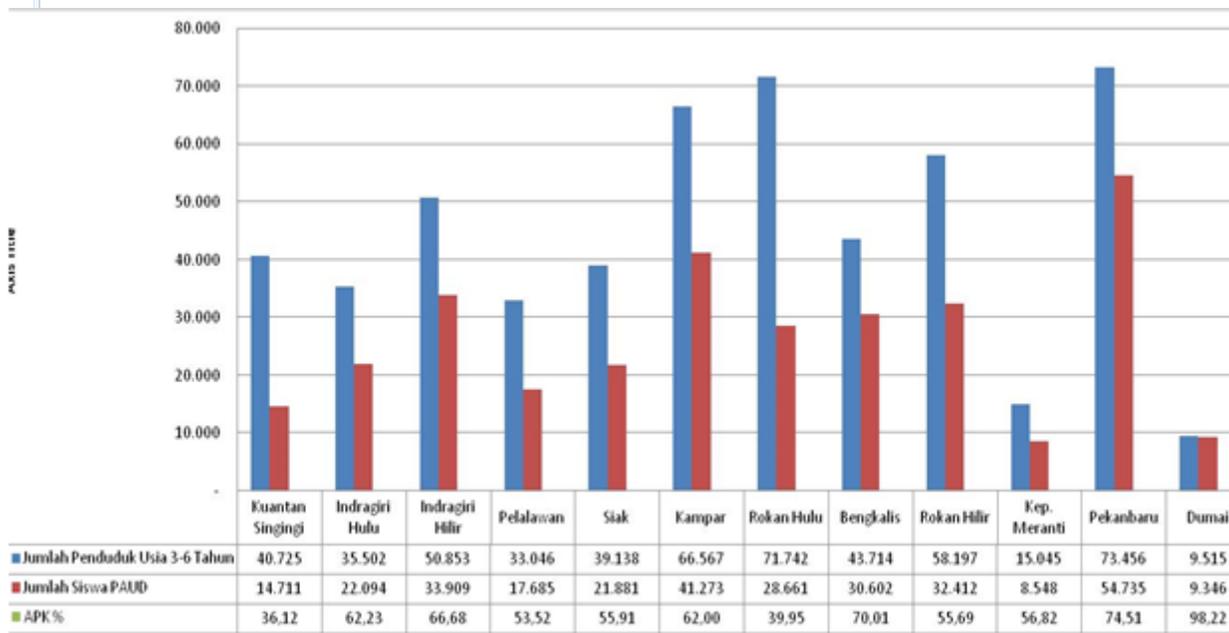
Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Perkembangan jumlah guru SLTA di kabupaten Rokan Hilir meningkat secara berfluktuatif.

Pada tahun 2007/2008, jumlah guru tingkat SLTA sebesar 1.329 orang, mengalami penurunan menjadi 966 orang pada tahun 2009/2010 serta pada tahun 2011/2012 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.737 orang serta pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan sebesar 1.435 orang.

2.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2014 jumlah penduduk usia anak dini di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 58.197 orang, Sedangkan yang mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebanyak 32.142 orang atau sebanyak 55,69 persen tingkat APK nya . Jadi ada sebanyak 26.055 orang yang tidak mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini atau sebesar 44,31 persen.



Gambar II-18: Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2014

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

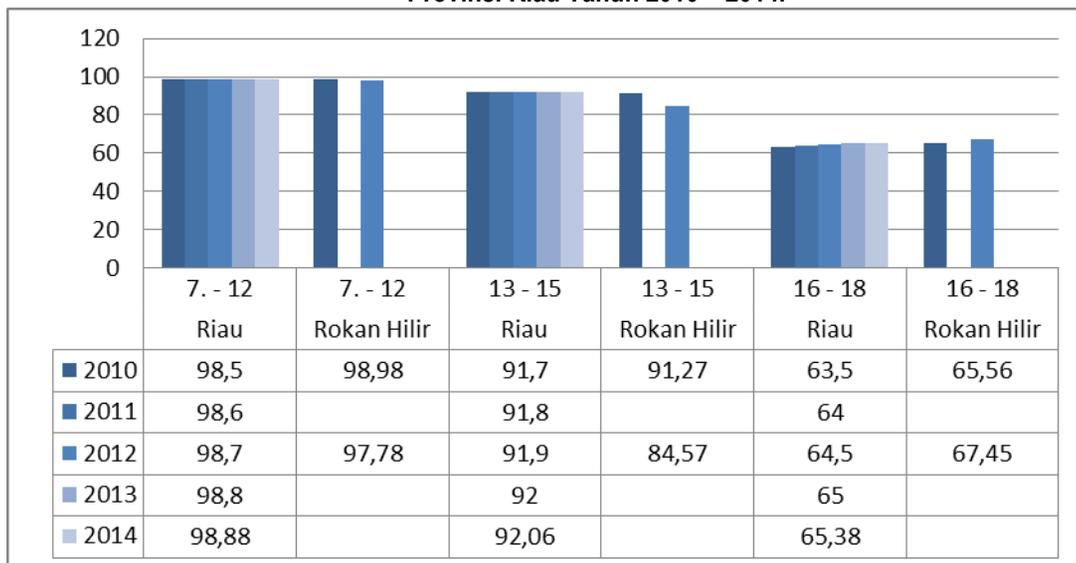
Berdasarkan gambar diatas jumlah persentase APK pendidikan anak usia dini di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 termasuk kategori sedang jika dibandingkan dengan APK Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. Dimana jumlah APK pendidikan anak usia dini yang tertinggi di Provinsi Riau ada di Kota Dumai dengan tingkat APK nya sebesar 98,22 persen sedangkan kabupten Kuantan Singingi Memiliki APK terendah yang hanya 36,12 persen.

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) dan pendidikan menengah (16 – 18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah yang dinyatakan dalam persen. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak selalu dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS umur 7 -12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2010 sebesar 98,98% yang berarti daya serap sistem pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir terhadap penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 98,98 % dan sisanya sebesar 1,02% tidak terserap di sekolah setingkat SD/MI. Pencapaian APS umur 7 – 12 tahun Rokan Hilir ini lebih tinggi dibanding APS Provinsi Riau pada kelompok umur yang sama yang capaiannya sebesar 98,50%. Serta ada tahun 2012 sebesar 97,78% yang berarti daya serap sistem pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir terhadap penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 97,78% dan sisanya sebesar 2,22% tidak terserap di sekolah setingkat SD/MI. Pencapaian APS umur 7 – 12 tahun Rokan Hilir ini lebih rendah dibanding APS Provinsi Riau pada kelompok umur yang sama yang capaiannya sebesar 98,70%.

Gambar II-19: Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) dan BPS Provinsi Riau (2015)

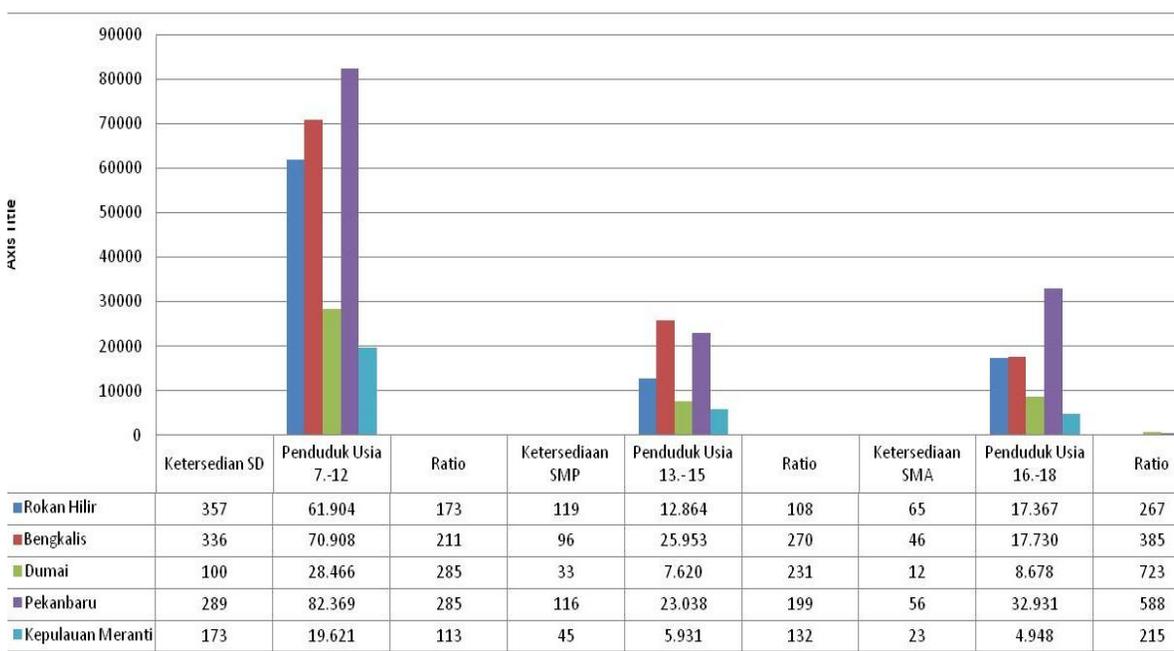
APS kelompok umur 13 – 15 tahun Kabupaten Rokan Hilir sebesar 91,27% pada tahun 2010, lebih rendah dibanding pencapaian Provinsi Riau yaitu sebesar 91,70%. Capaian APS kelompok umur 13 – 15 tahun Kabupaten Rokan Hilir sebesar 91,27% ini memberi makna bahwa sebesar 91,27% penduduk usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang dapat diserap pada sistem pendidikan tingkat SMP/MTs di Kabupaten Rokan Hilir, sisanya sebesar 8,73% tidak terserap di SMP/MTs yang ada di kabupaten Rokan Hilir, yang besar kemungkinan tidak bersekolah. Sedangkan pada tahun 2012 APS nya menjadi 84,57% yang jauh di bawah APS Provinsi Riau sebesar 91,90%.

APS kelompok umur 16 -17 tahun Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 sebesar 65,56%, lebih tinggi dibanding pencapaian APS kelompok umur 16 – 17 tahun Provinsi Riau yang hanya sebesar 63,50%. APS kelompok umur 65,56% ini memberi makna bahwa hanya 65,56% penduduk usia 15 – 17 tahun yang terserap dalam sistem pendidikan tingkat SMA/SMK/MA yang ada di kabupaten Rokan Hilir, sisanya sebesar 34,44% tidak terserap yang besar kemungkinan tidak sekolah. Serta Pada tahun 2012 APS Kabupaten Rokan Hilir Menjadi Semakin 67,45 % yang jauh diatas APS Provinsi Riau yang hanya sebesar 64,50%. Dengan semakin tingginya kelompok umur perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang relatif kurang sumberdaya alamnya, sehingga peningkatan SDM perlu diperkuat agar SDM yang dihasilkan dapat berdaya saing, khususnya diluar Kabupaten Rokan Hilir.

2.2.1.1.4. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Rokan Hilir termasuk kategori sedang jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. Dimana untuk Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SD adalah sebanyak 357 sekolah dan terdapat 61.904 jumlah penduduk usia 7-12 tahun dengan tingkat rasionya sebesar 173 persen.

Gambar II-20: Ratio Ketersediaan Sekolah/Jumlah Penduduk Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir 2014



Sumber: Data Annual Provinsi Riau (2015)

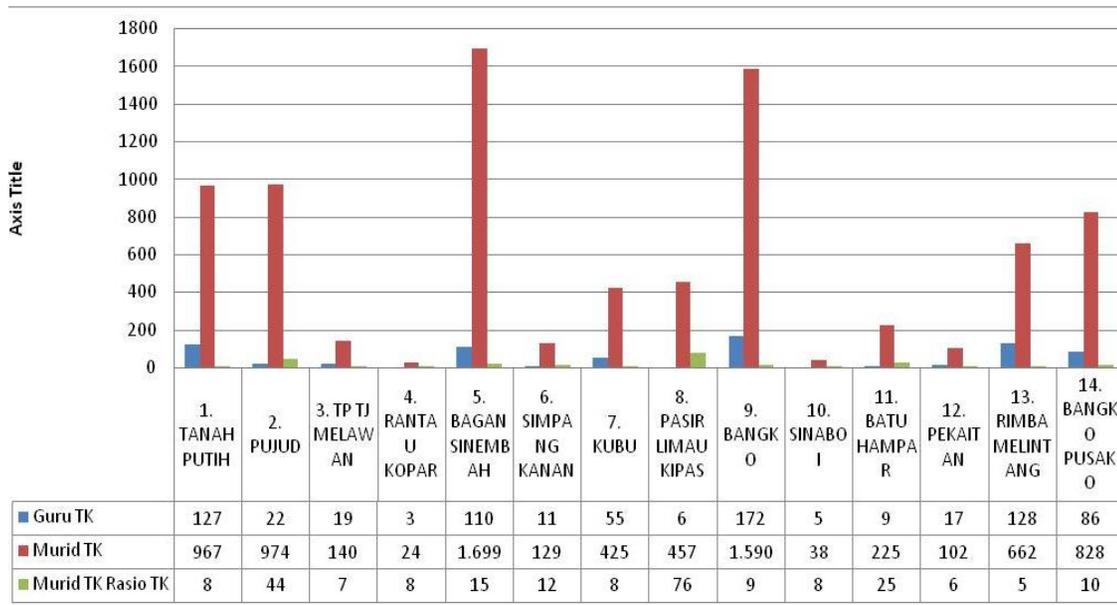
Ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP adalah sebanyak 119 sekolah dan terdapat 12.864 usia 13-15 tahun dengan tingkat ratio sebesar 108 persen. Sedangkan ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA di Kabupten Rokan Hilir terdapat sebanyak 65 sekolah dan jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun sebanyak 17.367 orang dengan tingkat ratio sebesar 267 persen.

2.3.1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid

a) TK

Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan TK di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan dimana terdapat sebanyak 8.260 orang murid dan 770 guru dengan Rasio sebesar 11 persen. Dimana pada tahun 2011/2011 terdapat sebanyak 904 guru dengan 9.368 murid dengan rasio 10 persen. Jumlah murid TK dan Guru TK tersebar diseluruh kecamatan di Kabupten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bangko memiliki jumlah Murid dan dan Guru TK terbesar yaitu sebanyak 1.590 orang murid dengan 172 orang guru. Sedangkan kecamatan Sinaboi hanya memiliki jumlah murid sebanyak 38 orang dengan 5 Guru.

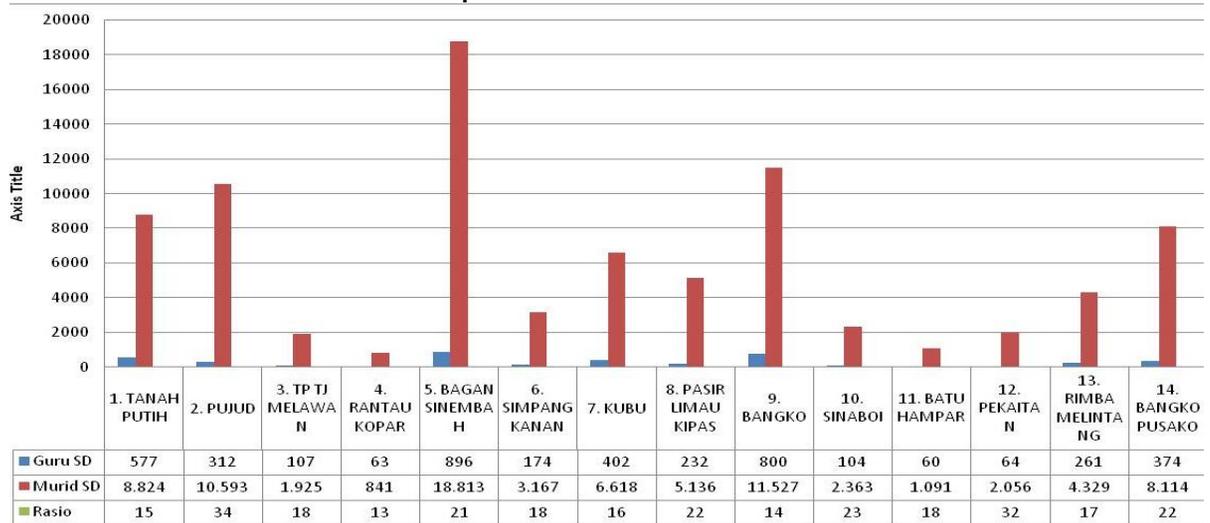
Gambar II-21: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan TK Bersarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014



Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015)

b) Sekolah Dasar

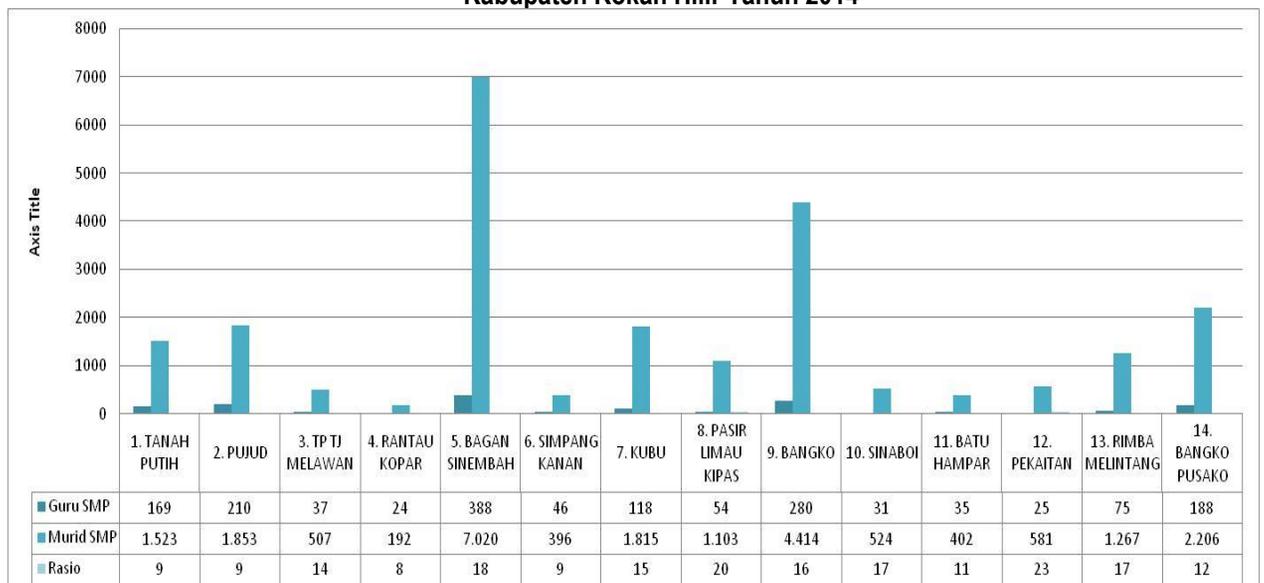
Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan dimana terdapat sebanyak 85.197 orang murid dan 4.426 guru dengan Rasio sebesar 19 persen. Dimana pada tahun 2011/2011 terdapat sebanyak 5.131 guru dengan 89.961 murid. Jumlah murid dan Guru Sekolah Dasar tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah Murid dan Guru Sekolah Dasar terbesar yaitu sebanyak 18.813 orang murid dengan 896 orang guru yang memiliki rasio sebesar 21 persen. Sedangkan kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki jumlah murid sebanyak 841 orang dengan 63 Guru.

Gambar II-22: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SD Bersarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014


Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015)

c) Sekolah Menengah Pertama

Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 adalah sebanyak 23.803 orang murid dan 1.680 guru dengan Rasio sebesar 14 persen. Jumlah Murid dan Guru SMP tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah Murid dan Guru SMP terbesar yaitu sebanyak 7.020 orang murid dengan 388 orang guru yang memiliki rasio sebesar 18 persen. Sedangkan kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki jumlah

Gambar II-23: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SMP Bersarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014


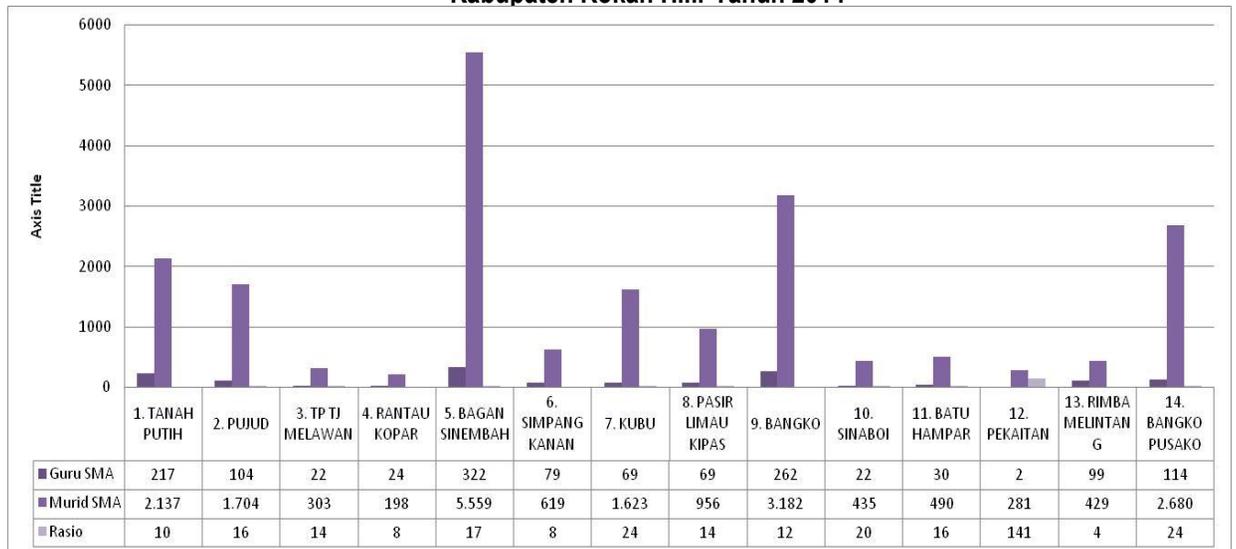
murid sebanyak 192 orang dengan 24 Guru.

Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015)

d) Sekolah Menengah Atas (SMA)

Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 adalah sebanyak 20.596 orang murid dan 1.435 guru dengan Rasio sebesar 14 persen. Jumlah Murid dan Guru SMA tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah Murid dan Guru SMA terbesar yaitu sebanyak 5.559 orang murid dengan 322 orang guru yang memiliki rasio sebesar 17 persen serta Kecamatan Bangko menempati urutan terbesar kedua dengan jumlah murid sebanyak 3.182 orang dan 262 orang guru dengan tingkat rasio sebesar 24 persen .

Gambar II-24: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SMA Bersarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

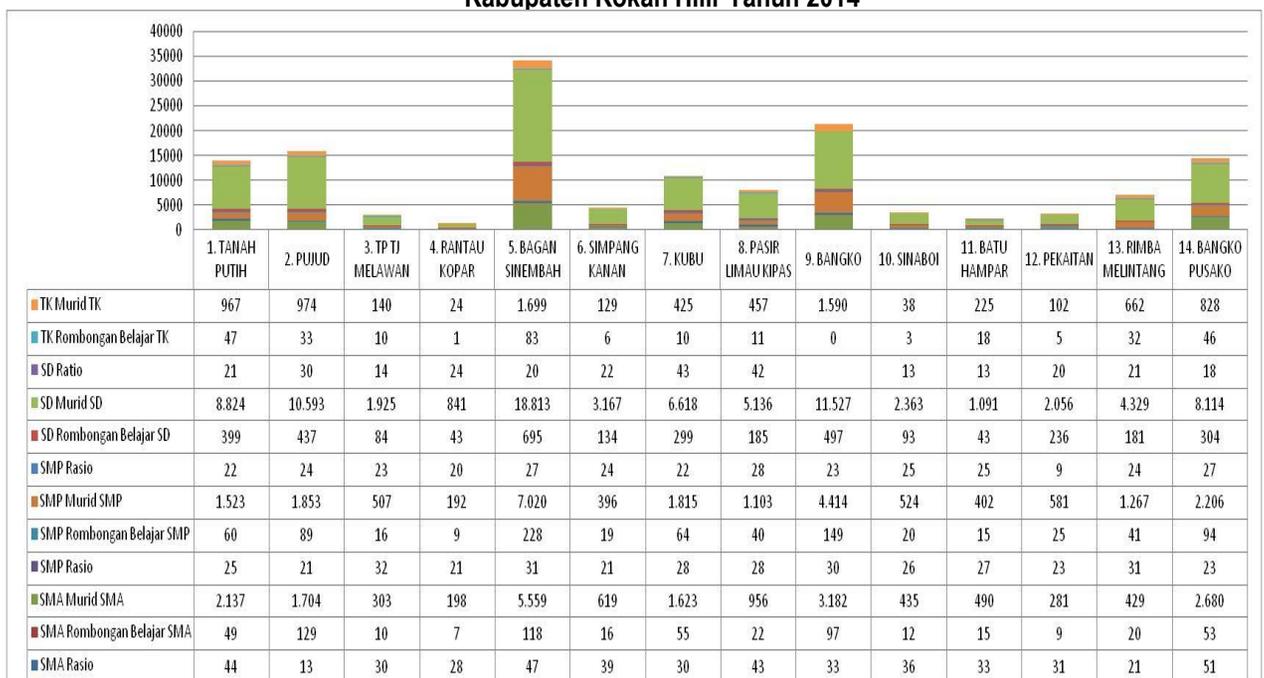


Sedangkan Kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki jumlah murid sebanyak 192 orang dengan 24 Guru.

2.3.1.1.4. Rasio Murid Terhadap Rombongan Belajar

Pada tahun 2014/2015 rasio murid terhadap banyaknya murid dalam satu ruangan kelas untuk jenjang pendidikan TK adalah sebanyak 27 orang satu ruangan, SD sebanyak 24 orang, SMP sebanyak 27 orang dan SMA sebanyak 34 orang.

Gambar II-25: Rasio Murid Terhadap Rombongan Belajar Berdasarkan Jenjang Pendidikan TK-SMA di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014



Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Terkait urusan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibagi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Sub urusan bidang kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Komponen sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersediaan sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan. Unit pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa kategori yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum dan unit pelayanan teknis kesehatan lainnya.

2.3.1.2.1. Perkembangan Fasilitas Kesehatan

a) Rumah Sakit

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Pada tahun 2013, jumlah rumah sakit di Kabupaten Rokan Hilir terdapat sebanyak 4 rumah sakit dengan 247 tempat tidur yang berlokasi 1 di Kecamatan Bangko dan 3 Kecamatan Bagan Sinembah.

b) Puskesmas

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan dibawah supervisi Dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 terdapat sebanyak 17 puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hilir.

Tabel II-19: Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2014

NO	Kecamatan	Puskesmas Pembantu	Puskesmas
1	Tanah Putih	3	1
2	Pujud	7	1
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	2	1

NO	Kecamatan	Puskesmas Pembantu	Puskesmas
4	Rantau Kopar	1	1
5	Bagan Sinembah	17	2
6	Simpang Kanan	5	1
7	Kubu	3	0
8	Pasir Limau Kapas	6	1
9	Kubu babussalam	4	1
10	Bangko	6	2
11	Sinaboi	2	1
12	Batu hampar	3	1
13	Pekaitan	4	1
14	Rimba Melintang	5	1
15	Bangko Pusako	9	2
Jumlah		77	17

Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Rokan Hilir masih ada Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas yaitu di Kecamatan Kubu. Kecamatan yang memiliki banyak Puskesmas terdapat di Kecamatan Bangko, Bagan Sinembah dan Bangko Pusako yaitu sebanyak 2 Puskesmas sedangkan selebihnya memiliki 1 Puskesmas. Ketidakmerataan penyebaran Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir, Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk memperbaiki penyediaan sarana dan prasanana kesehatan terutama di Kecamatan Bangko.

c) Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah sebanyak 77 buah yang tersebar disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dari 77 Puskesmas Pembantu yang ada, Kecamatan Bagan Sinembah memiliki Puskesmas Pembantu yang terbanyak yaitu sebanyak 17 buah puskesmas Pembantu dan Kecamatan Bangko Pusako 9 buah Puskesmas Pembantu. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu yang sedikit ada di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Puti Tanjung Melawan sebanyak 2 Puskesmas Pembantu serta Kecamatan Rantau Kopar memiliki 1 Puskesmas Pembantu.

2.3.1.2.2. Perkembangan Tenaga Medis, Perawat dan Bidan

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utama adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Permenkes Nomor 262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dan pascasarjana yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik.

a. Dokter

Pada tahun 2014 jumlah Dokter yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ada sebanyak 100 orang yang terdiri dari 13 orang Dokter Spesialis, 17 orang Dokter Umum dan 70 orang Dokter Gigi. Sebanyak 100 orang Dokter yang ada tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Dokter Spesialis hanya terdapat di Kecamatan Bangko dan Rantau Kopar. Dimana Kecamatan Bangko sebanyak 12 orang serta Kecamatan Rantau Kopar sebanyak 1 orang.

Tabel II-20: Jumlah Dokter di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

NO	Kecamatan	Dokter		
		Spesialis	Umum	Gigi
1	Tanah Putih		3	3
2	Pujud			3
3	Tanah Putih Tanjung Melawan			1
4	Rantau Kopar	1	1	4
5	Bagan Sinembah		4	6
6	Simpang Kanan		2	5
7	Kubu			
8	Pasir Limau Kapas		1	3
9	Kubu babussalam		1	2
10	Bangko	12	2	30
11	Sinaboi		1	1
12	Batu hampar			2
13	Pekaitan			
14	Rimba Melintang		1	2
15	Bangko Pusako		1	8
Jumlah		13	17	70

Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Untuk Dokter Umum hampir merata penyebarannya di Kabupaten Rokan Hilir, Dimana Bagan Sinembah Memiliki 4 Dokter Umum dan Tanah Putih sebanyak 3 Dokter Umum sekaligus Kecamatan yang memiliki jumlah Dokter Umum terbanyak penyebarannya yang ada di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014. Sedangkan untuk dokter spesialis yang terbanyak terdapat di Kecamatan Bangko yaitu sebanyak 30 orang sedangkan untuk Kecamatan Kubu dan Pakaitan tidak memiliki sama sekali Dokter Spesialis.

b. Perawat

Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MenKes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat pada pasal 1 ayat 1). Seorang perawat adalah sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Secara khusus, tugas perawat adalah (i) **Care Giver**, dimana perawat harus a) memperhatikan individu dalam konteks sesuai kehidupan klien, perawat harus memperhatikan klien berdasarkan kebutuhan significant dari klien. b) perawat menggunakan *Nursing Process*



untuk mengidentifikasi diagnosa keperawatan, mulai dari masalah fisik (fisiologis) sampai masalah-nasalah psikologis. c) Peran utamanya adalah memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sesuai diagnosa masalah yang terjadi mulai dari masalah yang bersifat sederhana sampai yang kompleks. (ii) **Client Advocat**, perawat bertanggung jawab untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan (*inform concent*) atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. Selain itu perawat harus mempertahankan dan melindungi hak-hak klien. Hal ini harus dilakukan karena klien yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan berinteraksi dengan banyak petugas kesehatan. Perawat adalah anggota tim kesehatan yang paling lama kontak dengan klien, leh karena itu perawat harus membela hak-hak klien. (iii) **Conselor**, dengan tugas utama perawat adalah a) mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. b) Adanya perubahan pola interaksi ini merupakan “Dasar” dalam merencanakan metoda untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya. c) Konseling diberikan kepada idividu/keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu. d) Pemecahan masalah difokuskan pada; masalah keperawatan, mengubah perilaku hidup sehat (perubahan pola interaksi). (iv) **Educator** yaitu a) peran ini dapat dilakukan kepada klien, keluarga, team kesehatan lain, baik secara spontan (sat interaksi) maupun formal (disiapkan). b) tugas perawat adalah membantu klien mempertinggi pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan, gejala penyakit sesuai kondisi dan tindakan yang spesifik dan c) dasar pelaksanaan peran adalah intervensi dalam NCP. (v) **Coordinator**, disini peran perawat adalah mengarahkan, merencanakan, mengorganisasikan pelayanan dari semua anggota team kesehatan. Karena klien menerima pelayanan dari banyak profesioanl, misal; pemenuhan nutrisi. Aspek yang harus diperhatikan adalah; jenisnya, jumlah, komposisi, persiapan, pengelolaan, cara memberikan, monitoring, motivasi, dedukasi dan sebagainya. (vi) **Collaborator**, dimana dalam hal ini perawat bersama klien, keluarga, team kesehatan lain berupaya mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang diperlukan termasuk tukar pendapat terhadap pelayanan yang dipelukan klien, pemberian dukungan, paduan keahlian dan keterampilan dari bebagai profesional pemberi pelayanan kesehatan. (vii) **Consultan dimana** elemen ini secara tidak langsung berkaitan dengan permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan keperawatan yang diberikan. Dengan peran ini dapat dikatakan perawatan adalah sumber informasi ang berkaitan dengan kondisi spesifik klien. (viii) **Change Agent**, dimanaelement ini mencakup perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dalam berhubungan denan klien dan cara pemberian keperawatan kepada klien.

Tabel II-21: Jumlah Perawat di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014

NO	Kecamatan	Perawat
1	Tanah Putih	47
2	Pujud	36
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	13
4	Rantau Kopar	9
5	Bagan Sinembah	101
6	Simpang Kanan	29



NO	Kecamatan	Perawat
7	Kubu	
8	Pasir Limau Kapas	19
9	Kubu babussalam	63
10	Bangko	226
11	Sinaboi	8
12	Batu hampar	8
13	Pekaitan	
14	Rimba Melintang	23
15	Bangko Pusako	45
Jumlah		627

Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Berdasarkan gambar diatas kita dapat mengetahui bahwa jumlah Perawat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 ada sebanyak 627 orang yang tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan yang tidak memiliki perawat adalah Kecamatan Kubu dan Kecamatan Pakaitan. Perawat di Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah adalah jumlah Perawat terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir yaitu senyak 226 Perawat dan 101 Perawat.

c. Bidan

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi dan untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional. Secara ringkas, terdapat standar minimal 9 (sembilan) tugas pokok dan fungsi, seorang bidan, yaitu (i) melaksanakan asuhan kebidanan kepada ibu hamil (*Ante Natal Care*), (ii) melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ibu bersalin (*Post Natal Care*), (iii) menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru lahir (kunjungan neanatal), (iv). mengupayakan kerjasama kemitraan dengan dukun bersalin di wilayah kerja puskesmas. (v) memberikan edukasi melalui penyuluhan kesehatan reproduksi dan kebidanan. (vi). melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada wanita usia subur (WUS). (vii) melakukan pelacakan dan pelayanan rujukan kepada ibu hamil risiko tinggi (bumil risti). (viii) mengupayakan diskusi audit maternal perinatal (AMP) bila ada kasus kematian ibu dan bayi. Dan (ix) melaksanakan mekanisme pencatatan dan pelaporan terpadu pelayanan puskesmas.

Pada tahun 2014 jumlah Bidan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 552 orang, dimana tersebar disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terkecuali kecamatan Kubu dan Kecamatan Pekaitan. Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah adalah Kecamatan yang memiliki jumlah terbesar di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebanyak 154 Bidan di Kecamatan Bangko dan 130 Bidan di Kecamatan Bagan Sinembah.



Tabel II-22: Jumlah Bidan Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014

NO	Kecamatan	Bidan
1	Tanah Putih	45
2	Pujud	36
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	18
4	Rantau Kopar	8
5	Bagan Sinembah	130
6	Simpang Kanan	14
7	Kubu	
8	Pasir Limau Kapas	28
9	Kubu babussalam	40
10	Bangko	154
11	Sinaboi	9
12	Batu hampar	13
13	Pekaitan	
14	Rimba Melintang	23
15	Bangko Pusako	34
Jumlah		552

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Menurut UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dimana jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2.3.1.3.1. Perkembangan Jalan

a. Kondisi Jalan

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

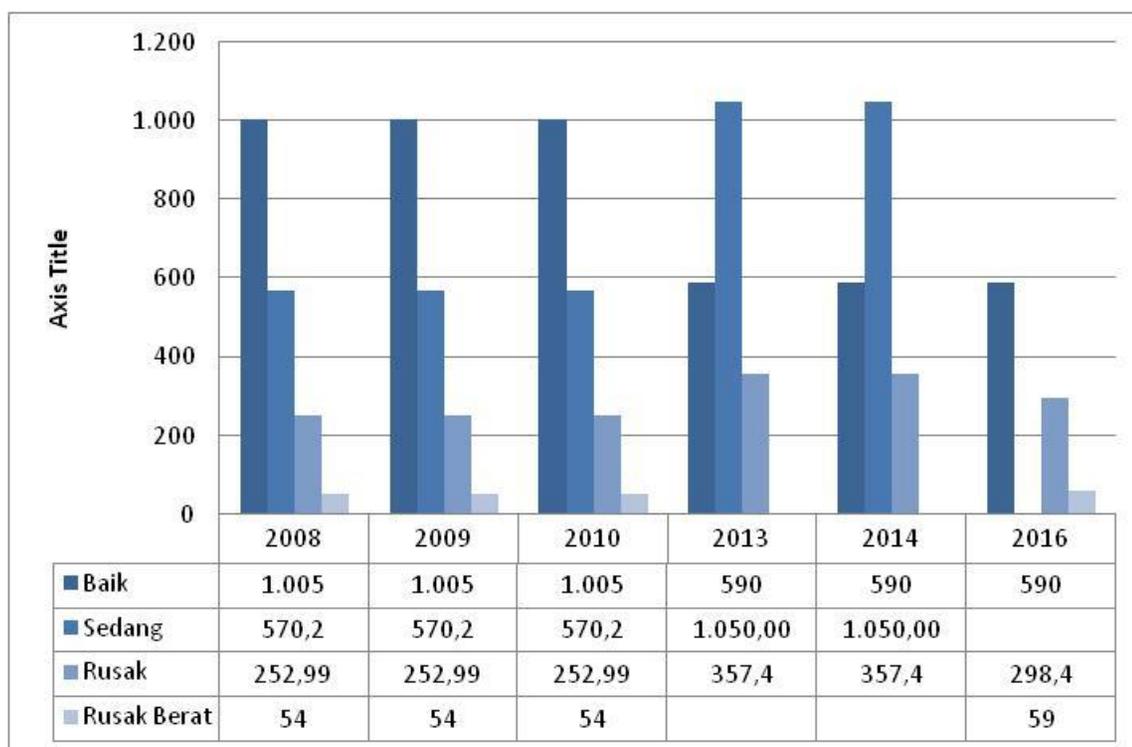
3. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan \leq 6%), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
4. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 - 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas.



5. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
6. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan - lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
7. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda – 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Untuk kondisi jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir cukup bagus dimana keadaan jalan rusak dan rusak berat lebih sedikit jika dibandingkan dengan keadaan jalan sedang dan baik, walaupun jalan baik mengalami penurunan pada tahun 2013-2016 sebesar 590 km yang sebelumnya berjumlah sebesar 1.005 km. Sedangkan untuk jalan rusak hanya berjumlah sebesar 252,99 km pada tahun 2008-2010 dan mengalami kenaikan menjadi 1,050 km pada tahun 2013-2014 serta mengalami penurunan menjadi 298,4 km. Sedangkan untuk jalan rusak berat mengalami kenaikan dari 54 km pada tahun 2010 menjadi 59 km pada tahun 2016. Dengan demikian pemerintah harus memperhatikan keadaan jalan rusak dan rusak berat yang ada di kabupaten Rokan hilir untuk kedepannya untuk menjadikan Kabupaten Rokan Hilir lebih maju dimasa yang akan datang. Untuk data pada tahun 2015 tidak terdapat informasi atau data.

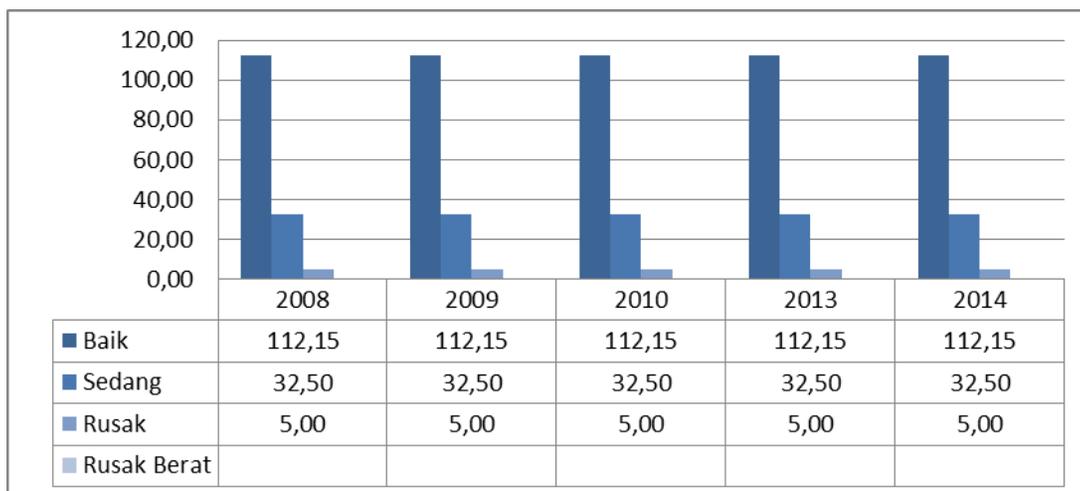
Gambar II-26: Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008– 2016



Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

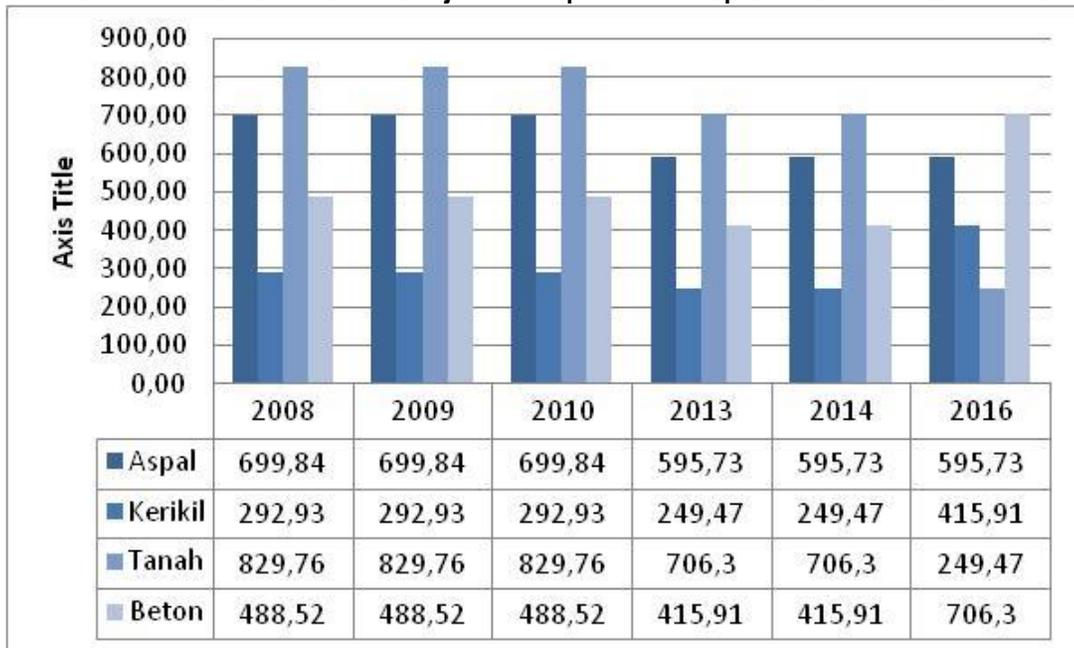
Untuk keadaan jalan provinsi yang adadi Kabupaten rokan Hilir padatahun 2008-2014 tidak ada mengalami perubahan. Dimana jalannya lebih baik jalan yang baik, yang mana jalan baik itu sebesar 112,15 km , jalan sedang 32,50 km dan jalan rusak 5 km.

Gambar II-27: Perkembangan Kondisi Jalan Negara di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008 - 2014



Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

b. Jenis Permukaan

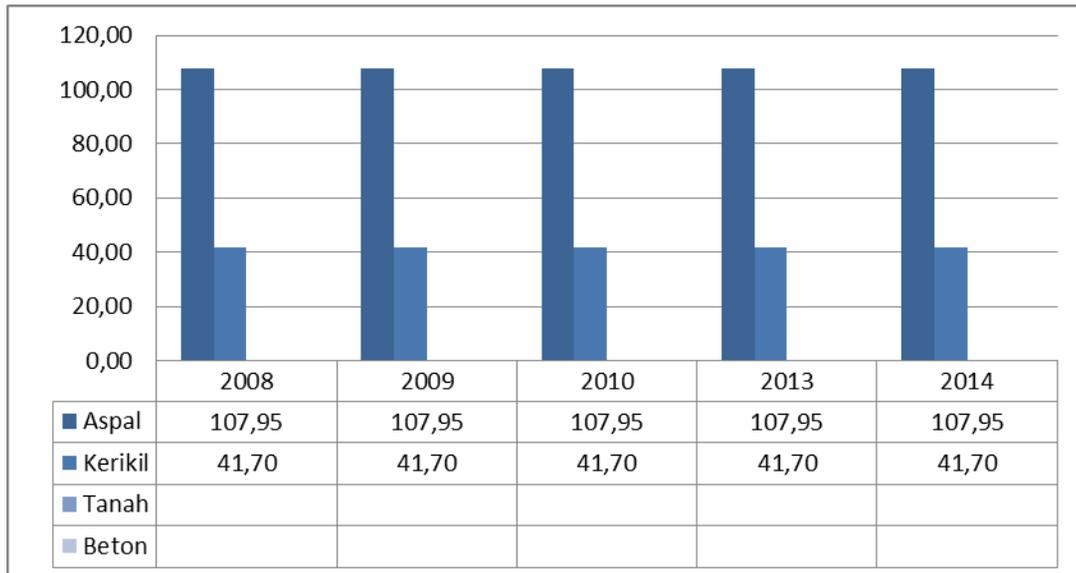
Gambar II-28: Jenis Permukaan jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008-2016


Su

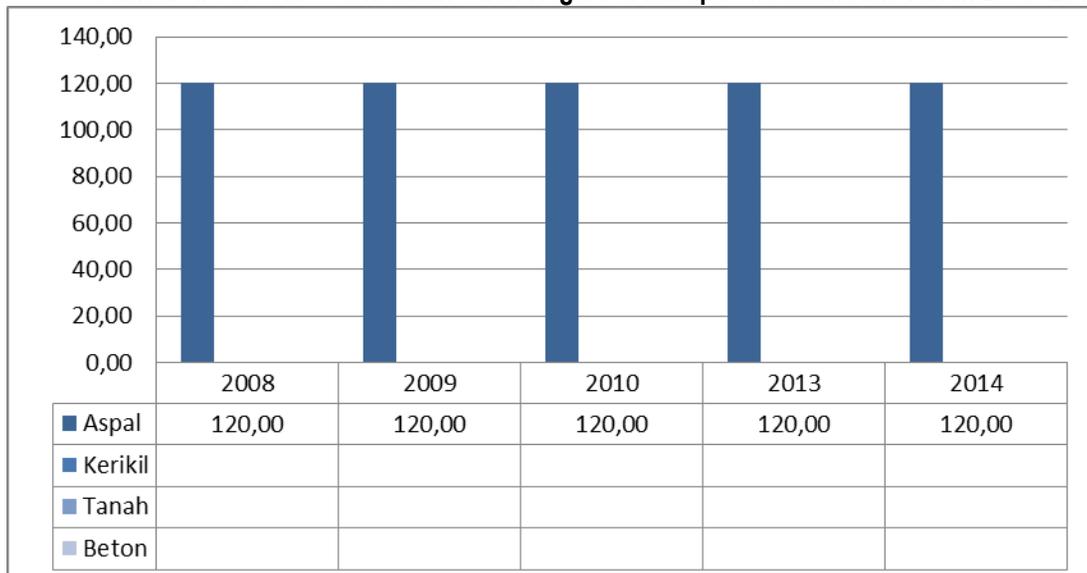
mber: BPS Rokan Hilir (2015)

Berdasarkan data diatas panjang jalan berdasarkan jenis permukaannya bersifat stabil dan cenderung menurun , dimana terdiri atas aspal, kerikil, tanah dan beton. Keadaan jalan jenis permukaan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 masih didominasi oleh jalan tanah yaitu sebesar 828,76 km dan mengalami penurunan padatahun 2013-2014 sepanjang 706,30 km dan mengalami penurunan menjadi 249,47 km. Untuk jenis permukaan jalan terekecil terdapat pada jenis permukaan kerikil yang hanya 292,93 km pada tahun 2008-2010 dan baru mengalami penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 249,47 km tetapi pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 415,91 km.

Sedangkan untuk permukaan jalan Provinsi dan Negara yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2008-2014 tidak mengalami perubahan sama sekali. Dimana Permukaan Jalan Provinsi yang aspal berjumlah 107,95 km dan kerikil sebanyak 41,70. Sedangkan untuk permukaan jalan negara berjumlah sebanyak 120 km aspal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di bawah ini sebagai berikut: Untuk data tahun 2015 tidak terdapat informasi yang relevan.

Gambar II-29: Jenis Permukaan jalan Provinsi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2014


Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

Gambar II-30: Jenis Permukaan Jalan Negara di kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008 -2014


Sumber: BPS Rokan Hilir (2015)

2.3.1.3.2. Jembatan

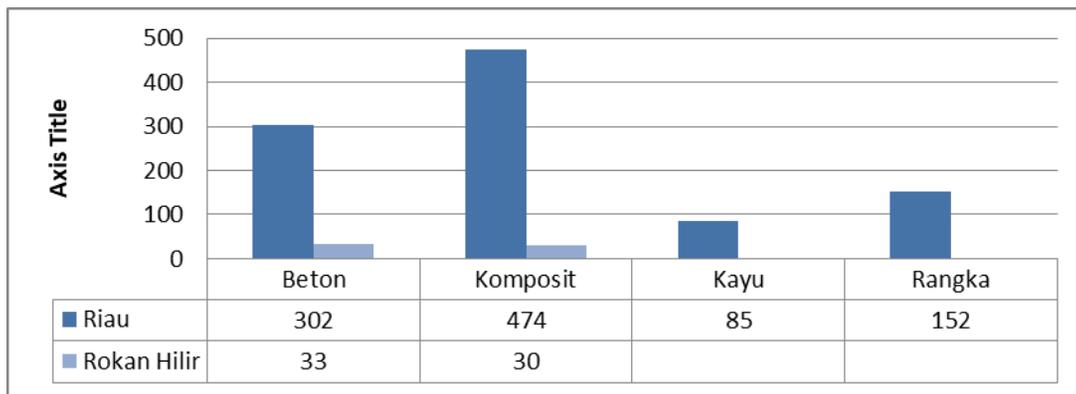
Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Dengan berkembangnya teknologi ada berbagai macam jenis jembatan yang di bangun untuk keperluan mobilisasi baik itu berdasarkan fungsi jembatan tersebut, dimana jembatan itu di bangun, bahan konstruksi yang digunakan serta tipe struktur yang di aplikasikan pada jembatan. Berdasarkan fungsinya jembatan di bagi menjadi (a) Jembatan jalan raya (*highway bridge*), (b). Jembatan jalan kereta api (*railway bridge*), (c) Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan (*pedestrian bridge*). Berdasarkan lokasi jembatan dibagi menjadi (a) Jembatan di atas sungai

atau danau serta laut, (b) Jembatan di atas lembah, (c) Jembatan di atas jalan yang ada (*fly over*), (d) Jembatan di atas saluran irigasi/drainase (*culvert*), dan (d) Jembatan di dermaga (*jetty*). Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain (a) Jembatan kayu (*log bridge*), (b) Jembatan beton (*concrete bridge*), (c) Jembatan beton prategang (*prestressed concrete bridge*), (d) Jembatan baja (*steel bridge*), (e) Jembatan komposit (*compossite bridge*).

a) Jumlah Jembatan

Pada tahun 2014 jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 66 buah jembatan yang terdiri dari jembatan beton sebanyak 33 buah dan jembatan komposit sebanyak 30 buah sedangkan untuk jembatan kayu dan rangka tidak ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar II-31: Panjang Jembatan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kontruksi pada tahun 2008-2014

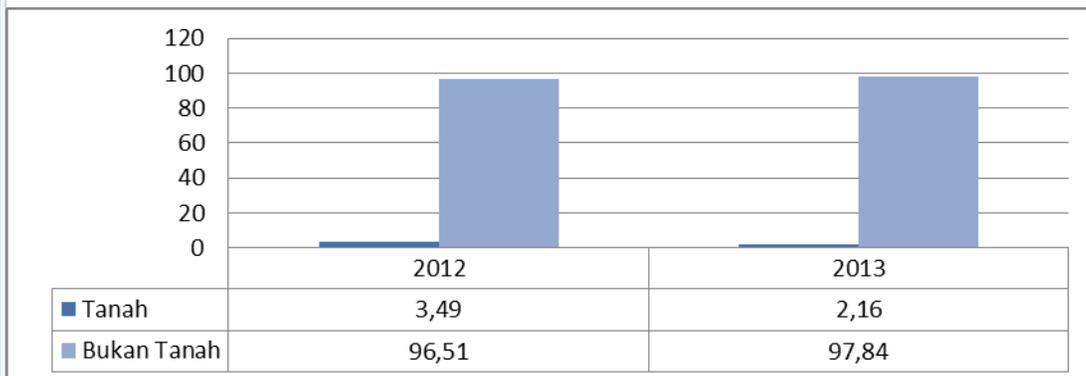


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

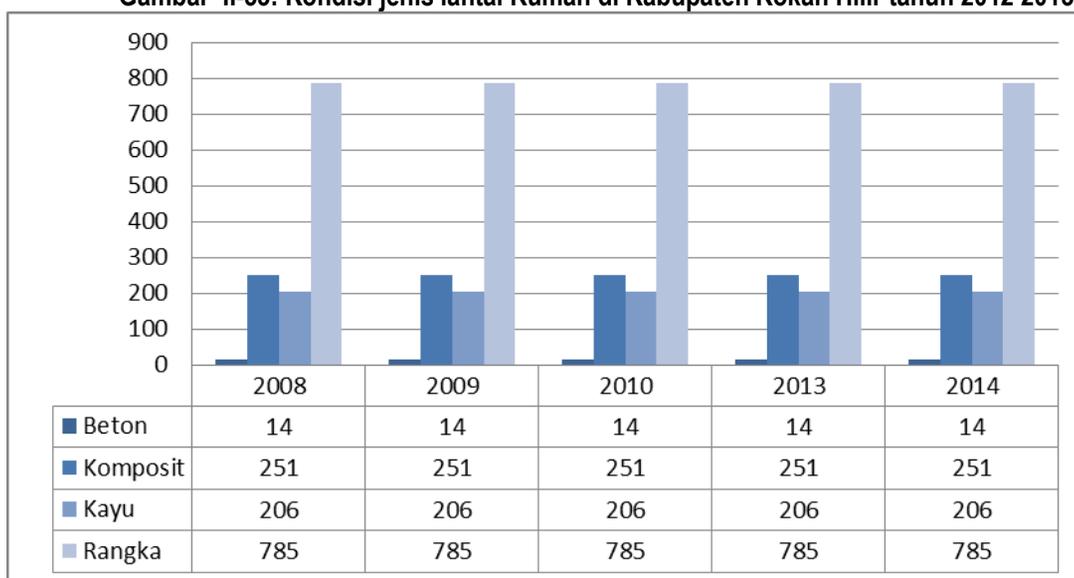
b) Panjang Jembatan

Keadaan Panjang jembatan di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari tahun 2008 – 2014 tidak mengalami perubahan. Dimana untuk jenis jembatannya terdiri dari beton, komposit, kayu dan rangka. Untuk jenis jalan beton sebesar 14 km, kopolit 251 km, kayu 206 km serta rangka sebesar 785 km.

Gambar 32: Panjang Jembatan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kontruksi pada tahun 2008-2014



Gambar II-33: Kondisi jenis lantai Rumah di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2012 2013



Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.1.4. Bidang Urusan Penataan Ruang

Menurut draft rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini dalam tahap proses pengesahan, dan Menunggu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sebagai acuan dalam dalam penalaah RTRW kabupaten Rokan Hilir.

2.3.1.5. Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.5.1. Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh manusia yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Kualitas perumahan dan fasilitas yang melengkapinya merupakan sarana penunjang yang mempengaruhi aspek lainnya seperti kesehatan dan pendidikan Karena itu penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat menjadi hal yang penting.

2.3.1.5.2. Rumah Layak Huni

Konsep rumah layak huni menurut Kementerian Perumahan Rakyat dilihat adalah kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah. Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana

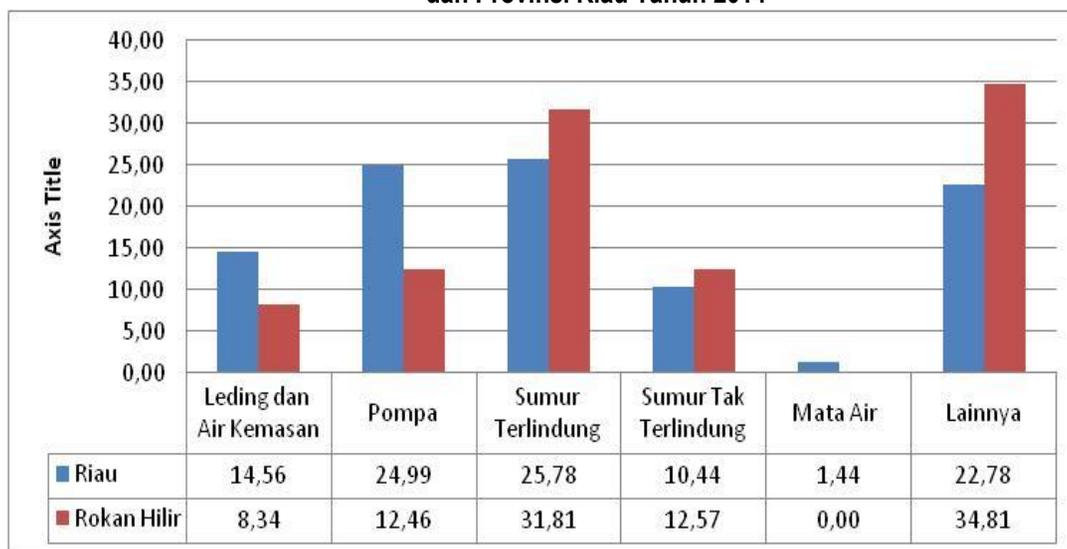
rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, dengan kriteria sebagai berikut (a) Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m² sedangkan untuk di desa kurang dari 10 m². (b) Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. (c) Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses. (d) Jenis lantai terbuat dari tanah dan (e) Tidak mempunyai fasilitas umum misalnya untuk kamar mandi atau MCK.

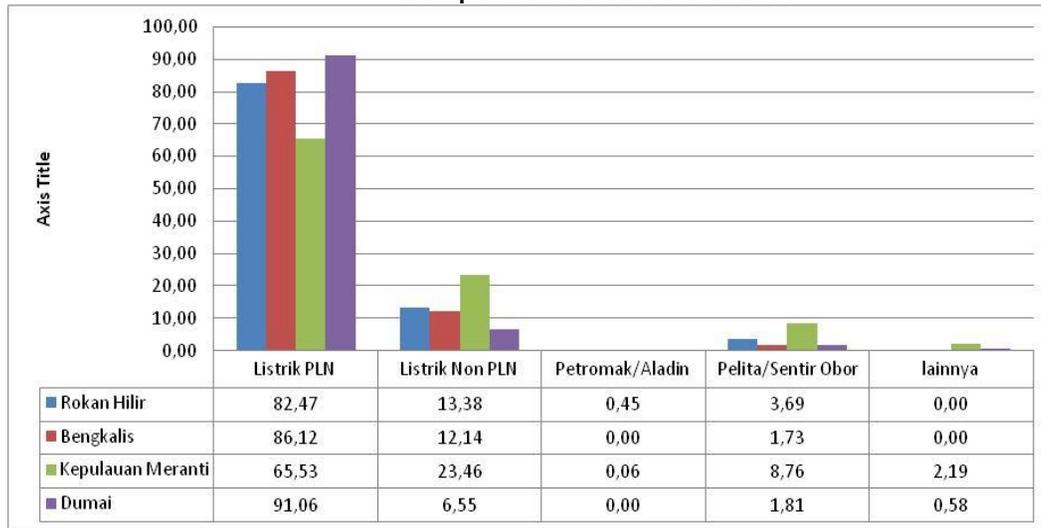
Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Dari gambar diatas diketahui bahwa keadaan lantai tanah lebih kecil jika dibandingkan dengan lantai rumah bukan tanah di Kabupaten Rokan Hilir. Dimana Pada tahun 2012 jumlah lantai rumah tanah yang ada yaitu sebesar 3,49 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,16 persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk lantai rumah bukan tanah, pada tahun 2012 sebesar 96,51 persen dan mengalami peningkatan menjadi 97,84 persen pada tahun 2013.

Untuk rata - rata luas lantai yang digunakan untuk setiap rumah tangga di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 adalah 57,05 meter persegi. Sedangkan untuk rata-rata luas lantai perkapita tercatat 12,71 meter persegi . Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan anggota rumah tangga yang menghuni rumah sudah baik dimana telah memenuhi batasan minimal kesehatan yaitu 8 meter persegi.

Gambar II-34: Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2014



Gambar II-35: Persentase Rumah Tangga Menurut Penerangan di Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014


Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

2.3.1.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan memerlukan kondisi yang kondusif dari aspek keamanan, ketertiban, tingkat kriminalitas. Agenda pembangunan ini termasuk dalam agenda aman dan damai. Tindak kriminalitas pada suatu wilayah atau daerah secara signifikan mengganggu aktivitas masyarakat dan pembangunan. Untuk itu, tingkat kriminalitas merupakan salah satu gambaran tentang kondisi daerah yang aman, tertib dan damai.

Tabel II-23: Banyaknya Kejahatan Dan Yang Diselesaikan Polres Rokan Hilir Tahun 2005-2012

Tahun	Jumlah Kriminalitas			Persentase
	Perkara	Diselesaikan	Sisa	
2005	395	228	167	57.72
2006	766	386	380	50.39
2007	729	382	347	52.4
2008	739	403	336	54.53
2009	752	351	401	46.68
2010	756	323	433	42.72
2011	763	249	514	32.63
2012	726	413	356	56.89
Jumlah	5626	2735	2934	393.96

Sumber: Rokan Hilir Dalam Angka 2015

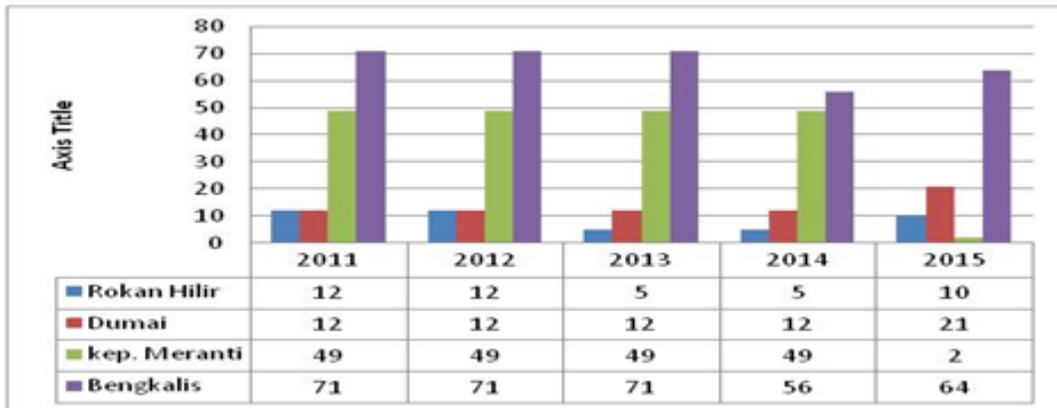
Gambaran data menunjukan jumlah persentase sisa kasus yang masih belum diselesaikan masih dalam kategori besar hal ini harus menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah kabupaten Rokan Hilir dalam menanggapi isu tersebut.

2.3.1.7. Urusan Sosial

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial pelayanan PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah (Permensos 129/HUK/2008). Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memprioritaskan enam urusan pelayanan dasar yang disebutkan pada pasal 12, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

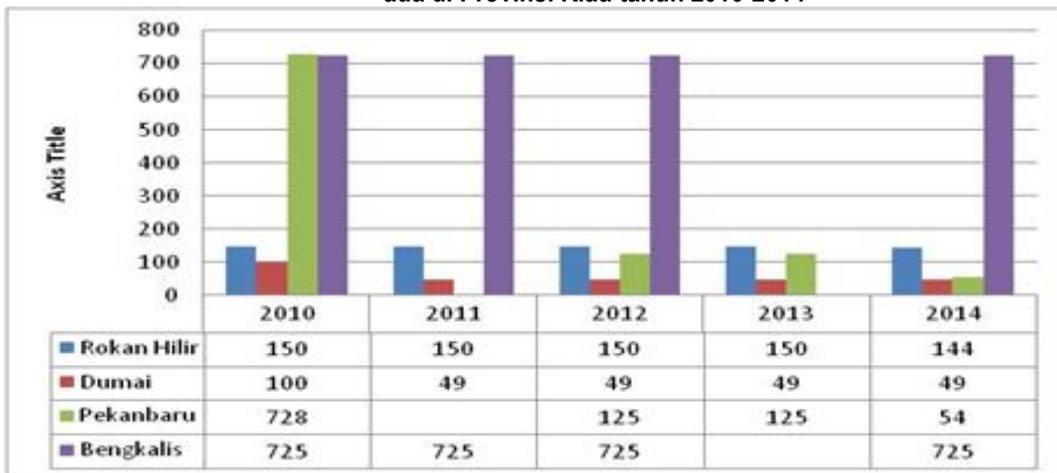
masyarakat dan sosial. Artinya, keenam program pelayanan dasar ini mendapat prioritas pembiayaan, SDM, sarana/prasarana dan manajemen sehingga dapat berjalan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015).

Gambar II-36: Jumlah Organisasi Sosial Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2011-2015

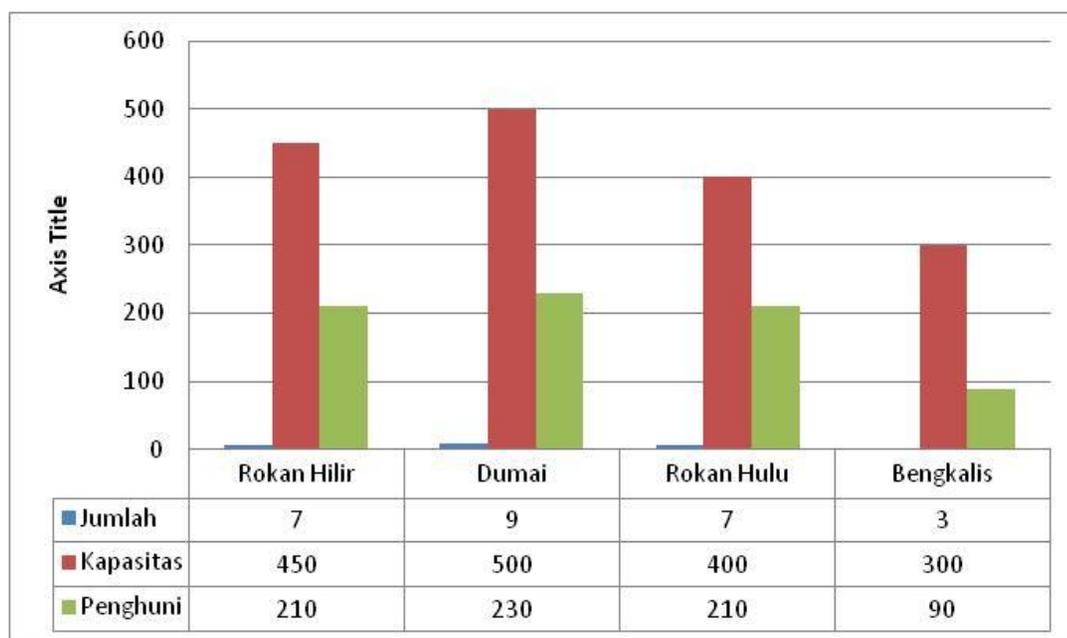


Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

Gambar II-37: Jumlah Wanita Tuna Asusila Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2010-2014



Gambar II-38: Jumlah Panti Sosial Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2014



2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Ketenaga Kerjaan

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi atau dalam kegiatan pembangunan. Sebagaimana sarana produksi lainnya, maka tenaga kerja lebih penting dari sarana lainnya karena tenaga kerjalah yang menggerakkan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja bersumber dari penduduk, tetapi tidak semua penduduk yang ada merupakan tenaga kerja. Hanya penduduk yang telah mencapai usia tertentu sebagai angkatan atau tenaga kerja yang potensial

2.3.2.1.1. Perkembangan Ketenagakerjaan

Tabel II-24: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2014

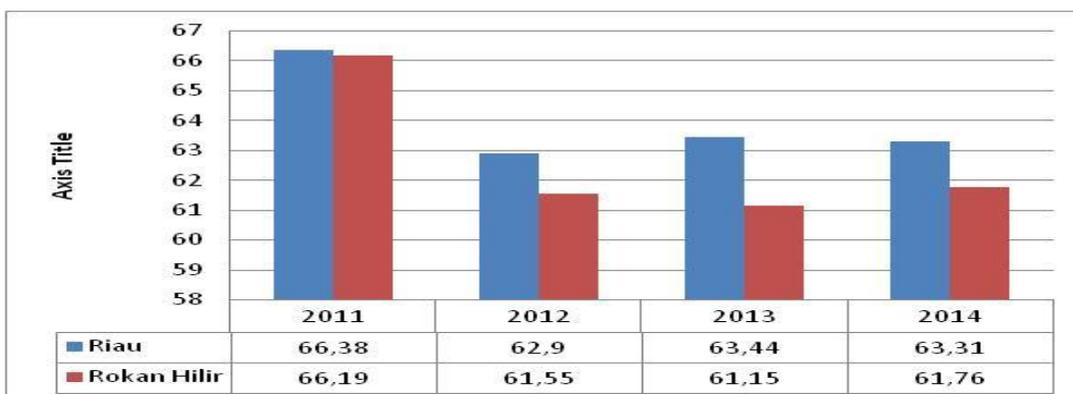
Uraian	2013	2014
Usia Kerja (jiwa)	396.687	396.687
Angkatan Kerja (%)	61,15	61,76
Bekerja (%)	57,46	57,46
Pengangguran (%)	6,04	6,04
Bukan Angkatan Kerja (%)	38,85	38,24
Sekolah (%)	11,63	11,63
Mengurus Rumah Tangga (%)	23,97	23,97
Lainnya (%)	3,25	3,25
TPT (%)	6,04	6,25
TPAK (%)	61,15	61,76

Berdasarkan statistik ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 sampai 2014 menunjukkan angka usia kerja termasuk tinggi di daerah ini dimana mencapai 396.687 jiwa dengan persentase angkatan kerja sebesar 61,15 persen pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 61,76 persen. Dimana tingkat pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir cukup rendah jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya yang hanya 6,04 persen. Sedangkan Jumlah penduduk yang bekerja itu sebesar 57,46 persen yang melebihi sebahagian jumlah penduduknya dimana sisanya terdiri atas penduduk yang sekolah sebesar 11,63 persen, Mengurus rumah tangga 23,97 persen dan lainnya sebesar 3,25 persen.

2.3.2.1.2. Perkembangan TPAK dan TPT

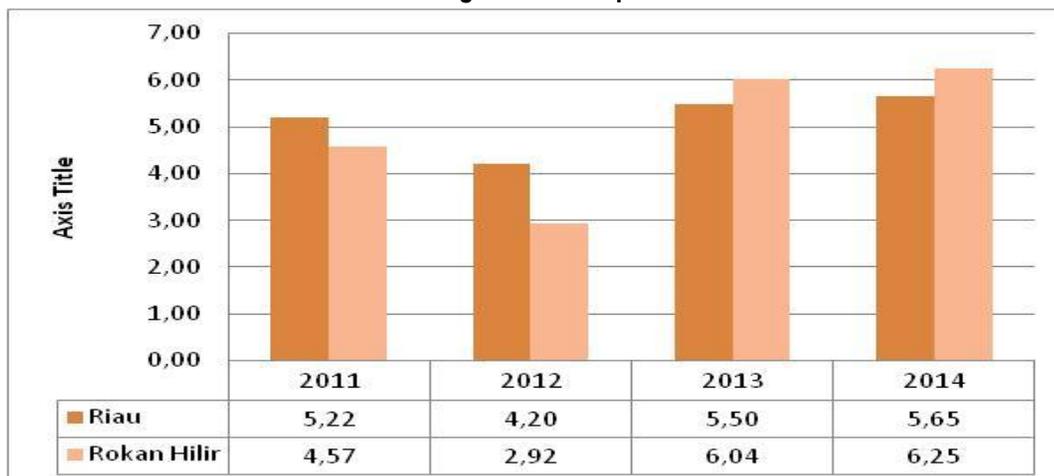
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Semakin tinggi TPAK berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun keatas ke dalam pasar kerja. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat bagaimana perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau dapat dilihat di garfik dibawah ini sebagai berikut:

Gambar II-39: Perkembangan TPAK kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2014



Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

Gambar II-40: Perkembangan TPT kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2014

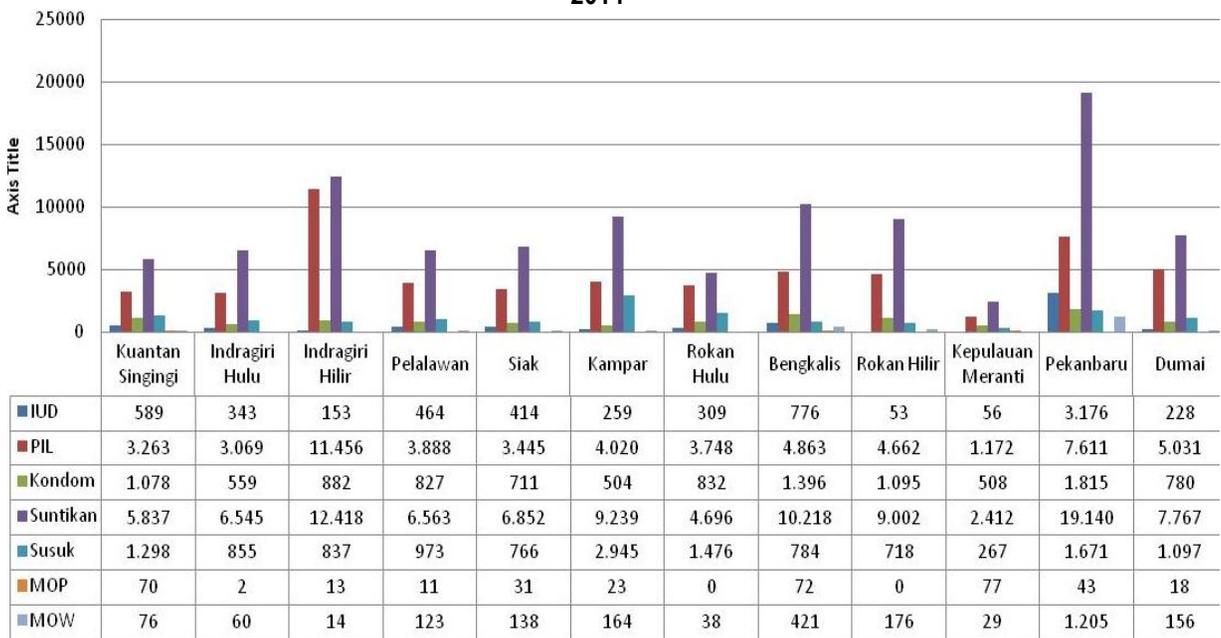


Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

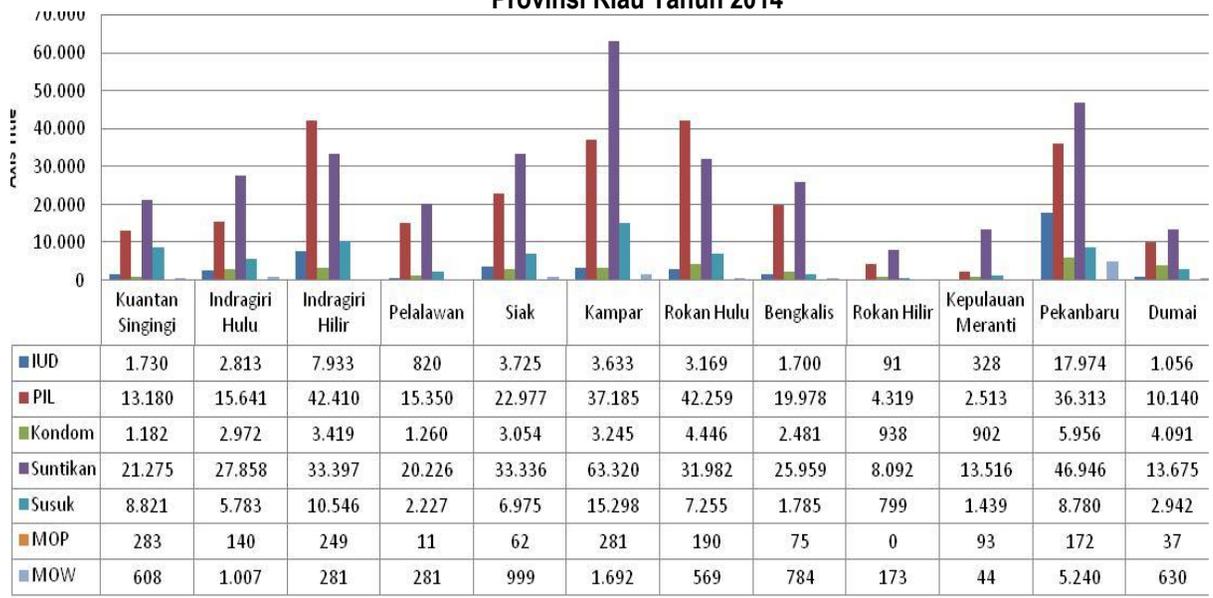
2.3.2.2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah berumur sangat lama yaitu pada tahun 70-an dan masyarakat dunia menganggap berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

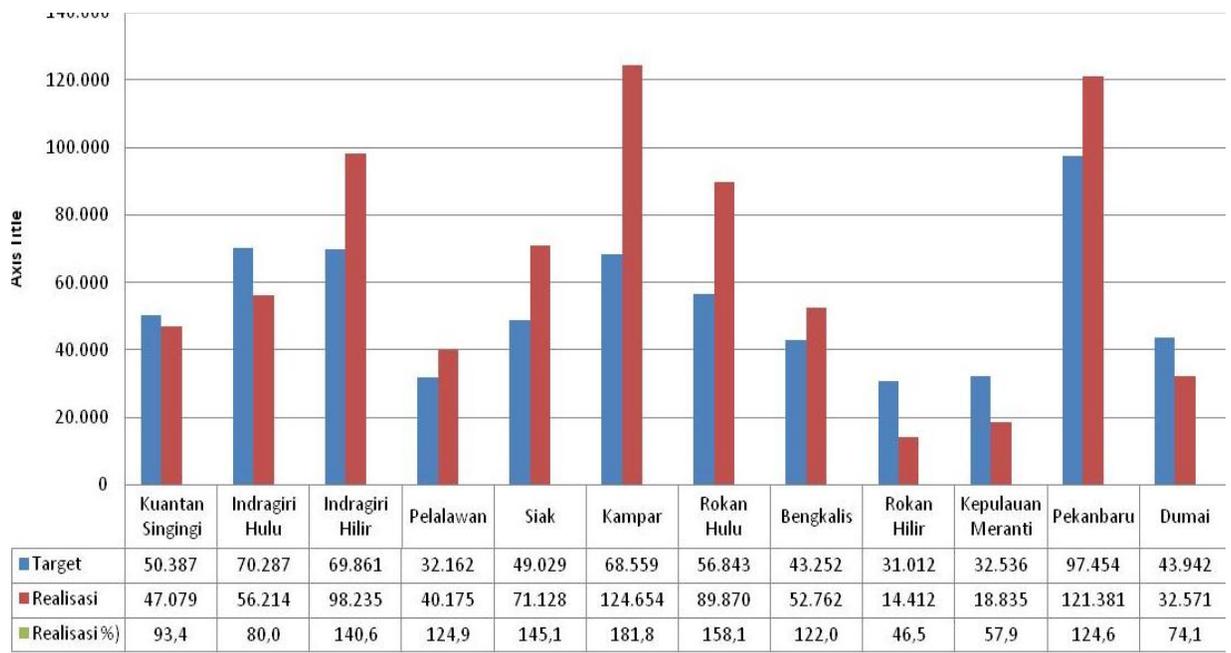
Gambar II-41: Jumlah Akseptor Baru KB Menurut Alat Pengguna Kontrasepsi Provinsi Riau 2014



Sumber: BPS, Provinisi Riau (2015)

Gambar II-42: Jumlah Akseptor Aktif KB menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014


Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

Gambar II-43: Target dan Realisasi Akseptor KB Aktif di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014


2.3.2.3. Urusan Lingkungan Hidup

- Penanganan sampah

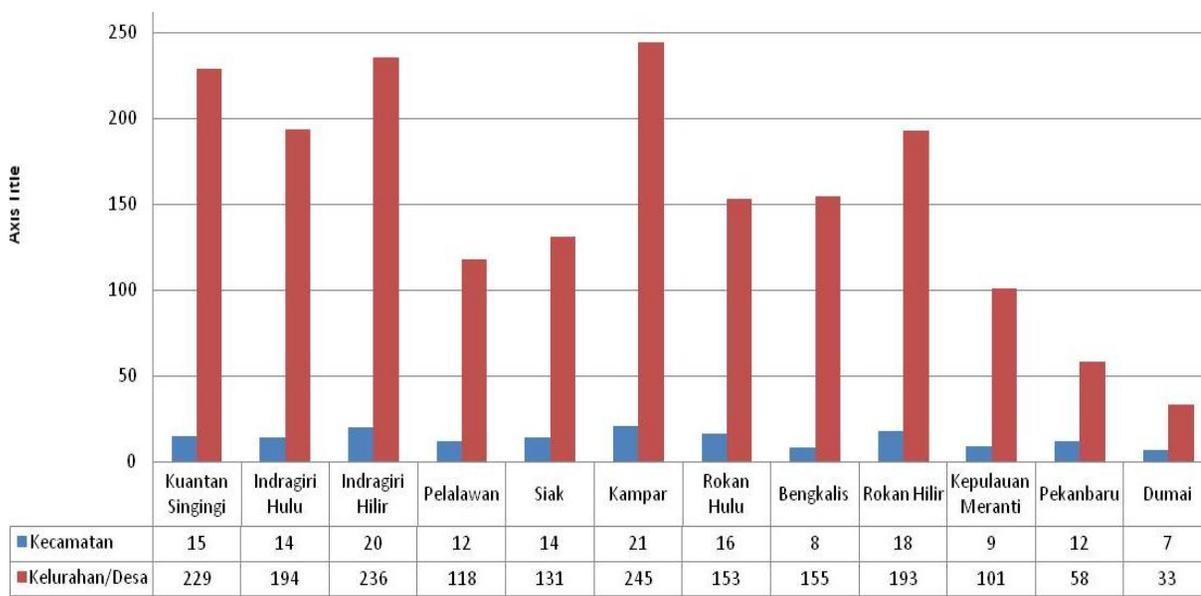
Untuk penanganan sampah pada Kabupaten Rokan Hilir masih jauh dari memadai dimana TPS yang tersedia saat ini hanya 2 unit dengan kapasitas daya tampung sebanyak 36 Ton sedangkan

produksi sampah untuk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun akhir tahun 2015 sebanyak 46.679 Ton per tahun

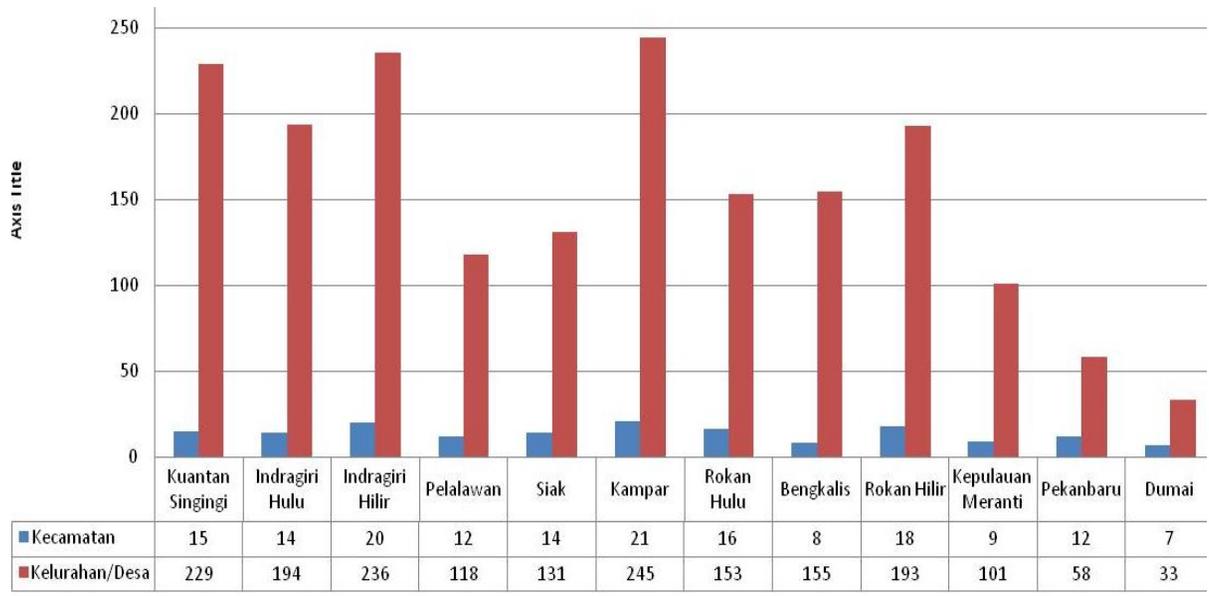
Tabel II-25: Kondisi Pengelolaan Sampah Kabupaten Rokan Hilir 2015

Sampah		
1. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah	2	Unit
2. Kapasitas Daya Tampung TPS	36	Ton
3. Tempat Pengolahan Akhir (TPA)	2	Unit
4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		Unit
5. Volume Produksi Sampah	46.679	Ton
6. Volume Sampah Yang Ditangani		Ton

Gambar II-44: Jumlah Kecamatan, kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014



Gambar II-45: Jumlah Kecamatan, kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014



2.3.2.4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

2.3.2.5. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah (i) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (ii) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, (iii) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, (iv) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (v) Kemandirian, (vi) Pendidikan perkoperasian dan (vii) Kerjasama antar koperasi. Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012 yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut (i) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), (iii) Milik Warga Negara Indonesia, (iv) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar dan (v) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

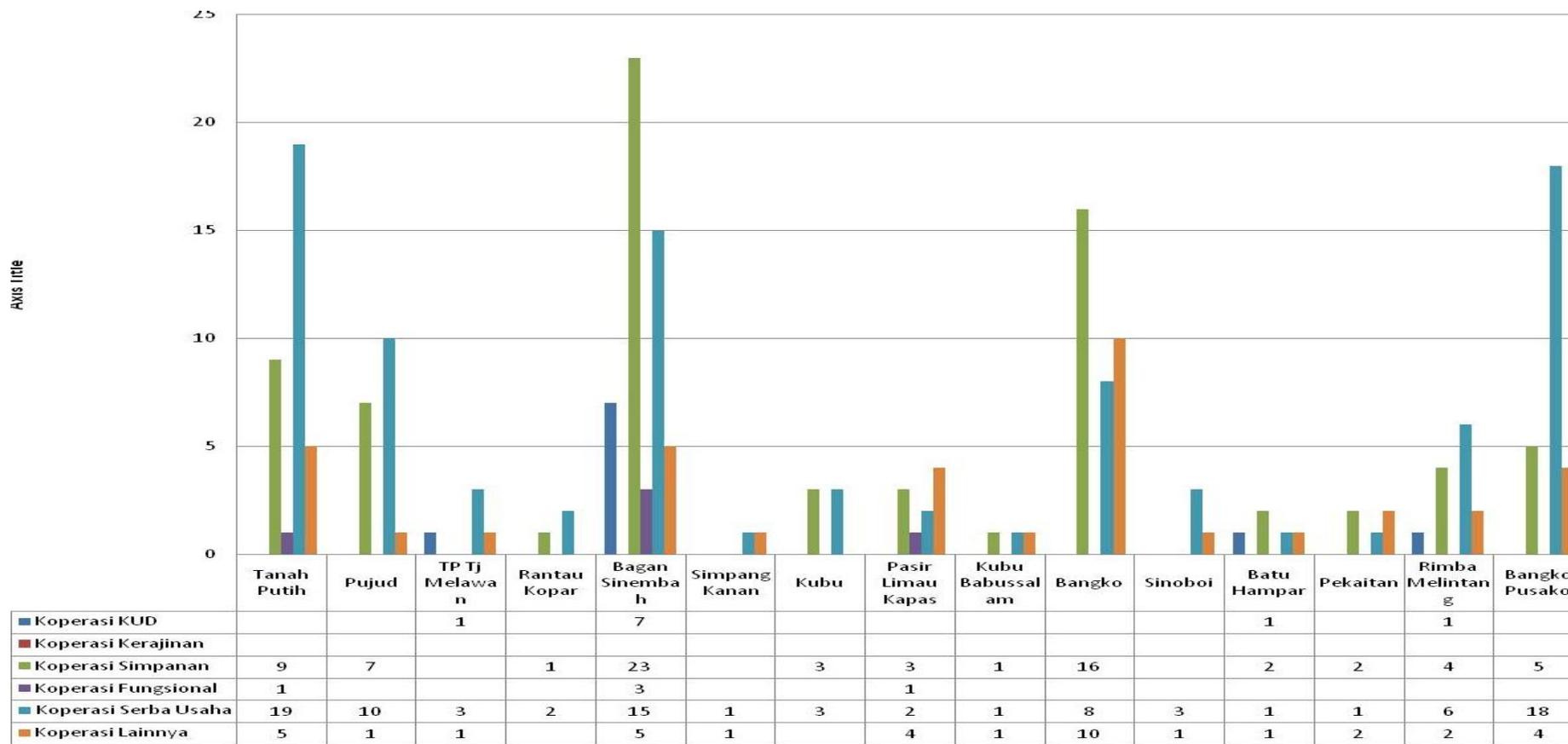
2.2.1.14.1. Perkembangan Koperasi

Pada tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 222 unit koperasi yang terdiri dari 10 KUD, 76 Koperasi Simpan Pinjam, 5 koperasi fungsional, 93 koperasi serba usaha dan 38 koperasi lainnya. Dilihat dari penyebarannya, sebanyak 53 unit koperasi di Kecamatan Bagan Sinembah, 34 unit koperasi di Kecamatan Bangko, Kubu 6 unit koperasi, 34 unit koperasi di Kecamatan Tanah Putih dan 18 unit koperasi di Kecamatan Pujud. Dari sejumlah koperasi yang ada, terdapat 18.443 anggota yang terdiri dari 1.809 anggota KUD, 9.805 anggota koperasi Simpan Pinjam, 601 anggota koperasi fungsional, 5.416 anggota koperasi serba usaha dan 812 anggota koperasi lainnya. Kecamatan Bagan Sinembah dengan 53 unit koperasi memiliki 11.077 orang anggota. Sedangkan untuk Kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko Pusako, dan Pujud sesuai dengan banyaknya koperasi masing-masing 34, 34, 27 dan 18 unit koperasi memiliki jumlah anggota perkecamatan sebanyak 1.142, 1.377, 694 dan 375 orang.

Simpanan koperasi pada tahun 2014 sebanyak Rp. 3,37 milyar terdiri dari Rp. 105,59 juta simpanan KUD, Rp. 93,42 juta simpanan koperasi fungsional, Rp. 458,51 juta simpanan koperasi serba usaha dan Rp. 89,2 juta simpanan koperasi lainnya. Sebagian besar simpanan koperasi di Kabupaten Rokan Hilir berasal dari Koperasi di Bagan Sinembah yaitu sebanyak Rp. 2,64 milyar (78,33 persen). Sedangkan untuk Kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pujud hanya mempunyai simpanan koperasi sebesar Rp. 362,1 juta (10,72 persen), Rp. 132,2 juta (3,91 persen), Rp. 7,53 juta (0,02 persen) dan Rp. 13,97 juta (0,42) untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Grafik dibawah ini sebagai berikut:



Gambar II-46 : Banyaknya Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

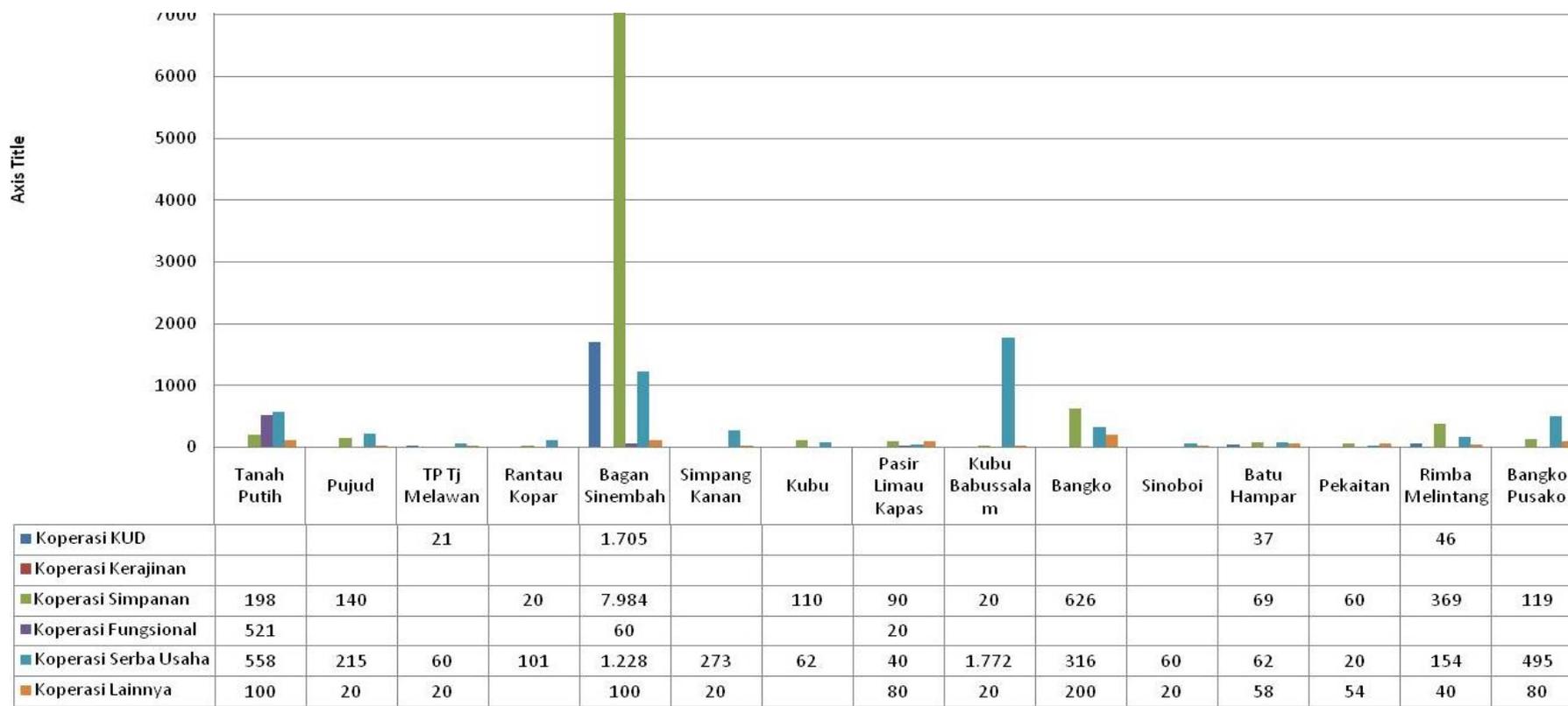


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)





Gambar II-47 Banyaknya Anggota Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

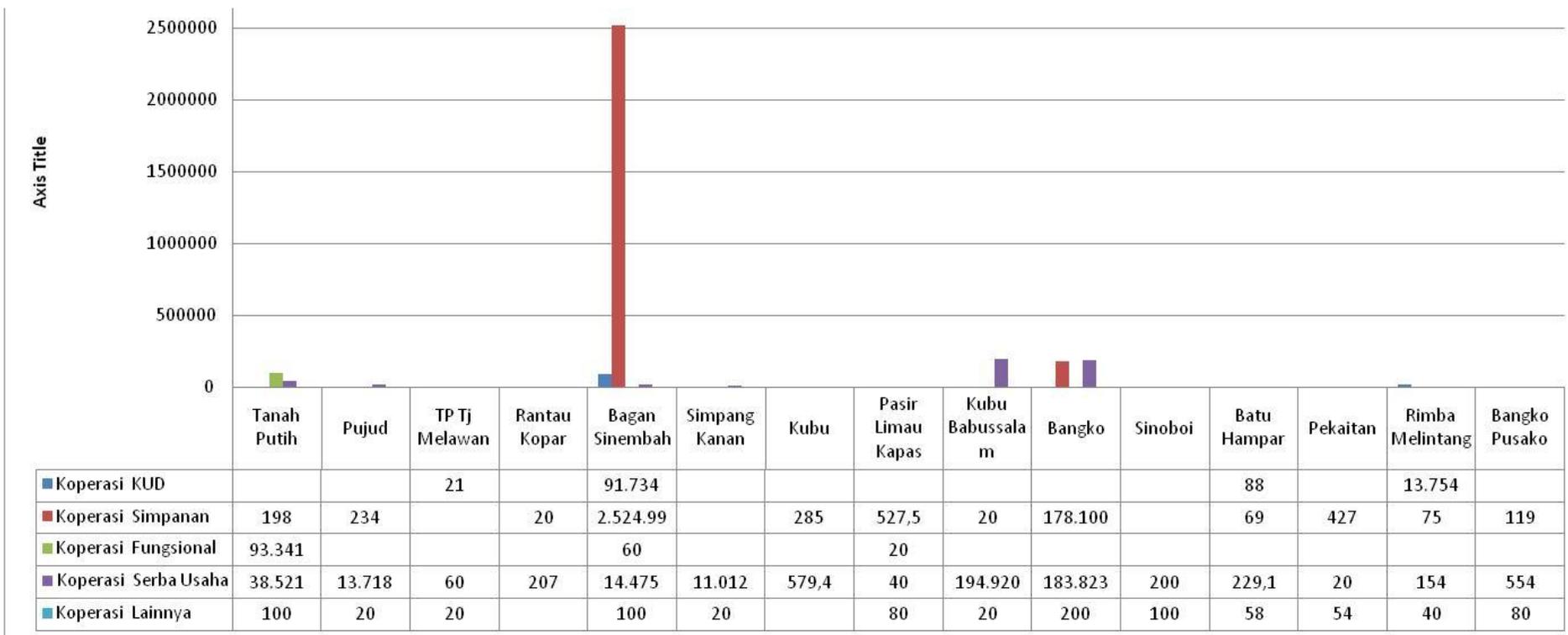


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)





Gambar II-48: Banyaknya Simpanan Anggota Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 (Ribu Rp)



Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

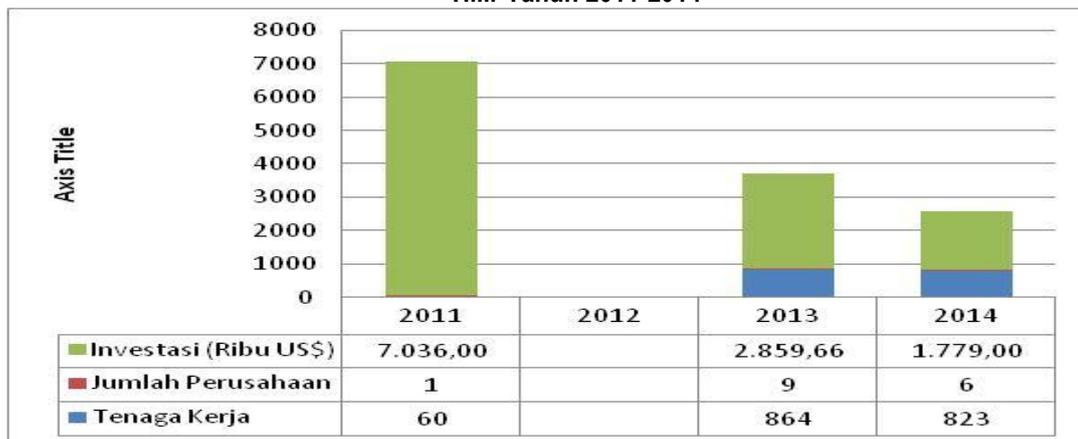


2.3.2.6. Urusan Penanaman Modal

- PMA (Penanaman Modal Asing)

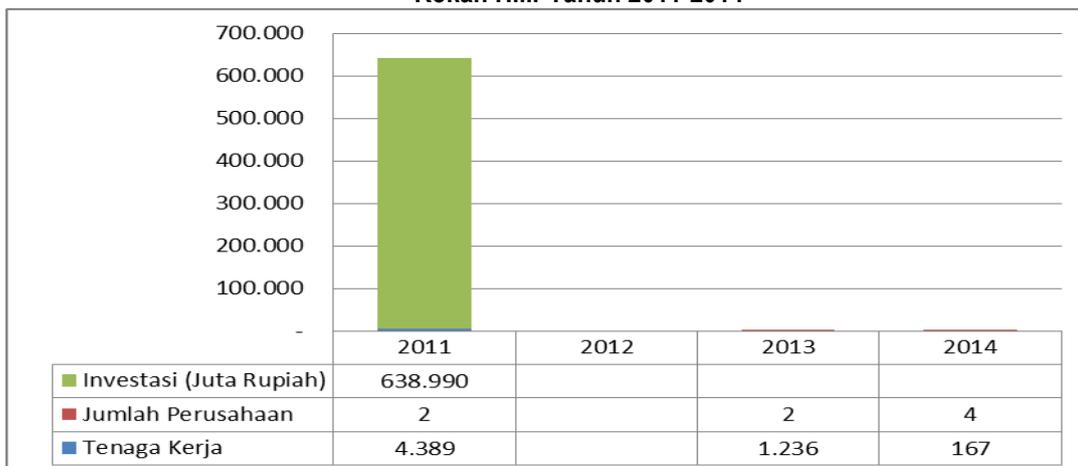
Selama periode 2011-2014 jumlah investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten Rokan Hilir cenderung mengalami penurunan. Tetapi jumlah perusahaan dan tenaga kerja akibat dari penanaman modal asing mengalami kenaikan dari tahun 2011-2013. Pada tahun 2012 Penanaman Modal Asing tidak ada di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan investasi penanaman modal asing dapat dilihat di gambar di bawah ini sebagai berikut:

Gambar II-49: Jumlah Investasi PMA, Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2014



Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

Gambar II-50: Jumlah Investasi PMDN , Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2014



Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

2.3.2.7. Urusan Kebudayaan

Tabel II-26: Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 S/D 2016

NO	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	JUMLAH GROUP KESENIAN	11 GROUP	19 GROUP	24 GROUP	31 GROUP	36 GROUP	41 GROUP
2.	JUMLAH GEDUNG KESENIAN	1 UNIT					

Gambaran untuk pengiat seni khususnya group gambus terdapat pada Kecamatan bangko, bangko pusako, tanah putih sidinginan, tanah putih tj. Melawan, kubu, bagan sinembah, untuk Group Rebbana terdapat pada 18 Kecamatan, untuk Sanggar Seni Tari dan Musik 6 Kec.: bangko, kubu, tanah putih sediginan, bagan sinembah, bangko pusako, pasir limau kapas. Sedangkan untuk seni teater terdapat 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bangko dan Kecamatan Bangko Pusako.

2.3.2.8. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri

Perkembangan Kelembagaan swadaya masyarakat dapat dilihat pada Tabel II-27 dan tingkat partisipasi politik partai, lembaga dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel II-28.

Tabel II-27: Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Pada Tahun 2016

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *		
1. Jumlah LSM Lokal **	135	Buah
1). LSM Lokal Terdaftar	63	Buah
2). LSM Lokal Tidak Aktif	72	Buah
2. Jumlah LSM Nasional **	7	Buah
1). LSM Nasional Terdaftar	7	Buah
2). LSM Nasional Tidak Aktif	0	Buah

Tabel II-28: Jumlah Partai Politik Dan Tingkat Partisiapsi Politik Masyarakat

Partai Politik *		
1. Jumlah Parpol Daerah	12	Partai
2. Jumlah Parpol Peserta Pemilu	12	Partai
Karakteristik Politik Masyarakat *		
1. Jumlah Pemilih	399.957	Orang
Tingkat Partisipasi Pemilih *		
1. Jumlah Pemilih	242.947	Orang
Organisasi Kemasyarakatan *		
1. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi	19	Buah
2. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama	1	Buah

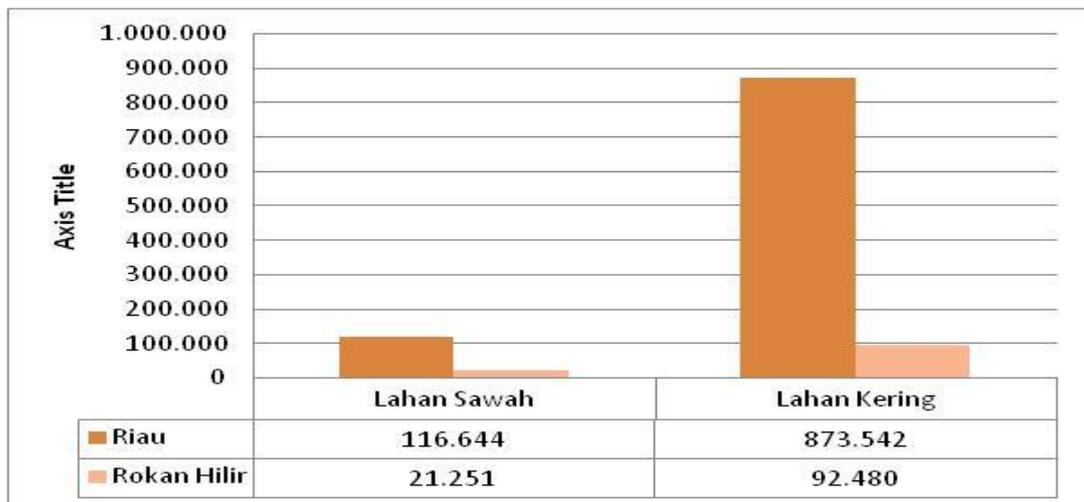
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran III, dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Berturut-turut berbagai indikator urusan pilihan pemerintahan dijelaskan pada bagian berikut ini.

2.3.3.1. Urusan Pertanian

Pertanian berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia sebagai bahan makan sumber energi, protein dan lemak. Selain untuk konsumsi, kelebihan produksi produk-produk pertanian dapat dijual kepada pihak lain sebagai sumber pendapatan petani. Pertanian dalam arti luas mengandung makna berbagai macam produk pertanian dapat dikelompokkan menjadi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Gambar II-51: Luas Lahan Sawah dan lahan Kering di Kabupaten Rokan Hilir 2014



Sumber: BPS, Provinsi riau (2015)

Sebagai media tanam untuk menghasilkan produk-produk pertanian, faktor produksi yang paling utama adalah ketersediaan lahan. Di Kabupaten Rokan Hilir, lahan dapat dibagi

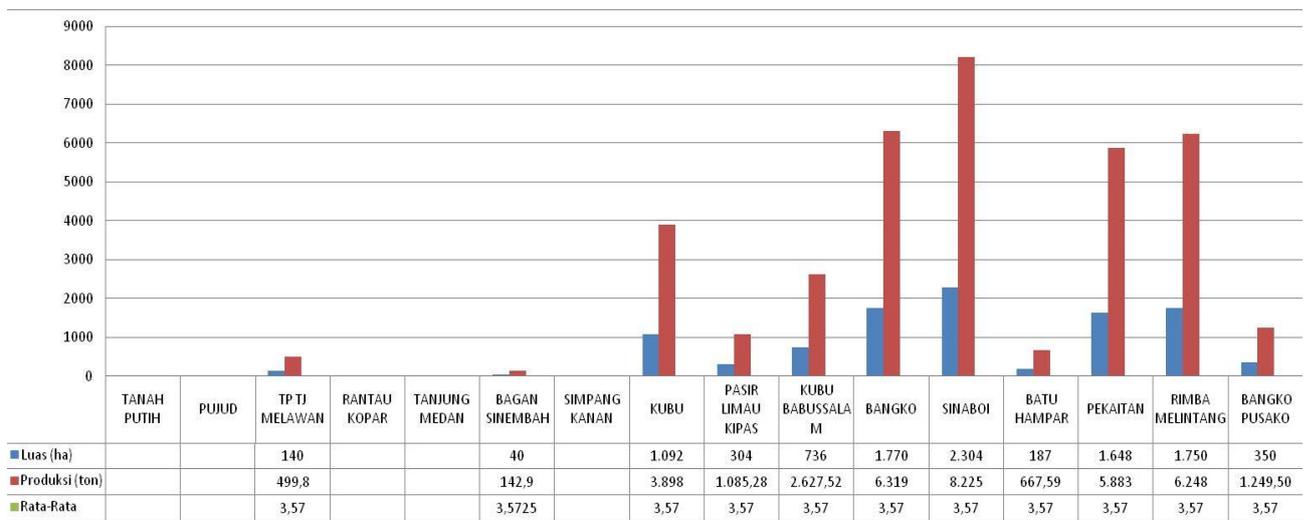
menjadi lahan sawah dan lahan kering. Luas lahan kering pada tahun 2014 adalah sebesar 92.480 ha dan luas lahan sawah sebesar 21.251. luas lahan kering lebih di Kabupaten Rokan Hilir lebih besar jika di dibandingkan dengan luas lahan sawah. Ketahanan pangan menjadi salah satu program unggulan dan program prioritas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Ketahanan pangan secara eksplisit dinyatakan dalam “Nawacita Jokowi-JK”, selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Program ketahanan pangan saat ini tidak lagi terfokus pada ketahanan pangan, namun telah meningkat menjadi program kemandirian pangan, dan pada masa mendatang akan meningkat menjadi program kedaulatan pangan.

2.3.3.1.1. Pertanian Tanaman Pangan

Data tanaman pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur sayuran dan buah-buahan yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir. Selama periode 2014 luas panen tanaman padi adalah 10,321 hektar (ha), yang terdiri dari padi sawah 10.321 ha dan padi ladang 0 ha. Sedangkan produksinya 36.845,97 ton yang terdiri dari padi sawah 36.845,97 ton dan padi ladang 0,00 ton. Sedangkan luas panen tanaman pangan lainnya hanya 10,93 persen dari total luas panen tanaman pangan yaitu 11.588,00 ha dengan produksi 36.845,97 ton. Luas panen tanaman sayursayuran adalah 781 ha dengan produksi 1.570,00 ton, sedangkan produksi tanaman buah-buahan sebesar 13.241,00 ton.

- Padi Sawah

Gambar II-52 Luas dan Produksi Padi Sawah Berdasarkan Kecamatan di Kabupten Rokan Hilir 2014



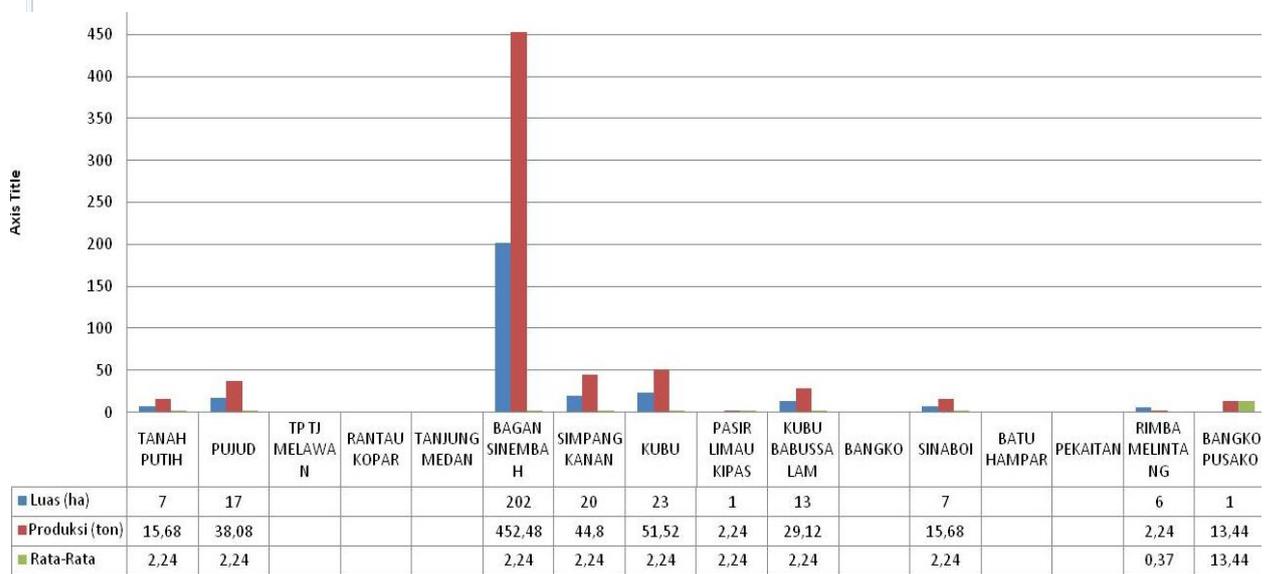
Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Seluas 10.321 (ha) lahan padi sawah di kabupaten Rokan Hilir tersebar di setiap kecamatan yang ada terkecuali kecamatan Tanah Putih, Pujud, rantau Kopar, Tanjung Medan dan

Simpang kanan. Dimana wilayah yang memiliki lahan padi sawah terbesar adalah Kecamatan Sinoboi yaitu seluas 2.304 dengan Produksi 8.225 ton serta Kecamatan Rimba Melintang yang memiliki luas sebesar 1.750 ha dengan total produksi 6.248 ton. Dengan rata-rata Produksinya yaitu sebanyak 3,57 ton per hektar nya untuk disetiap daerah yang memiliki lahan padi sawah.

- Jagung

Gambar II-53: Luas dan Produksi jagung Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014.

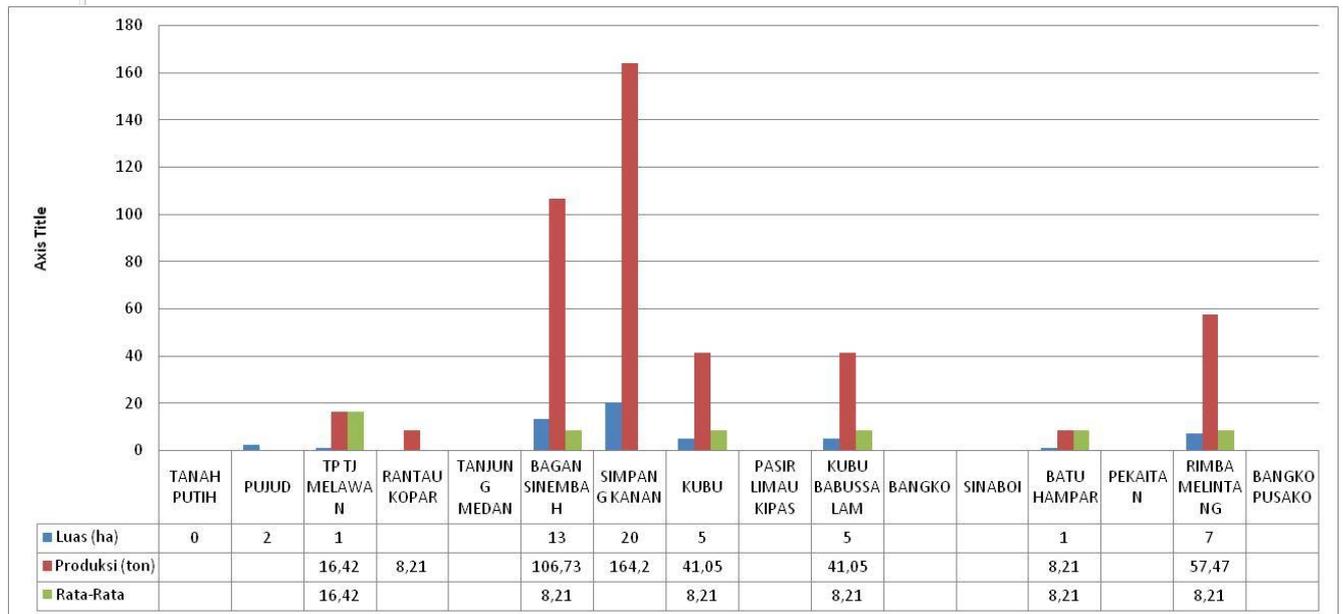


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Luas tananaman Jagung yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah 297 (ha) yang tersebar disetiap Kecamatan yang ada terkecuali Kecamatan Tanjung Melawan, Rantau Kopar, Tanjung Medan, Bangko, batu hampar, Serta Kecamatan Pekaitan. Sektor Basis jagung yang ada di Kabuapten Rokan Hilir adalah Kecamatan Bagan Sinembah sebesar 202 (ha) atau sebsar 68 persen dari total luas tananaman jagung di Kabupaten Rokan Hilir dengan Total Produksinya 452,48 ton.

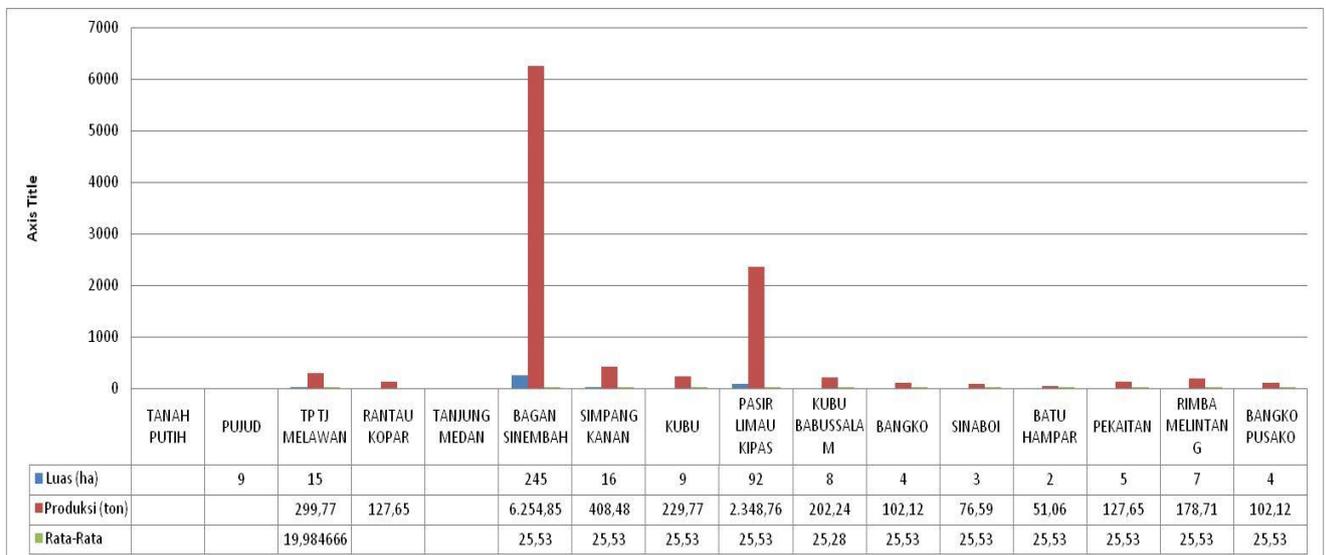
- Ketela Pohon

Gambar II-54: Luas dan Produksi Ketela Pohon di Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Gambar II-55: Luas dan Produksi Ketela Rambat Di Kabupaten Rokan Hilir 2014



Di Kabupaten Rokan Hilir ketela pohon merata di setiap kecamatan, hanya kecamatan Tanah Putih, Rantau Kopar dan Tanjung Medan yang tidak memiliki. Luasnya adalah 409 (ha) dengan Total produksi sebesar 10.442 (ton). Kecamatan yang menjadi sentral ketela pohon di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan bagan Sinembah yang memiliki lahan



seluas 245 (ha) dengan total Produksi 6.254,85 (ton) setiap tahunnya atau penyumbang ketela pohon sebesar 60 persen dari total keseluruhan ketela pohon yang ada.

- Ketela Rambat

Luas tananaman Ketela Rambat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah 54 (ha) dengan total Produksinya sebesar 443,43 (ton). Sektor Basis Ketela Rambat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Simpang Kanan sebesar 20 (ha) atau sebesar 37 persen dari total luas tananaman Ketela rambat di Kabupaten Rokan Hilir dengan total produksinya 164,2 ton.

- Kacang Tanah

Luas tananaman Kacang tanah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah 30 (ha) dengan total Produksinya sebesar 27,6 (ton). Sektor Basis Ketela Rambat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Simpang Kanan sebesar 17 (ha) atau sebesar 57 persen dari total luas tananaman Kacang tanah di Kabupaten Rokan Hilir dengan total produksinya 15,64 ton.

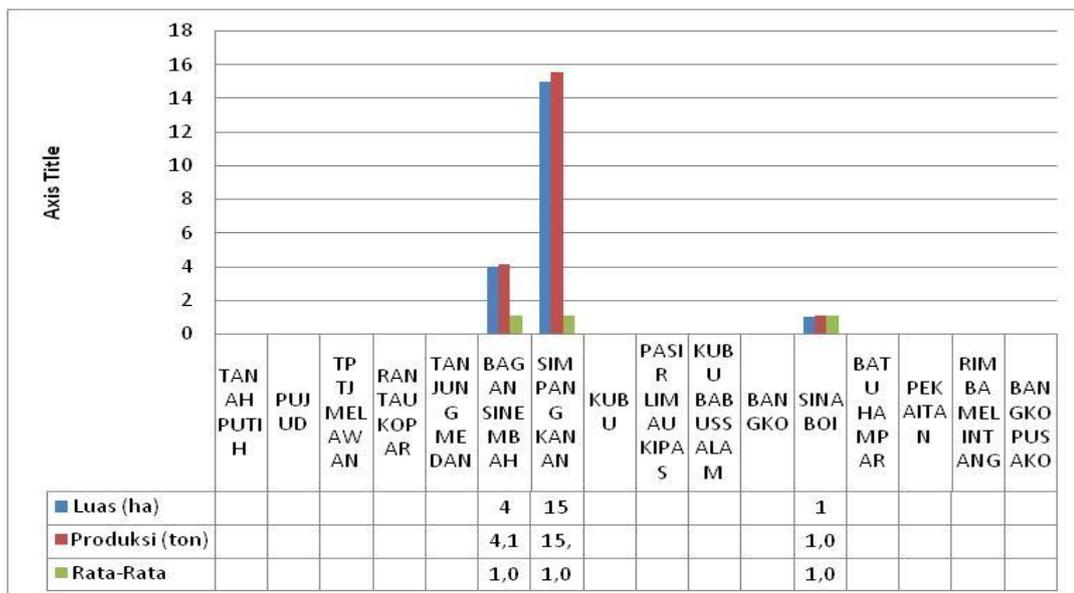
- Kacang Kedelai

Di Kabupaten Rokan Hilir Kacang Kedelai hanya dimiliki oleh beberapa kecamatan saja . Luasnya adalah 457(ha) dengan Total produksi sebesar 520,98 (ton). Kecamatan yang menjadi sentral Kacang Kedelai di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Pekaitan yang memiliki lahan seluas 401 (ha) dengan total Produksi 457,14 (ton) setiap tahunnya atau penyumbang Kacang Kedelai sebesar 88 persen dari total keseluruhan Kacang Kedelai yang ada.

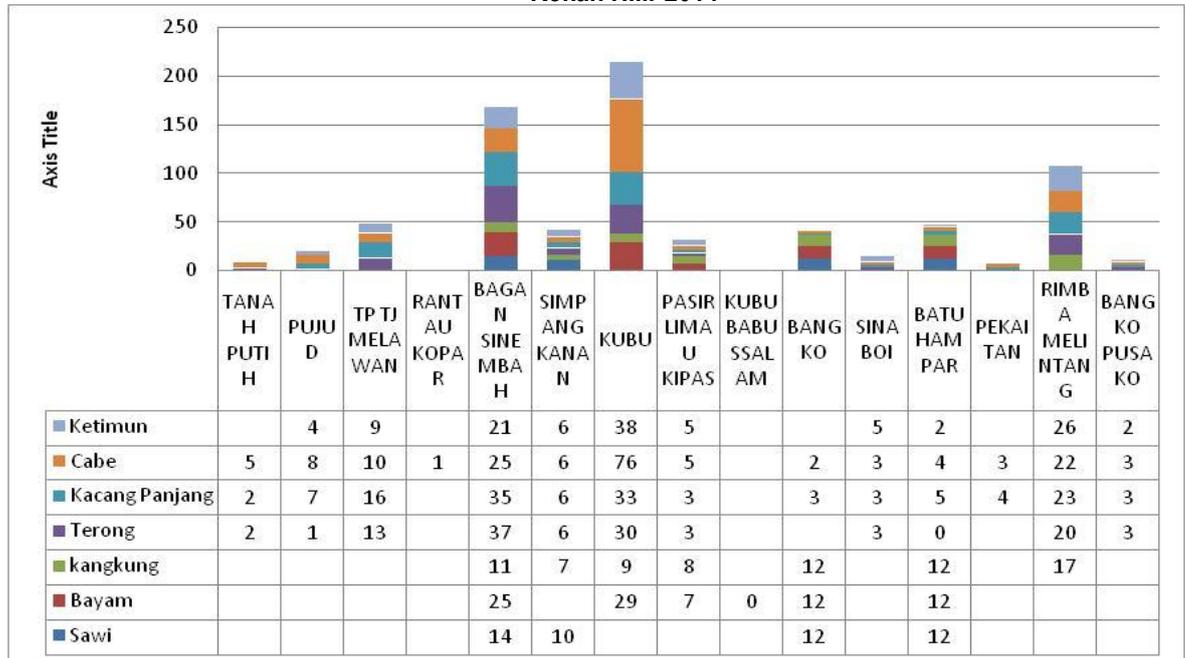
- Kacang Hijau

Tanaman Kacang Hijau di Kabupaten Rokan Hilir hanya terdapat di tiga kecamatan saja yaitu kecamatan Bagan Sinembah, Simpang Kanan serta Sinoboi. Total Luas Tanaman Kacang Hijau adalah sebesar 30 (ha) dengan Total Produksi sebesar 20,8 (ton). Dimana daerah yang menjadi sentral Kacang Hijau di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Simpang kanan memiliki luas setengah dari luas keseluruhannya dengan total Produksi 15,6 (ton) atau sebesar 75 persen total Kacang tanah keseluruhan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar II-56: Luas (ha) dan Produksi (ton) Tanaman Kacang Kedelai Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir 2014



Gambar II-57: Luas Panen Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Jenis Tanaman (Ha) Kabupaten Rokan Hilir 2014

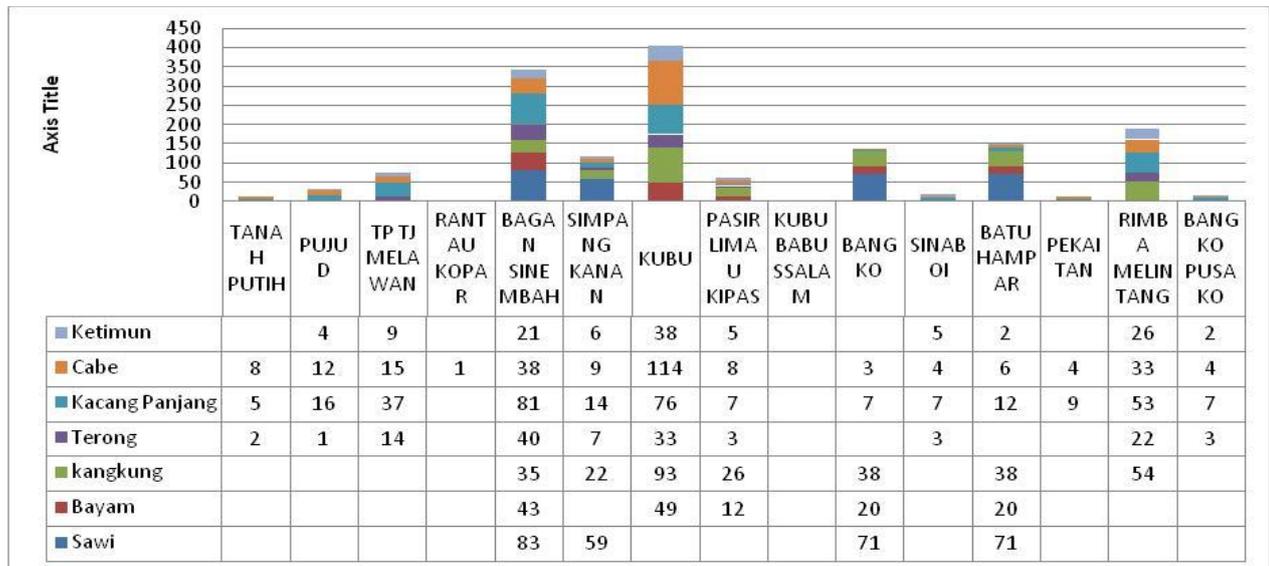


- Sayur Sayuran

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Luas tanaman sayu-sayuran di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah sebesar 761(ha) dengan total produksi sebesar 1.570 ton dengan rata-rata produksi sebesar 2,1 (ton) perhektarnya. Jenis tanaman sayur-sayuran ini terdiri dari sawi, bayam, kangkung, terong, kacang panjang , cabe dan ketimun.

Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Rokan Hilir untuk sawi sebesar 284 ton, bayam 144 ton, Kangkung 306, terong 128 ton, Kacang panjang 331 ton, cabe 259 ton dan ketimun sebesar 118 ton. Dengan luas masing-masing jenis tananman sayur-sayuran adalah sawi 48 ha, bayam 85 ha, kangkung 76 ha, terong 118 ha, kacang panjang, 143 ha, cabe 173 ha dan ketimun sebesar 118 ha. Untuk Lebih Jekasnya dapat dilihat di gambar dibawah ini sebagai berikut:

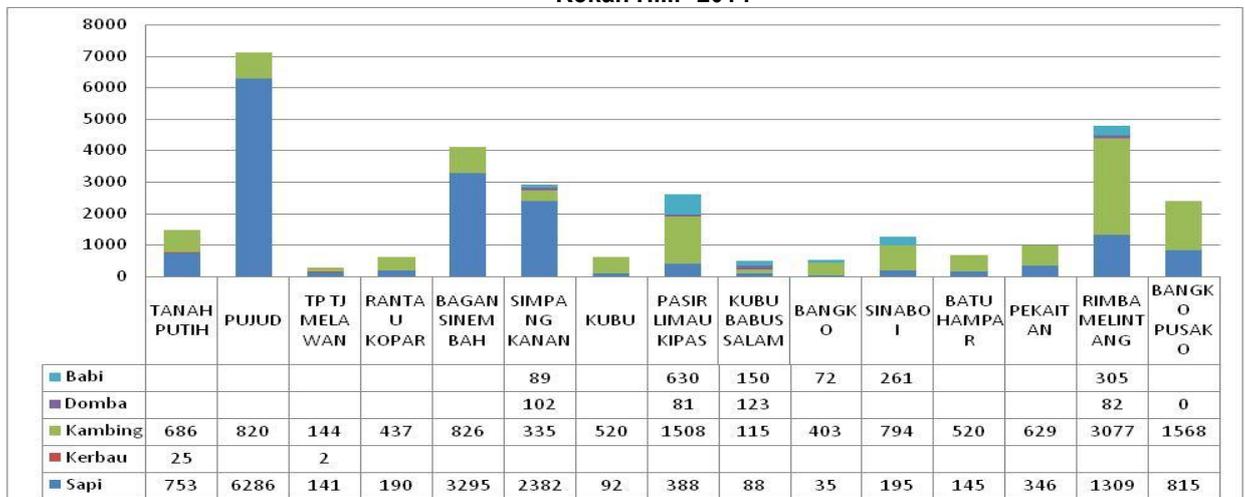
Gambar II-59: Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Jenis Tanaman (Ton)


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.3.2. Peternakan

Pembangunan subsektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Populasi ternak di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tercatat: sapi 16.460 ekor, kerbau 30 ekor, kambing/domba 12.770 ekor dan babi 1.507 ekor.

Informasi lain yang diperoleh Dinas Peternakan adalah jumlah ternak yang dipotong. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 2.651 ekor sapi, 32 ekor kerbau, 1.037 ekor kambing/domba.

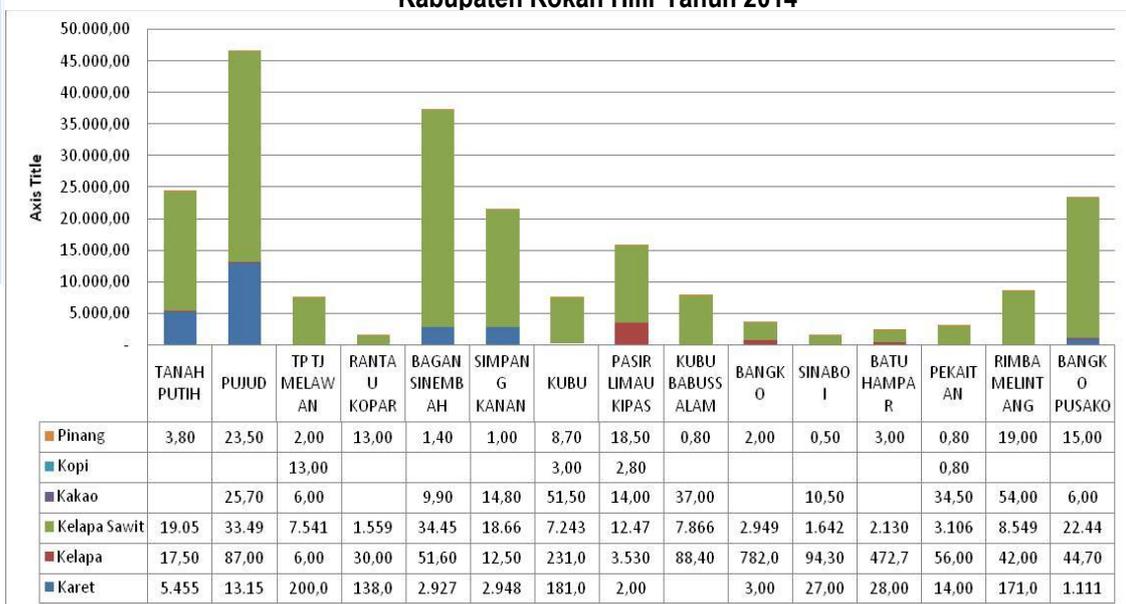
Gambar II-59: Banyak Ternak yang dipotong Menurut jenisnya dan Kecamatan (Ekor) Di Kabupaten Rokan Hilir 2014


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.3.3. Perkebunan

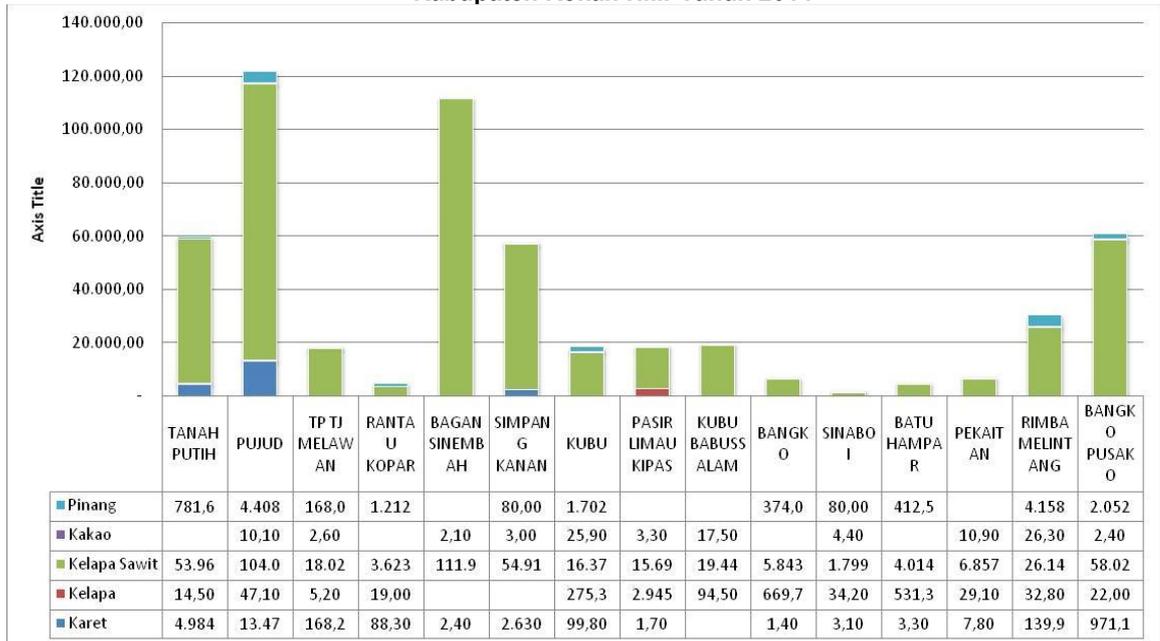
Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini ialah kelapa sawit, karet dan kelapa. Pada tahun 2014 luas areal perkebunan adalah 215.471,9 ha yang terdiri dari 26.359,50 ha Karet, 5.545,7 ha kelapa, 183.170,20 ha kelapa sawit, 263,90 ha kakao, 1,60 ha kopi dan 113 ha pinang. Untuk lebih jelasnya penyebaran berdasarkan kecamatan dapat dilihat di gambar dibawah ini sebagai berikut:

Gambar II-60: Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman(ha) dan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014



Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

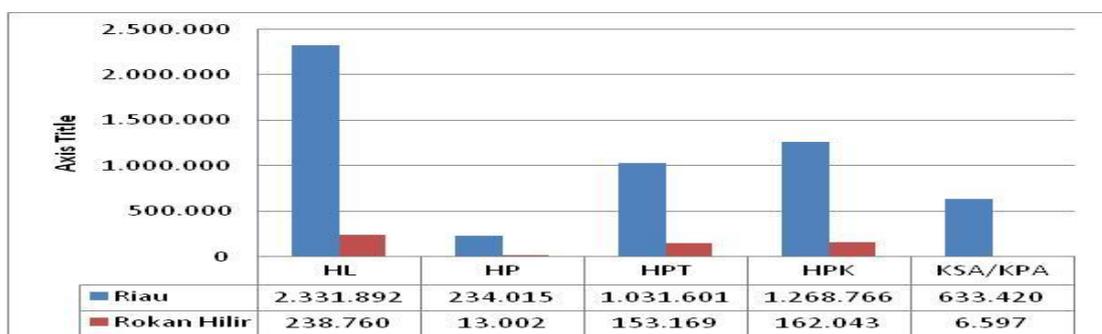
Sedangkan untuk total produksi tanaman perkebunan di kabupaten Rokan Hilir sebesar 543.554,5 ton. Dimana 92 persen dari total produksi perkebunan adalah komoditi kelapa sawit yaitu sebesar 500.723 ton, karet 22.574 ton, kelapa 4.719,8 ton, kakao 108,5 ton serta pinang sebesar 15.429,20 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini bagaimana total produksi perkebunan yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Gambar II-61: Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (ton) dan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.3.4. Urusan Kehutanan

Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Luas Hutan di Kabupaten Rokan Hilir 2014 adalah 573.571 ha. Bila dirinci menurut fungsinya seluas 238.760 merupakan hutan lindung, 6.597 ha hutan suaka alam, 13.002 ha hutan produksi, 153.169 ha hutan produksi terbatas dan 162.043 ha hutan produksi yang dapat di konservasi.

Gambar II-62: Luas Hutan Menurut Fungsi Hutan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014


Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

Keterangan :

HL : Hutan Lindung

HP : Hutan Produksi

HPT : Hutan Produksi Terbatas

HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi

KSA-W : Konservasi Sumber Daya Alam – Wisata

Pada tahun 2014 tercatat produksi hasil hutan di kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 172.906,31 m³. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel II-29: Produksi hasil Hutan menurut Jenisnya di kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2011-2014

No	Jenis Hasil Hutan	Satuan	2011	2012	2013	2014
1	Kayu Bulat	M3	17.596,05	1.441,53	5.094,48	
2	Kayu Bulat Kecil	M3	333.216,86	139.631,79	9.807,11	
3	Bahan Baku Serpih	M3				
4	Bahan Bakau	M3				
5	Arang Bakau	Ton				
6	Kayu Gergajian	M3	916,41	221,59	371,79	475,26
7	Wood Working	M3				
8	Fancy Wood	M3				
9	Block Board	M3				
10	Veneer	M3	53.957,46			
11	Plywood	M3	41.051,12	21.400,43	31.216,33	36.616,13
12	Moulding	M3				
13	Bahan Baku Serpih Akasia	M3			281.571,40	135.814,91
14	Rotan	Ton				
Jumlah			446.737,90	162.473,75	317.882,21	172.431,04

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Dari 172.431,04 produksi hutan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, didominasi jenis hasil hutan bahan baku serpih akasia yaitu sebesar 135.814,04 M³ atau 79 persen dari total keseluruhan hasil hutan yang ada, Ply wood sebesar 36.616,13 M³ serta kayu gergajian sebesar 474,26 M³.

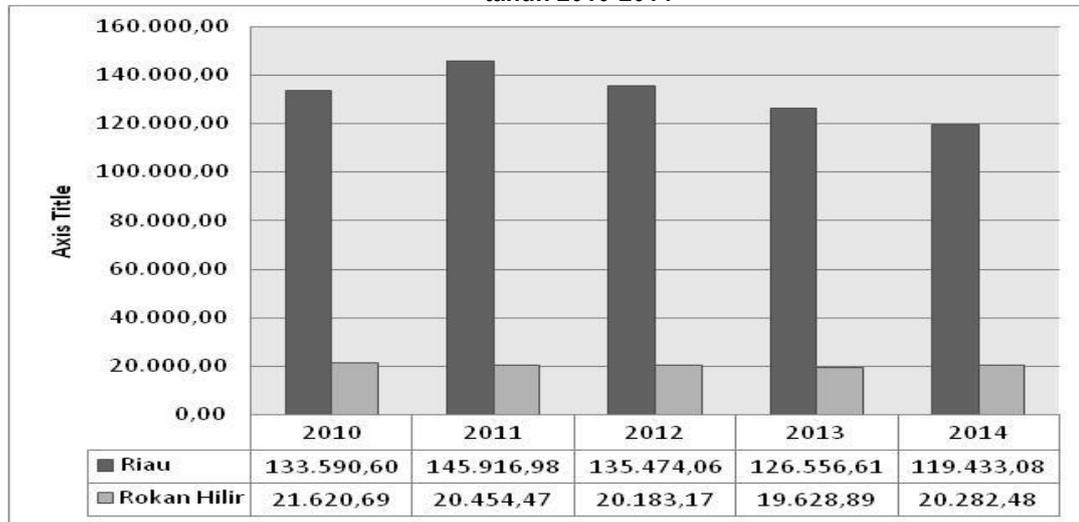
2.3.3.5. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten penghasil energi dan sumberdaya mineral di Provinsi Riau. Sumberdaya energi merupakan sumberdaya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi, seperti minyak bumi.

Produksi Migas di Kabupaten Rokan Hilir cenderung menurun pada periode 2010-2013, kemudian naik kembali pada tahun 2014. Produksi migas di Kabupaten Rokan

Hilirmenurundari 21.620,69ribu Barel pada tahun 2010 menjadi 19.628,89 ribu Barel pada tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 20.282,48 ribu Barel pada tahun 2014.

Gambar II-63: Produksi/Lifting Migas di Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010-2014



Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

2.3.3.6. Urusan Pariwisata

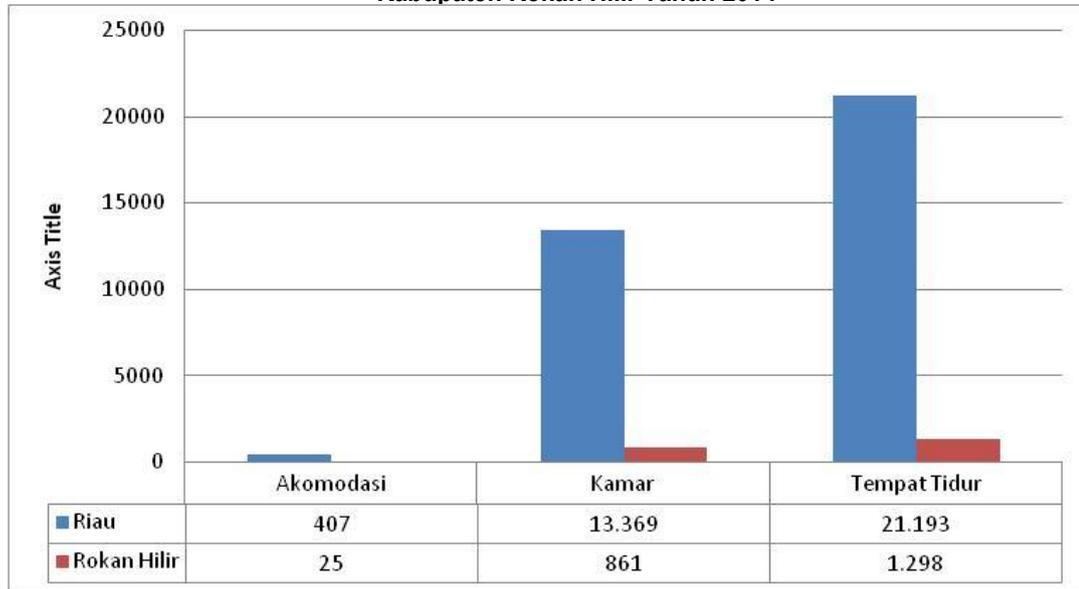
Provinsi Riau setidaknya memiliki 275 objek wisata, 19 objek wisata ada di Kabupaten Rokan Hilir. Objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir meliputi wisata alam sebanyak 5, wisata sejarah 9, wisata religius 1, wisata bahari 1, rekreasi 1, dan wisata minat khusus 2.

Tabel II-30: Objek Wisata di Riau

No	Kabupaten	Objek Wisata									
		Alam	Sejarah	Budaya	Religius	Bahari	Tirta	Rekreasi	Agr	Minat Khusus	Total
1	Kuantan Singingi	14	6	4	2		12			3	41
2	Indragiri Hulu	15	9	2			3				29
3	Indragiri Hilir	10	10	5	4	5	2	1	6		43
4	Pelalawan	2	3	1	1		1			2	10
5	Siak	4	19		2		2		1	1	29
6	Kampar	5	5	3	4		5	3	1	3	29
7	Rokan Hulu	10	4		1		2				17
8	Bengkalis	1	3	3		3	5		2		17
9	Rokan Hilir	5	9		1	1		1		2	19
10	Kep. Meranti	2								4	6
11	Pekanbaru	1	2	2	2		1	4		7	19
12	Dumai	6	3			2	1	1		3	16
	Jumlah	75	73	20	17	11	34	10	10	25	275

Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

Gambar II-64: Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan tempat Tidur di Provinsi riau dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

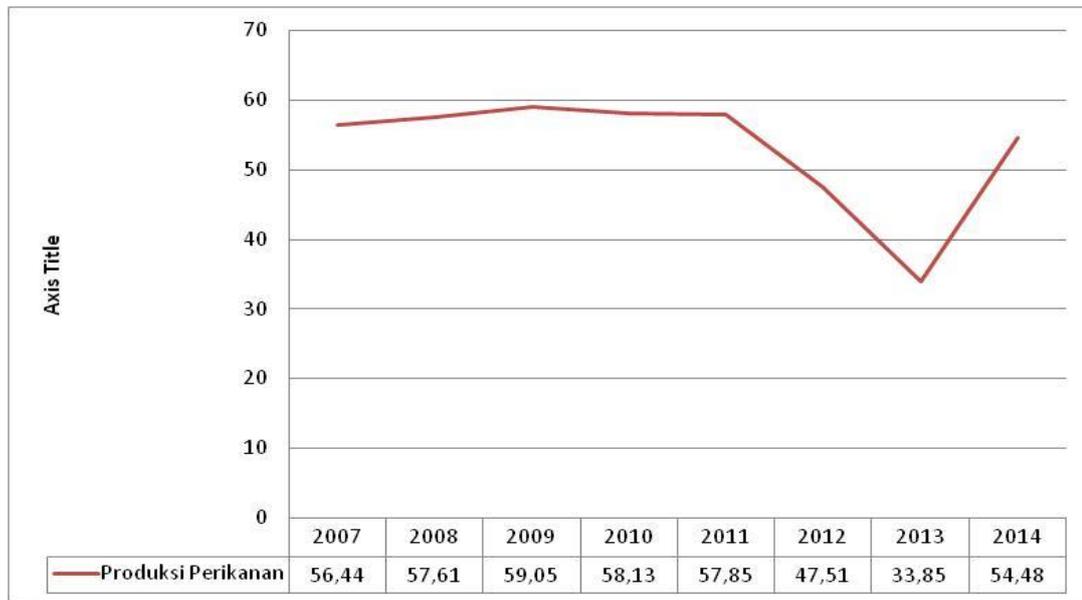


Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015)

2.3.3.7. Urusan Kelautan dan Perikanan

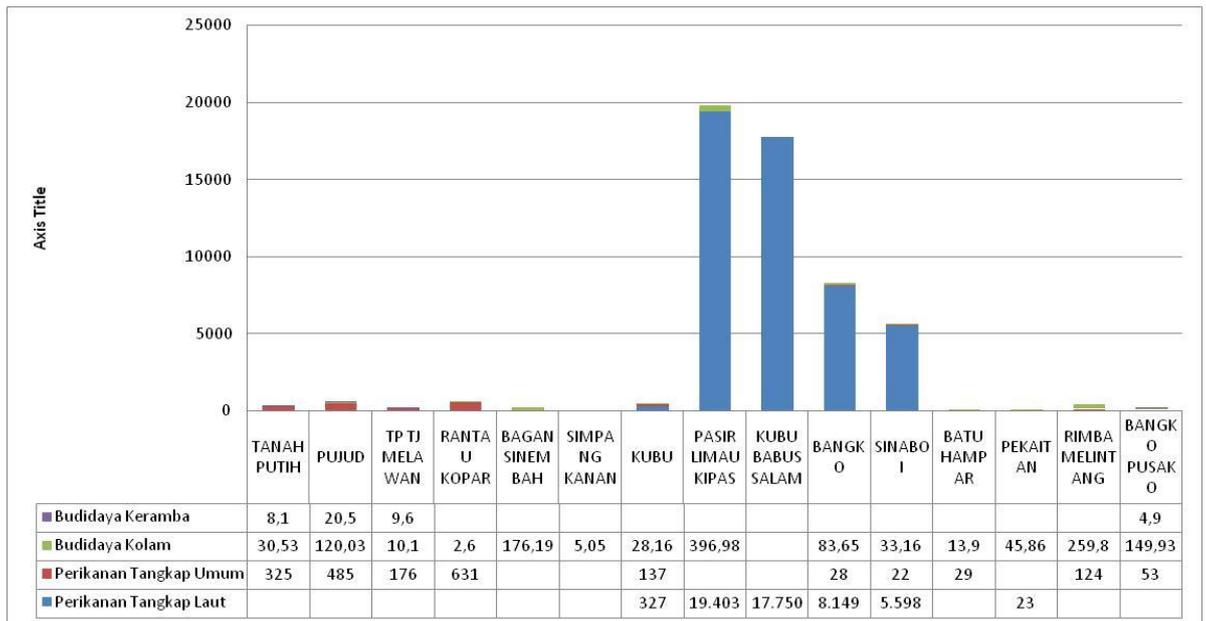
2.3.3.7.1. Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar berasal dari perikanan laut. Pada tahun 2014, produksi perikanan tercatat sebanyak 53.080,00 ton, dimana sebanyak 51.070,00 ton atau 93,74 persen merupakan hasil perikanan laut dan perairan umum dan hanya 2.010,00 ton (3,69 persen) hasil dari perikanan budidaya. Bila dibandingkan dengan total produksi ikan pada tahun sebelumnya yang berjumlah 50.230,46 ton berarti produksi perikanan 8,46 persen mengalami peningkatan sebesar persen.

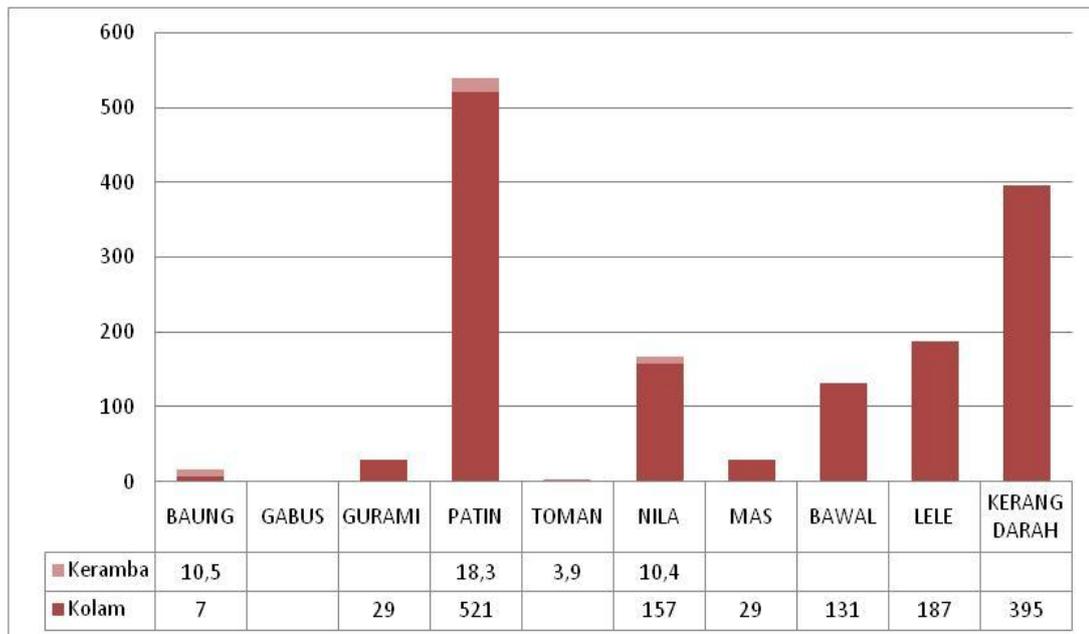
Gambar II-65: Produksi Perikanan Rokan Hilir tahun 2007 – 2014

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Dengan meningkatnya Produksi ikan di Rokan Hilir pada tahun 2014 sebesar 54,48 menandakan bahwa Kabupaten Rokan Hilir akan menjadi salah satu Kabupaten/kota sentral ikan terbesar di Provinsi Riau bahkan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa adanya fokus perhatian pemerintah terhadap para nelayan yang ada di kabupaten Rokan Hilir dengan program-program yang diterapkan. Karena pada tahun 2012-2013 produksi ikan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan terutama pada tahun 2013 hanya sebesar 33,85 persen.

Gambar II-66: Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (ton) Tahun 2014


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Gambar II-67: Produksi Perikanan Budidaya Menurut jenis Perikanan (kg) Tahun 2014


Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

Tabel II-31: Produksi dan Nilai Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan

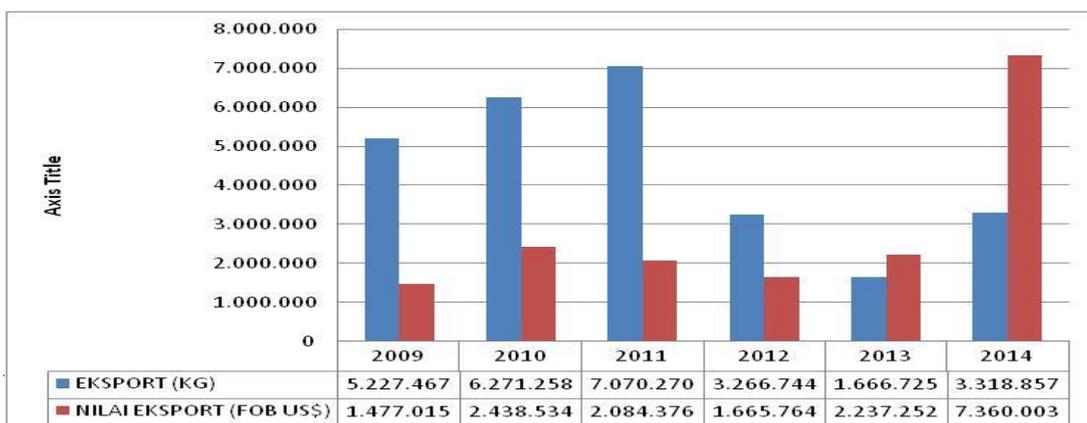
No	Jenis Ikan	Produksi (kg)		Nilai (Rp 000)	
		2013	2014	2013	2014
1	Tenggiri	489.387	578.953	13.702.836	16.210.684
2	Parang-parang	228.954	356.912	4.579.080	7.138.240
3	Senangin	3.985.400	4.086.431	127.532.800	245.185.860
4	Bawal Putih	988.600	876.900	79.088.000	87.690.000
5	Bawal Hitam	46.800	56.894	3.042.000	3.698.110
6	Kakap	137.000	256.879	4.795.000	11.559.555
7	Kurau	897.000	97.500	7.176.000	11.700.000
8	Sembilang	389.765	589.742	5.846.475	8.846.130
9	Malong	664.415	796.894	11.959.470	14.334.092
10	Kelampai	9.682	8.593	145.230	128.895
11	Gerot	2.189	1.875	43.780	37.500
12	Manyung	2.150	1.452	21.500	43.560
13	Puput	6.359	2.182	76.308	54.550
14	Talang	431.600	19.874	8.623.000	298.110
15	Layur	308.150	7.892	4.622.250	94.704
16	Sebelah	872.321	378.651	17.446.420	7.573.020
17	Belanak	263.000	308.150	2.630.000	4.622.250
18	Pari	5.752.000	735.980	57.520.000	16.191.560
19	Hiu	1.667	196.541	50.010	1.965.410
20	Gulama	2.687	6.234.267	67.175	62.342.670
21	Lomek	968.365	1.021.181	17.430.570	18.381.258
22	Biang-biang	139.400	21.689	2.091.000	325.335
23	Ikan Rucah	30.212.000	33.168.000	84.593.600	92.870.400
24	Udang Putih	52.345	50.327	3.402.425	1.177.190
25	Udang Merah	761.439	671.880	19.035.974	4.529.430
26	Udang Swallow	268.320	375.865	9.391.200	16.797.225
27	Ikan Lainnya	365.000	168.170	2.555.000	13.155.275
Jumlah		48.245.995	51.069.674	487.467.103	646.951.013

Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.3.8. Urusan Perdagangan

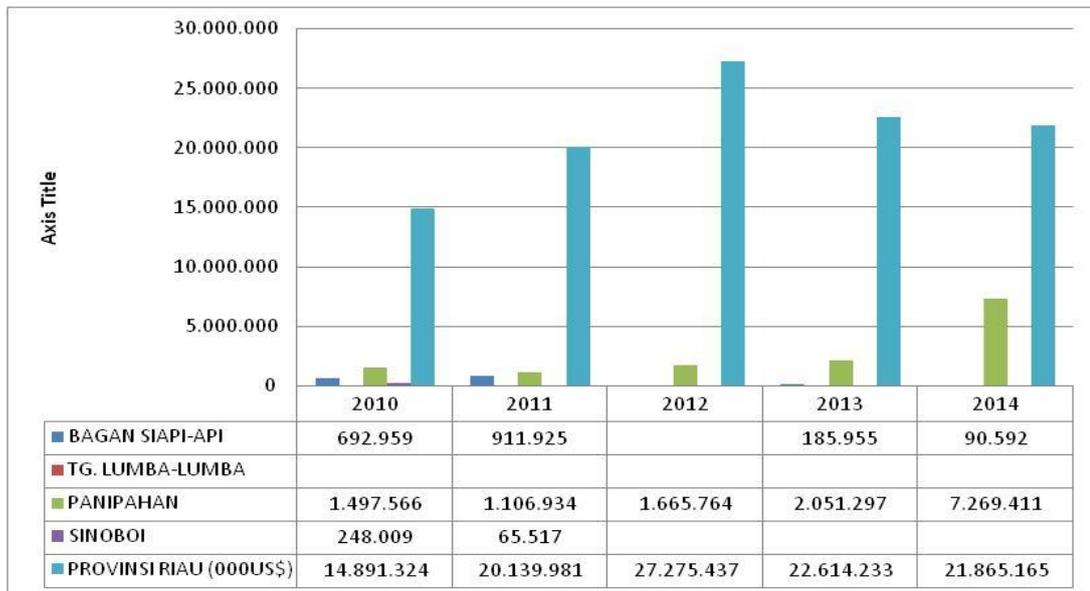
2.3.3.8.1. Ekspor

Nilai ekspor Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah US\$ 7.360.003 dan tidak ada impor. Hal menghasilkan surplus pembayaran luar negeri sebesar US\$ 7.360.003. Pada

Gambar II-68: Jumlah dan nilai Ekspor Kabupaten Rokan Hilir tahun 2009-2014


tahun 2014 terjadi peningkatan nilai ekspor terhadap tahun 2013. Pada tahun 2013 nilai ekspor sebesar US\$ 2.237.252 sedangkan tahun 2013 naik menjadi US\$ 2.237.252. Pelabuhan muat Panipahan menjadi pelabuhan muat dengan nilai ekspor terbesar, yakni US\$ 7.269.411. Nilai ekspor Rokan Hilir sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai ekspor Provinsi Riau yang mencapai US\$ 21.865.165 juta pada tahun 2014.

Gambar II-69: Eksport Kabupaten Rokan Hilir menurut Pelabuhan Muat Tahun 2010-2014



Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)

2.3.3.8.2. Impor

Sejak tahun 2010-2014 tidak ada kegiatan impor pada pelabuhan-pelabuhan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Kemungkinan yang terjadi, barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Kabupaten Rokan Hilir melalui pelabuhan di daerah lain. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana nilai impor tahun 2009 dengan nilai US\$ 800.000 dan tahun 2008 sebesar US\$570.134.

2.3.4. Fokus Urusan Penujang

2.3.4.1. Bidang Urusan Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir antara lain draf Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),



Draf RPJPD Kabupaten Rokan telah disusun untuk jangka waktu 2005 – 2025, untuk saat ini RPJPD Kabupten Rokan Hilir masih dalam tahapan pengesahan namun telah melalui proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Riau.

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir saat ini merupakan RPJMD tahap ke ketiga dengan penekanan pembangunan pada ekonomi kemasyarakatan untuk Periode 2016-2021. Semua dokumen perencanaan ini selalu disusun oleh Kabupaten Rokan Hilir sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010. Termasuk dalam pembuatan dokumen RKPD dan APBD dari tahun 2011-2016 yang menagcu pada RPJMD.

Jika dilihat aspek ketersediaan maka dokumen perencanaan pembangunan sudah tersedia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan dokumen perencanaan tersebut adalah masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari belum tersedianya gambaran yang jelas tentang evaluasi dari capaian dokumen tersebut oleh karena itu upaya agar program dan kegiatan pembangunan yang telah di jalan belum memberikan hasil yang pembangunan yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat walau telah memberikan dampak positif.

2.3.4.2. Bidang Urusan Keuangan

Merujuk pada Gambar di bawah terlihat selama kurun waktu 2011-2015 rata pertumbuhan pendapatan yang terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tumbuh sebesar 1,80%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan arah pertumbuhan yang positif, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sebagian besar disebabkan menurunnya penerimaan dari dana transfer bagi hasil bukan pajak.

Sementara itu bila dilihat dari masing-masing jenis pendapatan, terlihat bahwa pendapatan yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni tumbuh rata-rata 336,05% kemudian diikuti oleh pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan 14,18%. Sedangkan pendapatan transfer selama kurun waktu yang sama hanya tumbuh rata-rata 1,32 %. Namun demikian pada tahun 2015 dana transfer mengalami penurunan. Penurunan penerimaan dana transfer pada tahun tersebut disebabkan karena menurunnya harga minyak dipasaran internasional, sementara bagi hasil minyak dan gas merupakan penerimaan terbesar.

Tabel Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2010-2015



2.3.4.3. Bidang Kepegawaian

Jumlah pegawai negeri dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir masih 6365 orang yang tersebar pada Seluruh SKPD dengan populasi ANS wanita 3637 orang dan Pria 2732 orang. Jika dilihat dari pendidikan akhir yang diselesaikan oleh ANS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir 56% dari ANS yang ada masih memiliki pendidikan dibawah sarjana. Dalam pengembangan SDM pada lingkungan Pemerintahan yang ada Kabupaten Rokan hilir masih mempunyai pekerjaan yang sangat besar dalam meningkatkan tingkat pendidikan pada ANS hal yang paling mungkin untuk dapat meningkatkan kompetensi ANS pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dalam jangka pendek adalah dengan melakukan pelatihan dan untuk jangka panjang adalah membantu ANS dalam melanjutkan Pendidikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garfik berikut.



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel II-32 Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Menurut kelompok barang makanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2014

No	Jenis Pengeluaran Konsumsi	Kelompok Pengeluaran Perkapita				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Padi-padian Cereals	56,184	56,763	66,448	68,267	71,988
2	Umbi-umbian Tubers	2,77	2,942	3,486	3,399	3,67
3	Ikan Fish	36,023	42,335	59,29	54,384	52,994
4	Daging Meat	11,452	8,438	12,427	11,239	13,437
5	Telur & susu Eggs & Milk	19,55	19,354	21,862	25,161	18,875
6	Sayur-sayuran Vegetables	31,524	30,766	34,369	39,759	40,003
7	Kacang-kacangan Legumes	7,29	5,011	5,842	5,463	6,801
8	Buah-buahan Fruits	14,416	15,447	19,28	18,476	20,178
9	Minyak dan Lemak Oil & Fats	12,064	14,196	17,712	15,678	17,763
10	Bahan Minuman Beverages Stu	14,002	13,972	16,854	15,454	16,407
11	Bumbu-bumbuan Spices	6,955	6,725	8,871	7,793	8,538
12	Konsumsi Lainnya Miscellacous	10,592	6,608	7,83	6,378	6,466
13	Makanan & Minuman Jadi Prep	42,113	53,378	54,273	47,785	49,98
14	Tembakau & sirih Tobacco & B	41,582	47,239	55,573	58,092	64,607
MAKANAN		306,517	323,174	384,12	377,329	391,708

Sumber: Rokan Hilir 2015

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan tentang kemampuan suatu daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

2.4.1.1. Konsumsi Rumahtangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata menurut kelompok barang yang ada di kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2010-2014 yang terbesar terdapat pada padi-padian cereals yang mana mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010 sampai 2014. Dimana Pada Tahun 2010 sebesar 56.184 dan mengalami kenaikan sebesar 56.763 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 66.448 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 68.267 dan 71.988. Sedangkan urutan kedua yang tertinggi adalah jenis Makanan dan Minuman jadi Prep yang mana pada tahun 2010 sebesar 42.113 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 53.378 dan 54.273 serta mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 47.785 dan 49.980. Sedangkan untuk urutan

ke tiga adalah jenis Tembakau dan sirih Tobacco & B, hal ini mengindikasikan bahwa di kabupaten rokan Hilir banyak terdapat perokok aktif, dimana pada tahun 2010 sebesar 41.582 dan mengalami kenaikan secara terus menerus pada tahun 2011 sampai 2014 yaitu sebesar 47.239, 55.573, 58.092 dan 64.607.

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Gambaran pencapaian pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani sebagai bahagian dari masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama dari pembangunan. Salah satu ukuran kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep NTP secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Sebagai indikator kesejahteraan petani, maka NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran petani.

Tabel II-33: Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (Ntp) Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Tahun	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	Nilai Tukar Petani (NTP)
2010	125,07	120,11	102,36
2011	131,69	125,34	103,42
2012	134,76	129,25	101,71
2013	137,38	135,49	99,49
2014	108,90	112,34	100,08

Sumber: BPS, 2015

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa NTP petani di Riau sebagai gambaran rata-rata NTP petani yang termasuk di Kabupaten Rokan Hilir terlihat semakin menurun selama periode 2010 – 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani semakin menurun dari tahun ke tahun.

2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah

Daya saing ekonomi daerah dapat juga digambarkan oleh produktivitas kerja penduduk pada suatu daerah. Produktivitas kerja adalah rasio antara produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerjabaik individu maupun kelompok pada suatu daerah pada periode waktu tertentu. Artinya produktivitas tenaga kerja merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Berikut ini disajikan produktivitas penduduk yang bekerja di Kabupaten Rokan Hilir dan perbandingannya dengan produktivitas Provinsi Riau.

Tabel II-34: Produktivitas Penduduk yang Bekerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2014

Tahun	Produktivitas Rokan Hilir (Rp/Org)	Produktivitas Riau (Rp/Org)
2010	58.670.748	45.034.505
2011	49.713.862	42.350.801
2012	51.888.848	42.350.801
2013	51.621.485	43.956.980

Sumber: BPS, 2015

Pada tabel diatas terlihat bahwa secara umum produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hilir lebih baik jika dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Riau selama periode 2010-2013.

2.4.1.4. Nilai Tukar Perani

Gambaran pencapaian pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani sebagai bahagian dari masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama dari pembangunan. Salah satu ukuran kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep NTP secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Sebagai indikator kesejahteraan petani, maka NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran petani.

Tabel II-35: Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (Ntp) Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Tahun	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	Nilai Tukar Petani (NTP)
2010	125,07	120,11	102,36
2011	131,69	125,34	103,42
2012	134,76	129,25	101,71
2013	137,38	135,49	99,49
2014	108,90	112,34	100,08

Sumber: BPS, 2015

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa NTP petani di Riau sebagai gambaran rata-rata NTP petani yang termasuk di Kabupaten Rokan Hilir terlihat semakin menurun selama periode 2010 – 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani semakin menurun dari tahun ke tahun.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan pembangunan dan pengembangan wilayah. Penataan ruang bersifat konkuren atau merupakan urusan wajib yang menjadi

urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota didalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, sesuai kewenangan masing-masing. Sesuai dengan ketentuan UU No. 26 tahun 2007 bahwa penataan ruang nasional, penataan ruang provinsi, dan penataan ruang kabupaten kabupaten/kota saling mengacu dan saling melengkapi. RTRW Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dalam dokumen Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 untuk periode 2002-2012. Namun, penataan ketaan penataan ruang sesuai dengan RTRW belum dapat dinilai karena RTRW Provinsi Riau yang disusun sampai saat ini belum menjadi dokumen resmi karena belum ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.4.2.2. Luas Wilayah Produktif

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Ketersediaan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang terkait dengan pembentukan daya saing daerah adalah infrastruktur dasar meliputi, jalan, irigasi, dan listrik. Ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan listrik akan menggambarkan ketertinggalan daerah. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sentra padi sawah di Provinsi Riau, maka ketersediaan infrastruktur irigasi menjadi hal penting sebagai indicator daya saing ekonomi daerah.

Tabel II-36: Produktivitas Penduduk yang Bekerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2014

Tahun	Luas Lahan Sawah (ha)	Luas Lahan Sawah Beririgasi (ha)	Luas Lahan Sawah Tidak Beririgasi (ha)
2010	33.965,00	198,00	33.767,00
2011	33.012,00	198,00	32.814,00
2012	32.998,38	-	32.998,38
2013	12.381,00	-	12.381,00

Sumber: Statistik Lahan Pertanian 2014 (BPS, 2015)

Data luas areal lahan salah yang dikutip dari Statistik Lahan Indonesia, terlihat bahwa luas lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Rokan Hilir sangat sedikit, yaitu baru mencapai 198 ha dari keseluruhan luas lahan sawah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastuktur irigasi masih sangat minim, sehingga dapat menjadi penyebab kurangnya dukungan terhadap pengembangan produktivitas padi sawah dan dapat menurunkan daya saing daerah.

2.4.2.3. Layanan Transportasi

Hal penting lainnya dalam hal ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah adalah ketersediaan jalan. Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalulintas di darat. Lancarnya lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah.

Didaerah Rokan Hilir pada tahun 2013 tercatat panjang jalan Kabupaten 2.311 km, panjang jalan propinsi 3032,32 Km dan panjang jalan negara 1134,46 km serta panjang jembatan pada jalan negara dan propinsi 1.256 m. Dilihat dari jenis permukaannya, sebagian besar jalan kabupaten berupa jalan tanah yaitu sepanjang 829,76 km (35,90 persen). Panjang jalan kabupaten yang berupa jalan aspal sepanjang 699,84 km (30,28 persen).

Tabel II-37: Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kondisi Tahun 2013

Tingkat Pemerintahan	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
		Baik	sedang	Rusak	Rusak Berat
1. Negara	1.134,46 km	73,04%	18,45%	5,40%	3,11%
2. Provinsi	3.032,32 Km	30,70%	30,86%	17,96%	20,48%
3. Kabupaten	2.311 km	43,49%	24,67%	10,95%	2,34%

Sumber: Riau dalam Angka 2014

Sedangkan yang permukannya beton dan kerikil masing-masing sepanjang 488,52km (21,14 persen) dan 292,93km (12,68 persen). Dari keseluruhan jalan kabupaten hanya 43,49 persen yang kondisinya baik. Sebanyak 24,67 persen berkondisi sedang, 10,95 persen dengan kondisi rusak dan 2,33 persen jalan kabupaten rusak berat. Sedangkan jalan propinsi sepanjang 107,95 km (72,13 persen) dengan jenis permukaan aspal. Sisanya dengan permukaan kerikil sepanjang 41,70 km (27,87 persen). Sebanyak 74,94 persen dari jalan propinsi dengan kondisi baik. Jalan propinsi yang sedang sebesar 21,72 persen, sedangkan untuk yang kondisinya rusak sebesar 3,34 persen.

Seluruh jalan negara berpermukaan aspal. Sedangkan kondisinya, 60 persen baik dan hanya 40 persen yang masuk kategori sedang. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, sejak tahun 2009 tidak ada perubahan panjang konstruksi jembatan pada jalan negara dan propinsi. Tercatat sebagian besar yaitu sepanjang 785 m (62,50 persen) yang konstruksinya berupa rangka. Sedangkan untuk konstruksi jembatan yang berupa komposit hanya 251 m (19,98 persen). Untuk konstruksi jembatan yang berupa kayu dan beton hanya sepanjang 206 m (16,40 persen) dan 14m (1,12 persen).

Besarnya tingkat kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hilir bukan merupakan hal yang luar biasa mengingat tiga sektor pendukung perekonomian Kabupaten Rokan Hilir adalah industri pengolahan seperti industri pengolahan kayu, pertambangan dan pertanian yang didominasi perkebunan kelapa sawit dan karet. Ketiga sektor perekonomian ini memberikan beban yang sangat besar pada infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hilir akibat mobilisasi kendaraan angkutan peralatan, bahan baku dan hasil olahan yang bertonase tinggi (tonase kendaraan besar dari 20 ton). Disamping itu, kerusakan infrastruktur jalan juga disebabkan sebagian besar kondisi tanah dasar (*subgrade*) di Kabupaten Rokan Hilir merupakan tanah lunak dengan daya dukung yang rendah. Keterbatasan anggaran biaya dan pemanfaatan teknologi stabilisasi/perkuatan tanah lunak pada pembangunan



infrastruktur jalan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan daya dukung infrastruktur jalan yang dibangun tidak sesuai dengan beban tonase kendaraan yang ada. Kerusakan infrastruktur jalan ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi daya saing perekonomian dan minat investasi di Kabupaten Rokan Hilir. Selain infrastruktur jalan, telah dibangun juga jembatan yang pada tahun 2009 tercatat sepanjang 1256m. Fasilitas terbangun lainnya meliputi pelabuhan dan fasilitas irigasi meskipun infrastruktur ini masih perlu ditingkatkan. Disamping itu, pembangunan bandara di Sinaboi telah selesai proses perencanaannya dan tinggal dilanjutkan pelaksanaannya.

Tabel II-38: Jumlah Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2016

Jumlah Kendaraan Bermotor	47.471	Unit
1. Mobil Penumpang	2.984	Unit
2. Bus	33	Unit
3. Truk		Unit
4. Sepeda Motor	44.454	Unit

Untuk gambaran angkutan umum yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir awal tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-39: Jumlah Fasilitas Angkutan Umum Pada Tahun 2016

II. Angkutan Umum *		
1. Jumlah Angkutan Umum **	2.022	Unit
1). Mobil Penumpang Umum	76	Unit
2). Mobil Bus	87	Unit
3). Mobil Barang	1.859	Unit
4). Kereta Gandengan		Unit
5). Kereta Tempelan		Unit
2. Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan **	58	Unit
1). Izin Trayek antarkota antarprovinsi		Unit
2). Izin Trayek Perkotaan		Unit
3). Izin Trayek Pedesaan	58	Unit
3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum **	5.425	Unit
1). Mobil Penumpang Umum	76	Unit
2). Mobil Bus	87	Unit
3). Mobil Barang	5.261	Unit
4). Kereta Gandengan		Unit
5). Kereta Tempelan	1	Unit
4. Lama Pengujian KIR **	5	Hari
1). Mobil Penumpang Umum	1	Hari
2). Mobil Bus	1	Hari
3). Mobil Barang	1	Hari
4). Kereta Gandengan	1	Hari
5). Kereta Tempelan	1	Hari
5. Biaya Pengujian KIR **	310.000	Rp

1). Mobil Penumpang Umum	58.000	Rp
2). Mobil Bus	63.000	Rp
3). Mobil Barang	63.000	Rp
4). Kereta Gandengan	58.000	Rp
5). Kereta Tempelan	68.000	Rp

2.4.2.4. Layanan Air Minum

Pencapaian pembangunan air bersih di Kabupaten Rokan Hilir terlihat menunjukkan perbaikan. Walaupun demikian, secara keseluruhan akses terhadap air minum bersihampaknya masih menjadi masalah yang serius bagi penduduk di Rokan Hilir. Persentase rumah tangga dengan sumber airminum bersih sedikit menurun dibanding 2012, namun lebih dari 56 persen rumah tangga di Rokan Hilir masih belum mempunyai akses terhadap air minum bersih. Dari sejumlah rumah tangga yang mempunyai akses airminum bersih, hanya sekitar 32,68 persen mengakses air minum kemasan dan isi ulang. Hal ini mengindikasikan bahwa akses air bersih yang diperoleh oleh rumah tangga bukan berasal dari pembangunan jaringan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi dari sumber air isi ulang.

Tabel II-40: Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Air Bersih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2013

Tahun	Akses Air Bersih	Tidak Akses Air Bersih
2010	49,26	50,64
2011	44,76	55,24
2012	46,66	53,34
2013	56,70	43,30

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2014 (BPS, 2015)

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka kriminalitas

Pelaksanaan pembangunan memerlukan kondisi yang kondusif dari aspek keamanan, ketertiban, tingkat kriminalitas. Agenda pembangunan ini termasuk dalam agenda aman dan damai. Tindak kriminalitas pada suatu wilayah atau daerah secara signifikan mengganggu aktivitas masyarakat dan pembangunan. Untuk itu, tingkat kriminalitas merupakan salah satu gambaran tentang kondisi daerah yang aman, tertib dan damai.

Investasi dalam pengertian konseptual merupakan hasil dari sebuah proses yang bersifat multi dimensional. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Secara praktis, bahwa investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian

hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah. Angka kriminalitas dan jenis kriminalitas menggambarkan kondisi keamanan daerah. Kondisi kriminalitas di Kabupaten Rokan Hilir ditampilkan pada table berikut.

Tabel II-41: Banyaknya Kejahatan Dan Yang Diselesaikan Polres Rokan Hilir Tahun 2005-2012

Tahun	Jumlah Kriminalitas			Persentase
	Perkara	Diselesaikan	Sisa	
2005	395	228	167	57.72
2006	766	386	380	50.39
2007	729	382	347	52.4
2008	739	403	336	54.53
2009	752	351	401	46.68
2010	756	323	433	42.72
2011	763	249	514	32.63
2012	726	413	356	56.89
Jumlah	5626	2735	2934	393.96

Sumber: Rokan Hilir Dalam Angka 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui banyaknya kejahatan baik itu yang diselesaikan maupun yang belum diselesaikan di Kabupaten rokan Hilir pada tahun 2005-2012. Perkara yang paling banyak itu terdapat pada tahun 2006 dengan jumlah perkara sebanyak 766 perkara dan yang hanya di selesaikan sebanyak 386 perkara. untuk perkara yang pailing sedikit terjadi pada tahun 2005 dengan jumlah perkara 395 dan diselesaikan sebnyak 228 perkara. persentase jumlah perkara yang paling besar adalah terdapat pada tahun 2005 dengan asumsi 57,72 persen dan diikutu pata tahun 2008 dan 2012 sebesar 54,53 persen dan 56,89 persen.

Angka kriminalitas di Kabupaten Rokan Hilir adalah dibawah 1 persen, atau dibawah 1 kejadian setiap 1.000 penduduk dalam satu tahun. Angka ini diambil dari kasus kriminalitas yang dilaporkan kepada kepolisian Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah ini menunjukkan tingkat kriminalitas di Kabupaten Rokan Hilir tergolong rendah sehingga cukup kondusif untuk iklim berinvestasi. Kecenderungan angka kriminalitas pun terus menurun dari tahun 2008 sampai dengan 2009 dimana hampir 50 persen lebih penurunan kasus kriminalitas yang dilaporkan.

Tabel II-42: Banyaknya Peristiwa Kejahatan / Gangguan Kamtibmas yang Dilaporkan dan yang Diselesaikan Polres Rokan Hilir Tahun 2011 – 2012

No	Jenis Kejahatan	2011		2012	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Pencurian	103	50	88	74
2	Pencurian dengan Pemberatan	89	26	67	25
3	Pencurian dengan Kekerasan	46	7	29	7



No	Jenis Kejahatan	2011		2012	
		JTP	PTP	JTP	PTP
4	Curanmor	115	25	61	15
5	Anirat	9	3	2	0
6	Narkotika / Psikotropika	39	23	80	55
7	Asusila / Pemerksaan / Cabul / Perzinahan	8	6	40	37
8	Penggelapan	43	22	42	16
9	Perjudian	28	15	48	51
10	Penipuan	27	5	30	3
11	Penemuan Mayat	3	0	3	0
12	Illegal Logging	4	0	13	10
13	Pembakaran	2	0	4	0
14	TP HAKI	-	-	-	-
15	TP Advokat	-	-	-	-
16	Penyelundupan	-	-	-	-
17	Pengeroyokan	3	0	13	8
18	Pengancaman	0	0	0	0
19	Migas	1	0	4	2
20	Pengrusakan	20	4	13	6
21	Pemerasan	10	3	5	1
22	Perbuatan tidak menyenangkan	10	3	10	3
23	Bunuh Diri	1	0	1	2
24	Memberi keterangan palsu	-	-	-	-
25	Pembunuhan	4	0	4	2
26	Pemalsuan Surat	6	0	2	1
27	Kecelakaan Kerja	1	-	1	-
28	Minuman Keras	-	-	-	-
29	Kecelakaan Lalu Lintas	225	159	-	-
30	Melarikan Anak Orang	5	2	3	3
31	Trafficking	-	-	-	-
32	Penyerobotan Tanah	5	0	4	0
33	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0	3	0
34	Penadahan	2	2	3	7
35	Senjata Api/ Handak/ Sajam	4	2	-	-
36	Unjuk Rasa	-	-	-	-
37	Diterkam Harimau	-	-	-	-
38	Penghinaan	1	-	-	-
39	Illegal Fishing	1	1	1	1
40	TP Lingkungan Hidup	-	-	-	-
41	Korupsi	-	-	-	-
42	Kecelakaan Laut	-	-	-	-



No	Jenis Kejahatan	2011		2012	
		JTP	PTP	JTP	PTP
43	Kejahatan Lain-lain	-	-	152	84
Jumlah		816	358	726	413

Sumber: Rokan Hilir Dalam Angka 2015

Untuk jumlah kejahatan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 adalah kecelakaan lalu lintas curanmor dan pencurian yaitu sebanyak 225 ,115 dan 1o3 Kasus. Sedangkan pada tahun 2012 adalah kecaahatan lain lain yaitu sebesar 152 dan pencurian sebesar 88 dan 80 kasus untuk Narkotika. jumlah kasus yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 816 menjadi 762 sedangkan untuk kasus yang telah di selesaikan mengalami peningkatan yaitu sebesar 358 kasus pada tahun 2011 menjadi 413 pada tahun 2012. Angka kriminalitas dan jenis kriminalitas menggambarkan kondisi keamanan daerah. Kondisi kriminalitas di Kabupaten Rokan Hilir ditampilkan pada table diatas.

2.4.3.2. Eletrifikasi

Pada awal tahun 2016 masih terdapat 37.143 KK yang belum merasakan pelayanan listrik dengan kelompok penganan daya listrik 900 watt yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga yaitu 47.983 RT. untuk lebih jelasnya dapat diihat pada tabel berikut:

Tabel II-43: . Jangkauan Pelayanan Energy Listrik Tahun 2015

Jangkauan Pelayanan Energi Listrik		
1). Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	86.668	KK
2). Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN		KK
3). Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	37.143	KK
4). Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) **	86.668	RT
1. Rumah Tangga dengan daya 450 watt	8.491	RT
2. Rumah Tangga dengan daya 900 watt	47.983	RT
3. Rumah Tangga dengan daya 1300 watt	26.516	RT
4. Rumah Tangga dengan daya 2200 watt	3.183	RT
5. Rumah Tangga dengan daya >2200 watt	495	RT

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2 dan S3)

Jumlah pelajar SMA/SMK/MA yang melanjutkan Ke Perguruan Tinggi di Kabupaten Rokan Hilir sangat banyak sekali, hal ini menginyat perlunya proses percepatan pemebngunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang di dukung dengan SDM yang berkualitas. dari tahun ke tahun jumlah masiswa yang ada diKabupaten Rokan Hilir tersu meningkat hal ini terlihat pada tahun2013/2013 jumlah mahasiswa dan lulusan yang bersal dari perguruan tinggi

berjumlah 4.540 orang mahasiswa dan 1030 orang Lulusan sarjana. hal ini dapat di lihat di tabel dibawah ini.

Tabel II-44: Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Perguruan Tinggi Swasta Kabupaten Rokan Hilir 2013/2014

Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Lulusan
Perguruan Tinggi Swasta	2.795	685
Perguruan Tinggi Swasta Islam	1.745	345

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Secara keseluruhan berdasarkan data kependudukan tahun 2015 (<http://www.rohilkab.go.id/pemerintahan-12-Kependudukan.html>) terlihat bahwa jenjang pendidikan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir masih cukup rendah. Sebanyak 1,66 persen penduduk pada jenjang pendidikan sarjana dan keatasnya, sedangkan masih terdapat penduduk dengan pendidikan diploma sampai kebawah sebanyak 98,34 persen.

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Struktur kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir pada data kependudukan tahun 2015 (<http://www.rohilkab.go.id/pemerintahan-12-Kependudukan.html>) diperoleh bahwa jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) adalah sebanyak 479.576 jiwa dari total penduduk pada semester I tahun 2015 sebanyak 680.370 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu usia diawah 15 tahun sebanyak 180.133 jiwa dan penduduk usia diatas 64 tahun sebanyak 20.661 jiwa. Berdasarkan data tersebut maka tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 41,87 persen.

Rasio ketergantungan penduduk mengindikasikan beban ketergantungan penduduk usia produktif pada suatu wilayah. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Jika diperhatikan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir mengalami perbaikan yang berarti. Pada tahun 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk diperoleh rasio ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 63,24 persen dan mengalami perbaikan menjadi 41,87 persen pada tahun 2015. Sementara itu di Provinsi Riau rasio ketergantungan pada tahun 2010 adalah 54,10 persen dan pada tahun 2015 menjadi 51,60 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata rasio ketergantungan di Provinsi Riau.



Tabel II-45 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Kabupaten Rokan Hilir 2010-2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	4	5	6	7				
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indikator Makro								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)		7.68	7.77	5.64	6.88	2.1	>	
1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)								
2	PDRB Atas Dasar Harga konstan 2000 (Milyar Rp)	11,385.11	11,521.88	11,597.31	11,760.56	11,535.11			
6	Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi								
6.1	Pertumbuhan PDRB per-tahun (harga konstan tanpa migas) (%)								
6.3	PDRB (harga konstan) per kapita								
	- dengan migas (Juta Rp)	39,964,267.01	39,960,804.08	41,418,231.33	42,405,063.91	44,144,206.11	44,583,546.84	>	
	- tanpa migas (Juta Rp)	24,904,518.08	25,988,537.18	27,848,491.57	29,419,225.97	31,444,255.02	32,106,016.06	>	
6.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	72.43	72.83	73.17	73.45	71.98	66.81	<	
6.5	Persentase Penduduk Miskin(%)	9.3	7.58	7.37	7.73	7.28	7.67	<	
7	Kesejahteraan Masyarakat								
8.1	Pendidikan								
8.1	Angka Melek Huruf(%)								





	a.	Penduduk Usia 15 - 24 tahun (%)	100	100	97	96.63	100		
	b.	Penduduk Usia 15 - 55 tahun (%)	98.03	96.73	98.06	94.3	98.89		
8.1	.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7.24	7.20	7.36	7.42	7.62	7.62	<
8.1	.3	Angka partisipasi murni							
	A	SD/MI(%)				97.34	95.56	95.75	>
	B	SMP/MTs (%)				82.45	75.79	73.69	>
	C	SMA/SMK/MA (%)				73.27	46.16	55.51	<
8.1	.4	Angka partisipasi kasar							
	a	SD/MI (%)				116.05	111.92	112.57	>
	b	SMP/MTs(%)				104.64	92.88	96.72	>
	c	SMA/SMK/MA (%)				92.6	60.91	64.33	<
8.1	.5	Angka partisipasi sekolah							
	a	7-12 tahun (%)	97.05	89.08	92.86	86.50	93.68		>
	b	13-15 tahun(%)	90.12	75.15	72.80	77.22	89.16		>
	c	16-18 tahun (%)	65.56		67.45				
8.2		Kesehatan							
8.2	.1	Angka usia harapan hidup(tahun)	68.98	69.07	67.32	67.41	69.27	69.47	
8.2	.3	Angka Kematian Bayi (AKB)(Bayi/1000)	3.14	7.55	5.69	4.2	4.7		
8.2	.4	Angka Kematian ibu (Ibu/1000)	165.7	168.8	123.4	109	59		
8.2	.5	Angka kesakitan DBD(Orang/1000)	6.3	66.3	9.7	15.9	13.7	<20 per 10000 penduduk	





8.2 .6	Angka kesakitan Malaria (Orang/1000)					0.3		1 per 1000 pendu duk	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Pelayanan Urusan Wajib								
1.1	Pendidikan								
1.1 .1	Pendidikan dasar								
a	Angka partisipasi sekolah (%)	97.05	89.08	92.86	86.5	93.68			
b	Rasio murid/guru								
	Rasio murid/guru Sekolah dasar	19	18			20			
	Rasio murid/guru Sekolah Menengah Dasar	12	11			12			
	Rasio murid/guru Sekolah Menengah Atas	12	11			12			
1.1 .2	Pendidikan Menengah								
a	Angka partisipasi sekolah								
	SMP/MTs (%)	90.12	75.15	72.8	77.22	89.16			
	SMA/SMK/MA (%)	65.56		67.45					
1.1 .3	Angka Kelulusan								
a	Angka kelulusasn SMP/MTs (%)								
b	Angka kelulusasn SMA/MA/SMK (%)								
1.2	Kesehatan dan KB								
1.2 .1	Rasio puskesmas dan pustu per 100.000 penduduk				1.52	2.85		1 per 30000 pendu duk	>
1.2 .2	Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk				0.06	0.6			
1.2 .3	Rasio perawat per 100.000 penduduk	70.7	92.26	104.35	102.74	48.68			





1.2.4	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	13.41	13.1	14.65	14.44	10.84		
1.2.5	Rasio dokter spesialis per 100. 000 penduduk	1.63	1.38	2.24	1.85	1.77		
1.2.6	Pengguna Alat KB (%)	54.85	77.05	63.33	65.82	67.9		
1.2.7	Proporsi Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (Pertolongan Terakhir)	90.18	54.14	76.27	79.18	79.75		
1.2.8	Proporsi Pertolongan Pertama Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	80.36	50.1	68.37	79.18	60.12		
	Persentase Balita yang Telah Diimunisasi BCG	70.53	72.46	62.47	63.29	75.3		
	Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Campak / Morbili	80.36	49.81	59.09	37.52	62.65		
	Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Hepatitis B	77.08	68.45	62.47	27.69	60.12		
	Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Polio	90.18	82.95	58.65	59.31	77.83		
1.3	Penanaman Modal							
1.3.1	Jumlah investor berskala nasional							
	PMDN (investor)				2			
	PMA(investor)				9			
1.3.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
	PMDN (Rp milyar)				-			
	PMA (US\$ juta)				2.86	1.78	63.39	
1.3.3	Daya serap tenaga kerja							
	PMDN(Jiwa)				1236			
	PMA (Jiwa)				684			





1.4	Koperasi dan UKM								
1.4.1	Jumlah Koperasi(unit)		431		508		320		
1.4.2	Jumlah anggota koperasi(jiwa)		24,744		26,581				
1.4.3	Persentase koperasi aktif (%)						0.83		
1.5	Kependudukan								
1.5.1	Laju pertumbuhan penduduk(%)		3.21	3.13	2.93	2.86	2.78		
1.5.2	Jumlah penduduk (jiwa)	551,708	573,211	595,695	618,355	545,543	644,680		
1.5.3	Kepadatan Penduduk (jiwa Km2)	62.11	64.10	66.11	68.40	69.99	71.94		
1.6	Tenaga Kerja								
1.6.1	Angka partisipasi angkatan kerja(%)					61.76	56.53		
1.6.5	Persentase pengangguran terbuka(%)	9.33	4.57	2.92	6.04	9.14	11.23		
2	Pelayanan Urusan Pilihan								
2.1	Pertanian								
2.1.1	Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton)			3.83	3.84				
2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB(%)	18.98	20.16	21.43	22.71	17.88			
2.2	Kehutanan								
2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)								
2.2.1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB(%)	3.03	3.10	3.17	3.24	2.97			
2.2.2	Luas lahan kritis (ha)								
2.3	Kelautan dan Perikanan								





2.3	.1	Produksi perikanan(ton)							
2.3	.2	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB(%)	7.72	8.21	8.72	9.24	7.25		
2.4		Perdagangan							
2.4	.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8.38	9.21	10.12	11.03	7.64		
2.4	.2	Eksport bersih perdagangan termasuk minyak bumi (ribu USD)						20,000	
2.5		Pariwisata							
2.5	.1	Kunjungan wisata (jiwa)							
III		ASPEK DAYA SAING							
	1	Kemampuan Ekonomi							
	1.1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian							
	1.1	.1	Pengeluaran konsumsi RT perkapita per bulan (Rp)		753,160	687,398.00	708,955.00		
	1.1	.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perbulan (Rp)		489,554	446,809	347,359.00		
	1.2	Pertanian							
	1.2	.1	Nilai tukar petani/nelayan (%)						
	2	Fasilitas wilayah/infrastruktur							
	2.1	Perhubungan							
	2.1	.1	Jumlah terminal bis/ pelabuhan laut/udara						
	a	Terminal bis Darat							
	b	Pelabuhan Laut				11	11	11	
	c	Pelabuhan Udara	0	0	0	0	0	0	
	2.1	.2	Rata-rata panjang jalan per luas wilayah (km/km ²)						





2.1	.3	Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi baik							
2.1	.4	Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi sedang							
2.1	.5	Persentase Rumah tangga dengan sumber penerangan utama			90.16	94.52	82.47		
2.1	.6	Persentase Rumah tangga dengan sumber air minum utama	49.26	44.76	46.66	43.3	36.68		





III .GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu untuk mengetahui kondisi keuangan masa lalu. Analisis kinerja keuangan daerah ini menyangkut kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada dasarnya adalah merupakan, semua penerimaan yang diterima oleh daerah melalui rekening kas umum daerah, yang dapat menambah ekuitas dana. Pendapatan merupakan hak daerah yang diperoleh dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pengembalian.

Struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
- b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan ini sebenarnya di luar kendali Pemda Kabupaten Rokan Hilir, karena pengalokasiannya tergantung pada Pemerintah Pusat.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini juga diluar kendali Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, karena pengalokasiannya tergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.



Adapun kinerja pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari rerata pertumbuhan selama kurun waktu 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:



Table III-1: Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 (Dalam Jutaan)

No	Jenis Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert (%)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.099,42	66.423,36	82.962,46	86.143,19	111.332,08	14,57
1.1.1	Pajak Daerah	12.392,37	16.733,09	24.512,92	23.112,62	26.760,55	19,21
1.1.2	Retribusi Daerah	2.300,33	2.294,62	3.096,35	6.057,95	7.148,81	34,82
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.817,10	6.232,85	7.980,69	11.140,06	11.758,49	11,69
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah	40.589,62	41.162,80	47.372,49	45.832,57	66.664,23	14,18
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.612.196,57	1.840.198,51	1.866.256,09	2.303.118,25	1.527.555,59	1,32
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.495.442,61	1.738.853,65	1.760.245,28	2.139.225,39	1.274.401,45	-0,35
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	193.404,03	219.614,42	255.534,89	241.966,13	283.738,10	9,89
	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.101.636,21	1.206.274,83	1.076.460,64	1.471.398,81	569.602,35	-6,79
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	186.049,03	282.513,16	388.866,19	413.982,79	320.515,99	15,77
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	14.353,35	30.451,23	39.383,54	11.877,66	100.545,01	202,87
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	80.798,11	47.244,29	48.727,85	43.683,84	112.946,25	27,43
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	80.798,11	47.244,29	48.727,85	43.683,84	112.946,25	27,43
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	35.995,85	54.100,57	57.282,96	120.209,02	90.009,96	35,15
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.995,85	54.100,57	57.282,96	120.209,02	90.009,96	35,15
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	50.197,93	-
1.3.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi lainnya	-	-	-	-	4.160,20	-
1.3.2	Bantuan Keuangan Dana Desa	-	-	-	-	46.037,73	-





No	Jenis Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert (%)
1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	462,00	7.467,80	5.963,50	2.923,20	0,00	335,05
1.4.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.3	Pendapatan Lainnya	462,00	7.467,80	5.963,50	2.923,20	0,00	335,05
	PENDAPATAN	1.675.757,99	1.914.089,67	1.955.182,05	2.392.184,64	1.638.887,67	1,80

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir



Merujuk Pada Tabel diatas terlihat selama kurun waktu 2011-2012 rata pertumbuhan pendapatan yang terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tumbuh sebesar 1,80%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan arah pertumbuhan yang positif, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sebagian besar disebabkan menurunnya penerimaan dari dana transfer bagi hasil bukan pajak.

Sementara itu bila dilihat dari masing-masing jenis pendapatan, terlihat bahwa pendapatan yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni tumbuh rata-rata 336, 05% kemudian diikuti oleh pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan 14,18%. Sedangkan pendapatan transfer selama kurun waktu yang sama hanya tumbuh rata-rata 1,32 %. Namun demikian pada tahun 2015 dana transfer mengalami penurunan. Penurunan penerimaan dana transfer pada tahun tersebut disebabkan karena menurunnya harga minyak dipasaran internasional, sementara bagi hasil minyak dan gas merupakan penerimaan terbesar dari pos dana transfer.

Sebagaimana dijelaskan diatas pendaparan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapapatan Daerah yang sah. Adapun proporsi masing-masing jenis pendapatan tersebut yang terealisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Table III-2: Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 (Dalam Jutaan)

No	JENIS PENEIMAAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,77	3,47	4,24	3,60	6,79
1.1.1	Pajak Daerah	0,74	0,87	1,25	0,97	1,63
1.1.2	Retribusi Daerah	0,14	0,12	0,16	0,25	0,44
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,47	0,33	0,41	0,47	0,72
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah	2,42	2,15	2,42	1,92	4,07
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	96,21	96,14	95,45	96,28	93,21
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	89,24	90,84	90,03	89,43	77,76
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	11,54	11,47	13,07	10,11	17,31
	Bagi Hasil Bukan Pajak	65,74	63,02	55,06	61,51	34,76
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	11,10	14,76	19,89	17,31	19,56
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	0,86	1,59	2,01	0,50	6,13
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	4,82	2,47	2,49	1,83	6,89
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus					
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	4,82	2,47	2,49	1,83	6,89
1.2.3	Transfer Pemerintah	2,15	2,83	2,93	5,03	5,49

No	JENIS PENEIMAAN	2011	2012	2013	2014	2015
	Provinsi					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2,15	2,83	2,93	5,03	5,49
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
1.3	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	3,06
1.3.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi lainnya	-	-	-	-	0,25
1.3.2	Bantuan Keuangan Dana Desa	-	-	-	-	2,81
1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,03	0,39	0,31	0,12	-
1.4.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.4.3	Pendapatan Lainnya	0,03	0,39	0,31	0,12	-
	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir

Data di atas memperlihatkan bahwa proporsi pendapatan Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2011-2015 di dominasi pendapatan yang bersumber dari transfer yakni di atas 93%. Sumbangsih transfer terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu di atas 77%. Namun demikian transfer yang berasal dari dana perimbangan tersebut, selama kurun waktu yang sama menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun.

Sementara itu kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Kabupaten Rokan Hilir masih sangat kecil, berkisar antara 3,5% sampai dengan 6,8%. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Rokan Hilir masih sangat tergantung pada sumber-sumber yang di kelolah oleh Pemerintah pusat, yang berarti bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat lemah.

Selanjutnya kemampuan daerah merealisasikan pendapatan sangat menentukan akselerasi pembangunan. Oleh sebab itu pencapaian target pendapatan menjadi ukuran kinerja pendapatan. Adapun pencapaian target pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table III-3: Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011-2015

Tahun	Target	Realiasi	Persentase
2011	1.619.435,00	1.675.757,99	103,47
2012	1.778.328,04	1.914.089,67	107,63
2013	2.408.086,31	1.955.182,05	81,32
2014	2.528.259,46	2.392.184,64	94,61
2015	2.068.798,52	1.638.887,67	79,21

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015



Data tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian target pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan dalam APBD 2011-2015 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada masa 3 tahun terakhir kinerja pendapatan yang dihasilkan menunjukkan arah kinerja yang negatif. Sebagian besar disebabkan tidak tercapai target pendapatan dari dana perimbangan khususnya dari bagi hasil sumber daya alam sebagai dampak turunnya harga minyak dipasaran internasional.

3.1.1.1 B. Belanja Daerah.

Belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Kebijakan umum anggaran belanja daerah berorientasi pada pencapaian output dari input yang direncanakan. Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian dalam konteks kegiatan yang didistribusikan per SKPD dengan mengacu pada sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Alokasi belanja daerah adalah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2011-2015 dalam rangka efisiensi dan efektifitas maka kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan penjaminan.

Dalam perencanaan belanja daerah ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain itu juga ditetapkan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang proposional. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun 2011-2015 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Adapun penggunaan Anggaran untuk Belanja dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:



Table III-4: Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertb
	Belanja Tidak Langsung	674.804,19	696.912,72	752.413,64	790.556,76	1.091.627,78	13,60
	- Belanja Pegawai	538.117,69	605.061,28	658.781,17	682.654,71	822.058,17	11,31
	- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,13	
	- Belanja Hibah	45.475,84	64.694,11	60.979,37	67.532,32	69.644,83	12,34
	- Belanja Bantuan Sosial	68.017,06	3.358,83	1.079,30	7.402,00	9.242,10	-13,16
	- Belanja Bantuan Keuangan	23.193,60	23.798,50	31.573,80	32.967,73	189.327,55	128,45
	Belanja Langsung	952.852,20	1.263.712,90	1.529.162,20	1.030.667,43	1.036.805,61	5,41
	Belanja Barang dan Jasa	281.734,53	331.619,95	402.488,51	469.477,72	570.958,68	18,74
	Belanja Modal	671.117,67	932.092,95	1.126.673,69	561.189,71	465.846,93	-14,50
	- Belanja Tanah	13.202,99	14.616,76	19.937,99	19.477,78	11.021,70	0,33
	- Belanja Peralatan dan Mesin	43.153,30	63.647,01	86.273,45	102.625,56	78.320,33	18,82
	- Belanja Gedung dan Bangunan	122.424,938	225.536,52	258.361,43	102.739,78	68.851,36	-67,43
	- Belanja Jalan dan Irigasi	457.649,05	615.043,21	745.159,26	316.916,11	297.923,49	-21,39
	- Belanja Asset Tetap Lainnya	34.687,38	13.250,45	16.941,55	14.430,47	9.730,06	-20,98
	- Belanja Asset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Tidak Terduga	230,80	4.972,61	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Tidak Terduga	230,80	4.972,61	0,00	0,00	0,00	
	BELANJA	1.627.887,19	1.965.598,23	2.281.575,84	1.821.224,19	2.128.433,39	7,10

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir





Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung dan Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan. Rata-rata realisasi pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami pertumbuhan (7,10%).

Sementara jika dilihat dari jenis belanjanya, Realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan selama kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 13,60 % dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Bantuan Keuangan yang tumbuh rata-rata 128,45 %. Besarnya pertumbuhan belanja keuangan disebabkan dilaksanakan kebijakan bantuan keuangan kepada desa.

Selanjutnya realisasi Belanja Langsung dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami pertumbuhan minus yakni rata-rata pertumbuhan sebesar 5,41%. Penyumbang pertumbuhan dalam belanja langsung adalah belanja barang dan jasa rata-rata tumbuh sebesar 18,74%. Sementara itu belanja modal mengalami pertumbuhan negatif yakni (14,70%). Menurunnya pertumbuhan pada belanja modal ini disebabkan meningkatnya belanja tidak langsung baik itu bersumber dari belanja pegawai maupun belanja bantuan keuangan disatu sisi dan disisi yang lain adalah menurunnya pendapatan daerah dan rendahnya serapan pada tahun 2014 dan 2015.

Belanja langsung adalah belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Belanja ini dalam prakteknya diakomodir dalam dokumen perencanaan, yang sesungguhnya berhubungan erat dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh sebab itu belanja langsung mendapat tempat yang sangat strategis dalam kebijakan belanja daerah. Untuk melihat kebijakan dalam belanja daerah dapat dilihat dari proporsi realisasi

anggaran antara tidak langsung dengan belanja langsung. Adapun besaran proporsi realisasi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Table III-5: Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012-2015

No	Uraian	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
	Belanja Tidak Langsung	41,45	35,46	32,97	43,40	51,28
	Belanja langsung	58,53	64,29	67,02	56,59	48,71

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2012-2015

Dari data tabel diatas dapat diketahui proporsi struktur belanja APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011-2015 yang terserap menunjukkan bahwa proporsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung kecuali pada tahun 2015. Besarnya proporsi belanja tidak langsung pada tahun 2015 disebabkan turunnya tingkat pendapatan pada tahun yang sama dan disisi yang lain meningkatkan bantuan keuangan kepada desa sebagai belanja tidak langsung yang merupakan amanat dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa . Namun secara umum keberpihakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pembangunan dapat dikatakan cukup tinggi.

Kemudian kinerja penggunaan anggaran belanja menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam menggunakan anggaran yang dilihat dari perbandingan antara anggaran belanja yang ditargetkan dengan realiasi belanja. Adapun realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Table III-6: Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011-2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	2.053.395,73	1.627.887,19	79,28
2012	2.035.211,85	1.965.598,23	96,58
2013	2.621.255,60	2.281.575,84	87,04
2014	2.712.503,95	1.821.224,19	67,14
2015	2.738.620,32	2.128.433,39	77,71

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyerap anggaran belanja selama kurun waktu 2011-2015 rata-rata sebesar 81,55 persen. Selanjutnya jika dilihat kemampuan menyerap anggaran belanja per –tahun anggaran pada kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Kenyataan ini disebabkan adanya adanya keterlambatan dana transfer dan tidak tercapainya target pendapatan yang sudah dengan yang dianggarkan.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Rata-rata pertumbuhan Necara Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Table III-7: Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Rokan Hilir 2012-2015 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR	607.409.06	263.076.06	819.635.77	348.739.77	9,82
1.1.1	Kas	509.541.26	183.419.21	751.458.89	258.703.19	10,51
1.1.2	Piutang	62.640.57	71.467.95	54.073.84	78.952,95	(1,32)
1.1.3	Persediaan	35.227.24	8.188.91	14.103.03	10.589,88	48,85
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	65.627.96	65.627.96	68.127.96	72.846,72	6,73
1.2.1	Investasi Non Permanen					
1.2.2	Investasi Permanen	65.627.96	65.627.96	68.127.96	72.846,72	6,73
1.3	ASET TETAP	6.411.017.91	7.536.359.42	8.097.122,46	5.754.919,26	15,93
1.3.1	Tanah	286.556.26	306.494.26	325.887.67	337.327,72	6,61
1.3.2	Peralatan dan mesin	362.560.24	447.501.51	549.784.78	629.164,51	27,98
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.104.668.67	1.301.574.99	1.419.581.83	1.561.347,50	18,64
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	3.619.569.88	4.436.394.79	4.767.309.96	5.079.463,27	17,56
1.3.5	Aset tetap lainnya	101.685.59	118.627.13	133.057.61	142.613,49	16,82
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	935.977.27	925.766.73	901.500.60	843.450,34	4,85
1.4	ASET LAINNYA	2.464.57	2.464.57	2.806.87	2.978,24	61,09
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran					
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	1.473.767	1.473.77	1.473.77	1.301,22	0
1.4.4	Aset tak berwujud	990.80	990.80	1.333.10	1.677,02	11,52
1.4.5	Aset Lain-Lain					
	JUMLAH ASSET DAERAH	7.086.519,50	7.867.528.02	8.987.693.06	6.179.484,00	15,22
3	KEWAJIBAN	149.03	1.869.75	2.824.02	51.694,01	897,49
3.1	KEWJB JANGKA PENDEK	149.03	1.869.72	2.824.02	51.694,01	897,49
3.12	Utang perhitungan pihak ketiga	149.03	396.67	1.475.31	1.120,80	444,98
3.1.3	Uang muka dari kas daerah					
3.1.4	Pendapatan diterima dimuka				71,81	
3.1.5	Utang Belanja				48.792,52	
3.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya		1.473.06	1.348.71	1.708,88	
4	EKUITAS DANA	7.086.370.48	7.865.658.31	8.984.869.04	6.127.789,99	15,21
4.1	EKUITAS DANA LANCAR	607.260.03	261.206.35	816.811.75	0,00	9,67
4.1.1	SiLPA	509.392.23	182.998.44	751.458.89	0,00	10,53
4.1.2	Pendapatan Yang Ditangguhkan		24.108.30			-
4.1.3	Cadangan Piutang	62.640.57	71.467.95	54.073.84	0,00	(1,32)
4.1.4	Cadangan Persediaan	35.227.23	8.188.91	14.103.03	0,00	48,85
4.1.5	Dana Yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-1.473.06	-2.824.02		-
4.2	EKUITAS DANA INVEST	6.479.110.44	7.604.451.95	8.168.057.30	0,00	15,84
4.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	65.627.96	65.627.96	68.127.96	0,00	6,73
4.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	6.411.017.91	7.536.359.42	8.097.122.46	0,00	15,93
4.2.3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	2.464.56	2.464.57	2.806.86	0,00	61,09
4.2.4	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	7.086.519,50	7.867.528.03	8.987.693.06	6.127.789,99	15,21

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan pada Neraca Daerah maka nilai aset pemerintah daerah mengalami peningkatan dari Rp 7,086 trilyun pada tahun 2012 -menjadi sebesar Rp 8,987 trilyun,-pada tahun 2014. Namun demikian pada tahun 2015 asset pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan menjadi Rp. 6,127 trilyun. Kalau kita cermati lebih jauh asset Kabupaten Rokan

Hilir yang mengalami penurunan pada tahun 2015 adalah asset lancar dan asset tetap.. Asset tetap yang mempunyai nilai yang signifikan dalam neraca Kabupaten Rokan Hilir adalah Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa selama beberapa periode pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir, belanja modal merupakan belanja yang menjadi titik fokus kebijakan dalam penganggaran pembangunan daerah .

Selanjutnya untuk melihat kondisi keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir lebih lanjut berdasarkan data-data yang ada di Neraca Daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan daerah. Analisis tersebut untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban daerah yang menjadi beban pembangunan. Analisis rasio keuangan tersebut antara lain rasio lancar yaitu untuk mengukur seberapa jauh ekuitas dana lancar bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban lancar. Selanjutnya rasio quick yaitu untuk melihat kemampuan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dalam memenuhi kewajiban lancar daerah. Rasio total hutang terhadap ekuitas yaitu untuk membandingkan besaran ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap kewajiban daerah. Analisis tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Table III-8: Analisis Rasio Atas Neraca Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2014

No	Uraian	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Rasio Lancar	407.586	14.070	29.023	674,63
2	Rasi Quic	383.947	13.632	28.343	654,13
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Ekuitas	-	-	-	-

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir.

a) Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio lancar pada neraca daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2012 –2015 menunjukkan angka rasio yang melebihi 100%. Keadaan ini menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir adalah tidak menjadikan beban keuangan daerah.

b) Rasio Quick (Quick Ratio)

Merupakan perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio quick pada neraca daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2012 –2015 menunjukkan angka rasio diatas 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban keuangan pemerintah daerah atas kewajiban lancar dapat ditanggung oleh kemampuan kas pemerintah daerah.

c) Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio)

Merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam neraca daerah. Berdasarkan rasio total hutang terhadap total ekuitas neraca daerah Kabupaten Rokan Hilir 2012 –2015 bernilai < 1 sehingga

kemampuan ekuitas pemerintah daerah untuk menjamin hutang pemerintah daerah tidak menjadikan beban.

Berdasarkan analisis atas Rasio Lancar dan Rasio Quick Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Demikian halnya dari Rasio total kewajiban terhadap total ekuitas dapat dilihat bahwa keuangan daerah tidak terbebani oleh kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum anggaran belanja daerah berorientasi pada pencapaian output dari input yang direncanakan. Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian dalam konteks kegiatan yang didistribusikan per SKPD dengan mengacu pada sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Alokasi belanja daerah adalah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2011-2015 dalam rangka efisiensi dan efektifitas maka kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan penjaminan. Namun demikian dalam konteks anggaran yang menjadi prioritas untuk dianggarkan terlebih dahulu adalah belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

Adapun penggunaan proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2011 -2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table III-9: Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014

No	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	Rata 2 Pert
	Belanja Tidak Langsung	500.862.37	534.575.51	493.747.65	-(0,45)
	Belanja Gaji dan Tunjangan	282.303.36	307.409.28	374.495.86	15,36
	Belanja Tambahan Penghasilan	209.003.47	216.832.74	89.307.79	(27,53)
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.736.48	3.775.20	3.802.00	0,87
	Belanja pemungutan Pajak Daerah	5.819.05	6.558.29	26.142.00	155,65
	Belanja Langsung	128.498.94	259.376.85	60.664,60	12,61
	Belanja Honorarium PNS	33.928.37	34.484.39		(49,18)

No	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	Rata 2 Pert
	Belanja Uang Lembur	1.410.13	688.75		(75,57)
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.051.33	2.504.14		
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.533.08	17.515.14	200,0,0	(43,04)
	Belanja premi asuransi kesehatan		2.47		
	Belanja makanan dan minuman pegawai	2.011.98	31.558.76	3.700.00	690,13
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	2.213.63	1.752.05		(60,42)
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.891.73	3.865.58		(67,19)
	Belanja perjalanan dinas	65.458.68	64.379.99	9.800,00	(43,21)
	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0		
	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	86.273.45	102.625.56	46.964,60	(17,64)
	Jumlah Belanja Aparatur	629.361.30	793.952.37	554.412,25	(2,00)

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir

Data pada tabel di atas memperlihatkan selamat kurun waktu 2013-2015 belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menunjukkan kecenderungan menurun rata-rata (2,00%). Sementara kalau diklasifikasikan antara belanja langsung dan tidak langsung untuk aparatur, terlihat bahwa pertumbuhan belanja langsung lebih besar yakni rata-rata 12,61% sedangkan belanja tidak langsung pemenuhan kebutuhan aparatur tumbuh minus rata-rata (0,45%). Menurunnya rata-rata pertumbuhan belanja pemenuhan aratur ini disebabkan karena menurunnya pendapatan daerah.

Table III-10: Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Pemenuhan Kebutuhan Untuk Aparatur Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2015

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	%
1	Tahun Anggaran 2013	629.361.30	2.281.575.83	27,58
2	Tahun Anggaran 2014	793.952.37	1.823.724,19	43,53
3	Tahun Anggaran 2015	554.412,25	2.133.152,15	25,99

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014

Merujuk pada data tabel di atas terlihat bahwa proporsi belanjaja aparatur dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir berfluktuasi dari 27,58% pada tahun 2013 meningkat menjadi 43,53% pada tahun 2014 dan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 25,99%. Terjadi fluktuasi ini disebabkan naik turunnya pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Hal ini terlihat pada tahun 2015 realisasi pendapatan

menurun jika dibandingkan tahun 2014, hal berdampak menurunnya belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, kecuali gaji dan tunjangan yang meningkatkan.

Selanjutnya alokasi belanja untuk pendidikan sebagaimana dimanakan oleh UUD 1945 sebesar 20% dari total belanja, patut senantiasa dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terhadap pemenuhan proporsi belanja pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table III-11: Proporsi Realisasi Belanja Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2015.

No	Uraian	Realisasi Belanja Pendidikan	Total Belanja	%
1	Tahun Anggaran 2013	393.046,57	1.977.976,92	19,87
2	Tahun Anggaran 2014	577.428,21	2.712.503,95	21,28
3	Tahun Anggaran 2015	620.758,66	2.738.620,33	22,67

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2013-2015

Data tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi realisasi belanja pendidikan Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2013-2015 menunjukkan trend yang semakin meningkat. Pemenuhan belanja pendidikan sebagaimana diamanat UUD 1945 untuk 2 tahun terakhir sudah melampaui dari persentase yang diamanatkan yakni 20%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pendidikan sangat kuat.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defesit belanja daerah. Keadaan surplus atau defesit belanja daerah menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui analisis defisit riil anggaran: Adapun defisit riil Anggaran Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table III-12: Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.914.089,67	1.955.182,05	2.392.184,64	1.638.887,67
	Dikurangi Realisasi				
2	Belanja Daerah	1.965.598,23	2.281.575,84	1.821.224,19	2.128.433,39
3	Pengeluaran Pembiayaan	9.187,90	0	2.500,00	4.718,76
	Defisit Riil	(60.696,46)	(315.393,79)	568.460,45	(494.264,48)
	Silpa		509.392,23	182.998,44	751.458,88
	Silpa Tahun	509.392,23	182.998,41	751.458,88	267.194,40

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
	Berkenaan				

Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir

Tabel data di atas memperlihatkan selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2015 keuangan Kabupaten Rokan Hilir terjadi defisit, kecuali tahun 2014 terdapat surplus.. Defisit Riil yang dialami oleh Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2012-2013 dan 2015 tentunya ditutup dengan pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit Kabupaten Rokan Hilir adalah kebijakan dengan menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA yang merupakan unsur pembiayaan di Kabupaten Rokan Hilir pada masa 2011-2015 terbentuk dominan disebabkan karena penyerapan anggaran yang belum maksimal terutama yang berasal dari komponen belanja langsung.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya.

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dapat disajikan di bawah ini:

Table III-13: Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014

No	Uraian	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	Rata 2Pert
	Belanja Gaji dan Tunjangan	257.342.07	282.303.36	307.409.28	9,73
	Belanja Tambahan Penghasilan	204.287.66	209.003.47	216.832.74	3,07
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.736.48	3.736.48	3.775.20	0,52
	Belanja pemungutan Pajak Daerah	4.451.13	5.819.05	6.558.29	23,67
	Belanja Bantuan Keuangan	23.798.49	31.573.80	32.967.73	18,54
	Jumlah Belanja Aparatur	493.616,13	500.862,47	567.543,24	7,48

Sumber; APBD Kabupaten Rokan Hilir

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada belanja pemungutan pajak Daerah yakni tumbuh rata-rata sebesar 23,67% sedangkan yang terendah ada pada belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH yakni tumbuh rata-rata sebesar 0,52%.. Sedangkan apabila dilihat dari proporsi belanja tidak langsung yang terbesar adalah belanja gaji dan tunjangan dan disusul dengan belanja tambahan penghasilan. Persoalan ini tipikal dengan persoalan pengelolaan APBD secara nasional, dimana memang porsi belanja untuk kebutuhan aparatur masih cukup besar dibanding dengan belanja langsung untuk publik dan pembangunan.



3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu.

3.3.2.1 Proyeksi pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah merupakan merupakan sumber pendanaan kegiatan pemerintahan yang tercermin dari belanja daerah. Oleh sebab itu dalam kerangka pendanaan kegiatan pemerintah kedepan perlu di proyeksi pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan data pendapatan masa lalu maka dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan pendapatan rata-rata 1,8%. Pertumbuhan ini tidak normal karena terjadinya penyimpangan yang cukup tajam pada pendapatan tahun 2015 yang disebabkan jatuhnya harga minyak dipasaran Internasional yang berakibat turunnya secara drastis penerimaan dari dana bagi hasil sumberdaya alam. Kondisi yang demikian menyebabkan pertumbuhan rata-rata pendapatan masa lalu tidak bisa dijadikan dasar untuk memproyeksikan pendapatan 5 tahun kedepan. Oleh sebab itu data tahun 2015 dimana terjadi penurunan total pendapatan secara drastis dijadikan tahun dasar penghitungan proyeksi pendapatan 5 tahun kedepan. Diproyeksikan 5 tahun ke depan, harga minyak diperkirakan tidak akan mengalami kenaikan secara signifikan. Dengan menggunakan skenario optimis kenaikan pendapatan daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan tidak akan melebihi 4 %. Berdasarkan perkiraan tersebut maka dipoyeksikan pendapatan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah seperti terlihat pada tabel berikut:



Table III-14: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 (Dalam Jutaan)

No	Jenis Penerimaan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.898,68	121.574,63	126.437,62	131.495,12	136.754,93	142.225,12
1.1.1	Pajak Daerah	28.098,58	29.222,52	30.391,42	31.607,08	32.871,36	34.186,22
1.1.2	Retribusi Daerah	7.506,25	7.806,50	8.118,76	8.443,51	8.781,25	9.132,50
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.346,41	12.840,27	13.353,88	13.888,04	14.443,56	15.021,30
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah	69.997,44	72.797,34	75.709,23	78.737,60	81.887,11	85.162,59
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.603.933,37	1.668.090,70	1.734.814,33	1.804.206,91	1.876.375,18	1.951.430,19
1.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.338.121,52	1.391.646,38	1.447.312,24	1.505.204,73	1.565.412,92	1.628.029,43
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	297.925,01	309.842,01	322.235,69	335.125,11	348.530,12	362.471,32
	Bagi Hasil Bukan Pajak	598.082,47	622.005,77	646.886,00	672.761,44	699.671,89	727.658,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum	336.541,79	350.003,46	364.003,60	378.563,74	393.706,29	409.454,54
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	105.572,26	109.795,15	114.186,96	118.754,44	123.504,61	128.444,80
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	118.593,56	123.337,31	128.270,80	133.401,63	138.737,69	144.287,20
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	118.593,56	123.337,31	128.270,80	133.401,63	138.737,69	144.287,20
	Transfer Pemerintah Provinsi	94.510,46	98.290,88	102.222,51	106.311,41	110.563,87	114.986,42
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.510,46	98.290,88	102.222,51	106.311,41	110.563,87	114.986,42
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	52.707,83	54.816,14	57.008,79	59.289,14	61.660,70	64.127,13
	Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi lainnya	4.368,21	4.542,94	4.724,66	4.913,64	5.110,19	5.314,60
	Bantuan Keuangan Dana Desa	48.339,62	50.273,20	52.284,13	54.375,49	56.550,51	58.812,53
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	PENDAPATAN	1.720.832,05	1.789.665,34	1.861.251,95	1.935.702,03	2.013.130,11	2.093.655,31



Data di atas menunjukkan proyeksi pendapatan untuk 5 tahun kedepan diproyeksikan semakin meningkat. Secara keseluruhan proyeksi pendapatan tahun 2016 diperkirakan akan diterima sebesar Rp.1,753 Trilyun, selanjutnya tahun terakhir perencanaan yakni tahun 2021 pendapatan diterima di perkiraan sebesar Rp. 2,459 trilyun. Proyeksi tersebut dengan asumsi kondisi perekonomian nasional berada dalam keadaan normal dan tidak mengalami resesi.

Dari proyeksi di atas dapat dilihat sumbangan terbesar dari pendapatan berasal dari dana perimbangan. Hal ini didasarkan kepada perkiraan, bahwa kebijakan-kebijakan keuangan daerah terutama menyangkut dana perimbangan tidak banyak mengalami perubahan. Hal yang sama juga diperkirakan terjadi pada pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan baik jenis dan sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

3.3.2.2 Proyeksi Silpa

Silpa Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan angka yang bervariasi dari tahun ketahun. Artinya Silpa sangat tergantung kepada kemampuan manajemen pelaksanaan program dan kegiatan disamping faktor eksternal seperti keterlambatan transfer dari dana perimbangan serta adanya piutang pendapatan. Oleh sebab itu kedepannya selain dari tahun 2016 yang diproyeksikan tumbuh sebesar 58%, dan tahun selanjutnya diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 2%. Pertumbuhan Silpa rata-rata 1% yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016 tersebut didasarkan bahwa tahun 2017 dan seterusnya pendapatan daerah tidak akan naik secara signifikan.

Adapun proyeksi Silpa selama kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Table III-15: Proyeksi Silpa Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Silpa	450.000,00	59.688,42	60.285,31	60.888,16	61.497,04	62.112,01

Bedasarkan pada proyeksi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah yang berasal dari Silpa, maka dapat dapat diproyeksikan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah . Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendanai pembangunan untuk periode tahun 2016-2021, akan disajikan pada Tabel 3.14 sebagai berikut:

Table III-16: Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Daerah	1.720.832,05	1.789.665,34	1.861.251,95	1.935.702,03	2.013.130,11	2.093.655,31
2	Silpa	452.809,35	59.688,42	60.285,31	60.888,16	61.497,04	62.112,01



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total	2.173.641,40	1.849.353,76	1.921.547,26	1.996.590,19	2.074.627,15	2.155.767,32

3.3.2.3 Proyeksi Belanja Daerah.

Besaran belanja daerah sangat tergantung kepada besaran pendapatan dan pembiayaan. Oleh karenanya kalau pendapatan di proyeksi meningkat sudah jelas belanja juga akan meningkat. Kecenderungan belanja meningkat dari sisi keuangan daerah dapat dipahami karena semakin meningkatnya kebutuhan akan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Kebutuhan belanja tidak langsung misalnya terjadinya penambahan pegawai, naiknya gaji dan tunjangan pegawai sebagai konsekuensi terjadinya inflasi. Begitu juga dengan belanja langsung yang diperkirakan meningkat sebagai konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum pelayanan publik dan belanja urusan wajib dan pilihan lainnya.

Proyeksi belanja selama untuk tahun 2016 terjadi kenaikan untuk tidak langsung naik rata-rata 2 %, sementara untuk belanja modal modal naik rata –rata 6%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pendapatan khususnya dari bagi hasil migas sehingga semua komponen belanja diperkirakan mengalami penurunan kecuali belanja pegawai yang naik sama dengan tahun sebelumnya. Penurunan belanja operasi selain belanja pegawai pada rahhun 2017 diproyeksikan turun sebesar 30%. Sementara untuk belanja modal pada tahun 2017 diproyeksikan turun 20%. Selanjutnya sampai dengan tahun 2021 belanja operasi diproyeksikan naik rata rata 2%, sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan naik sekitar rata-rata 7%. Adapun proyeksi belanja 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:



Table III-17: Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Tidak langsung	1.101.175,37	1.050.056,76	1.071.057,93	1.092.479,09	1.114.328,68	1.136.615,25
	Belanja Pegawai	830.278,75	846.884,33	863.822,01	881.098,45	898.720,42	1.916.694,83
	Belanja Bunga		-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	70.341,28	52.755,96	53.811,08	54.887,30	55.985,05	57.104,75
	Belanja Bantuan Sosial	9.334,52	7.000,89	7.140,91	7.283,73	7.429,40	7.577,99
	Belanja Bantuan Keuangan	191.220,83	143.415,62	146.283,93	149.209,61	152.193,80	155.237,68
					-	-	-
	Belanja Langsung	1.070.466,03	798.708,00	834.432,02	872.255,21	912.314,27	954.754,49
	Belanja Barang dan Jasa	576.668,27	403.667,79	411.741,14	419.975,97	428.375,48	436.942,99
	Belanja Modal	493.797,76	395.038,21	422.690,88	452.279,24	483.938,79	517.814,50
	- Belanja Tanah	11.683,00	9.346,40	10.000,65	10.700,70	11.449,74	12.251,23
	- Belanja Peralatan dan Mesin	83.019,55	66.415,64	71.064,73	76.039,27	81.362,01	87.057,36
	- Belanja Gedung dan Bangunan	72.982,44	58.385,95	62.472,97	66.846,08	71.525,30	76.532,07
	- Belanja Jalan dan Irigasi	315.798,90	252.639,12	270.323,86	289.246,53	309.493,78	331.158,35
	- Belanja Asset Tetap Lainnya	10.313,86	8.251,09	8.828,67	9.446,67	10.107,94	10.815,50
	Belanja Tidak Terduga						
	Belanja Tidak Terduga						
	BELANJA	2.171.641,40	1.848.762,79	1.905.489,95	1.964.734,30	2.026.642,94	2.091.372,7



Merujuk pada data tabel diatas Belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 di proyeksikan meningkat selama kurun waktu tersebut. Proyeksi Peningkatan ini didasarkan pada meningkatnya pendapatan daerah sebagai sumber belanja daerah. Peningkatan pendapatan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan, pemenuhan kebutuhan aparatur dan masyarakat, seiring dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dimasa depan menuntut aktivitas pembangunan semakin diintensifkan, karena semakin baik ekonomi semakin meningkat kebutuhan masyarakat termasuk terhadap pelayanan publik.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan penghitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III. 18 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Uraian	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.789.665,34	1.861.251,95	1.935.702,03	2.013.130,11	2.093.655,31
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	59.688,42	60.285,31	60.888,16	61.497,04	62.112,01
	Total penerimaan	1.849.353,76	1.921.547,26	1.996.590,19	2.074.627,15	2.155.767,32
	Dikurangi:					
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.057.278,33	1.080.070,01	1.107.357,45	1.135.160,42	1.163.775,83
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	792.075,43	841.477,25	889.232,74	939.466,73	991.991,40

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.



Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama. Di dalamnya termasuk kewajiban untuk anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan dan anggaran untuk gaji pegawai di lingkungan Kabupaten Siak.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 selama 5 (lima) tahun kedepan, secara rinci disajikan dengan tabel sebagai berikut:



Table III-18: Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

No	Jenis Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021
	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	792.075,43	841.477,25	889.232,74	939.466,73	991.991,40
I	RENCANA PENGELUARAN PRIORITAS II	588.903,85	634.241,33	677.312,10	723.858,48	772.070,98
	BELANJA LANGSUNG	588.903,85	634.241,33	677.312,10	723.858,48	772.070,98
II	RENCANA PENGELUARAN PRIORITAS III	203.171,58	207.235,92	211.920,64	215.608,25	219.920,42
	- Belanja Hibah	52.755,96	53.811,08	54.887,30	55.985,05	57.104,75
	- Belanja Bantuan Sosial	7.000,89	7.140,91	7.283,73	7.429,40	7.577,99
	- Belanja Bantuan Keuangan	143.415,62	146.283,93	149.209,61	152.193,80	155.237,68
	SURPLUS ANGGARAN RIIL ATAU BERIMBANG	0	0	0	0	0





IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan potensi dan seluruh sumber daya yang ada di daerah khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui kebijakan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Hal tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan yang strategis. Dalam kurun lima tahun terakhir ini, program-program pembangunan dimaksud telah menampakkan hasilnya.

Isu strategis pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan rumusan terhadap persoalan-persoalan dasar yang bersifat penting, strategis dan perlu diberikan perhatian khusus dalam pembangunan. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 isu-isu strategis yang teridentifikasi meliputi analisis tentang lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta analisis eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan yang akan dihadapi selama pembangunan jangka menengah.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir diidentifikasi berdasarkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan misi pembangunan yang ditetapkan. Ada lima sasaran pokok pembangunan yang merupakan agenda pokok pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 5 (lima) tahun yang akan datang. Agenda pembangunan ini yang ingin dicapai ini, kemudian dijabarkan dalam beberapa beberapa target pembangunan menurut bidang atau agenda pembangunan. Secara rinci identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 4. 1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir

No	Sasaran Pokok Pembangunan	Indikator dan Target Pembangunan	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 7,8% pada tahun 2012 menjadi 8,0 % pada tahun 2016; 2. PDRB meningkat dari Rp 3,6 trilyun pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 5,3 trilyun pada tahun 2016 berdasarkan harga konstan tahun 2000 3. PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah meningkat dari Rp 102,2 milyarr menjadi Rp 150 milyar pada tahun 2016; 4. Angka kemiskinan turun dari 21,76% pada tahun 2012 menjadi 16,76% pada tahun 2016. 5. Tingkat pengangguran turun dari 17,6% pada tahun 2012 menjadi 15,1% menjadi pada tahun 2016. 6. Majunya sektor perdagangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah; 7. Meningkatnya penghasilan masyarakat sebagai hasil dari iklim perekonomian daerah yang kondusif; 8. Meningkatnya komoditi hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan masyarakat; 9. Terwujudnya kekuatan perekonomian masyarakat yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sumberdaya migas makin berkurang dan bisa menjadi faktor penentu penurunan pertumbuhan ekonomi, b. Basis data dan teknologi informasi pada semua bidang pemerintahan daerah masih lemah sehingga menyulitkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. c. Konversi lahan kehutanan menjadi lahan perkebunan dan pembukaan daerah pertambangan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hutan, konservasi air terganggu, dan permasalahan pencemaran lingkungan. d. Dampak dari globalisasi yang telah menimbulkan konsekuensi logis berupa perubahan lingkungan strategis yang berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi geografis alam yang bervariasi (pesisir, dataran rendah, rawa, 15 aliran sungai) merupakan potensi alam yang cukup besar untuk mendukung pembangunan sektor non migas dalam pertumbuhan ekonomi, b. Kabupaten Rohil masih memiliki banyak ruang kosong untuk pembangunan, sehingga lebih mudah ditata dan merupakan potensi untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan, c. Letak strategis Kabupaten Rokan Hilir yang dilewati oleh jalur lintas Sumatera (jalan negara) yang menghubungkan Riau dan Sumatera bagian utara, merupakan potensi besar untuk mengembangkan sektor perekonomian daerah khususnya perdagangan antar daerah. d. <i>Political will</i> pemerintah Kabupaten terhadap kemajuan pembangunan. e. Akses Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (Sumatera Utara) dan Selat Malaka (perairan internasional) merupakan peluang untuk melakukan kerjasama antar wilayah (regional) dengan keunggulan yang berbeda-beda. f. Berkembangnya Kota Dumai yang direncanakan sebagai pintu gerbang perekonomian Riau dan menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memperbesar peluang bagi Kabupaten Rohil untuk mendapatkan keuntungan sektor



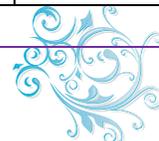


2.	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan jaringan jalan arteri primer Ujung Tanjung-Bagan Batu, status jalan negara dengan konstruksi aspal dengan pembiayaan APBN. 2. Memantapkan jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi, konstruksi aspal sepanjang 149,65 km. Kondisi tahun 2004 dimana 60% jalan provinsi dalam keadaan baik meningkat menjadi 90% pada tahun 2016 (APBD Provinsi Riau) 3. Meningkatkan jaringan jalan kabupaten dengan fungsi kolektor sekunder dan lokal primer sepanjang 1.828 km. Kondisi tahun 2012 hanya 53.4% jalan kabupaten dalam keadaan baik meningkat menjadi 85% pada tahun 2016. 4. Pembangunan jaringan jalan lintas pesisir. 5. Sarana dan prasarana irigasi/pompanisasi. 6. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Bagan Siapi-api, Sinaboi, Panipahan, Pulau Jemur, Pulau Halang, dan Pelabuhan Tanjung Lumba-lumba. 7. Peningkatan pelayanan infrastruktur sumber daya air bersih. 8. Peningkatan pelayanan infrastuktur kelistrikan. 9. Pembangunan rumah layak huni untuk penduduk miskin terlayani sebanyak 40% dari jumlah penduduk miskin, kondisi sampai tahun 2006 telah dibangun rumah layak huni sebanyak 1.349 unit untuk penduduk miskin. 10. Pembangunan resettlement tambahan sebanyak 800 unit, kondisi sampai tahun 2006 telah dibangun resettlement sebanyak 803 unit. 11. Sarana pendidikan dasar mencapai 75% kondisi baik, sarana pendidikan menengah pertama 80% kondisi baik, dan sarana pendidikan menengah atas 90% kondisi baik. 12. Meratanya pembangunan ke semua wilayah di 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi infrastruktur transportasi antar wilayah untuk mendukung peningkatan ekonomi khususnya untuk wilayah terpencil yang masih belum memadai. Tingkat kerusakan jalan secara umum masih diatas 40% b. Infrastruktur penghubung poros pesisir Kab. Rohil masih terbatas c. Infrastruktur pulau-pulau terluar dan terpencil masih kurang memadai terutama untuk sarana dan prasarana pelabuhan dan jalan penghubung. d. Ketersediaan air bersih dan energi listrik masih terbatas dan belum memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi e. Penurunan kualitas lingkungan hidup f. Efektifitas pencegahan dan penanggulangan bencana khususnya kebakaran dan pencemaran lingkungan yang belum memadai. 	<p>perdagangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan dana APBN khususnya untuk pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar wilayah NKRI. b. Dukungan dana APBD Kab. Rohil dalam pembangunan Infrastruktur c. Efektifitas dan efisiensi kinerja SKPD terkait khususnya Bina Marga, Cipta Karya, Distamben dan Bappedalda dalam mengelola pembangunan infrastruktur dan lingkungan. d. Ketersediaan sumber bahan baku infrastruktur dan air baku yang memadai e. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan lingkungan hidup yang layak.
----	--	---	--	---





		<p>Kabupaten Rokan Hilir, sehingga tidak terjadi konsentrasi pembangunan secara berlebihan di satu tempat;</p> <p>13. Pengembangan sistem pelayanan persampahan untuk 50% daerah perkotaan</p> <p>14. Terwujudnya taman kota, ruang terbuka hijau, dan rekreasi di daerah perkotaan dengan rasio minimum 20% dari luas kota dengan penyebaran yang merata</p> <p>15. Terlaksananya AMDAL dan implementasinya dalam kegiatan pembangunan.</p> <p>16. Konservasi lahan, flora dan fauna seperti penanggulangan masalah abrasi, kelestarian biota pesisir, laut dan darat.</p> <p>17. Pencemaran udara, air, dan tanah turun.</p>		
3.	Pembangunan Pendidikan	<p>1. Angka partisipasi sekolah (APS 7-12) meningkat dari 94,6% pada tahun 2012 menjadi 99,7% pada tahun 2016</p> <p>2. APS 13-15 meningkat dari 87,1% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2016</p> <p>3. APS 16-18 meningkat dari 62,9% pada tahun 2012 menjadi 66,4% pada tahun 2016</p> <p>4. Angka melek huruf meningkat dari 88,8% pada tahun 2012 menjadi 100% pada tahun 2016</p> <p>5. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,0 tahun pada tahun 2012 menjadi 8,5 tahun pada tahun 2016</p> <p>6. IPM meningkat dari 67,6 pada tahun 2012 menjadi 71,5 pada tahun 2016.</p>	<p>a. Fasilitas dan SDM bidang pendidikan masih belum terdistribusi merata,</p> <p>b. Infrastruktur pendidikan terkonsentrasi pada Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah.</p> <p>c. Pembangunan infrastruktur di daerah Rokan Hilir relatif mahal karena daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah</p>	<p>a. Komitmen pemerintah yang terus melakukan pembukaan akses transportasi kesetiap wilayah agar mobilitas penduduk dapat berlangsung dengan baik.</p> <p>b. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah membuka akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau sehingga berdampak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan penduduk.</p>
4.	Pembangunan Kesehatan	<p>1. Pertumbuhan penduduk per tahun turun dari 4,5% pada tahun 2012 menjadi 3,5% pada tahun 2016</p> <p>2. Akseptor aktif Keluarga Berencana meningkat dari 63.925 orang pada tahun 2012 menjadi 76.237 orang pada tahun 2016, atau meningkat rata-rata 3% per tahun.</p> <p>3. Angka kematian bayi turun dari 24 pada tahun</p>	<p>a. Fasilitas dan SDM bidang kesehatan masih belum terdistribusi merata,</p> <p>b. Infrastruktur kesehatan terkonsentrasi pada ibu kota kecamatan, khususnya Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah.</p> <p>c. Pembangunan infrastruktur di daerah Rokan Hilir relatif mahal karena daerah pesisir laut dan</p>	<p>c. Komitmen pemerintah yang terus melakukan pembukaan akses transportasi kesetiap wilayah agar mobilitas penduduk dapat berlangsung dengan baik.</p> <p>d. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah membuka akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau sehingga berdampak berdampak pada</p>





		<p>2012 menjadi 20 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2016.</p> <p>4. Angka harapan hidup meningkat dari 68,1 tahun (perempuan) dan 64,2 tahun (laki-laki) pada tahun 2012 menjadi 69,6 tahun (perempuan) dan 65,7 tahun (laki-laki) pada tahun 2016.</p>	<p>sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah</p> <p>d. Penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas sehingga sanitasi masyarakat kurang baik.</p> <p>e. Wilayah yang tersebar dan banyak dipisahkan oleh sungai dengan sarana dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan mobilitas penduduk sangat terbatas, sehingga akses sarana kesehatan juga terbatas.</p>	<p>peningkatan kualitas kesehatan penduduk.</p>
5.	Pemerintahan yang Handal, Bersih, dan Berwibawa	<p>1. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi.</p> <p>2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.</p> <p>3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.</p> <p>4. Kualitas SDM aparaturmeningkat 10%.</p> <p>5. Efisiensi birokrasi (beban kerja/keuangan) meningkat 5%.</p> <p>6. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah berfungsi 60%.</p>	<p>a. Proses rekrutmen masih belum didasarkan pada analisis kebutuhan.</p> <p>b. Masih kurangnya tenaga spesialis, ahli, kepakaran untuk kebutuhan pelayanan dasar.</p> <p>c. Belum berkembangnya orientasi budaya memberi pelayanan, dan masih kuatnya budaya dilayani.</p> <p>d. Lemahnya koordinasi antara SKPD-SKPD di dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Layanan Publik yang Berkualitas.</p>
6.	Masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	<p>1. Tersosialisasikannya dan teraplikasikannya Budaya Melayu di tengah masyarakat pada semua aspeknya;</p> <p>2. Prinsip-prinsip dasar Budaya Melayu yang bersendikan Islam menjadi panutan masyarakat;</p> <p>3. Implementasi Budaya Melayu dalam aspek arsitektur, tata lingkungan, dan kesenian menjadi ciri khas daerah;</p> <p>4. Lestarinya Budaya Melayu dan kearifan lokal;</p>	<p>a. Terpingirkannya budaya Melayu.</p> <p>b. Minat terhadap budaya Melayu yang rendah.</p> <p>c. Minimnya ruang apresiasi terhadap budaya Melayu.</p>	<p>Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu</p>





4.2 Lingkungan Strategis Lainnya Yang Mempengaruhi

4.2.1 Isu Global/ Internasional

a) Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda Pembangunan Pasca 2015

Memberikan arahan tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan SDGs meliputi:

- a) Penghapusan Kemiskinan
- b) Penghapusan Kelaparan
- c) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
- d) Pendidikan Berkualitas
- e) Kesetaraan Gender
- f) Air Bersih dan Sanitasi
- g) Energi Bersih dan Terjangkau
- h) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
- i) Infrastruktur tangguh, Industri inklusif, dan Inovatif
- j) Penurunan Kesenjangan
- k) Kota Inklusif Dan Berkelanjutan
- l) Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan
- m) Perubahan Iklim Dan Pengurangan Resiko Bencana
- n) Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Bawah Laut
- o) Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
- p) Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kokoh
- q) Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan.

Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengadopsi strategi melalui 5 (lima) sentra KSI (Kawasan Sentra Industri) yang diharapkan dapat menciptakan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat.

b) Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations (MEA), isu-isu yang dikembangkan adalah:



- 1) Pengembangan Industri Nasional, yang fokus pada:
 - a) Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka Memenuhi Pasar ASEAN;
 - b) Pengembangan Industri Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri;
 - c) Pengembangan Industri Kecil Menengah;
 - d) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian;
 - e) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 2) Pengembangan Pertanian, yang fokus pada:
 - a) Peningkatan Investasi Langsung di Sektor Pertanian;
 - b) Peningkatan Akses Pasar;
- 3) Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang focus pada:
 - r) Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan;
 - s) Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
 - t) Penguatan Pasar Dalam Negeri;
 - u) Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor;
- 4) Pengembangan Energi, yang fokus pada:
 - a) Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan
 - b) energi fosil (Bahan Bakar Minyak);
 - c) Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
 - d) Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik;
- 5) Pengembangan Infrastruktur, yang fokus pada:
 - a) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas;
 - b) Peningkatan Daya Saing Infrastruktur;
 - c) Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran;
- 6) Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
- 7) Pengembangan Perbankan;
- 8) Pengembangan Investasi, yang fokus pada:
 - a) Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum;
 - b) Kemudahan Berusaha;
 - c) Perluasan Investasi;
 - d) Database Investasi;
 - e) Peningkatan Daya Saing Investasi;
 - f) Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di Kawasan ASEAN;
- 9) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang fokus pada:
 - a) Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Sisi Pembiayaan;
 - b) Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka
 - c) Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d) Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 10) Pengembangan Tenaga Kerja, yang fokus pada:
 - a) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - b) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 11) Pengembangan Kesehatan, yang fokus pada:
 - a) Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri;
 - b) Peningkatan Akses Pasar;



- 12) Pengembangan Perdagangan, yang fokus pada:
 - a) Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri;
 - b) Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional;
 - c) Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam
 - d) Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
 - e) Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor;
 - f) Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;
- 13) Pengembangan Kepariwisata, yang fokus pada:
 - a) Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b) Pengembangan Acara (event) Pariwisata;
- 14) Pengembangan Kewirausahaan, yang fokus pada:
 - a) Pengembangan wirausaha pemula;
 - b) Perluasan peran wirausaha muda;
 - c) Pengembangan usaha berbasis temuan baru (Invention/Resources and Development).

Berlakunya MEA memberikan tantangan dan peluang bagi Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan daya saing melalui penciptan setra setra produksi yang potensial di setiap kecamatan, hal ini adalah upaya untuk meningkatkan daya saing hasil produk Kabupaten Rokan Hilir agar mampu bersaing secara global.

4.2.2 Isu Nasional

a) RPJPN 2005-2025 (Untuk RPJMN III)

Secara umum kebijakan pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Dari kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk: meningkatkan daya saing daerah melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDM dan kemampuan Iptek yang tinggi.

b) RPJMN 2015-2019

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut "Nawa Cita", yaitu:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;



- Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Melakukan revolusi karakter bangsa;
- Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

- a) Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
- b) Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
- c) Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

c) Peraturan Undang Undang baru

Peraturan Pemerintah PP 18 tahun 2016 tentang Penataan kembali organisasi perangkat daerah akan mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa mengurangi jumlah pegawai. Dimasa mendatang, pemerintah daerah perlu segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang organisasi perangkat daerah. Untuk dapat memberlakukan peraturan tersebut sebagai dasar pembentukan SOTK baru di kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya tantangan yang dihadapi adalah kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2015-2019. Kebijakan moratorium PNS memberikan tantangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor PNS. Kreativitas pemerintah mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan program terobosan pemerintah untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha.



4.2.3 Kebijakan Pembangunan Lainnya

a) RPJPD Provinsi Riau

Visi RPJPD Provinsi Riau

TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN, DI ASIA TENGGARA TAHUN 2020

Dengan amanat RPJP Untuk PJMD Tahap III adalah ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pada pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan:

- Pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia,
- Pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas
- Sistem informasi yang handal.

b) RPJMD Provisni Riau

Visi RPJMD Provinsi Riau 2014-2019

TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA MELAYU DAN BERDAYA SAING TINGGI, MENURUNNYA KEMISKINAN, TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA SERTA PEMANTAPAN APARATUR”.

Dengan Penekanan pada

- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan
- Berbudaya Melayu merupakan upaya terus-menerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat budaya
- Berdayasaing: Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya,tatanan sosial yang agamis
- Menurunnya kemiskinan: Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
- Lapangan kerja: Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat
- Pemantapan Aparatur: Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan.



4.3 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hilir berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dan pemanfaatan potensi pembangunan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan output pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kabupaten Rokan Hilir adalah:

1. Perekonomian Daerah

Isu penting dalam perekonomian daerah adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk dapat menggantikan sektor pertambangan minyak dan gas sebagai penopang perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir. Sektor pertanian sebagai sektor dominan dalam perekonomian tanpa minyak dan gas juga masih didominasi oleh sektor perkebunan yang lebih banyak dikuasai oleh perusahaan swasta besar. Perkembangan perkebunan rakyat telah tumbuh berkembang dan memerlukan perhatian serius dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hal mendukung sektor pertanian sebagai sektor unggulan, maka pemanfaatan keunggulan komparatif (*kompetitif advantage*) yakni potensi khusus wilayah Rokan Hilir yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa) belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan ekonomi kerakyatan pada sub-sektor perikanan darat dan peternakan. Disisi lain, pemanfaatan lahan untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat juga belum berjalan secara maksimal dalam pengembangan perekonomian rakyat, dan hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Perkembangan sub sektor perkebunan juga mengakibatkan dampak buruk bagi perkembangan sub sektor tanaman pangan, dimana penggunaan lahan untuk pertanian telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian pangan kepada perkebunan. Permasalahan alih fungsi lahan menjadi isu penting dalam pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, sehingga eksistensi Kabupaten Rokan Hilir sebagai lumbung pangan Riau akan dapat hilang, jika areal pengembangan tanaman padi terus beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Permasalahan ini akan menjadi permasalahan serius pada ketahanan pangan daerah, sedangkan persoalan ketahanan pangan merupakan urusan wajib karena menyangkut hak dasar masyarakat.



Upaya mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat terhambat dengan kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas. Kemampuan dan wawasan kewirausahaan penduduk menjadi faktor utama terhambatnya pengembangan perekonomian kerakyatan, khususnya pengembangan usaha kecil dan menengah pada sektor industri dan jasa. Penciptaan iklim investasi dan mendorong keterlibatan rakyat dalam pengembangan perekonomian tentu saja masih memerlukan perhatian, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir terus mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan dan cenderung stabil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sektor dominan perekonomian Rokan Hilir adalah sektor pertambangan (khususnya minyak), dan pada perekonomian tanpa minyak dan gas sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Rokan Hilir adalah sektor pertanian dengan kontribusi lebih dari 50 persen, sektor perdagangan dengan kontribusi sekitar 20 persen, dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi sekitar 10 persen. Pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan dimasa yang akan datang akan menjadikan sektor perekonomian Kabupaten Rokan Hilir semakin handal, karena potensi pertambangan minyak merupakan *unrenewable resources* atau sumberdaya yang tidak terbarukan, sehingga akan semakin menurun kontribusinya dalam struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir. Maka, untuk mendukung pembangunan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir yang lebih baik dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan, maka diperlukan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yakni potensi khusus wilayah Rokan Hilir yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa, perbukitan) untuk pengembangan produksi perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan lahan sebagai keunggulan daerah untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan agar penguasaan aset lahan dan distribusi penguasaan perkebunan kelapa sawit berlangsung dengan baik. Namun, disisi lain pengawasan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas, diperlukan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha. Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap perlu dimaksimalkan agar prosedur pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan baik.

Pembangunan sektor pertanian, selain dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, juga sangat penting dalam menopang pengamanan ketahanan pangan. Upaya-upaya peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian,



perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan perlu menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian agar dapat memberikan kontribusi yang semakin tinggi pada perekonomian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor industri dan usaha kecil pada perekonomian daerah maka perlu prioritas pada program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro. Hal ini berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan penduduk, penurunan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Artinya program dan kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah akan menjadi program utama yang dapat mengakomodir kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penurunan angka pengangguran (*pro job*), dan penanggulangan kemiskinan (*pro poor*).

Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi isu strategis yang perlu dikedepankan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, terutama masalah kemiskinan dan pengangguran.

2. Infrastruktur Daerah

Di antara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah adanya modal infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Adanya infrastruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses distribusi, akan bisa dilakukan lebih efisien dan efektif. Karena itu, di negara atau daerah manapun, ketika terdapat percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur.

Untuk Kabupaten Rokan Hilir, pembangunan infrastruktur terkait dengan beberapa isu strategis yang dapat dijelaskan berikut ini; Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kabupaten hasil pemekaran yang relatif muda yang memiliki ruang kosong untuk pembangunan yang luas. Oleh karena itu, penataan dan pembangunan infrastruktur relatif lebih mudah dari segi wilayah dan administrasi.

Disamping itu, Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah pesisir pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan NKRI khususnya pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau terluar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka kesatuan dan ketahanan NKRI. Oleh karena itu Kabupaten Rokan Hilir perlu menyambut isu ini agar pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat disinkronisasikan dengan program pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk pulau jemur yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan.

Sinkronisasi pembangunan tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerintah pusat. Pada tingkat yang lebih rendah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di bidang K2I menyatakan dukungan untuk pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau perlu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu peluang pendanaan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Rokan



Hilir hingga saat ini secara berkelanjutan membangun perumahan sederhana dan sehat serta jalan-jalan akses ke daerah-daerah terisolir. Program-program ini dapat dikomunikasikan dan disinkronisasikan dengan program-program dari Provinsi Riau.

Pembangunan infrastruktur baik darat, laut maupun udara di Kabupaten Rokan hilir memerlukan dana yang relatif besar. Hal ini dikarenakan struktur tanah daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah lunak yang memiliki daya dukung yang rendah. Disamping itu, beban infrastruktur yang cukup tinggi untuk mendukung kegiatan ekonomi dibidang perkebunan, pengolahan hasil alam dan migas yang memerlukan konstruksi yang padat modal dan teknologi yang memadai. Namun demikian, pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam misi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, program-program pembangunan dan peningkatan infrastruktur tidak bisa diabaikan seperti percepatan pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka isolasi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang ada, pembangunan fasilitas pelabuhan dan juga pembangunan bandar udara yang telah direncanakan. Program-program pembangunan infrastruktur yang strategis seperti misalnya untuk membuka isolasi daerah seperti di daerah Pujud dan Air hitam; pembangunan fasilitas pelabuhan seperti di Teluk Dalam dan Sinaboi maupun pembangunan bandara di Sinaboi.

Untuk keperluan perumahan penduduk, terutama penduduk miskin, pembangunan rumah layak huni masih terus diperlukan. Hingga tahun 2010, tercatat sudah sekitar 3160 rumah layak huni yang dibangun pemerintah daerah. Untuk keberlanjutan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ini, ditargetkan pembangunan 5 unit rumah layak huni perdesa.

Isu strategis lain yang perlu diperhatikan adalah isu mengenai ketersediaan air bersih yang masih minim. Namun demikian, Kabupaten Rokan Hilir memiliki ketersediaan sumber air baku yang cukup besar dengan adanya 15 aliran sungai yang salah satunya sungai Rokan. Rencana strategis yang ramah lingkungan perlu dipertimbangkan agar sumber air baku dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan air bersih secara berkelanjutan. Selain itu, untuk keperluan irigasi diperlukan sistem pompanisasi dan jaringan irigasi teknis yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang baik.

Selain air bersih, Pelayanan listrik PLN sangat rendah dan hanya menjangkau 10 persen dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir merupakan isu yang perlu diantisipasi secara sistematis. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian dan aktivitas pembangunan lainnya.

Isu lain yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir secara global dan perlu dipertimbangkan serta dikonsultasikan secara baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat adalah kejelasan dan ketetapan mengenai struktur tata ruang dan wilayah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang akan disahkan nantinya.



3. Pendidikan dan Kesehatan, SDM dan IPM

Isu pendidikan dan kesehatan merupakan isu penting dalam pembangunan kabupaten Rokan Hilir. Isu pendidikan dan kesehatan merupakan permasalahan yang dihadapi pada pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tersebar memerlukan penyediaan infrastruktur transportasi agar tingkat aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin baik.

Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Akibat kondisi wilayah yang cukup sulit karena banyak dipisah oleh sungai dan sangat tersebar, maka fasilitas dan tenaga bidang pendidikan dan kesehatan masih belum terdistribusi merata, tetapi hanya terkonsentrasi wilayah perkotaan dan wilayah pertumbuhan.

Wilayah yang tersebar dan banyak dipisahkan oleh sungai dengan sarana dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan mobilitas penduduk sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur di daerah Rokan Hilir relatif mahal karena daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah, mengakibatkan biaya pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan semakin mahal juga. Kondisi wilayah yang demikian mengakibatkan sebahagian sarana pendidikan dan kesehatan terkonsentrasi di wilayah ibu kota kecamatan, yang merupakan daerah dengan kondisi yang lebih baik, jika dibandingkan dengan desa-desa lain.

Pembangunan pembangunan manusia yang terbatas akan mengakibatkan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran terbuka dan akses penduduk untuk berusaha dan bekerja semakin terbatas. Kondisi ini secara akumulatif mengakibatkan kesejahteraan masyarakat rendah dan angka kemiskinan yang tinggi. Capaian pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan akumulasi dari pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan manusia. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hilir dari 71,51 pada tahun 2008, dan menjadi 71,98 pada tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 72,43 pada tahun 2010. Secara akumulatif pembangunan pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan manusia. Hasil-hasil pembangunan manusia merupakan potret dari keseriusan pembangunan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki kemampuan dalam aktivitas ekonomi yang ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan yang dimiliki mencukupi untuk memenuhi konsumsi sehari-hari, sehingga dapat menikmati hidup yang layak, termasuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula.

Untuk lebih memaksimalkan pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hilir dan untuk memantapkan basis pembangunan yang mengakar di tingkat masyarakat, maka upaya-upaya



peningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus dilaksanakan melalui peningkatan basis kompetensi agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik lokal, nasional dan global.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas adalah pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan terutama di luar Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah, sehingga akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin meningkat. Upaya-upaya ini tentu saja harus diiringi oleh peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan, yang terdistribusi secara merata disetiap wilayah di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya peningkatan kesehatan penduduk juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan kesehatan dan penyuluhan kesehatan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Meningkatkan promosi, pembinaan, dan pengawasan kesehatan terhadap diri, rumah, dan lingkungan. Peningkatan akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau perlu ditingkatkan, agar berdampak pada peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sumberdaya manusia.

4. Pemerintahan Daerah

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik mana kala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Suatu pemerintahan dikelola secara baik mana kala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan memudahkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah dengan melakukan penataan sistem kepegawaian yang meliputi sistem pengangkatan pegawai, penempatan yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi, kenaikan pangkat dan karier berdasarkan kinerja dan prestasi, pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), pelatihan berkala dan *on-job training*, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang. Termasuk di dalamnya pengurusan surat menyurat, perizinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelayanan umum.

Menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan bertahap menggunakan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem informasi geografis (GIS) yang efisien, efektif, dan akurat sehingga mempercepat pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur. Menerapkan transparansi dalam penganggaran, program berbasis kinerja, dan asas-asas manajemen modern untuk melancarkan pembangunan.



Dalam bidang kependudukan, pembangunan diarahkan untuk menerapkan sistem informasi kependudukan sehingga administrasi kependudukan yang handal dapat membantu optimalisasi pelayanan publik, membangun jaringan dan program aplikasi informasi kependudukan yang tersambung (*connected*) di setiap kecamatan sampai ke dinas terkait, sehingga duplikasi data penduduk dapat dihindari, mempertegas penerapan ketentuan (Perda) bagi pendatang untuk mengurangi dampak-dampak sosial pengangguran yang bersumber dari arus urbanisasi, dan memperbaharui kebijakan kependudukan sesuai dengan perkembangan kota dan pembangunan.

5. Sosial, Budaya, dan Agama

Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, penyelenggaraan acara seni dan budaya, dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. Penerapan Budaya Melayu di tengah masyarakat harus memperhatikan adat yang bersendikan syara-syara bersendikan Kitabullah di mana Islam menjadi pilar utamanya.

Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdas, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan.

Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran), ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastra (buku, puisi, sajak) dan aspek budaya lainnya. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu menjadi hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan ini.

Memajukan pendidikan agama di sekolah yang diarahkan untuk memperdalam pengetahuan agama, membentuk sikap dan perilaku mulia di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama, dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan semua amal dan perbuatan.

Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat, aparatur pemerintah, anak-anak, dan pemuda melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata.

Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan.

Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada masyarakat. Menangkal



pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama dengan mempersiapkan perangkat hukum, pengawasan, pembinaan, dan sanksi sehingga kehidupan masyarakat terlindungi dari pengaruh yang tidak baik.

Memajukan ekonomi syari'ah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat seperti lembaga amil zakat, *baitul mal wattamwil* (BMT), dan perbankan syari'ah yang turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggiatkan perekonomian masyarakat. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.



V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menurut RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, maka RPJM ke-3 (2016-2021) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Rokan Hilir di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah potensial di tempat terpencil.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan agribisnis termasuk usaha hulu dan hilir yang sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian, perkebunan, dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, serta pendapatan daerah pada masa yang akan datang; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu



didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

5.1 Visi

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan kondisi masyarakat dan Kabupaten Rokan Hilir saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang maka Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 adalah:

Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera

Unsur Visi	Penjelasan
Kawasan Sentra Industri	Kawasan sentra industri merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini di tandai dengan indicator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) pada tahun 2021 sebesar 2 %
Masyarakat Madani dan Mandiri	Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten. Hal ini di tandai dengan tingkat keberhasilan capaian IPM % sebesar 72.99
Kemandirian Daerah	Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di

Unsur Visi	Penjelasan
	dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan; Kemandirian Daerah di tandai dengan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,30% dan Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) sebesar 8%
Masyarakat Sejahtera	Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan pendidikan sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat. Tercapainya angka Kemiskinan sebesar 5.32 dan GINI Rasio sebesar 0.27

Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD, penjelasan visi tersebut telah menggambarkan keterkaitannya dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD, sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir

Visi Nasional		Visi Provinsi Riau		Visi Kabupaten Rokan Hilir	
RPJPN 2005-2025	RPJMN 2015-2019	RPJPD 2005-2025	RPJMD 2015-2019	RPJPD 2005-2025	RPJMD 2015-2019
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur	Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Terwujudnya provinsi riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya melayu secara proposional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan	Terwujudnya masyarakat rokan hilir yang sejahtera, berna'wah dan bertaqwa dengan dukungan agribisnis yang tangguh tahun 2025	Terwujudnya rokan hilir sebagai kawasan industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera



bathin, di asia tenggara tahun 2020	pendidikan dalam masyarakat yang agamais
--	---

5.2 Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 terdiri dari 5 misi yaitu:

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
2. Mengembangkan industry hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdeasaan dan perkotaan.

Tabel 5. 2: Keselarasan Agenda Nawacita (9 Agenda Prioritas RPJMN) Dengan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

9 AGENDA PRIORITAS RPJMN	PENJABARAN DALAM RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021
Agenda 1: Akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Misi 1: Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu berlandaskan iman dan taqwa
Agenda 2: Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, dan berwibawa
Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan	Misi 2 dan 5 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk perbatasan dan wilayah terisolir guna memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembentukan kawasan sentra industri yang berbasis pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan.



Agenda 4: Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Misi 4: Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum
Agenda 5: Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerjadan Indonesia Sejahtera	Misi 3: Memperkuat sumberdaya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan
Agenda 6: Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Misi 2: Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, memajukan sector pertanian, industri, dan jasa
Agenda 7: Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Misi 2 : Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembentukan kawasan sentra industri yang berbasis pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan sesuai dengan potensi wilayah
Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Misi 1: Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu berlandaskan iman dan taqwa
Agenda 9: Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial	Misi 1: Mewujudkan budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir

Tabel 5. 3 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Riau dengan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

Misi RPJMD Provinsi Riau	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan konektivitas pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat pada setiap jenjang pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan dan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat
4. Menurunkan Kemiskinan	Mewujudkan kawasan sentra industri perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai penggerak ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Mewujudkan good governance yang handal, bersih dan berwibawa
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Mewujudkan masyarakat Rokan Hillir berbudaya Melayu berlandaskan iman dan taqwa
7. Memperkuat Pembangunan	Mewujudkan kawasan sentra industri perikanan,

Pertaniandan Perkebunan	pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai penggerak ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Menyediakan infrastruktur pendukung guna mempermudah akses menuju objek wisata
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.	Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka peningkatan iklim investasi

Dikaitkan dengan Misi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025, maka penerjemahan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

Misi RPJPD Rokan Hilir 2005-2025	Misi RPJMD Rokan Hilir 2016-2021
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat
Memajukan perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya	Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat
Mewujudkan pemerintah dan pengelolaan pemerintahan yang handal	Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi
Menyediakan infrastruktur daerah dan mewujudkan lingkungan alam yang lestari	Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan
Mewujudkan masyarakat yang bermarwah, berdedikasi dan terpuji dengan Budaya Melayu sebagai ruhnya	Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya Melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa
Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa	Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya Melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa

5.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.



Visi : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera											
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					TARGET AKHIR
						2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa	Mewujudkan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu	Jumlah Karya intangible (Tak Benda) yang terdaftar sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Indonesia	NA	2	3	4	5	6	6
2.	Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat	Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	1.00	1.00
				PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	70,39	70,67	70,94	71,22	71,50	71,79	71,79
				Persentase peningkatan PAD (%)	104,65	5	7	7	7	7	7
				Nilai Tukar Petani (Rp)	116,96	116,96	121	121,5	122	122,5	122,5
				Produksi perikanan(Ton)	67,5	67,5	70	73	75	78	78





				Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton/Ha)	NA	3,64	3,83	4,01	4,22	4,43	4,43
3.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pendidikan	APS (7-12 Tahun)	93,68	94	94,20	94,40	94,60	95	95
				APS (13-15 Tahun)	89,16	90	90,20	90,60	90,90	91	91
				APS (16 - 18 Tahun)	75,68						
				APK SD/MI (%)	92	94	95	96	97	98	98
				APK SMP/MTs(%)	88	89	90	92	94	95	95
				APK SMA/SMK/MA (%)	67	68	70	71	74	75	75
				Angka Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	12	12	12	12	12	12	12
				Angka Melek Huruf (%)	95	96	96	97	97	98	98
		Peningkatan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup(Tahun)	69,27	69,80	70	70,10	70,40	70,60	70,60	
			Angka Kematian Bayi(Bayi/1000)	34,8	18	16	14	12	10	10	
			Angka Kematian Ibu Melahirkan(ibu/1000)	99	91,08	83,79	77,09	70,92	65,25	65,25	
			Angka Kesakitan Malaria(orang/1000)	6,1	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,3	
			Angka Kesakitan DBD(orang/100.000)	12,33	12,33	11,1	9,99	8,99	8,09	8,09	





			Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57,61	63,71	63,9	64	64,15	64,30	64,30
				Persentase Pengangguran Terbuka (%)	8,85	8,8	8,6	8,4	8,2	8	8
4.	Menedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan investasi iklim	Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir	C	B	B	B	BB	A	A
				Indek Kepuasan Masyarakat	n/a	70	72	74	75	77	77
				Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	CC	B	B	BB	BB	BB
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	n/a	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi	Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian dipedesaan dan perkotaan	Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah	Tersedianya Jaringan Transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian	Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani (%)	98	98	100	100	100	100	100
				Rata-Rata Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani	95,66	96	96	96	97	100	100





			masyarakat	(%)							
				Kondisi Jalan dalam kondisi baik (%)	80	82	85	87	89	92	92
				Kondisi Jalan dalam kondisi sedang (%)	35	32	30	28	26	25	25
				Kondisi Jalan dalam kondisi rusak (%)	30	24	22	20	19	17	17
				Frekuensi Pelayanan Angkutan Laut (feri)	1.7	1.7	1.8	2	2	2	2
		Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah pedesaan dan perkotaan	Terkoneksinya infrastruktur transportasi pedesaan dan perkotaan	Persentase Desa Terisolir	N/A	1%	1%	1%	0%	0%	0%
				Jumlah Alat Transportasi Pedesaan (Buah)	36	36	37	37	38	39	39
				Persentase Jalan Beraspal di Pedesaan (%)	60%	62%	64%	65%	67%	69%	69%
				Jumlah Jembatan Penghubung Antar Pedesaan dan Perkotaan (Unit)	195	200	215	220	220	230	230





VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan diperlukan untuk mencapai Misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan diperlukan sebagai penegasan terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Penegasan tujuan dan sasaran pembangunan dimaksudkan untuk menyusun program-program dan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun. Rumusan arah kebijakan sangat diperlukan sebagai panduan dalam penyusunan program-program pembangunan yang dapat diindikasikan untuk mencapai misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan sebagai wujud dari hasil-hasil pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai misi pembangunan. Strategi pembangunan merupakan penjelasan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang kemudian diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan dalam melaksanakan pembangunan untuk lima tahun yang akan datang.

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan RJPMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 akan disampaikan dalam bahagian kedua. Rumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan menjadi parameter utama dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya berpikir strategik untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

6.1 Strategi Umum Pembangunan

Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir pada 5 tahun yang akan datang diperlukan strategi umum pembangunan yang disusun sesuai dengan tujuan pembangunan untuk mencapai misi dan visi pembangunan yang ditetapkan. Sesuai dengan kondisi daerah maka strategi umum



pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016 – 2021 adalah **Pembangunan Spasial** yaitu pelaksanaan pembangunan pada semua aspek yang mendukung terhadap hasil-hasil pembangunan yang menekankan pada aspek ruang sesuai dengan potensi masyarakat dan wilayah pada kawasan strategis sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang di Kabupaten Rokan Hilir.

Penekanan Strategi Pembangunan Spasial merupakan pembangunan yang menekankan aspek unit wilayah strategi secara konkrit dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan. Unit wilayah strategis tersebut adalah kawasan strategis yang disusun sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Penempatan pembangunan pada kawasan strategis dimaksudkan untuk memfungsikan dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam kewilayahan dan sumberdaya masyarakat lokal dalam pemecahan masalah untuk mencapai hasil yang lebih baik. Strategi Pembangunan Spasial diharapkan mampu mengoptimalkan berfungsinya hubungan antarpelaku dan antaraktivitas yang terkoordinasi dan terintegrasi dan saling mendukung untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai guna hasil pembangunan bagi masyarakat dan daerah. Pelaksanaan pembangunan dengan Strategi Pembangunan Spasial dimulai dari pembangunan ekonomi daerah melalui pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi produktif sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia pada kawasan strategis, yang didukung oleh penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung terhadap aktivitas ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan dan penyediaan unsur-unsur lain yang diperlukan dalam pengembangan wilayah strategis. Dengan demikian, akan terbentuk karakteristik wilayah dengan ciri tersendiri pada setiap kawasan strategis.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan Strategi Pembangunan Spasial adalah terbentuknya aktivitas ekonomi yang saling terintegrasi dengan menghasilkan produk-produk spesifik daerah yang didukung oleh kompetensi sumberdaya manusia, pasar, dengan dukungan infrastruktur yang mantap pada setiap kawasan strategis. Bentuk konkrit pengembangan aktivitas ekonomi produktif pada kawasan strategis adalah terciptanya Kawasan Sentra Industri (KSI) pada setiap kawasan strategis di Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari pendekatan Strategi Pembangunan Spasial adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang didukung oleh struktur ekonomi yang kuat pada sector non migas,
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran,
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat,
4. Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

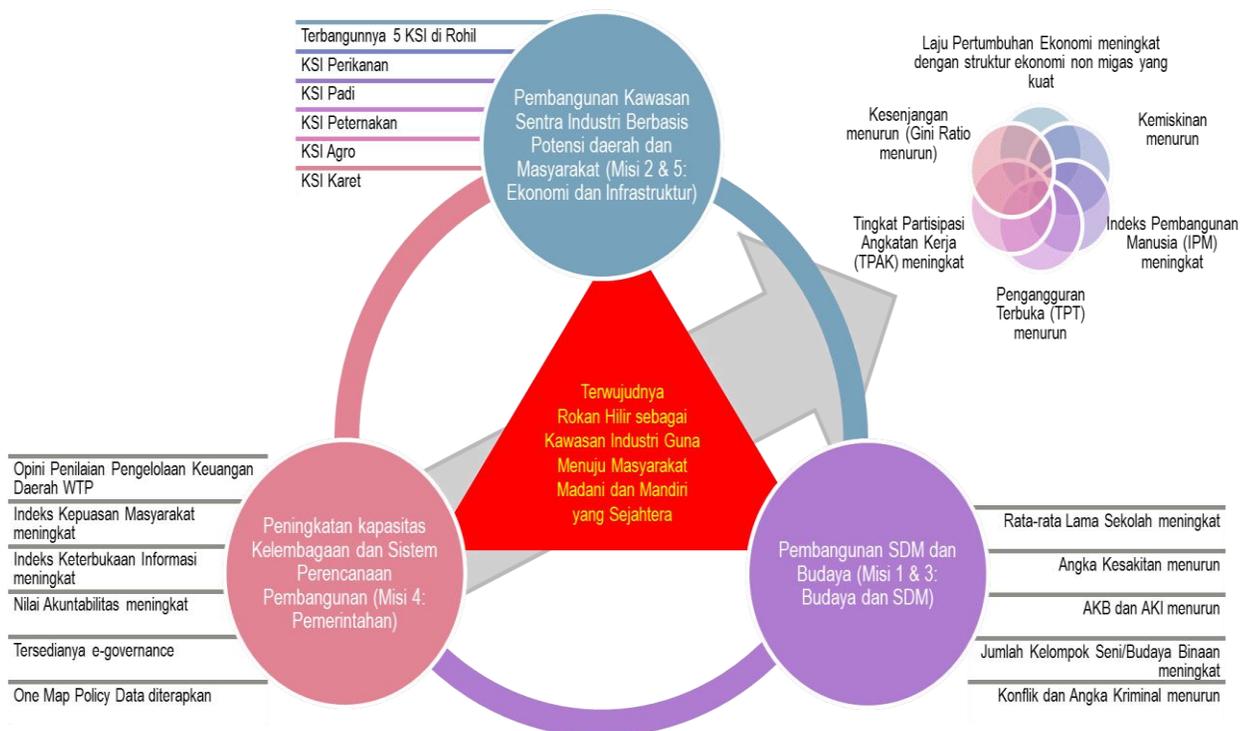


Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka implementasi Strategi Pembangunan Spasial Kabupaten Rokan Hilir pada RPJMD 2016-2021 dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk menyelesaikan masalah pembangunan secara terpadu dan terintegrasi untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Dengan demikian, Strategi Pembangunan Spasial harus menghindari pelaksanaan pembangunan secara parsial dan sektoral. Rumusan Strategi Pembangunan Spasial harus dimulai dari perumusan dan penyusunan rencana pembangunan melalui koordinasi dan sinergi antar sektor dan antar organisasi pemerintah daerah (OPD) pada setiap kawasan strategis. Untuk itu, maka penekanan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada RPJMD 2016-2021 ini harus dilakukan dengan:

1. Menekankan **pembangunan dan pengembangan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas** yang membentuk pola keruangan wilayah yang strategis yang dilengkapi dengan **infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan (Misi Kedua dan Misi kelima)**
2. Mendukung Kawasan Sentra Industri sebagai kawasan pengembangan strategis dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, **masyarakat beriman dan bertaqwa, berakhlak, dan berbudaya melayu**, dengan **dukungan sistem pemerintahan yang handal (Misi Pertama, Misi Ketiga, dan Misi Keempat).**

Secara ringkas strategi umum pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada RPJMD 2016-2021 dengan pendekatan Strategi Pembangunan Spasial dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 6.1. Strategi Pembangunan Spasial dalam Pembangunan Rokan Hilir 2016-2021





6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Rokan Hilir 2016-2021 sesuai dengan jabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan.

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang mengindikasikan program-program untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan. Sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan rencana pembangunan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Secara umum, untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut.

Tabel VI. 1: Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

Visi: Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa			
Mewujudkan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu	Pengintegrasian nilai budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan Masyarakat	Penerapan Nilai Budaya Melayu dalam Pendidikan formal dan non formal
		Pelestarian warisan kesenian, tradisi dan cagar budaya	Melestarikan objek cagar budaya, kesenian dan tradisi daerah
		Pembinaan kerukunan umat beragama dan peningkatan peran lintas agama dalam pembinaan kerukunan umat beragama	Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam menciptakan kondisi kondusif dan toleransi antar umat beragama
			Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan keagamaan dan ahlak masyarakat
Misi 2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat			
Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Mengembangkan cluster-cluster industri dalam bentuk Kawasan Sentara Industri (KSI) Berbasis Masyarakat pada Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan sesuai dengan Potensi Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai struktur ruang daerah	Pembangunan dan Penguatan Sentra-Sentra Produksi sebagai Kawasan Sentra Industri berbasis masyarakat dan potensi wilayah
			Perluasan, Replikasi dan Pengintegrasian antar Sentra Produksi pada Kawasan Sentra Industri



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			(KSI)
		Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor non migas sesuai dengan potensi daerah	Fasilitasi pengembangan industri hilir
			Pengembangan sektor pariwisata daerah
			Pengembangan sektor jasa-jasa dan perdagangan
			Peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
Misi 3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat			
Meningkatnya kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas	Pemenuhan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan dasar	Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik (sertifikasi guru)
		Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar	Pemenuhan manajemen pelayanan pendidikan dan tata kelola sekolah
	Peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Memenuhi upaya kesehatan masyarakat
		Meningkatkan upaya preventif bidang kesehatan	Mempromosikan hidup sehat dan memberdayakan masyarakat
			Menangani dan mencegah kekurangan gizi
			Mencegah dan menanggulangi penyakit menular
		Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin	Menjamin kesehatan penduduk miskin
		Menyediakan pelayanan kesehatan di puskesmas yang handal	Membangun, meningkatkan dan memperbaiki puskesmas
		Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dan ibu melahirkan	Meningkatkan kesehatan anak balita
			Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran	Peningkatan skill dan kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah
			Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal
			Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal
Misi 4. Mengedepankan prinsip <i>good governance</i> untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim investasi			
Mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>cleand and good governance</i>	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan edukasi kepada masyarakat dan swasta
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur).	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan kompeten.
		Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan terpadu	Mengintensifkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemerintahan
			Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
		Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan koordinasi pemanfaatan dan pengendalian ruang.
			Penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah	Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan		
	Memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan		
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Penerapan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah yang sistematis
			Optimalisasi penggunaan anggaran secara bertanggung jawab.
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan.	Penataan prosedur administrasi dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah
		Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat	Peningkatan stabilitas yang didukung dengan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	swakarsa masyarakat.
		Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Misi 5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di pedesaan dan perkotaan			
Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah	Tersedianya jaringan transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat	Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur darat, laut dan penyeberangan	Membangun dan melakukan kerjasama pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkelanjutan.
		Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur energi, telekomunikasi dan air bersih penunjang industri	Meningkatkan ketersediaan air bersih, energi dan telekomunikasi penunjang industri
		Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan dan peternakan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pasar dan fasilitasnya Meningkatkan infrastruktur irigasi dan pengairan Meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan Meningkatkan infrastruktur penelitian dan pengembangan serta pembenihan
	Terkoneksinya infrastruktur transportasi pedesaan dan perkotaan	Meningkatkan konektivitas infrastruktur transportasi pedesaan dan perkotaan	Meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
		Meningkatkan jangkauan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih	Meningkatkan jangkauan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir





VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan agar selaras dengan strategi dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu, kebijakan umum harus disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD masing-masing. Program pembangunan merupakan bentuk instrument kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan RPJMD tahun 2016-2021 sebagai pedoman Renstra SKPD tahun 2016-2021.



Tabel VII-1: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
Misi 1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa								
Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu	Pengintegrasian nilai budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan Masyarakat	Penerapan Nilai Budaya Melayu dalam Pendidikan formal dan non formal	Terlaksananya Kurikulum budaya melayu di Sekolah formal dan non formal	0	Ada	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	DIS DIK
			cakupan pengembangan sanggar budaya	80%	82%			
			Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan	30%	80%	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga	DIS PAR PORA
			Terselenggaranya Paskibra Kab Rohil 2017	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
			Cakupan pengiriman atlet dan pelaksanaan kegiatan olahraga	30	80	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	DIS PAR PORA
			Cakupan sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	30%	82%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	DIS PAR PORA
								DIS PU TR
			Pelestarian warisan kesenian, tradisi dan cagar budaya	Melestarikan objek cagar budaya, kesenian dan tradisi daerah	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya	80%	82%	Program pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah Pngiat Seni yang dibina	12	50			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DIS DIK	





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Jumlah koleksi arsip yang dilestarikan dan terdokumentasi (berkas)	na	100%	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah	Kearsipan	SET WAN
			Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen bernilai sejarah: Restorasi. Persentase cakupan pembinaan pengelolaan arsip	na	100%			
			Cakupan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	na	100%			
	Pembinaan kerukunan umat beragama dan peningkatan peran lintas agama dalam pembinaan kerukunan umat beragama	Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam menciptakan kondisi kondusif dan toleransi antar umat beragama	Persentase penanganan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	na	80%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Persentase pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	na	80%	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Terciptanya sinergitas antara lembaga/ instansi/ organisasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan	6 Lembaga	30 Lembaga	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Jumlah konflik bernuasa sara	5 kasus	0 kasus	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu:	80%	100%	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Pemilukada Provinsi	75%	100%			
			Pemilukada Kabupaten	85%	100%			
			Pemilu Pilpres	76%	100%			
			Jumlah upaya pencegahan dini bencana	6%	30%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Jumlah operasional penanganan gangguan bencana alam yang dilakukan TRC	6 Kegiatan	30 Kegiatan	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
		Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan keagamaan dan ahlak masyarakat	Jumlah Peningkatan pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Rohil	na	30 Kegiatan	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Persentase aparat Satpol PP yang sigap, tanggap, dan terlatih	na	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Persentase Perda/Perkada yang disosialisasikan dan ditegakkan	na	80%	Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Meningkatnya sumber daya manusia tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (orang)	na	500 orang	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	DIS SOSIAL
			Jumlah Panti asuhan dan panti jompo yang dibina	2	12	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Sosial	DIS SOSIAL
			Persentase orang yang mendapatkan bantuan jaminan sosial serta perlindungan sosial.	na	75%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya.	Sosial	DIS SOSIAL
			Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan	na	250 orang	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			rehabilitasi kesejahteraan sosial					
			Presentase anak penyandang masalah sosial yang mendapat pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	na	75%	Program Pembinaan Anak Terlantar	Sosial	DIS SOSIAL
			Peningkatan pengetahuan peyandang cacat	12 kegiatan	24 Kegiatan	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Sosial	DIS SOSIAL
			Jumlah Pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial TS			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	DIS SOSIAL
			terlaksananya peringatan hari besar (tahun 1 saja)*	90	100	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Sosial	DISDUKCAPIL, SET DA/KOPRI
Misi 2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat								
Meningkatkan perekonomian daerah	Mengembangkan cluster-cluster industri dalam bentuk Kawasan Sentra Industri (KSI) Berbasis Masyarakat pada Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan	Pembangunan dan Penguatan Sentra-Sentra Produksi sebagai Kawasan Sentra Industri berbasis masyarakat dan potensi wilayah	Produktifitas pertanian/perkebunan			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DKP TAN
			Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DKP TAN
			Cakupan Penyuluhan pertanian/perkebunan			Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Pertanian	DKP TAN
			Produktifitas Peternakan			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pertanian	DKP TAN





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
	Peternakan sesuai dengan Potensi Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai struktur ruang daerah	Perluasan, Replikasi dan Pengintegrasian antar Sentra Produksi pada Kawasan Sentra Industri (KSI)	Persentase Tercapainya Pengelolaan Hasil perikanan dan Kelautan		5000 ton	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil perikanan dan kelautan	Perikanan	DIS KAN
			Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan perikanan, Hygyenis Produk dan pengemasan	6 Pelatihan	12 Pelatihan	Program Peningkatan Kualitas hasil pengolahan Perikanan dan Kelautan dengan Orientasi Hygienis dan Kemasan yang Modern	Perikanan	DIS KAN
Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor non migas sesuai dengan potensi daerah	Fasilitasi pengembangan industri hilir	Meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan petani				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	DKP TAN
		Jumlah Pelaku usaha	na	150 pelaku usaha	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DKP TAN	
		Persentase angka kematian ternak (%)	na	5%	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	DKP TAN	
		Jumlah Produksi Perternakan Sapi kambing unggas			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	DKP TAN	
		Tingkat penerapan teknologi tepat guna pada bidang pertanian/perkebunan		4	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Pertanian	DKP TAN	
		Jumlah Pelaku usaha Perikanan Yang dimbina	160 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Perikanan	DIS KAN	
		Jumlah kegiatan Kemasyarakatan yang terkait dengan kelautan (Orang)	na	150 orang	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Perikanan	DIS KAN	





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD			
			Produksi Budidaya Perikanan	1571.52 Ton	1750 Ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Perikanan	DIS KAN			
			Produksi Perikanan Tangkap	55742.2 Ton	58000 Ton	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Perikanan	DIS KAN			
			Konsumsi Ikan Perkapita dan angka ketersediaan	Konsumsi Perkapita: 35,07 Kg/Kapita/th dan Ketersedian 25,01 kg/Kapita/th	Konsumsi Perkapita: 35,83 Kg/Kapita/th dan Ketersedian 27,09 kg/Kapita/th	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Perikanan	DIS KAN			
			Jumlah Pelaku usaha Perikanan Yang Dibantu (Keramba Jaring Apung)	unit	4	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Perikanan	DIS KAN			
			Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	8 Mou	12 Mou	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	DPMPT			
			Jumlah Investor Baru	8	24 Investor						
			Terciptanya Kerjasama dalam Wilayah KSI	0	5 Mou						
			Pertumbuhan Nilai Investasi PMA			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	DPMPT			
			Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN								
			Pengembangan sektor pariwisata daerah			Cakupan pengelolaan keragaman budaya	80%	82%	Program pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	DIS DIK
						Terdatanya ODTW (Objek Dan Daya Tarik Wisata)	12 objek Wisata	18 objek Wisata			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Bertambahnya ODTW (Objek Dan Daya Tarik Wisata) yang ditata	12 objek Wisata	22 objek wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DIS PAR PORA
		Pengembangan sektor jasa-jasa dan perdagangan	Jumlah IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	212 IKM	300 IKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	DIS PERINDAG SAR
			Pertumbuhan tenaga kerja yang diserap UKM (%)	na	10000 orang			
			Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi tepat guna dengan cara pleatihan, magang, sosialisasi, pendampingan langsung, dan bantuan peralatan	5 kegiatan	5 Kegiatan	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DIS PERINDAG SAR
			Jumlah Sentra Industri	0	2	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	DIS PERINDAG SAR
			Jumlah makan dan Minuman yang dilakukan pengujian	na	700 prodak/tahun	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	DIS PERINDAG SAR
			Jumlah alat UTTP yang dilakukan pengawasan dan Pengujian	na	24 Alat			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD	
			Jumlah rumusan kesepakatan perdagangan perbatasan antar Kabupaten Rokan Hilir - Malaysia	na	3 Mou	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Perdagangan	DIS PERINDAG SAR	
			Jumlah ekspor produk ke LN			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	DIS PERINDAG SAR	
			Cakupan Peningkatan area pemasaran produk UKM	30%	80%	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DIS PERINDAG SAR	
			Rata-rata persentase koefisiensi variasi harga bahan pokok			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DIS PERINDAG SAR	
			Jumlah Pedangang Kaki lima yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		DIS PERINDAG SAR	
		Peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Jumlah IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi tehnologi tepat guna	na	175 IKM	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian	DIS PERINDAG SAR	
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran	Peningkatan skill dan kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah	Jumlah Wira Usaha Baru	0	1500 Pengusaha	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKOP UKM
				Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang diserap UMKM	0	10000 orang	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKOP UKM





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Persentase Koperasi Aktive	180 Koperasi	300 Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKOP UKM
			Persentase Koperasi Sehat Terhadap Total KSP/USP	180 Koperasi	300 Koperasi			DISKOP UKM
			Prosentase peningkatan kualitas pelaku UKM	40%	90%	Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKOP UKM
		Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal	Persentase Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan	100	100	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK	Tenaga Kerja	DISNAKER
		Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal	Angka pengangguran [%]	10	10	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	DISNAKER
			Persentase lembaga ketenagakerjaan yang berkembang aktif	80	82	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	DISNAKER
Misi 3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat								
Meningkatkan kualitas SDM	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas	Pemenuhan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat	Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kompetensi [%]	70	72	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	DIS DIK
			Persentase terpenuhinya pelayanan PAUD bagi	70	72		Pendidikan	DIS DIK





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			anak usia dini [%]					
			Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil [%]	80	82	Program Wajib Belajar 9 Tahun	Pendidikan	DIS DIK
			% Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis [%]	80	82			
			Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta	80	82			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik [%]					
			Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	80	82			
			Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	80	82			
			Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup	80	82			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;					
			Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	80	82			
			Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	80	82			
			Persentase terpenuhinya pelayanan pendidikan menengah (1 Tahun Saja)	80	82	Program Pendidikan Menengah [RPJMD tahun 1 saja]	Pendidikan	DIS DIK
			Terlaksananya pembinaan pendidikan non formal [%]	80	82	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIS DIK
			Terlaksananya pembinaan pendidikan	80	82	Program Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan	DIS DIK





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			luar biasa [%]					
	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan dasar	Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan					
			Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran					
			Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik					
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak					





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%					
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn					
			Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik					
			Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik					





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik					
			Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;					
			Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :					
			- Kelas I - II : 18 jam per minggu					
			- Kelas III : 24 jam per minggu					





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			- Kelas IV – VI : 27 jam per minggu					
			- Kelas VII – IX : 27 jam per minggu					
			Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya					
			Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik					
			Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester					
			Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada					





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik					
			Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota	80	82			
		Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik (sertifikasi guru)	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	80	82			
			Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata	80	82			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran					
			Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	80	82			
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	80	82			
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran	80	82			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn					
			Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	80	82			
			Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	80	82			
			Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	80	82			
			Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,	80	82			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;					
			Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	80	82			
			- Kelas I - II : 18 jam per minggu	80	82			
			- Kelas III : 24 jam per minggu	80	82			
			- Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	80	82			
			- Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	80	82			
			Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	80	82			
			Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk	80	82			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik					
			Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	80	82			
			Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	80	82			
			Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada	80	82			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan					
	Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar	Pemenuhan manajemen pelayanan pendidikan dan tata kelola sekolah	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	80	82			
			Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	80	82			
			Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	80	82			
			Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	80	82			
			Tersusunnya database pendidikan untuk	20	40			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			memenuhi SPM					
			Persentase terpenuhinya target pelaksanaan lomba dan pengiriman peserta lomba	80	82	Program Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Pendidikan	DIS DIK
Peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Memenuhi upaya kesehatan masyarakat	Cakupan peserta KB aktif	60	62	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	DIS KES
			Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	90	92		Kesehatan	RSUD
			Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	90	92		Kesehatan	RSUD
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	90	92		Kesehatan	RSUD
			Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80	82		Kesehatan	RSUD
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	92		Kesehatan	RSUD
			Cakupan pelayanan ibu nifas	90	92		Kesehatan	RSUD





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Persentase terselenggaranya pelayanan di puskesmas2.	90	92		Kesehatan	RSUD
			Persentase terselenggaranya pelayanan di RSUD*	80	82		Kesehatan	RSUD
			RSUD tersertifikasi akreditasi Nasional	100	100	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD
			RSUD Kelas C memiliki 7 dokter spesialis	80	80			
			Tambahan 2 RSUD di Bagan Batu dan Ujung Tanjung	0				
			Cakupan pelayanan RSUD	80	82			
			Cakupan pemeliharaan fasilitas RSUD [%]	80	82	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	RSUD
			Cakupan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	80	82	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSUD
			Rasio rumah layak huni	85	87	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	DIS PERU RA
			Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	135	80	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	DIS PERU RA





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Jumlah pembangunan rumah layak huni	85	87	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	DIS PERU RA
	Meningkatkan upaya preventif bidang kesehatan	Mempromosikan hidup sehat dan memberdayakan masyarakat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	90	92	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	DIS KES
			Cakupan Desa Siaga Aktif [%]	90	92		Kesehatan	RSUD
			Cakupan promosi RSUD*	90	92		Kesehatan	RSUD
		Menangani dan mencegah kekurangan gizi	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	DIS KES
			Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	20	18			
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	30	28			
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	80	82			
		Mencegah dan menanggulangi penyakit menular	Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	90	91	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	DIS KES
			Penderita DBD yang Ditangani	90	91			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	90	91			
			Menurunnya angka kesakitan penyakit menular	20	19			
	Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin	Menjamin kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	90	91	Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	DIS KES
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	90	91			
	Menyediakan pelayanan kesehatan di puskesmas yang handal	Membangun, meningkatkan dan memperbaiki puskesmas	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	90	91	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	DIS KES
			Puskesmas terakreditasi tersertifikasi (persen)	60	62		Kesehatan	DIS KES
			Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (persen)	70	72		Kesehatan	DIS KES
			Tersedianya dokumen pendukung bidang Kesehatan	100	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	DIS KES
			Tersedianya dokumen Renja, RKA dan Renstra	100	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesehatan	DIS KES





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
	Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dan ibu melahirkan	Meningkatkan kesehatan anak balita	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	82	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	DIS KES
			Cakupan kunjungan bayi	80	82			
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80	82			
			Cakupan pelayanan anak balita	80	82			
			Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	20	18			
			Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	DIS KES
			Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	20	18			
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	30	28			
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	80	82			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
		Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan	Cakupan perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	80	82	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	DIS KES
			Cakupan lingkungan yang sehat	70	72	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	DIS KES
Peningkatan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran	Peningkatan skill dan kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah	Jumlah Wira Usaha Baru	0	1500 Pengusaha	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKOP UKM
			Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang diserap UMKM	0	10000 orang	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKOP UKM
			Persentase Koperasi Aktive	180 Koperasi	300 Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKOP UKM
			Persentase Koperasi Sehat Terhadap Total KSP/USP	180 Koperasi	300 Koperasi			DISKOP UKM
			Prosentase peningkatan kualitas pelaku UKM	40%	90%	Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISKOP UKM
		Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal	Persentase Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan	100	100	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK	Tenaga Kerja	DISNAKER





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
		Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal	Angka pengangguran [%]	10	10	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	DISNAKER
			Persentase lembaga ketenagakerjaan yang berkembang aktif	80	82	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	DISNAKER
Misi 4. Mengedepankan prinsip <i>good governance</i> untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim investasi								
<i>Mewujudkan Good Governance dalam penelenggaraan pemerintahan</i>	Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>cleand and good governance</i>	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan edukasi kepada masyarakat dan swasta	Persentase Jumlah kebijakan KDH yang difasilitasi	85%	100%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Fungsi Lainnya	Seluruh Kecamatan Rokan Hilir
			Persentase penurunan penyimpangan pengelola keuangan	0	100%		Fungsi Lainnya	Seluruh Kecamatan Rokan Hilir
			Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS serta Pendamping yang diberdayakan	na	600 Lembaga	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Fungsi Lainnya	Seluruh Kecamatan Rokan Hilir
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur).	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan kompeten.	Persentase tenaga pemeriksa yang kompeten dan bersertifikat	0	45%	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Fungsi Lainnya	INSPEKTORAT
			Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan tugas belajar			Program Pendidikan kedinasan	Fungsi Penunjang	BKD
			Jenis diklat aparatur yang diikuti: Fungsional, Teknis.	na	400 orang			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD		
			Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin.	na	0	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Fungsi Penunjang	BKD		
			Persentase PNS yang berpendidikan: S1, S2, S3.	2570 orang	3000 orang					
			Persentase jumlah penataan pengembangan manajemen ASN yang profesional	40	80					
			Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun/ purna tugas			Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			Fungsi Penunjang	BKD
			Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	80	85	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			Fungsi Penunjang	BKD
	Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan terpadu	Mengintensifkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemerintahan	Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan kerjasama pembangunan (Dokumen)	an	16	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang	BAPPEDA		
			Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan		42 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang	BAPPEDA	
		Jumlah Dokumen Perencanaan			42 Dokumen	Fungsi Lainnya		SETDA		
		Jumlah pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			6 Kegiatan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penanganan Bencana Alam Daerah	DIS SOSIAL		





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Persentase pelayanan darurat dan logistik	60	80	Program Kedaruratan dan Logistik	Penanganan Bencana Alam Daerah	DIS SOSIAL
			Persentase korban bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	na	60	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penanganan Bencana Alam Daerah	DIS SOSIAL
			Tersedianya dokumen peraturan daerah	18 Perda	24 Perda	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Fungsi Penunjang	SET WAN
			Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	80%	82%			
			Cakupan penyelenggaraan pelayanan KB	80%	82%	Program keluarga berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A
			Cakupan dukungan sarana prasarana penyuluh KB dan PLKB	80%	82%			
			Cakupan pembinaan kesehatan reproduksi remaja	80%	82%	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A
			Cakupan pelayanan kontrasepsi	80%	82%	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Cakupan pembinaan KB mandiri	80%	82%	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A
			Cakupan penyelenggaraan pembinaan ibu dan anak	80%	82%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial * (tahun pertama saja) tahun kedua masuk ke Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A
			Cakupan pembinaan keluarga	80%	82%	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A
			Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan	80%	82%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A
			Cakupan penyelenggaraan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	80%	82%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A
			Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	80%	82%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Cakupan pembinaan organisasi perempuan	80%	82%	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB P3A
	Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan koordinasi pemanfaatan dan pengendalian ruang.	Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan ekonomi	5 dokumen	42 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Fungsi Penunjang	BAPPEDA
			Tersedianya dokumen pendukung perencanaan pembangunan Daerah rawan bencana	na	5 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Fungsi Penunjang	BAPPEDA
			Tersedianya Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi	2 Dokumen	8 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Kota - Kota Menengah dan Besar	Fungsi Penunjang	BAPPEDA
			cakupan layanan e KTP	90%	98%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	DISDUKCAPIL
			cakupan layanan perkawinan muslim belum punya surat nikah	90%	100%			
			Cakupan penyebarluasan informasi mass media	80%	90%	Program kerjasama informasi dengan mass media	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	DISDUKCAPIL





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
		Penataan ruang yang berwawasan lingkungan.	Tersedianya dokumen, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2 Dokumen	5 Dokumen	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Fungsi Penunjang	BAPPEDA
	Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah	Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan	Persentase penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah	na	0%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Fungsi Lainnya	INSPEKTORAT
Persentase pencapaian daya serap APBD/APBN			95%	100%	Fungsi Lainnya		SET DA	
Cakupan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH			95%	100%	Sosial		DIS SOS	
			95%	100%	Fungsi Penunjang		BAPPEDA	
Tersedianya Dokumen Penataan dan Inventarisasi Aset Bappeda Rokan Hilir			an	ada	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang	BAPPEDA	
Persentase terfasilitasnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH			95%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Fungsi Lainnya	SET DA	
Memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan			Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan sosial budaya	na	ada	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Fungsi Penunjang	BAPPEDA





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
		pembangunan	Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah		6	Program Pengembangan Data dan Informasi	Fungsi Penunjang	BAPPEDA
			Jumlah kerjasama dibidang perekonomian	na	24 Kerjasama	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah	Fungsi Lainnya	SET DA
			Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik			Program penataan peraturan perundang-undangan	Fungsi Lainnya	SET DA
			Persentase usulan pemekaran desa yang telah disusun ranperdanya	6 Ranperda	24 Ranpeda	Program penataan daerah otonomi baru	Fungsi Lainnya	SET DA
			Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan (BUMDes, pasar desa dan POSYANTEK)	na	150 Lembaga Usaha	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DIS PE MAS
			Cakupan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan desa		98	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DIS PE MAS
			Jumlah Aparatur PMD dan kelembagan Desa yang Berkompetensi	na	400	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DIS PE MAS SET DA
			Presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	na	98	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DIS PE MAS





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Jumlah penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG)		4			
			Cakupam Desa yang mempunyai RPJMDES (%)	na	98	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DIS PE MAS
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Penerapan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah yang sistematis	Persentase penyelesaian laporan keuangan TW/SM/LKPD tepat waktu	na	98	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Lainnya	SET DA
			Persentase penyelesaian administrasi pengadaan dan pemeliharaan aset					
			Opini LKPD dari BPK	Wajar Dengan pengecualian	Wajar tanpa Pengecualian			
			Cakupam Desa yang mempunyai RPJMDES (%)	na	98	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Tingkat ketepatan pengelelolaan keuangan daerah			Tingkat ketepatan pengelelolaan keuangan daerah	Fungsi Lainnya	SET DA	
		Optimalisasi penggunaan anggaran secara bertanggung jawab.		80	98	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota	Fungsi Penunjang	BA PEN DA
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber	Penataan prosedur administrasi dan	Peningkatan penerimaan pajak daerah			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang	BA PEN DA	





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
	pendapatan.	penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan penerimaan retribusi daerah					
			Peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
			Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang Sah					
			Tersedianya data sektoral perekonomian daerah			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Fungsi Penunjang	BA PEN DA
			Peningkatan penerimaan pajak daerah			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang	SET DA
			Peningkatan penerimaan retribusi daerah					
			Peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
			Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang Sah					
			Prosentase ketepatan pengelolaan keuangan daerah	80	98			





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Prosentase ketepatan pengelolaan keuangan daerah	80	98		Fungsi Lainnya	SET WAN
	Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan stabilitas yang didukung dengan swakarsa masyarakat.	Jumlah peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemananan	na	350 siskambling aktive	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
			Persentase tanah pemerintah yang bersertifikat	ha	ha	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Pertanahaan	SET DA
			Tingkat ketersediaan peta dan tabel data lahan	an	5 dokumen	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahaan	SET DA
			Ketersediaan lahan siap bangun milik pemerintah	ha	ha			
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Cakupan pelaksanaan e-prouchment	60	100	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Fungsi Lainnya	SET DA	
		Jumlah kerjasama informasi dengan media massa	4	6	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan Informatika	SET DA	
		Jumlah Media Penyiaran yang memenuhi syarat mendapatkan rekomendasi penyiaran	2	3			DIS HUB	
		Jumlah informasi media massa yang difasilitasi dan dipublish di tingkat nasional	na	2				





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Cakupan penyebaran luasan informasi daerah melalui media massa	na	80	Program kerja sama informasi dengan mass media	Komunikasi dan Informatika	SET DA
			Jumlah liputan pembangunan infrastruktur	na	80		Komunikasi dan Informatika	DIS PU TR
			Jumlah liputan pembangunan perhubungan	na	90		Komunikasi dan Informatika	DIS HUB
			Jumlah liputan pembangunan perdesaan	na	90		Komunikasi dan Informatika	BPM
			Persentase terliputnya kegiatan DPRD melalui media	na	80		Komunikasi dan Informatika	SEKWAN
Misi 5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan								
Tersedianya jaringan transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat	Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur darat, laut dan penyeberangan	Membangun dan melakukan kerjasama pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkelanjutan.	Panjang jalan aspal dan jembatan dgn kondisi baik	590 Km		Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Tersedia data panjang dan kondisi jalan dan jembatan [update data tahunan]	tersedia (update)	tersedia (update)	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Rasio jalan dan jembatan dgn kondisi baik	29,98	tersedia (update)	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Tersedianya inventarisasi sapras kebinamargaan [update data tahunan]	tersedia (update)	tersedia (update)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Rasio luas areal yang sesuai tata ruang [%]	na	80%	Program Perencanaan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Cakupan sistem penanganan sampah di perkotaan	na	40	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Lingkungan Hidup	DIS LING HUP
			Cakupan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	na	80			DKPP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DIS LING HUP
			Jumlah Kecamatan berwawasan lingkungan					RSUD
			Cakupan pengelolaan limbah B3 RSUD	90%	92%			
			Persentase lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	90%	92%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	DIS LING HUP
			Persentase ketersediaan informasi publik dibidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	90%	95%	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Lingkungan Hidup	DIS LING HUP
			Cakupan uji emisi/polusi industri* (tahun 1 saja)	90%	92%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	RSUD
			Jumlah lokasi pembinaan pencegahan kebakaran	8 lokasi	6 Lokasi	Program pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	DIS LING HUP





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			hutan dan lahan					
			Rasio luas ruang terbuka hijau publik kota dengan wilayah kota	na	10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	DIS LING HUP
			Rasio luas ruang terbuka hijau publik kota dengan wilayah kota	na	10		Lingkungan Hidup	DKPP
	Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur energi, telekomunikasi dan air bersih penunjang industri	Meningkatkan ketersediaan air bersih, energi dan telekomunikasi penunjang industri	Panjang turap yang dibangun [m]	na	500 m	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Luas areal teririgasi teknis dengan kondisi baik (m2)	27.549	50000	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Prosentase RT dengan akses air bersih [%]	57	60	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Rasio panjang jalan yang memiliki drainase [%]	50,00	55,00	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Prosentase RT dengan akses air bersih [%]	57	60	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
			Jumlah lokasi yang memperoleh manfaat pembangunan sarana ketenagalistrikan			Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan SDA	SET DA
			Rasio elektrifikasi					
	Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan dan perternakan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pasar dan fasilitasnya	Tersedianya pasar yang presentatif	18 Pasar	24 Pasar	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DIS PERINDAG SAR
		Meningkatkan infratraktur irigasi dan pengairan	Panjang turap yang dibangun [m]	na	500 M	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
			Panjang jaringan irigasi teknis kondisi baik			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR
		Meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan	Jumlah Rumah nelayan yang dibangun	0 Unit	12 Unit	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim	Kelautan dan Perikanan	DIS KAN
		Meningkatkan infrastruktur penelitian dan pengembangan serta pembenihan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pangan	DIS TAN PANGAN
			Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (pertanian)					
			Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (perkebunan)					
Meningkatkan konektivitas infrastruktur	Meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan	Prosentase bangunan memiliki IMB [%]	na	85%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR	





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
	transportasi pedesaan dan perkotaan	pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan						
		Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	DIS HUB
			Cakupan jaringan pelayanan angkutan: darat, laut	60%	80%			
			Cakupan fasilitas perlengkapan: darat, laut	60%	80%			
			Cakupan layanan angkutan: darat, laut (daerah terpencil, umum)	60%	80%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	DIS HUB
			Angka kecelakaan lalulintas	1275	600	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	DIS HUB
			Jumlah prasarana dan fasilitas yang di pelihara	12	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	DIS HUB
			Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (Halte)	0	12	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	DIS HUB
Meningkatkan jangkauan dan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih	Meningkatkan jangkauan dan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih	Volume penyediaan air minum dan pengolahan air limbah [m3]	86,72 M3	120 m3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan	Terencananya wilayah strategis dan cepat tumbuh	5 dokumen	12 Dokumen	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DIS PU TR	





Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Urusan	SKPD
	wilayah terisolir	wilayah terisolir						





VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas yang disertai indikasi pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya akan dijabarkan melalui Rencana Strategis SKPD.

Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan disertai pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Lima tahun kedepan ini, pembangunan Kabupaten Rokan Hilir diarahkan khususnya untuk membangun kawasan-kawasan sentra produksi dan industri di kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya memperkuat struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir mengantisipasi menurunnya sector Migas. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir dijabarkan pada Tabel 8.1 indikasi program dan pagu indikatif berikut ini.



Tabel VIII-1: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Tabel VIII 1: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A	BELANJA LANGSUNG				851,505	895,130	934,269	978,292	1,028,080	4,687,274									
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				402,146	420,935	440,535	460,901	483,061	2,207,578									
1	1	PENDIDIKAN			130,164	131,179	137,355	143,536	149,996	692,231									
S	A	DINAS PENDIDIKAN																	
1	1	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100,000	100	104,000	100	108,680	100	113,571	100	118,681	100	544,932	DIS DIK
1	1	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	1,000	85	1,040	85	1,087	85	1,136	85	1,187	85	5,449	DIS DIK
1	1	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	150	98	156	98	163	98	170	98	178	98	817	DIS DIK
1	1	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	500	85	520	85	543	85	568	85	593	85	2,725	DIS DIK
1	1	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	460	95	478	95	500	95	522	95	546	95	2,507	DIS DIK
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kompetensi [%]	%	60	62	300	64	314	66	328	68	342	70	358	70	1,641	DIS DIK
1	1	15		Persentase terpenuhinya pelayanan PAUD bagi anak usia dini [%]	%	60	62	800	64	1,000	66	1,045	68	1,092	70	1,141	70	5,078	DIS PU TR
1	1	16	Program Wajib Belajar 9 Tahun	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terencil [%]	%	60	62	5,000	64	7,000	66	7,315	68	7,644	70	7,988	70	34,947	DIS PU TR
1	1	16		% jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	%	60	62	8,000	64	8,360	66	9,009	68	9,415	70	9,838	70	44,622	DIS DIK
1	1	16		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	16		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	16		Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	16		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	16		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	16		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	17	Program Pendidikan Menengah [RPJMD tahun 1 sajal	Persentase terpenuhinya pelayanan pendidikan menengah	%	60	62	3,000									3,000	DIS DIK	
1	1	17			%	60	62	3,000	64		66		68		70		70	3,000	DIS PU TR
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pembinaan pendidikan non formal [%]	%	60	62	880	64	920	66	961	68	1,004	70	1,049	70	4,814	DIS DIK

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	1	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Terlaksananya pembinaan pendidikan luar	%	60	62	122	64	128	66	134	68	140	70	146	70	670	DIS DIK
1	1	19			%	60	62	451	64	472	66	493	68	515	70	538	70	2,468	DIS PU TR
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	%	60	62	4,000	64	4,180	66	4,368	68	4,565	70	4,770	70	21,883	DIS DIK
1	1	20		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		- Kelas I - II : 18 jam per minggu	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		- Kelas III : 24 jam per minggu	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		- Kelas IV - VI : 27 jam per minggu	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		- Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK
1	1	20		Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK

No.	NAMA PROGRAM		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
						Target	Rp.[Jt]	Target	Rp.[Jt]	Target	Rp.[Jt]	Target	Rp.[Jt]	Target	Rp.[Jt]	Target	Rp.[Jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	1	21	Program Manajemen Pelayanan Kependidikan	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang	%	60	62	1,500	64	1,568	66	1,638	68	1,712	70	1,789	70	8,206	DIS DIK	
1	1	21		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK	
1	1	21		Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK	
1	1	21		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK	
1	1	21		Tersusunnya database pendidikan untuk memenuhi SPM	%	60	62		64		66		68		70		70		DIS DIK	
1	1	22	Program Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Persentase terpenuhinya target pelaksanaan lomba dan pengiriman	%	60	62	1,000	64	1,045	66	1,092	68	1,141	70	1,193	70	5,471	DIS DIK	
1	2		KESEHATAN					80,280		85,258		89,480		93,240		97,469		445,728		
S	A		DINAS KESEHATAN																	
S	A		RSUD																	
1	2	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	14,000	100	14,630	100	15,288	100	15,976	100	16,695	100	76,590	DIS KES	
1	2	x						9,066		9,474		9,900		10,346		10,811		49,597	RSUD	
1	2	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	1,000	85	1,045	85	1,092	85	1,141	85	1,193	85	5,471	DIS KES	
1	2	x						200		209		218		228		239		1,094	RSUD	
1	2	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	500	85	523	85	546	85	571	85	596	85	2,735	DIS KES	
1	2	x						180		188		197		205		215		985	RSUD	
1	2	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	400	95	418	95	437	95	456	95	477	95	2,188	DIS KES	
1	2	x						100		105		109		114		119		547	RSUD	
1	2	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	60	274	RSUD
1	2	x						50		33		276		36		84		479	DIS KES	
1	2	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	60	82	7000	84	7,315	86	7,644	88	7,988	90	8,348	90	38,295	DIS KES	
1	2	1		Persentase obat yang memenuhi syarat	%	80	82		84		86		88		90		90		DIS KES	
1	2	1		Persentase ketersediaan obat, bahan dan alat kesehatan sesuai kebutuhan	%	80	82		84		86		88		90		90		DIS KES	
1	2	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan peserta KB aktif	%	60	62	6,000	64	6,270	66	6,552	68	6,847	70	7,155	70	32,824	DIS KES	
1	2	2		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	%	90	92		94		96		98		100		100		DIS KES	
1	2	2		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	%	90	92		94		96		98		100		100		DIS KES	
1	2	2		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	90	92		94		96		98		100		100		DIS KES	
1	2	2		Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang	%	80	82		84		86		88		90		90		DIS KES	
1	2	2		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	92		94		96		98		100		100		DIS KES	
1	2	2		Cakupan pelayanan ibu nifas	%	90	92		94		96		98		100		100		DIS KES	
1	2	2		Persentase terselenggaranya pelayanan di Puskesmas2	%	90	92		94		96		98		100		100		DIS KES	
1	2	2		Persentase terselenggaranya pelayanan di RSUD*	%	80	82	14,000	84	14,630	86	15,288	88	15,976	90	16,695	90	76,590	RSUD	
1	2	3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	%	80	82	300	84	314	86	328	88	342	90	358	90	1,641	DIS KES	
1	2	4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	90	92	780	94	815	96	852	98	890	100	930	100	4,267	DIS KES	
1	2	4		Cakupan Desa Siaga Aktif [%]	%	90	92	60	94	63	96	66	98	68	100	72	100	328	RSUD	
1	2	4		Cakupan promosi RSUD*	%	90	92	90	94	94	96	98	98	103	100	107	100	492	RSUD	

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita gizi buruk mendapat	%	100	100	160	100	167	100	175	100	183	100	191	100	875	DIS KES
1	2	5		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	%	20	18		16		14		12		10		10	DIS KES	
1	2	5		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	%	30	28		26		24		22		20		20	DIS KES	
1	2	5		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	80	82		84		86		88		90		90	DIS KES	
1	2	6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan lingkungan yang sehat	%	70	72	450	74	470	76	491	78	514	80	537	80	2,462	DIS KES
1	2	7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	org	90	91	4,000	92	4,180	93	4,368	94	4,565	95	4,770	95	21,883	DIS KES
1	2	7		Penderita DBD yang Ditangani	org	90	91		92		93		94		95		95	DIS KES	
1	2	7		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24	%	90	91		92		93		94		95		95	DIS KES	
1	2	7		Menurunnya angka kesakitan penyakit	org	20	19		18		17		16		15		15	DIS KES	
1	2	8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya dokumen pendukung bidang Kesehatan	dok	100	100	500	100	523	100	546	100	571	100	596	100	2,735	DIS KES
				RSUD tersertifikasi akreditasi Nasional	sertifikat	na	akreditasi	200		209		218		228		239	akreditasi	1,094	RSUD
1	2	9	Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	90	91	2,000	92	3,325	93	3,475	94	3,631	95	3,794	95	16,225	DIS KES
1	2	9		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	90	91		92		93		94		95		95	DIS KES	
1	2	10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	%	90	91	10,000	92	10,450	93	10,920	94	11,412	95	11,925	95	54,707	DIS KES
1	2	10		Puskesmas terakreditasi tersertifikasi (persen)	%	60	62		64		66		68		70		70	DIS PU TR	
1	2	10		Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (persen)	%	70	72		74		76		78		80		80	DIS KES	
1	2	11	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			100	100	8,000	100	8,360	100	8,736	100	9,129	100	9,540	100	43,766	RSUD
1	2	11		RSUD Kelas C memiliki 7 dokter spesialis	%	100	80		85		90		95		100		100	RSUD	
1	2	11		Tambahan 2 RSUD di Bagan Batu dan Ujung	0	0	0		0		1		0		1		2	RSUD	
1	2	11		Cakupan pelayanan RSUD	%	80	82		84		86		88		90		90	RSUD	
1	2	12	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan pemeliharaan fasilitas RSUD [%]	%	80	82	650	84	679	86	710	88	742	90	775	90	3,556	RSUD
1	2	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	%	95	0	0	100	150	100	300	100	300	100	300	100	1,050	DIS KES
1	2	13	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	%	80	82	140	84	146	86	153	88	160	90	167	90	766	RSUD
1	2	14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	80	82	188	84	196	86	205	88	215	90	224	90	1,028	DIS KES
1	2	14		Cakupan kunjungan bayi	%	80	82		84		86		88		90		90	DIS KES	
1	2	14		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	80	82		84		86		88		90		90	DIS KES	
1	2	14		Cakupan pelayanan anak balita	%	80	82		84		86		88		90		90	DIS KES	
1	2	14		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran		20	18		16		14		12		10		10	DIS KES	
1	2	15	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	%	80	82	56	84	59	86	61	88	64	90	67	90	306	DIS KES
1	2	16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Renja, RKA dan Renstra	dok	100	100	160	100	167	100	175	100	183	100	191	100	875	DIS KES
1	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					146,379		157,260		164,336		172,539		181,690		822,204	
S	C		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																
1	3	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	2,607	100	2,724	100	2,847	100	2,975	100	3,109	100	14,262	DIS PU TR
1	3	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	1,100	85	1,150	85	1,201	85	1,255	85	1,312	85	6,018	DIS PU TR
1	3	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	300	85	314	85	328	85	342	85	358	85	1,642	DIS PU TR
1	3	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	100	98	105	98	109	98	114	98	119	98	547	DIS PU TR

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	3	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	500	95	523	95	546	95	571	95	596	95	2,735	DIS PU TR
1	3	1	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten beraspal dan jembatan dgn kondisi baik	km	590	590	93,054	605	101,535	620	106,105	635	111,687	650	118,099	650	530,480	DIS PU TR
	3	1					3,500	3,658		3,822		3,994		4,174		19,147		PERKIM	
1	3	2	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Tersedia data panjang dan kondisi jalan dan jembatan [update data tahunan]	-	tersedia (update)	tersedia (update)	915	tersedia (update)	956	tersedia (update)	999	tersedia (update)	1,044	tersedia (update)	1,091	tersedia (update)	5,004	DIS PU TR
1	3	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Tersedianya inventarisasi sapras kebinamargaan [update data tahunan]		tersedia (update)	tersedia (update)	1,196	tersedia (update)	1,250	tersedia (update)	1,306	tersedia (update)	1,365	tersedia (update)	1,426	tersedia (update)	6,543	DIS PU TR
1	3	4	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Rasio jalan dan jembatan dgn kondisi baik	%	29,98	30	8,000	40	8,360	50	8,736	60	9,129	70	9,540	70	43,766	DIS PU TR
1	3	5	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap yang dibangun [km]	m	na	50	8,050	150	8,412	350	8,791	550	9,186	750	9,600	750	44,038	DIS PU TR
1	3	6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Luas areal teririgasi teknis dengan kondisi baik	m2	27,549	127,549	9,000	2,300,000	9,405	2,300,000	9,828	2,350,000	10,270	2,350,000	10,733	2,350,000	49,236	DIS PU TR
1	3	7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase RT dengan akses air bersih [%]	%	57	60	1,000	70	1,045	75	1,092	80	1,141	85	1,193	85	5,471	DIS PU TR
1	3	8	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rasio panjang jalan yang memiliki drainase [%]	%	50	55	4,000	60	4,180	65	4,368	70	4,565	75	4,770	85	21,883	DIS PU TR
	3	8					1,500	1,568		1,638		1,712		1,789		8,206		PERKIM	
1	3	9	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Prosentase RT dengan akses air bersih [%]	%	57	60	1,500	70	1,568	75	1,638	80	1,712	85	1,789	85	8,206	DIS PU TR
1	3	10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terencananya wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	50	55	640	60	669	70	699	80	730	90	763	90	3,501	DIS PU TR
							200	209		218		228		239		1,094		PERKIM	
1	3	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	am: 86,72	87	9,000	am: 87	9,405	am: 87	9,828	am: 88	10,270	am: 88	10,733	am: 89	49,236	DIS PU TR
1	3	11					57	al: 56,55		57		al: 57		58		60		65	65
1	3	12	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio luas areal yang sesuai tata ruang [%]	%	70	75	120	77	125	79	131	80	137	82	143	82	656	DIS PU TR
1	3	13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase bangunan memiliki IMB [%]	%	30	40	97	50	101	55	106	60	111	70	116	70	531	DIS PU TR
1	4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					18,272		19,094		19,953		20,851		21,790		99,961	
S		C	DINAS PERUMAHAN RAKYAT																
1	4	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	2,000	100	2,090	100	2,184	100	2,282	100	2,385	100	10,941	PERKIM
1	4	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	72	98	75	98	79	98	82	98	86	98	394	PERKIM
1	4	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	1,000	85	1,045	85	1,092	85	1,141	85	1,193	85	5,471	PERKIM
1	4	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	500	95	523	95	546	95	571	95	596	95	2,735	PERKIM
1	4	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	5,500	85	5,748	85	6,006	85	6,276	85	6,559	85	30,089	PERKIM
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	%	80	87	1,000	83	1,045	86	1,092	90	1,141	90	1,193	90	5,471	PERKIM
1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas area pemukiman kumuh	Ha	135	125	2,000	115	2,090	105	2,184	95	2,282	85	2,385	85	10,941	PERKIM
1	4	17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Jumlah pembangunan rumah layak huni	unit	na	50	6,000	50	6,270	50	6,552	50	6,847	50	7,155	50	32,824	PERKIM
	4	18	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran	%	60	62	200	65	209	70	218	72	228	75	239	75	1,094	PERKIM
1	9		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11,012		11,507		12,025		12,566		13,132		60,241	
S		B	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																

No.	NAMA PROGRAM			Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab
							Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S																			32
1	9	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	4,100	100	4,285	100	4,477	100	4,679	100	4,889	100	22,430	SAT POL PP
1	9	x						1,700		1,777		1,856		1,940		2,027		9,300	KES BANG POL
1	9	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	524	85	548	85	572	85	598	85	625	85	2,867	SAT POL PP
1	9	x						410		428		448		468		489		2,243	KES BANG POL
1	9	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	200	98	209	98	218	98	228	98	239	98	1,094	SAT POL PP
1	9	x						100		105		109		114		119		547	KES BANG POL
1	9	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	200	85	209	85	218	85	228	85	239	85	1,094	SAT POL PP
1	9	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	140	95	146	95	153	95	160	95	167	95	766	SAT POL PP
1	9	x						243		254		265		277		290		1,329	KES BANG POL
1	9	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	%	80.00	80.00	1,500	80	1,568	80	1,638	80	1,712	80	1,789	80	8,206	SAT POL PP
								250		261		273		285		298		1,368	KES BANG POL
1	9	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	%	80.00	85.00	400	85	418	85	437	85	456	85	477	85	2,188	SAT POL PP
1	9	16						100		105		109		114		119		547	KES BANG POL
1	9	17	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah operasional penanganan gangguan bencana alam yang dilakukan TRC	Jlh	na	10.00	221	10	231	10	242	10	252	10	264	50	1,210	SAT POL PP
1	9	17						500		523		546		571		596		2,735	KES BANG POL
1	9	19	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik bernuasa sara	Jlh	na	1.00	112	1.00	117	1.00	123	1.00	128	1.00	134	5	614	SAT POL PP
1	9	19																	KES BANG POL
1	9	20	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya sinergitas antara lembaga/ instansi/ organisasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan	%	90	90	131	90	136	90	143	90	149	90	156	90	715	KES BANG POL
1	9	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu	%	80	80	181	80	189	80	197	80	206	80	215	80	988	KES BANG POL
1	13		SOSIAL					16,040		16,636		17,385		18,167		18,985		87,214	
S			DINAS SOSIAL																
1	13	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,200	100	1,254	100	1,310	100	1,369	100	1,431	100	6,565	DIS SOSIAL
1	13	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	250	85	261	85	273	85	285	85	298	85	1,368	DIS SOSIAL
1	13	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	274	DIS SOSIAL
1	13	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	150	85	157	85	164	85	171	85	179	85	821	DIS SOSIAL
1	13	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	260	95	272	95	284	95	297	95	310	95	1,422	DIS SOSIAL
1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Persentase orang yang mendapatkan bantuan jaminan sosial serta perlindungan sosial.	%	90	90	640	90	669	90	699	90	730	90	763	90	3,501	DIS SOSIAL
1	13	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jlh	na	50	504	60	527	65	550	70	575	80	601	80	2,757	DIS SOSIAL
1	13	3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak penyandang masalah sosial yang mendapat pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	%	80	83	80	84	84	85	87	86	91	87	95	87	438	DIS SOSIAL
1	13	4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Peningkatan pengetahuan penyandang cacat	%	80	85	350	85	366	85	382	85	399	90	417	90	1,915	DIS SOSIAL
1	13	5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial TS	Jlh	na	1	64	1	67	1	70	1	73	1	76	5	350	DIS SOSIAL
1	13	6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya sumber daya manusia tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	org	na	10	716	10	748	10	782	10	817	10	854	50	3,917	DIS SOSIAL

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab				
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	13	6	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	terlaksananya peringatan hari besar		90	90	120								95	120	DISDUKCAPIL			
1	13	6	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Lompo	Jumlah Panti asuhan dan panti jompo yang dibina		12	12	60		10,000		10,450		10,920		11,412		11,925	95	54,707	SET DA
1	13	7	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH																		32
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jlh	na	2	684	2	715	2	747	2	816	10	3,742	DIS SOSIAL				
			Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase pelayanan darurat dan logistik	%	50	50	720	55	752	60	786	70	822	75	859	75	3,939	DIS SOSIAL		
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase korban bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	%	na	60	192	65	201	70	210	75	219	80	229	80	1,050	DIS SOSIAL		
2			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					132,719		135,411		141,425		148,120		154,563		712,238			
2	14		TENAGA KERJA					3,756		3,925		4,102		4,286		4,479		20,548			
5			DINAS TENAGA KERJA																		
2	14	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,300	100	1,359	100	1,420	100	1,484	100	1,550	100	7,112	DISNAKER		
2	14	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	170	85	178	85	186	85	194	85	203	85	930	DISNAKER		
2	14	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	36	98	38	98	39	98	41	98	43	98	197	DISNAKER		
2	14	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	DISNAKER		
2	14	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	400	95	418	95	437	95	456	95	477	95	2,188	DISNAKER		
2	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK	% Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan	%	70	73	800	76	836	79	874	81	913	83	954	83	4,377	DISNAKER		
2	14	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka pengangguran [%]	%	10	10	450	9	470	9	491	8	514	8	537	8	2,462	DISNAKER		
2	14	3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase lembaga ketenagakerjaan yang berkembang aktif	%	80	82	500	84	523	86	546	88	571	90	596	90	2,735	DISNAKER		
2	11		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDIDIK					4,897		5,437		5,398		5,763		5,735		27,229			
5			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2	11	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	950	100	993	100	1,037	100	1,084	100	1,133	100	5,197	DPPKB P3A		
2	11	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	DPPKB P3A		
2	11	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	25	98	26	98	27	98	29	98	30	98	137	DPPKB P3A		
2	11	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	50	85	52	85	55	85	57	85	60	85	274	DPPKB P3A		
2	11	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	290	95	303	95	317	95	331	95	346	95	1,587	DPPKB P3A		
2	11	1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan	%	80	82	71	84	74	86	78	88	81	90	85	90	390	DPPKB P3A		
2	11	2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan penyelenggaraan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	%	80	82	152	84	159	86	166	88	173	90	181	90	832	DPPKB P3A		
2	11	3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	%	80	82	176	84	184	86	192	88	201	90	210	90	963	DPPKB P3A		
2	11	4	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan pembinaan organisasi perempuan	%	80	82	800	84	836	86	874	88	913	90	954	90	4,377	DPPKB P3A		
			Program tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Cakupan persentase laju pertumbuhan penduduk	%	80	82	612	84	623	86	643	88	760	90	490	90	3,428	DPPKB P3A		
			Program Kependudukan keluarga berencana, dan Pembangunan keluarga kabupaten Rokan Hilir	cakupan persentase Pemakaian Kontrasepsi	%	80	82	373	84	426	86	483	88	539	90	580	90	2,401	DPPKB P3A		

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	12	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2	12	1	Program keluarga berencana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan KB	%	80	82	150	84	157	86	164	88	171	90	179	90	821	DPPKB P3A
2	12	1		Cakupan dukungan sarana prasarana penyuluh KB dan PL KB	%	80	80	66	10,000	69	10,500	72	11,025	75	11,576	78	12,155	359	DPPKB P3A
2	12	2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan pembinaan kesehatan reproduksi remaja	%	80	82	184	84	192	86	201	88	210	90	219	90	1,007	DPPKB P3A
2	12	3	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan pelayanan kontrasepsi	%	80	82	250	84	261	86	273	88	285	90	298	90	1,368	DPPKB P3A
2	12	4	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan pembinaan KB mandiri	%	80	82	200	84	209	86	218	88	228	90	239	90	1,094	DPPKB P3A
2	12	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial * (tahun pertama saja) tahun kedua masuk ke Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan penyelenggaraan pembinaan ibu dan anak	%	80	82	200	85	209	87	218	88	228	90	239	90	1,094	DPPKB P3A
2	12	6	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan pembinaan keluarga	%	80	82	248	84	259	86	271	88	283	90	296	90	1,357	DPPKB P3A
2	25	PANGAN						6,261		6,543		6,838		7,145		7,467		34,255	
5		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																	
2	25		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (gabah)	Ton	36,846	58,954	4,000	36,846	4,180	36,846	4,368	36,846	4,565	36,846	4,770	36,846	21,883	DIS TAN PANGAN
				Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (pertanian)	Ton			1,360		1,421		1,485		1,551		1,621		7,438	DIS TAN PANGAN
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Produktivitas petani	Ton/p etani	1	1	902	2	943	3	985	4	1,029	5	1,076	5	4,934	DIS TAN PANGAN
2	9	PERTANAHAN						22,500		23,513		24,571		25,676		26,832		123,091	
2	9	1	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase tanah pemerintah yang bersertifikat	%	50	55	2,500	57	2,613	60	2,730	63	2,853	65	2,981	65	13,677	SET DA
2	9	2	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tingkat ketersediaan peta dan tabel data lahan	doc	tersedia	update	20,000	update	20,900	update	21,841	update	22,823	update	23,850	update	109,414	SET DA
2	8	LINGKUNGAN HIDUP						29,325		30,556		31,931		33,368		34,869		160,048	
5	8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
2	8	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	4,000	100	4,180	100	4,368	100	4,565	100	4,770	100	21,883	DIS LING HUP
2	8	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	3,000	85	3,135	85	3,276	85	3,423	85	3,578	85	16,412	DIS LING HUP
2	8	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	144	85	150	85	157	85	164	85	172	85	788	DIS LING HUP
2	8	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	515	95	538	95	562	95	588	95	614	95	2,817	DIS LING HUP
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	150	98	157	98	164	98	171	98	179	98	821	DIS LING HUP
2	8	1	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Cakupan sistem penanganan sampah di perkotaan	%	90	90	1,000	90	1,045	90	1,092	90	1,141	90	1,193	90	5,471	DIS LING HUP
2	8	1		Cakupan fasilitas pengurangan sampah di	%	80	80	16,000	80	16,720	80	17,472	80	18,259	80	19,080	80	87,531	DIS LING HUP
2	8	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	55	55	1,000	60	1,045	65	1,092	70	1,141	72	1,193	75	5,471	DIS LING HUP
2	8	2		Cakupan pengelolaan limbah B3 RSUD	%	100	100	150	100	157	100	164	100	171	100	179	90	821	RSUD
2	8	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	%	50	50	500	50	523	50	546	50	571	50	596	50	2,735	DIS LING HUP
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase tingkat pengelolaan hutan dan lahan	%	50	50	500	50	523	50	546	50	571	50	596	50	2,735	DIS LING HUP
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Persentase ketersediaan informasi publik dibidang sumberdaya alam dan lingkungan	%	90	95	481	90	503	90	525	90	549	90	574	90	2,631	DIS LING HUP
2	8	5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Cakupan Uji emisi/polusi industri	%	50	50	150	50	157	50	164	50	171	50	179	50	821	DIS LING HUP
2	8	5		Cakupan uji emisi/polusi industri* (tahun 1	%	80	85	85										85	RSUD
2	8	6	Program pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi pembinaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	%	10	11	150	10	157	10	164	10	171	10	179	10	821	DIS LING HUP
2	8	7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luas RTH yang dikelola	%	30	35	1,500	30	1,568	30	1,638	30	1,712	30	1,789	30	8,206	DIS LING HUP
2	10	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4,605		4,812		5,029		5,255		5,492		25,193	

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
S		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2	10	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	2,150	100	2,247	100	2,348	100	2,454	100	2,564	100	11,762	DISDUKCAPIL
2	10	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	450	85	470	85	491	85	514	85	537	85	2,462	DISDUKCAPIL
2	10	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	274	DISDUKCAPIL
2	10	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	DISDUKCAPIL
2	10	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	300	95	314	95	328	95	342	95	358	95	1,641	DISDUKCAPIL
2	10	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kartu Keluarga yang di terbitkan	Jumlah Kartu Keluarga yang di terbitk	42,500	30,000	1,500	30,000	1,568	30,000	1,638	30,000	1,712	30,000	1,789	150,000	8,206	DISDUKCAPIL
2	10	2	Program kerjasama informasi dengan mass media	Cakupan penyebarluasan informasi mass media	%	90	90	55	92	57	94	60	96	63	98	66	98	301	DISDUKCAPIL
2	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					17,693		14,979		15,856		16,778		17,599		82,905	
S			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
2	22	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,600	100	1,672	100	1,747	100	1,826	100	1,908	100	8,753	DIS PE MAS
2	22	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	245	85	256	85	268	85	280	85	292	85	1,340	DIS PE MAS
2	22	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	274	DIS PE MAS
2	22	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	DIS PE MAS
2	22	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	410	95	428	95	448	95	468	95	489	95	2,243	DIS PE MAS
2	22	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan (BUMDes, pasar desa dan POSYANTEK)	Jlh	na	10	888	10	928	10	970	10	1,013	10	1,059	50	4,857	DIS PE MAS
2	22	2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	%	60	65	1,500	70	1,568	75	1,638	80	1,712	85	1,789	85	8,206	DIS PE MAS
2	22	3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur PMD dan kelembagan Desa yang Berkompetensi	%	50	60	2,000	65	2,090	70	2,184	75	2,282	80	2,385	80	10,941	DIS PE MAS
2	22	4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	%	80	80	1,500	85	1,568	87	1,638	88	1,712	90	1,789	90	8,206	DIS PE MAS
2	22	4		Jumlah pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)		na	5	500	5	523	5	546	5	571	5	596	25	2,735	DIS PE MAS
2	22	5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	%	60	70	2,000	75	2,090	80	2,184	85	2,282	90	2,385	90	10,941	DIS PE MAS
2			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	80.0	80.0	5,400.0	82.5	2,200.0	85.0	2,420.0	87.5	2,662.0	90.0	2,928.2	90	15,610	DIS PE MAS
2			Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru	Kepenghulua	n/a	193	1,500	193	1,500	193	1,650	193	1,800	193	1,800	193	8,250	DIS PE MAS
2	7		PERHUBUNGAN					10,214		10,673		11,154		11,655		12,180		55,876	
S			DINAS PERHUBUNGAN																
2	7	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	2,500	100	2,613	100	2,730	100	2,853	100	2,981	100	13,677	DIS HUB
2	7	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	1,000	85	1,045	85	1,092	85	1,141	85	1,193	85	5,471	DIS HUB
2	7	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	500	85	523	85	546	85	571	85	596	85	2,735	DIS HUB
2	7	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	350	95	366	95	382	95	399	95	417	95	1,915	DIS HUB
2	7	1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan	Jlh	79	100	2,500	100	2,613	100	2,730	100	2,853	100	2,981	579	13,677	DIS HUB
2	7	1		Cakupan jaringan pelayanan angkutan: darat,	%	60	65		67	0	70		73		75		75		DIS HUB
2	7	1		Cakupan fasilitas perlengkapan: darat, laut	%	60	65		67	0	70		73		75		75		DIS HUB
2	7	2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan layanan angkutan: darat, laut (daerah terencil, umum)	%	60	65	1,000	67	1,045	70	1,092	73	1,141	75	1,193	75	5,471	DIS HUB

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	7 3	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Angka kecelakaan lalulintas	Jlh	1,275	1,155	1,651	1,055	1,725	1,000	1,803	900	1,884	800	1,968	800	9,030	DIS HUB

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	7	4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas yang di pelihara	Jlh	12	12	553	12	578	12	604	12	631	12	659	60	3,025	DIS HUB
2	7	5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (Halte)	Jlh	5	5	160	5	167	5	175	5	183	5	191	25	875	DIS HUB
2	25		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7,943		8,301		8,674		9,065		9,472		43,455	
2	25	1	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1) Jumlah kerjasama informasi dengan media massa 2) Jumlah Media Penyiaran yang memenuhi syarat mendapatkan rekomendasi nenviaran	1) Jlh 2) Jlh 3) %	na	1) 20 2) 5 3)	2,000	1) 20 2) 5 3) 70	2,090	1) 20 2) 5 3) 70	2,184	1) 20 2) 5 3) 70	2,282	1) 20 2) 5 3) 70	2,385	1) 20 2) 5 3) 70	10,941	SET DA
2	25	1			%	3) 80	3) 85	200	3) 85	209	3) 85	218	3) 85	228	3) 85	239	3) 85	1,094	DIS HUB
2	25	2	Program kerja sama informasi dengan mass media	Cakupan penyebaran luasan informasi daerah melalui media massa	%	80	85	5,000	85	5,225	85	5,460	85	5,706	85	5,963	85	27,354	SET DA
2	25	2		Jumlah liputan pembangunan infrastruktur		10	10	48	10	50	10	52	10	55	10	57	50	263	DIS PU TR
2	25	2		Jumlah liputan pembangunan perhubungan		10	10	20	10	21	10	22	10	23	10	24	50	109	DIS HUB
2	25	2		Jumlah liputan pembangunan perdesaan		20	20	48	20	50	20	52	20	55	20	57	100	263	DIS PE MAS
2	25	2		Persentase terliputnya kegiatan DPRD melalui	%	90	90	627	90	655	90	685	90	716	90	748	90	3,431	SEKWAN
2	15		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					5,628		5,881		6,145		6,422		6,711		30,787	
S			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
2	15	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,500	100	1,568	100	1,638	100	1,712	100	1,789	100	8,206	DISKOP UKM
2	15	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	850	85	888	85	928	85	970	85	1,014	85	4,650	DISKOP UKM
2	15	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	DISKOP UKM
2	15	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	375	95	392	95	410	95	428	95	447	95	2,052	DISKOP UKM
2	15	1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah Wira Usaha Baru	Jlh	300	400	700	400	732	400	764	400	799	400	835	835	3,829	DISKOP UKM
2	15	2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM	Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang diserap UMKM	Jlh	na	1,000	546	1,000	570	1,000	596	1,000	623	1,000	651	5,000	2,986	DISKOP UKM
2	15	3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan	Koperasi Aktive	Kop	222	230	1,000	250	1,045	250	1,092	270	1,141	270	1,193	270	5,471	DISKOP UKM
2	15	3		Jumlah Koperasi Sehat Terhadap Total KSP/USP	Kop	na	100	400	120	418	130	437	125	456	130	477	130	2,188	DISKOP UKM
2	15	4	Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif	Jumlah Anggota Koperasi	Org	18,443.000	50	157	50	164	50	171	50	179	50	187	18,693	858	DISKOP UKM
2	16		PENANAMAN MODAL					4,274		4,467		4,668		4,878		5,097		23,384	
S			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU																
2	16	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,560	100	1,630	100	1,704	100	1,780	100	1,860	100	8,534	DPMPPT
2	16	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	310	85	324	85	339	85	354	85	370	85	1,696	DPMPPT
2	16	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	DPMPPT
2	16	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	58	98	60	98	63	98	66	98	69	98	315	DPMPPT
2	16	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	170	95	178	95	186	95	194	95	203	95	930	DPMPPT
2	16	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	na	3	1,000	3	1,045	3	1,092	3	1,141	3	1,193	15	5,471	DPMPPT	
2	16	1		Jumlah Investor Baru	na	5	179	5	187	5	196	5	205	5	214	25	981	DPMPPT	
2	16	1		Terciptanya Kerjasama dalam Wilayah KSI	na	3	179	3	187	3	196	5	205	6	214	20	981	DIS TAN PANGAN	
2	16	2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	%	na	2	500	2	523	2	546	2	571	2	596	2	2,735	DPMPPT
2	16	2		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	%	na	2	218	2	228	2	238	2	249	2	260	2	1,193	DPMPPT

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			10,644		11,123		11,623		12,146		12,693		58,228			
S		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2	18	x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	4,400	100	4,598	100	4,805	100	5,021	100	5,247	100	24,071	DIS PAR PORA
2	18	x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	534	85	558	85	583	85	609	85	636	85	2,920	DIS PAR PORA
2	18	x Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	100	98	105	98	109	98	114	98	119	98	547	DIS PAR PORA
2	18	x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	210	95	219	95	229	95	240	95	250	95	1,149	DIS PAR PORA
2	18	1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan	%	80	82	500	84	523	86	546	88	571	90	596	90	2,735	DIS PAR PORA
2	18	1	Cakupan Terselenggaranya Paskibra Kab Rohil	%	100	100	100	100	105	100	109	100	114	100	119	100	547	DIS PAR PORA
2	18	2 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pengiriman atlet dan pelaksanaan kegiatan olahraga	%	80	82	2,700	84	2,822	86	2,948	88	3,081	90	3,220	90	14,771	DIS PAR PORA
2	18	2	Terlaksananya Pembinaan Olahraga	%	80	82	100	84	105	86	109	88	114	90	119	90	547	SET DA
2	18	3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Cakupan sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	80	82	1,000	84	1,045	86	1,092	88	1,141	90	1,193	90	5,471	DIS PAR PORA
2	18	3					1,000		1,045		1,092		1,141		1,193		5,471	DIS PU TR
2	17	KEBUDAYAAN			4,799		5,015		5,241		5,476		5,723		26,254			
2	17	1 Program Pengembangan Nilai Budaya	cakupan pengembangan sanggar budaya	%	80	82	1,500	84	1,568	86	1,638	88	1,712	90	1,789	90	8,206	DIS DIK
2	17	1	Persentase Terlaksananya Kurikulum budaya melalui di Sekolah formal dan non formal	%	na	30		60		70		70	0	80	0	70		DIS DIK
2	17	3 Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	%	80	82	3,000	84	3,135	86	3,276	88	3,423	90	3,578	90	16,412	DIS DIK
2	17	4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Pngiat Seni yang dibina	Klp Seni	41	45	299	45	312	50	327	50	341	55	357	55	1,636	DIS DIK
2	24	KEARSIPAN			180		188		197		205		215		985			
2	24	2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah	Jumlah koleksi arsip yang dilestarikan dan terdokumentasi (berkas)		na	100	100	100	105	100	109	100	114	100	119	500	547	SET WAN
2	24	2	Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen bernilai sejarah: Restorasi. Persentase dukungan pembinaan pengelolaan	%	na	50	80	55	84	60	87	65	91	70	95	70	438	SET WAN
3		URUSAN PILIHAN			124,991		131,429		137,259		143,263		149,630		686,573			
3	5	KELAUTAN DAN PERIKANAN			38,029		39,741		41,529		43,398		45,351		208,047			
S		DINAS PERIKANAN																
3	5	x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	2,000	100	2,090	100	2,184	100	2,282	100	2,385	100	10,941	DIS KAN
3	5	x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	1,160	85	1,213	85	1,267	85	1,324	85	1,384	85	6,348	DIS KAN
3	5	x Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	58	98	60	98	63	98	66	98	69	98	315	DIS KAN
3	5	x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	200	85	209	85	218	85	228	85	239	85	1,094	DIS KAN
3	5	x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	400	95	418	95	437	95	456	95	477	95	2,188	DIS KAN
3	5	1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Pelaku usaha Perikanan Yang dibina	org	na	60	664	90	694	90	725	90	758	90	792	420	3,633	DIS KAN
3	5	2 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Jumlah Partisipasi Masyarakat yang terkait dengan kelautan	org	na	50	459	100	480	100	502	100	524	100	548	200	2,513	DIS KAN
3	5	3 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Budidaya Perikanan	ton	1571.52	1,750	15,000	2,000	15,675	2,300	16,380	2,600	17,117	3,000	17,888	3,000	82,061	DIS KAN
3	5	4 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton	55742.2	58,000	15,000	60,900	15,675	63,945	16,380	67,142	17,117	70,000	17,888	70,000	82,061	DIS KAN
3	5	5 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1) Konsumsi Ikan Perkapita 2) Angka ketersediaan	Kg/Kapita/tahun	1) 35,07 2) 25,01	1) 35,83 2) 27,09	688	1) 36,02 2) 29,32	719	1) 36,91 2) 29,32	751	1) 36,91 2) 31,01	785	1) 37,01 2) 31,85	820	1) 37,90 2) 32,07	3,764	DIS KAN
3	5	6 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Pelaku usaha Perikanan Yang Dibantu (Keramba Jaring Apung)	klp		4	2,400	3	2,508	2	2,621	2	2,739	2	2,862	12	13,130	DIS KAN

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	32
3	4	PARIWISATA			2,464		2,575		2,691		2,812		2,938				13,480	
S		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																
3	4	1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bertambahnya ODTW (Objek Dan Daya Tarik Wisata) yang ditata	Jlh Obj Wsta	19	20	2,464	21	2,575	21	2,691	22	2,812	22	2,938	22	13,480	DIS PAR PORA
3	1	PERTANIAN			54,410		56,858		59,417		62,090		64,884				297,659	
S		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																
3	1	x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	8,000	100	8,360	100	8,736	100	9,129	100	9,540	100	43,766	DKP TAN
3	1	x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	4,200	85	4,389	85	4,587	85	4,793	85	5,009	85	22,977	DKP TAN
3	1	x Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	250	98	261	98	273	98	285	98	298	98	1,368	DKP TAN
3	1	x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	700	85	732	85	764	85	799	85	835	85	3,829	DKP TAN
3	1	x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	500	95	523	95	546	95	571	95	596	95	2,735	DKP TAN
3	1	1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Kelompok Tani yang ditingkatkan kelasnya	%	60	70.00	1,300	70.00	1,359	70.00	1,420	70.00	1,484	70.00	1,550	350	7,112	DKP TAN
3	1	2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah outlet pemasaran hasil pertanian	na	0.5	281	1	294	1	307	1.5	321	2	335	2	1,539	DKP TAN	
3	1	3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktifitas pertanian (padi)	kw/Ha	40.11	60.00	6,000	62	6,270	65	6,552	68	6,847	70	7,155	70	32,824	DKP TAN
3	1	4 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Lahan Pertanian (padi)	ton/ha	4	5	2,400	6	2,508	6.5	2,621	7	2,739	8	2,862	8	13,130	DKP TAN
3	1	5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan Penyuluhan pertanian/perkebunan	%	50	60.00	1,722	70	1,800	80	1,881	90	1,965	95	2,054	95	9,422	DKP TAN
3	1	6 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak (%)	%	na	10	256	9	268	8	280	7	292	5	305	5	1,401	DKP TAN
3	1	7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Perternakan Sapi kambing unggas	na	200	3,000	200	3,135	200	3,276	200	3,423	200	3,578	1000	16,412	DKP TAN	
3	1	8 Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Tingkat penerapan teknologi tepat guna pada bidang pertanian/perkebunan	%	na	50	25,000	55	26,125	58	27,301	60	28,529	65	29,813	65	136,768	DKP TAN
3	1	9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Produktifitas Perternakan	Ekor/Klp	na	10	800	12	836	15	874	17	913	20	954	20	4,377	DKP TAN
3	7	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			20,089		21,805		22,703		23,552		24,531				112,680	
S		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR																
3	7	x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase waktu pelayanan yang disediakan	%	100	100	1,800	100	1,881	100	1,966	100	2,054	100	2,147	100	9,847	DIS PERINDAG SAR
3	7	x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan SKPD	%	80	85	340	85	355	85	371	85	388	85	405	85	1,860	DIS PERINDAG SAR
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan berfungsi dengan baik	%	90	100	200	100	209	100	218	100	228	100	239	100	1,094	
3	7	x Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat keseragaman dan kelengkapan atribut aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	274	DIS PERINDAG SAR
3	7	x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang tersertifikasi	Org	3	43	100	43	105	23	109	43	114	23	119	175	547	DIS PERINDAG SAR
3	7	x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Inspektorat atas hasil evaluasi/review LAKIP SKPD	Prediket	C	CC	360	B	376	B	393	BB	411	A	429	A	1,969	DIS PERINDAG SAR
			Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	tersedianya rumah kemasan	unit	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	DIS PERINDAG SAR
3	7	1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM formal yang direvitalisasi	IKM	20	30	1,000	30	1,045	30	1,092	30	1,141	30	1,193	150	5,471	DIS PERINDAG SAR
			Tumbuhnya wirausaha baru IKM	IKM	-	10	500	15	523	20	546	20	571	25	596	90	2,735	DIS PERINDAG SAR
3	7	3 Program Penataan Struktur Industri	Paket kebijakan penataan struktur industri	paket kebijakan	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	DIS PERINDAG SAR	
3	7	4 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Ketersediaan sarana sentra industri	unit	-	1	200	2	209	2	218	3	228	4	239	12	1,094	DIS PERINDAG SAR
			Jumlah unit sentra IKM	unit	0	0	500	0	523	1	546	2	571	3	596	6	2,735	DIS PERINDAG SAR

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	7	5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	%	2	5	400	10	418	20	437	30	456	40	477	40	2,188	DIS PERINDAG SAR
3	7	6		Persentase pengawasan gudang dan kegiatan usaha perdagangan	%	50	-	300	80	314	80	328	80	342	80	358	80	1,641	DIS PERINDAG SAR
				Persentase barang diawasi sesuai ketentuan	%	65	70	350	75	366	75	382	80	399	80	417	80	1,915	DIS PERINDAG SAR
				Persentase BDKT dan UTTP yang diawasi	%	20	50	250	55	261	60	273	65	285	70	298	70	1,368	DIS PERINDAG SAR
3	7	7	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah rumusan kesepakatan perdagangan perbatasan	rumusan	1	0	0	1	0	1	0	1		1		5	0	DIS PERINDAG SAR
3	7	8	Program Peningkatan dan Pengembangan Eksnor	Nilai ekspor produk ke LN	US\$ x juta	7.36	9.80	560	10.78	585	11.85	612	13.04	639	14.34	668	14.34	3,064	DIS PERINDAG SAR
3	7	9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting secara real time	%	45	50	100	60	105	65	109	70	114	75	119	75	547	DIS PERINDAG SAR
				Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi	%	4	4	8,510	5	8,892	8	9,293	10	9,711	11	10,148	42	46,553	DIS PERINDAG SAR
				Jumlah promosi perdagangan yang diikuti	Event Promosi/Misi dagan	4	3	350	5	366	5	382	6	399	6	417	25	1,915	DIS PERINDAG SAR
				Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	%	10	< 9	1,040	< 9	1,087	< 9	1,136	< 9	1,187	< 9	1,240	< 9	5,690	DIS PERINDAG SAR
3	7	10	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha	PKL	20	30	1,000	40	1,045	40	1,092	35	1,141	35	1,193	180	5,471	DIS PERINDAG SAR
3	7		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah wirusaha baru IKM	Pelaku Wirusaha Baru		19	2,179	19	3,090	19	3,145	19	3,114	19	3,174	90	14,702	DIS PERINDAG SAR
4	20		ENERGI DAN SDM					10,000		10,450		10,920		11,412		11,925		54,707	
4	20	1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi		65	70	10,000	73	10,450	75	10,920	78	11,412	80	11,925	80	54,707	SET DA
4			URUSAN PENUNJANG					191,649		207,354		215,050		226,007		240,826		1,080,886	
4	20		FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN					18,970		19,823		20,715		21,647		22,622		103,777	
5			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
4	6	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	2,000	100	2,090	100	2,184	100	2,282	100	2,385	100	10,941	BAPPEDA
4	6	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	1,000	85	1,045	85	1,092	85	1,141	85	1,193	85	5,471	BAPPEDA
4	6	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	100	98	105	98	109	98	114	98	119	98	547	BAPPEDA
4	6	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	1,500	95	1,568	95	1,638	95	1,712	95	1,789	95	8,206	BAPPEDA
4	6	1	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Persentase program dan kegiatan yang sinkron	%	na	96	800	97	836	98	874	99	913	100	954	100	4,377	BAPPEDA
4	6	2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	dok	na	10	4,000	10	4,180	10	4,368	10	4,565	10	4,770	50	21,883	BAPPEDA
4	6	2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen evaluasi kerjasama pembangunan	dok	na	1	239	1	250	1	261	1	273	1	285	5	1,308	SET DA
4	6	3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Ketersediaan dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan	dok	na	1	896	1	936	1	978	1	1,022	1	1,068	5	4,902	BAPPEDA
4	6	4	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Ketersediaan dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan sosial	dok	na	1	500	1	523	1	546	1	571	1	596	5	2,735	BAPPEDA
4	6	5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan dokumen, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	na	na	1	523	1	547	1	571	1	597	1	624	5	2,862	BAPPEDA
4	6	6	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah	%	60	70	4,000	75	4,180	80	4,368	85	4,565	90	4,770	90	21,883	BAPPEDA
4	6	7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	na	75	2,000	80	2,090	85	2,184	90	2,282	95	2,385	95	10,941	BAPPEDA
4	6	8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Ketersediaan dokumen pendukung perencanaan pembangunan Daerah rawan bencana	na	na	1	1,179	1	1,232	1	1,288	1	1,346	1	1,406	5	6,451	BAPPEDA
4	6	9	Program Perencanaan Pembangunan Kota - Kota Menengah dan Besar	Ketersediaan Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	na	na	1	232	1	242	1	253	1	265	1	277	5	1,269	BAPPEDA

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	32	
4	20	FUNGSI KEUANGAN			44,101		46,411		47,926		50,271		51,834		240,543				
S		BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	2,000	100	2,090	100	2,184	100	2,282	100	2,385	100	10,941	
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	1,500	85	1,568	85	1,638	85	1,712	85	1,789	85	8,206	BA PEN DA
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	55	8	28,158	8	29,426	8	30,750	8	32,133	8	33,579	95	154,046	BA PEN DA
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	274	BA PEN DA
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	BA PEN DA
4	20	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan keuangan pemerintah tepat waktu	%	na	100	236	100	246	100	257	100	269	100	281	100	1,290	BA PEN DA
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	%	na	100	88	100	75	100	75	100	75	100	175	100	488	BA PEN DA
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan rekomendasi	Dokumen Laporan	3 LHP	3	180	5	215	7	250	7	250	7	250	29	1,145	BA PEN DA
			Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang terlatih	orang	na	0	0	4	160	4	160	4	160	2	60	18	540	BA PEN DA
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan	Laporan Naskah / Prosedur	Dokumen	na	0	0	2	285	1	35	2	285	1	35	6	640	BA PEN DA
			Program Menginsentifkan Penangan Pengaduan Masyarakat	Laporan rekapitulasi rutin	Dokumen	na	12	160	12	160	12	160	12	160	12	160	60	800	BA PEN DA
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Peraturan	Naskah Rancangan	na	3	460	4	460	4	460	4	460	4	460	19	2,300	BA PEN DA
4	20	12	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan penerimaan PAD	%	na	5	2,822	5	2,857	5	2,697	5	2,818	5	2,777	25	13,971	BA PEN DA
4	20	14	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Aplikasi yang diterapkan	1	Aplikasi	1	210	1	210	1	210	1	210	1	1	5	841	BA PEN DA
S		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																	
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,000	100	1,045	100	1,092	100	1,141	100	1,193	100	5,471	BPKAD
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	500	85	523	85	546	85	571	85	596	85	2,735	BPKAD
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	274	BPKAD
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	BPKAD
4	20	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan keuangan pemerintah tepat waktu	%	na	100	236	100	246	100	257	100	269		281	100	1,290	BPKAD
4	20	x	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset daerah yang terdata	%	na	100	4,577	100	4,783	100	4,998	100	5,223	100	5,458	100	25,039	BPKAD
			Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Tingkat kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah	%	na	80	1,674	80	1,749	80	1,828	80	1,910	80	1,996	100	9,158	BPKAD
4	21	FUNGSI KEPEGAWAIAN			15,716		16,423		17,162		17,935		18,742		85,978				
S		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																	
4	21	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	91	8,700	92	9,092	93	9,501	94	9,928	95	10,375	95	47,595	BKD
4	21	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	70	71	423	72	442	73	462	74	483	75	504	75	2,314	BKD
4	21	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	274	BKD
4	21	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	BKD

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4	21	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	91	243	92	254	93	265	94	277	95	290	95	1,329	BKD
4	21	1	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase pelayanan PNS purna tugas/pindah	%	95	98	100	98	105	98	109	98	114	98	119	100	547	BKD
4	21	2	Program Pendidikan kedinasan	Persentase aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan tugas belajar	%	80	85	1,600	86	1,672	87	1,747	88	1,826	90	1,908	90	8,753	BKD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	%	80	85	1,600	88	1,672	91	1,747	94	1,826	97	1,908	97	8,753	BKD
4	21	3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jumlah penataan pengembangan manajemen ASN yang profesional	%	80	85	2,700	86	2,822	87	2,948	88	3,081	89	3,220	89	14,771	BKD
1	13	6	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	terlaksananya peringatan hari besar			200		209		218		228		239	95	1,094	BKD	
4	21		FUNGSI LAINYA				112,863		124,697		129,247		136,154		147,628		650,588		
S			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
4	21	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	91	1,382	92	1,444	93	1,509	94	1,577	95	1,648	95	7,561	BPBD
4	21	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	70	71	423	72	1,684	73	1,647	74	1,682	75	1,758	75	7,194	BPBD
4	21	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	50	98	52	98	55	98	57	98	60	98	274	BPBD
4	21	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	BPBD
4	21	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	91	100	92	294	93	203	94	212	95	222	95	1,031	BPBD
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	a. Persentase berkurangnya resiko bencana	%	5	5	4,032	5	5,870	5	6,210	5	6,845	5	13,015	5	35,972	BPBD
				b. Jumlah relawan bencana	org	0	60		60		60		60		60		300	0	BPBD
				c. Jumlah desa tangguh bencana	Desa	0	0		2		2		2		2		8	0	BPBD
			Program Kedaruratan dan Logistik bencana	a. Persentase korban bencana berhasil dievakuasi	%	60	60	375	60	365	60	910	60	1,150	60	1,150	60	3,950	BPBD
				b. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	%	20	20		20		20		20		20		20	0	BPBD
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	a. Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100	100	25	100	2,440	100	1,100	100	1,725	100	1,340	100	6,630	BPBD
				b. Jumlah aparatur dan relawan yang dapat menghitung kerugian bencana	org	0	30		20		30		20		30		130	0	BPBD
4	20		PEMERINTAHAN UMUM																
S		A	SEKRETARIAT DAERAH (A)																
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	10,000	100	10,450	100	10,920	100	11,412	100	11,925	100	54,707	SET DA
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	10,000	85	10,450	85	10,920	85	11,412	85	11,925	85	54,707	SET DA
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	400	98	418	98	437	98	456	98	477	98	2,188	SET DA
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	5,000	85	5,225	85	5,460	85	5,706	85	5,963	85	27,354	SET DA
4	20	x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	3,000	95	3,135	95	3,276	95	3,423	95	3,578	95	16,412	SET DA
4	20	1	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase penyelesaian laporan keuangan TW/SM/LKPD tepat waktu	%	85	85	1,900	89	1,986	90	2,075	95	2,168	100	2,266	100	10,394	SET DA
4	20	1		Tingkat ketepatan pengelolaan keuangan daerah	%	80	80		80		80		80	0	85	0	90		SET DA
4	20	3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	%	100	100	10,000	100	10,450	100	10,920	100	11,412	100	11,925	100	54,707	SET DA
4	20	4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah	Opini LKPD BPK	%	75	75	400	80	418	80	437	80	456	85	477	85	2,188	SET DA
4	20	4		Prosentase ketepatan pengelolaan keuangan	%	75	75	105	75	110	80	115	80	120	80	125	80	574	BAPPEDA
4	20	4		Prosentase ketepatan pengelolaan keuangan	%	75	75	88	75	92	80	96	80	100	80	105	80	480	SET WAN

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab		
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	20	6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH	%	80	80	10,000	80	10,450	80	10,920	80	11,412	100	11,925	100	54,707	SET DA
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Hari Pahlawan	Jml	na	1	200	1	209	1	218	1	228	1	239	1	1,094	DIS SOSIAL
			Program Keluarga Harapan	Cakupan Pendampingan dan Penyaluran	%	na	80	800	80	836	85	874	90	913	95	954	95	4,377	
4	20	6		Cakupan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH	%	75	75	32	80	33	80	35	80	37	80	38	85	175	DIS SOSIAL
4	20	7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan pelaksanaan e-prouchment	%	80	80	511	80	534	85	558	85	583	85	609	100	2,796	SET DA
4	20	8	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah	Jumlah kerjasama dibidang perekonomian	%	na	30	239	30	250	30	261	30	273	30	285	30	1,307	SET DA
4	20	9	Program penataan peraturan perundang-undangan	Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan	%	75	75	3,000	80	3,135	80	3,276	80	3,423	85	3,578	100	16,412	SET DA
4	20	10	Program penataan daerah otonomi baru	Persentase usulan pemekaran desa yang telah disusun ranperdanya	%	75	80	808	80	844	80	882	80	922	80	964	85	4,420	SET DA
2	24	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	%	na	50	500	55	523	60	546	65	571	70	596	70	2,735	SETDA
K		1	KECAMATAN BANGKO							0				0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	611	100	639	100	667	100	697	100	729	100	3,344	
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	151	85	158	85	165	85	173	85	180	85	827	
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	45	98	47	98	49	98	51	98	54	98	246	
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	923	80	964	80	1,008	80	1,053	80	1,101	80	5,049	
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masvarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	97	80	101	80	105	80	110	80	115	80	528	
K		2	KECAMATAN KUBU							0				0		0			
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	517	100	540	100	565	100	590	100	617	100	2,829	
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	379	85	396	85	414	85	432	85	452	85	2,072	
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	54	98	56	98	59	98	62	98	64	98	295	
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	146	80	153	80	160	80	167	80	174	80	801	
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masvarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	100	80	105	80	109	80	114	80	119	80	547	
K		3	KECAMATAN RIMBA MELINTANG											0		0			
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	805	100	842	100	880	100	919	100	960	100	4,406	
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	212	85	221	85	231	85	241	85	252	85	1,158	
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	54	98	56	98	59	98	62	98	64	98	295	
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Anaratur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	8	85	8	85	9	85	9	85	10	85	44	
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	541	80	565	80	590	80	617	80	645	80	2,957	
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masvarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	127	80	133	80	139	80	145	80	151	80	694	
K		4	KECAMATAN BAGAN SINEMBAH											0		0			
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	552	100	577	100	603	100	630	100	659	100	3,022	
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	136	85	142	85	148	85	155	85	162	85	742	
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	73	98	76	98	80	98	84	98	87	98	400	

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	4	85	4	85	4	85	5	85	5	85	22
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	549	80	574	80	600	80	627	80	655	80	3,004
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	190	80	199	80	207	80	217	80	227	80	1,039
K	5		KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA									0	0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	296	100	310	100	323	100	338	100	353	100	1,620
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar		80	85	108	85	113	85	118	85	123	85	129	85	590
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	18	98	19	98	20	98	21	98	21	98	98
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	5	85	5	85	5	85	6	85	6	85	27
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	454	80	474	80	495	80	518	80	541	80	2,482
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	120	80	125	80	131	80	137	80	143	80	656
K	6		KECAMATAN BALAI JAYA									0	0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	296	100	310	100	323	100	338	100	353	100	1,620
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar		80	85	76	85	80	85	83	85	87	85	91	85	418
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	18	98	19	98	20	98	21	98	21	98	98
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	5	85	5	85	5	85	6	85	6	85	27
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	454	80	474	80	495	80	518	80	541	80	2,482
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	120	80	125	80	131	80	137	80	143	80	656
K	7		KECAMATAN TANJUNG MEDAN									0	0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	315	100	329	100	344	100	359	100	375	100	1,721
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar		80	85	158	85	165	85	172	85	180	85	188	85	864
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	19	98	20	98	20	98	21	98	22	98	103
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	110	80	115	80	120	80	126	80	131	80	603
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	151	80	157	80	165	80	172	80	180	80	824
K	8		KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS									0	0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	396	100	413	100	432	100	451	100	472	100	2,164
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar		80	85	118	85	123	85	128	85	134	85	140	85	643
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	21	98	22	98	23	98	24	98	25	98	115
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	4	85	4	85	4	85	5	85	5	85	22
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	441	80	461	80	481	80	503	80	526	80	2,411
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	96	80	100	80	105	80	109	80	114	80	524

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
K	9	KECAMATAN SINABOI																
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	448	100	468	100	490	100	512	100	535	100	2,453
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	147	85	154	85	161	85	168	85	176	85	806
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	21	98	22	98	23	98	24	98	25	98	115
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	331	80	346	80	362	80	378	80	395	80	1,812
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	127	80	132	80	138	80	145	80	151	80	693
														0	0			
K	10	KECAMATAN PUJUD												0	0			
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	383	100	400	100	418	100	437	100	457	100	2,094
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	163	85	170	85	178	85	186	85	194	85	891
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	73	98	76	98	80	98	84	98	87	98	400
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	247	80	258	80	270	80	282	80	294	80	1,351
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	218	80	228	80	238	80	249	80	260	80	1,194
														0	0			
K	11	KECAMATAN BATU HAMPAR												0	0			
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	522	100	546	100	571	100	596	100	623	100	2,858
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	202	85	211	85	220	85	230	85	240	85	1,103
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	25	98	26	98	27	98	28	98	30	98	135
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	3	85	3	85	3	85	3	85	4	85	16
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	201	80	210	80	220	80	230	80	240	80	1,101
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	122	80	127	80	133	80	139	80	145	80	665
K	12	KECAMATAN RANTAU KOPAR												0	0			
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	375	100	392	100	409	100	428	100	447	100	2,051
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	124	85	129	85	135	85	141	85	148	85	677
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	5	85	5	85	5	85	6	85	6	85	27
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	559	80	584	80	610	80	638	80	667	80	3,058
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	155	80	162	80	169	80	176	80	184	80	846
K	13	KECAMATAN KUBU BABUSSALAM												0	0			
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	363	100	379	100	396	100	414	100	432	100	1,983
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	210	85	219	85	229	85	240	85	250	85	1,149
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	137	80	143	80	150	80	157	80	164	80	750
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	150	80	157	80	164	80	171	80	179	80	821

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
K	14	KECAMATAN TANAH PUTIH									0		0				32	
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	958	100	1,001	100	1,047	100	1,094	100	1,143	100	5,243
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	234	85	245	85	256	85	268	85	280	85	1,282
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	96	98	100	98	105	98	109	98	114	98	524
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	95	98	1	98	1	98	1	98	1	98	1	98	5
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	420	80	439	80	458	80	479	80	501	80	2,297
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	118	80	123	80	128	80	134	80	140	80	643
K	15	KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN									0		0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	451	100	472	100	493	100	515	100	538	100	2,468
4	20	x	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	208	85	217	85	227	85	237	85	248	85	1,136
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	42	98	44	98	46	98	48	98	50	98	230
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	5	85	5	85	5	85	6	85	6	85	27
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	233	80	243	80	254	80	266	80	278	80	1,273
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	136	80	142	80	149	80	155	80	162	80	744
K	16	KECAMATAN SIMPANG KANAN									0		0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	500	100	523	100	547	100	571	100	597	100	2,738
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	278	85	290	85	303	85	317	85	331	85	1,518
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	21	98	22	98	23	98	24	98	25	98	115
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	176	80	183	80	192	80	200	80	209	80	960
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	100	80	105	80	109	80	114	80	119	80	547
							0		0		0		0		0			
K	17	KECAMATAN BANGKO PUSAKO									0		0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	374	100	391	100	409	100	427	100	446	100	2,048
4	20	x	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	171	85	178	85	187	85	195	85	204	85	934
4	20	x	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	38	98	40	98	41	98	43	98	45	98	207
4	20	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	614	80	642	80	671	80	701	80	732	80	3,359
4	20	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	200	80	209	80	218	80	228	80	239	80	1,094
							0		0		0		0		0			
K	18	KECAMATAN PEKAITAN									0		0					
4	20	x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	362	100	378	100	395	100	413	100	431	100	1,978
4	20	x	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	62	85	64	85	67	85	70	85	73	85	337
4	20	x	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	8	85	8	85	9	85	9	85	10	85	44

No.	NAMA PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)		SKPD Penanggung Jawab			
					Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]	Target	Rp.[jt]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4	20	17		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	343	80	359	80	375	80	392	80	409	80	1,878	
4	20	17		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	132	80	138	80	145	80	151	80	158	80	725	
K		19		KECAMATAN RANTAU BAIS											0		0			
4	20	x		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	315	100	329	100	344	100	359	100	375	100	1,721	
4	20	x		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	158	85	165	85	172	85	180	85	188	85	864	
4	20	x		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	19	98	20	98	20	98	21	98	22	98	103	
4	20	17		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur	%	na	80	110	80	115	80	120	80	126	80	131	80	603	
4	20	17		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan	%	na	80	151	80	157	80	165	80	172	80	180	80	824	
S	A			SEKRETARIAT DEWAN											0		0			
4	20	x		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	8,000	100	9,000	100	9,405	100	9,828	100	10,270	100	46,504	SET WAN
4	20	x		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	5,000	85	5,225	85	5,460	85	5,706	85	5,963	85	27,354	SET WAN
4	20	x		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	95	98	434	98	453	98	474	98	495	98	517	98	2,373	SET WAN
4	20	x		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	100	85	105	85	109	85	114	85	119	85	547	SET WAN
4	20	x		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	200	95	209	95	218	95	228	95	239	95	1,094	SET WAN
4	20	11		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya dokumen peraturan daerah	%	na	15	8,000	15	9,000	15	9,405	15	9,828	15	10,270	75	46,504	SET WAN
S	A			INSPEKTORAT											0		0			
4	20	x		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,500	100	1,568	100	1,638	100	1,712	100	1,789	100	8,206	INSPEKTORAT
4	20	x		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	%	80	85	1,000	85	1,045	85	1,092	85	1,141	85	1,193	85	5,471	INSPEKTORAT
4	20	x		Program peningkatan disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	80	95	33	95	35	95	36	95	38	95	39	95	181	INSPEKTORAT
4	20	x		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	80	85	805	85	841	85	879	85	919	85	960	85	4,404	INSPEKTORAT
4	20	x		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu	%	90	95	399	95	416	95	435	95	455	95	475	95	2,180	INSPEKTORAT
4	20	15		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Persentase penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Persentase pencapaian daya serap APBD/APBN	%	na	1.5 2.80	1,000	1.5 2.80	1,045	1.5 2.80	1,092	1.5 2.80	1,141	1.5 2.80	1,193	1.5 2.80	5,471	INSPEKTORAT
4	20	16		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang kompeten dan bersertifikat	%	na	50	510	65	533	70	558	75	583	75	609	75	2,793	INSPEKTORAT
				TOTAL URUSAN WAJIB				534,864		556,346		581,960		609,021		637,624		2,919,815		
				TOTAL URUSAN PILIHAN				124,991		131,429		137,259		143,263		149,630		686,573		
				TOTAL URUSAN PENUNJANG				191,649		207,354		215,050		226,007		240,826		1,080,886		
				TOTAL SEMUA URUSAN				851,505		895,130		934,269		978,292		1,028,080		4,687,274		



IX. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Riau dan RPJP Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tertuang pada Tabel IX.1.

Tabel IX.1: Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	7	6	5	4		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Indikator Makro							
1,1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,01	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	1.00	1.00
1,2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	74.736,8	87.442	102.307	119.699	140.048	163.857	163.857
	Persentase Peningkatan PAD (%)	104,65%	(59,02)%	7%	7%	7%	7%	7%
2	PDRB Atas Dasar Harga konstan 2000 (Milyar Rp)	44.153,2	45.919,33	47.756,10	49.666,35	51.653,00	53.719,12	53.719,12
6	Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi							
6,3	PDRB (harga konstan) per kapita	70,39	70,67	70,94	71,22	71,50	71,79	71,79
6,4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	66,22	66,60	67,10	67,40	67,80	68,1	68,1
6,5	Persentase Penduduk Miskin(%)	7,28	6,1	5,9	5,8	5,7	5,5	5,5
7	Kesejahteraan Masyarakat							
8,1	Pendidikan							
8.1.1	Angka Melek Huruf(%)	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%
a.	Penduduk Usia 15 - 24 tahun (%)	99,98	99,98	99,98	99,99	100	100	100
b.	Penduduk Usia 15 - 55 tahun (%)	98,89	99,98	99,98	99,99	100	100	100
8.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	12	12	12	12	12	12	12
8.1.3	Angka partisipasi murni							



	A	SD/MI(%)	95,75	95,90	96,00	96,20	96,40	97,60	97,60
	B	SMP/MTs (%)	73,69	74,00	74,25	75,60	78,50	79,70	79,70
	C	SMA/SMK/MA (%)	49,47	50	0	0	0	0	0
	8.1.	Angka partisipasi kasar							
	4								
	a	SD/MI (%)	92%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
	b	SMP/MTs(%)	88%	89%	90%	92%	94%	95%	95%
	c	SMA/SMK/MA (%)	67%	68%	70%	71%	74%	75%	75%
	8.1.	Angka partisipasi sekolah							
	5								
	a	7-12 tahun (%)							
	b	13-15 tahun(%)							
	c	16-18 tahun (%)							
	8.2	Kesehatan							
	8.2.	Angka usia harapan hidup(tahun)	69,27	69,80	70,00	70,10	70,40	70,60	70,60
	1								
	8.2.	Angka Kematian Bayi (AKB)(Bayi/1000)	n/a	18	16	14	12	10	10
	3								
	8.2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan(Ibu/1000)	99	91,08	83,79	77,09	70,92	65,25	65,25
	4								
	8.2.	Angka kesakitan DBD(Orang/100.000)	12,33	12,33	11,1	9,99	8,99	8,09	8,09
	5								
	8.2.	Angka kesakitan Malaria (Orang/1000)	6,1	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,3
	6								
	8.2.	Posyandu Tidak Aktif	283	273	263	253	243	233	233
	7								
	II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	1	Pelayanan Urusan Wajib							
	1,1	Pendidikan							
	1.1.	Pendidikan dasar							
	1								
	a	Angka partisipasi sekolah (%)	93,68	92,57	91,46	90,35	89,27	88,17	88,7
	b	Rasio murid/guru							





		Rasio murid/guru Sekolah dasar	19	18	18	17	17	17	17
		Rasio murid/guru Sekolah Menengah Dasar	14	14	13	13	13	13	13
		Rasio murid/guru Sekolah Menengah Atas	14	15	0	0	0	0	17
	1.1.	Pendidikan Menengah							
	2								
	a	Angka partisipasi sekolah							
		SMP/MTs (%)	89,16	90,00	90,20	90,60	90,90	91,00	91,00
		SMA/SMK/MA (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1.1.	Angka Kelulusan							
	3								
	a	Angka kelulusan SMP/MTs (%)	91,7	92,6	93,4	94,7	94,8	95,3	95,3
	b	Angka kelulusan SMA/MA/SMK (%)	90,6	-	-	-	-	-	-
	1.2	Kesehatan dan KB							
	1.2.	Rasio puskesmas dan pustu per 10.000 penduduk	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,75
	1								
	1.2.	Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk	0,0637	0,0637	0,0637	0,0797	0,0797	0,0956	0,0956
	2								
	1.2.	Rasio perawat per 100.000 penduduk	10	10,31	10,63	10,95	11,27	11,59	11,59
	3								
	1.2.	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	0,27	0,36	0,43	0,51	0,59	0,67	0,67
	4								
	1.2.	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	0,20	0,26	0,30	0,35	0,56	0,60	0,60
	5								
	1.2.	Pengguna Alat KB (%)	67,9	70	72	75	77	80	80
	6								
	1.2.	Proporsi Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (Pertolongan Terakhir)	79,75	80	81	82	85	87	87
	7								
	1.2.	Proporsi Pertolongan Pertama Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	60,12	65	67	70	72	75	75
	8								
		Persentase Balita yang Telah Diimunisasi BCG	75,3	80	82	85	87	90	90
		Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Campak / Morbili	62,65	70	75	80	85	90	90
		Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Hepatitis B	60,12	70	75	80	85	90	90





		Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Polio	77,83	80	82	85	87	90	90
1,3		Penanaman Modal							
1.3.		Jumlah investor berskala nasional							
1									
		PMDN (investor)	4	6	5	5	2	3	21
		PMA(investor)	6	1	1	1	1	1	11
1.3.		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
2									
		PMA (US\$ juta)	1.779,00	1.814,58	1.850,87	1.887,89	1.925,65	1.964,16	1964,16
1.3.		Daya serap tenaga kerja							
3									
		PMDN(Jiwa)	167	168,67	170,36	172,06	173,78	175,52	175,52
		PMA (Jiwa)	823	831,23	839,54	847,94	856,42	864,98	864,98
1,4		Koperasi dan UKM							
1.4.		Jumlah Koperasi(unit)	508	508	508	508	513	518	518
1									
1.4.		Jumlah anggota koperasi(jiwa)	26.581	26.847	27.115	27.386	27.660	27.937	27937
2									
1.4.		Persentase koperasi aktif (%)	222	244	266	288	300	322	322
3									
1,5		Kependudukan							
1.5.		Laju pertumbuhan penduduk(%)	4,58	4,63	4,68	4,73	4,78	4,83	4,83
1									
1.5.		Jumlah penduduk (jiwa)	627.233	658.595	684.938	712.336	733.706	770.391	770391,36
2									
1,6		Tenaga Kerja	2.893	2.922	2.951	2.981	3.010	3.041	3040,57
1.6.		Angka partisipasi angkatan kerja(%)	57,61%	63,71%	63,9%	64%	64,15%	64,30%	64,30%
1									
1.6.		Persentase pengangguran terbuka(%)	8,85%	8,8%	8,6 %	8,4%	8,2%	8%	8%
5									
2		Pelayanan Urusan Pilihan							
2,1		Pertanian							
2.1.		Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton/ha)	3.64	3.83	4.01	4.22	4.43	3.64	3.83





	1								
	2.1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB(%)	17,88	18,06	18,24	18,42	18,61	18,79	18,98
	2								
	2,3	Kelautan dan Perikanan							
	2.3.	Produksi perikanan tangkap (ton)	67,5	67,5	70	73	75	78	78
	1								
	2.3.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB(%)	7,25	7,39	7,54	7,69	7,85	8,00	8,00
	2								
	2,4	Perdagangan							
	2.4.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	7,64	7,71	7,79	7,87	7,95	8,03	8,03
	1								
	2.4.	Eksport bersih perdagangan termasuk minyak bumi (USD)	7.360.003,00	7.433.603,03	7.507.939,06	7.583.018,45	7.658.848,64	7.735.437,12	7.735.437,12
	2								
		Industri							
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	5,0	5,0	5,3	5,6	5,9	6,3	6,3
	2,5	Pariwisata							
	2.5.	Kunjungan wisata (jiwa) tahun 2016	47.876	50.000	55000	60000	65000	70000	70000
	1								
III		ASPEK DAYA SAING							
	1	Kemampuan Ekonomi							
	1,1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian							
	1.1.	Pengeluaran konsumsi RT perkapita per bulan (Rp)	391,708	415,210	440,123	466,530	494,522	524,193	524,193
	1								
	1.1.	Pengeluaran konsumsi non pangan perbulan (Rp)	324,757	340,995	358,045	375,947	394,744	414,481	414,481
	2								
	1,2	Pertanian							
	1.2.	Nilai tukar petani (Provinsi Riau)	116,96	116,96	121	121,5	122	122,5	122,5
	1								
	2	Fasilitas wilayah/infrastruktur							
	2,1	Perhubungan							
	2.1.	Jumlah terminal bis/ pelabuhan laut/udara							





1								
a	Terminal bis Darat	2	0	1	0	1	0	4
	Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Pelabuhan Laut	11	0	0	0	0	0	11
	Rata-Rata Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani	95.66%	96%	96%	96%	97%	100%	100%
	Frekuensi pelayanan angkutan laut (fery)	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	2
2.1.	Panjang jalan Kabupaten (km)	1967,41	2006,76	2046,89	2087,83	2129,59	2172,18	2215,62
2.1.	Persentase Jalan dalam kondisi baik	80%	82%	85%	87%	89%	92%	92%
2.1.	Persentase Jalan dalam kondisi sedang	35%	32%	30%	28%	26%	25%	25%
	Persentase Jalan Dalam Kondisi Rusak	30%	24%	22%	20%	19%	17%	17%
2.1.	Persentase Rumah tangga dengan sumber penerangan utama (Listrik PLN)	76	78	80	82	84	86	86
2.1.	Persentase Rumah tangga dengan sumber air minum utama	36,68	40	45	50	60	70	70
	Persentase Desa Terisolir	N/A	1%	1%	1%	0%	0%	0%
	Jumlah Alat Transportasi Pedesaan	36	36	37	37	38	39	39
	Persentase Jalan Beraspal di Pedesaan	60%	62%	64%	65%	67%	69%	69%
	Jumlah Jembatan Penghubung antar pedesaan dan perkotaan	195 unit	200 unit	215 unit	220 unit	220 unit	230 unit	230 unit
	PEMERINTAHAN UMUM							
	Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir	C	B	B	B	BB	A	A
	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	70	72	74	75	77	77
	Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	CC	B	B	BB	BB	BB





X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Pada masa transisi dimana periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 ini berakhir, maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru, RPJMD ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RAPBD Kabupaten Rokan Hilir. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Riau yang digunakan pada masa tersebut.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi salah satu acuan bagi SKPD dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk masa lima tahun ke depan.

Sudah selayaknya SKPD berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan melalui program kegiatan di setiap SKPD. Gambaran pencapaian target-target tersebut akan terlihat pada evaluasi-evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Dari evaluasi ini akan kelihatan target-target mana yang telah aman tercapai maupun target-target mana yang sedang dalam proses pencapaian maupun target-target yang perlu dorongan dan dukungan untuk pencapaiannya. Guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, antara lain :

- a) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait dokumen RPJMD yang telah disusun kepada stakeholder yang terkait.
- b) Target-target yang telah tercantum didalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir agar didukung oleh semua SKPD maupun stakeholder melalui berbagai program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, konsistensi, transparansi, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi.
- c) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra.
- d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN 2016-2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II
SISTEMATIKA RECAPA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD dan lintas SKPD dalam jangka waktu lima (5) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD; dan
- b. pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

- | | |
|-------------|---|
| a. BAB I | PENDAHULUAN |
| b. BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; |
| c. BAB III | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN; |
| d. BAB IV | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS; |
| e. BAB V | VISI DAN MISI; |
| f. BAB VI | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; |
| g. BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN; |
| h. BAB VIII | INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN; |
| i. BAB IX | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; |
| j. BAB X | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN; |

(2) Rincian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

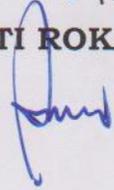
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

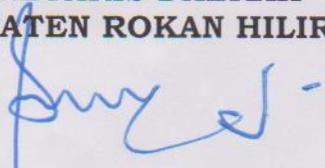
Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 FEBRUARI 2017

BUPATI ROKAN HILIR,


SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROPINSI RIAU :
(10.12.C/2017)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Riau dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam kurun waktu RPJMD Kabuapten Rokan Hilir adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021. RPJMD Kabuapten Rokan Hilir memuat visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabuapten Rokan Hilir dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabuapten Rokan Hilir yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Rokan Hilir. RKPD memuat prioritas pembangunan

daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Rokan Hilir secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendaan yang bersifat indikatif.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Rokan hilir untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Terwujudnya Rokan Hilir Sebagaimana kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu : (a) membangun masyarakat rokan hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa. (b) Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. (c). mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. (d). Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi. (e). Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Strategi Pembangunan adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah harus mempunyai cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Rencana Strategis adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah mempunyai suatu proses dalam menetapkan rencana yang akan diambil
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas